

**LAPORAN
KINERJA**

2025 | **BALAI BESAR POM
DI BANDAR LAMPUNG**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera,



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung (BBPOM di Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung menggambarkan capaian program dan kegiatan, perkembangan indikator kinerja, serta berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025. Laporan ini tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung berisikan ikhtisar tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang tertuang dalam DIPA-APBN Tahun 2025 dan juga memuat isu strategis BBPOM di Bandar Lampung.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Oleh karena itu, hasil yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan, penguatan strategi, dan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai, *stakeholders*, serta pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 27 Februari 2026
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,




Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah bentuk pertanggung jawaban sebagai perwujudan visi dan misi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025– 2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode rencana strategis tahun 2025-2029. Terdapat 8 Sasaran Kegiatan dengan 28 indikator kinerja yang menjadi target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM pada Bulan Agustus Tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **104,03%** dengan kriteria “**ISTIMEWA**” dengan rincian 3 indikator tercapai dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, 15 indikator tercapai dengan kategori **Sangat Baik**, 8 indikator tercapai dengan kategori **Baik**, 2 indikator tidak tercapai dengan kategori **Baik**.

Pencapaian Nilai Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Sasaran Kegiatan 1 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 106,08% dengan kriteria capaian “Sangat Baik” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Tahun 2025.
- b. Capaian Sasaran Kegiatan 2 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 108,11% dengan kriteria capaian “Sangat Baik” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi pada Tahun 2025.

- c. Capaian Sasaran Kegiatan 3 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100,87% dengan kriteria capaian “Sangat Baik” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja UPT pada Tahun 2025.
- d. Capaian Sasaran Kegiatan 4 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100% dengan kriteria capaian “Baik” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada Tahun 2025.
- e. Capaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100% dengan kriteria capaian “Baik” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT pada Tahun 2025.
- f. Capaian Sasaran Kegiatan 6 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 108,89% dengan kriteria capaian “Sangat Baik” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT pada Tahun 2025.
- g. Capaian Sasaran Kegiatan 7 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 103,19% dengan kriteria capaian “Sangat Baik” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan Layanan Publik UPT yang prima pada Tahun 2025.
- h. Capaian Sasaran Kegiatan 8 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 99,49% dengan kriteria capaian “Baik” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

Pada tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung memiliki pagu anggaran sebesar Rp31.915.508.000,00 dengan pagu efektif setelah *automatic adjustment* sebesar 21.597.563.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.534.812.503,00 (67,47% terhadap pagu penuh atau 99,7095% terhadap pagu efektif).

Untuk mendukung capaian 8 Sasaran Kegiatan, Balai Besar POM melaksanakan 23 kegiatan berdasarkan DIPA TA 2025. Berdasarkan perhitungan sebanyak 18 kegiatan efisien, 1 kegiatan tidak efisien dan 4 kegiatan tidak dapat didefinisikan. Rentang

efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara -0,62 – 0,14. Kegiatan yang tidak efisiensi yaitu Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 sehingga anggaran nonblokir yang tersisa pada kegiatan ini tidak mampu mencukupi kegiatan KIE utamanya bersama Tokoh Masyarakat sehingga target tahunan tidak tercapai. Kemudian pada rincian output Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia, Perangkat pengolahan data dan komunikasi, Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia dan Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans seluruh anggarannya terblokir sehingga efisiensi tidak dapat diperhitungkan namun target dari Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans tercapai seluruhnya dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring.

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja, rentang tingkat efisiensi yaitu antara -0,02 – 0,16. Dari 28 indikator utama didapatkan sebanyak 26 indikator efisien dan 2 indikator tidak efisien. Inefisiensi pemanfaatan anggaran pada 2 indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung dan Indeks Manajemen Risiko disebabkan karena target kinerja tahun 2025 tidak tercapai namun anggaran telah dimanfaatkan secara optimal.

HIGHLIGHT KINERJA

1. PENGHARGAAN KOTA PANGAN AMAN



Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro sebagai Terbaik II Regional Barat Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2024. Penghargaan ini diberikan Badan POM pada triwulan I tahun 2025.

BBPOM di Bandar Lampung telah mengimplementasikan Program Prioritas BPOM Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah aman dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas pada tahun 2020 dan Pemda Kota Metro telah melakukan replikasi bertahap untuk program desa pangan aman tahun 2022 dan 2023. BBPOM di Bandar Lampung setiap tahun terus melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan ketiga program nasional tersebut.

Dukungan lintas sektor dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemda Kota Metro sangat kuat untuk menjaga keamanan pangan baik di sektor pangan segar maupun pangan olahan.

Kota Metro menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat Terbaik II Regional Barat dalam ajang Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Metro bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, bermutu, dan BBPOM di Bandar Lampung dalam hal pengawasan pangan, edukasi masyarakat, serta penguatan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan daerah, apresiasi ini diberikan oleh Badan POM dalam ajang lomba kabupaten/kota pangan aman.

2. INOVASI BERLANJUT, SINERGI SEMAKIN KUAT!



QRIS-PUSAKA 2025 hadir kembali dengan semangat baru melalui kegiatan KIE bertema "Aman Produknya, Aman Pembayaranannya, Terjamin Halalnya", yang dilaksanakan di Pasar KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat)Lebak Budi Bandar Lampung pada 12 Maret 2025.

Kolaborasi antara BBPOM Bandar Lampung, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan para stakeholder ini mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan, transaksi digital, dan produk halal.

Kegiatan ini ditandai dengan dilaunchingnya Pasar Khas Lebak Budi, *talkshow* produk aman dan Halal, yang langsung disampaikan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung, dan stikerisasi Qris-Pusaka di pasar Lebak Budi, yang sebelumnya BBPOM di Bandar Lampung juga telah melaksanakan sampling dan pengujian terhadap pangan yang dijual di pasar Lebak Budi, QRIS-PUSAKA menjadi langkah nyata membangun pasar yang sehat, modern, dan inklusif, "Aman Produknya, Aman Pembayarannya, Terjamin Halalnya "

3. TERBAIK 3 PADA KATEGORI PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN



Pada tahun 2024 BBPOM di Bandar Lampung telah menginput data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang didapatkan dari berbagai sumber salah satunya adalah pelimpahan barang bukti hasil penindakan Dirjen Bea dan Cukai berupa produk obat-obat tertentu dan obat psikotropik dan data hasil penyelidikan substansi Penindakan BBPOM di Bandar Lampung secara lengkap dan rutin (real time) di aplikasi dashboard penindakan sebanyak 247 data sehingga mendapat peringkat ke-3 Terbaik dan terbanyak.

4. BBPOM DI BANDAR LAMPUNG RAIH 2 PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2025



Ajang kompetisi bergengsi Anugerah Humas Indonesia kembali di gelar tahun 2025. Humas Indonesia, untuk ketujuh kalinya dengan bangga kembali mempersembahkan kompetisi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025. Ajang kompetisi kinerja akuntabilitas komunikasi dan keterbukaan informasi lembaga publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum (BLU) se-Indonesia. PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung pada ajang tersebut mengirimkan 2 entry, yaitu:

1. Kategori PPID Pelaksana Terbaik Sub Kategori PPID Pelaksana Terbaik; dan
2. Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif Sub Kategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung menyajikan pemaparan dengan Judul sebagai berikut :

- Program Buka Informasi, Bangun Kepercayaan Publik untuk Sub Kategori PPID Pelaksana Terbaik.
- Nyaman dan Inovatif, Layanan Publik yang Menginspirasi dan Membahagiakan untuk Sub Kategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik.

Awarding Night THE 7th ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2025 di selenggarakan di Hotel JW Marriott, Surabaya pada tanggal 25 September 2025. BBPOM di Bandar Lampung berhasil meraih penghargaan:

1. GOLD WINNER Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif Sub Kategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik; dan
2. BRONZE WINNER Kategori PPID Pelaksana Terbaik Sub Kategori PPID Pelaksana Terbaik.

Penghargaan tersebut diraih sebagai wujud pembuktian dan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik, dan dengan semangat “Buka Informasi, Bangun Kepercayaan”, kami berkomitmen menjadi lembaga yang transparan dan terpercaya dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Transparansi bukan hanya kewajiban, tapi juga langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik dan pelayanan prima.

5. PPID INFORMATIF DENGAN NILAI 100 UNTUK ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI LAMPUNG



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Predikat **Informatif** dan berhasil memperoleh nilai sempurna, yakni 100, pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 untuk kategori Instansi Vertikal.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BBPOM di Bandar Lampung dalam mengedepankan transparansi, membuka informasi untuk publik, serta akuntabilitas layanan. Predikat ini juga menandai keberhasilan BBPOM dalam mempertahankan nilai sempurna selama dua tahun berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat instansi dalam menghadirkan layanan informasi yang responsif dan terpercaya.

6. PPID TERBAIK 1 UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN POM



BBPOM di Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai **PPID Terbaik 1 UPT Badan POM**. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif kepada masyarakat. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Bandar Lampung secara konsisten memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Melalui inovasi layanan digital, optimalisasi kanal komunikasi publik, serta pengelolaan dokumentasi yang

sistematis, berbagai informasi terkait pengawasan obat dan makanan dapat tersampaikan secara luas dan terpercaya.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran pegawai yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan pelayanan prima. Berbagai indikator penilaian, mulai dari kualitas layanan informasi, kelengkapan dokumen publik, kecepatan respons permohonan informasi, hingga inovasi keterbukaan informasi, berhasil dipenuhi dengan sangat baik.

7. KOMITMEN YANG NYATA UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN GUNA MENGIMPLEMENTASIKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN



BBPOM di Bandar Lampung kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif melalui penghargaan atas implementasi **Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial** dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Penghargaan ini menjadi bukti kesungguhan institusi dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan pengawasan memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan, serta akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Bandar Lampung secara konsisten mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial dalam setiap tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan akses informasi yang memadai terkait keamanan obat dan makanan.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait PUG, penyusunan data terpilah gender sebagai dasar pengambilan kebijakan, penyediaan sarana layanan informasi yang ramah disabilitas, serta pelibatan aktif masyarakat dalam edukasi dan pemberdayaan. Upaya ini menjadi wujud komitmen nyata untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam menghadirkan pengawasan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan inklusif.

8. TERBAIK II TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI





Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Bandar Lampung secara aktif menggerakkan peran Agen Perubahan sebagai motor penggerak budaya kerja positif di lingkungan organisasi. Tim Agen Perubahan tidak hanya menjadi simbol transformasi, tetapi juga berperan strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, dan inovasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Berbagai inisiatif telah diimplementasikan, mulai dari penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, optimalisasi digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas pelayanan, hingga pembentukan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif. Melalui pendekatan partisipatif, Tim Agen Perubahan mampu membangun komitmen bersama seluruh pegawai untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam setiap proses kerja.

9. TERBAIK I SATKER DENGAN JUMLAH TRANSAKSI KARTU KREDIT PEMERINTAH TAHUN 2025



BBPOM di Bandar Lampung secara konsisten mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai bagian dari implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan instansi pemerintah. Pemanfaatan KKP tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, tetapi juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam setiap transaksi belanja negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
DAFTAR ISI	xxv
BAB I PENDAHULUAN	41
1.1 Latar Belakang	41
1.2 Gambaran Umum Organisasi	45
1.3 Struktur Organisasi	48
1.4 Isu Strategis.....	49
1.4.1 Kekuatan (<i>Strength</i>)	49
1.4.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>)	54
1.4.3 Peluang (<i>Opportunity</i>)	59
1.4.4 Ancaman (<i>Threat</i>).....	65
BAB II PERENCANAAN KINERJA	75
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	75
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	82
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	85
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	92
2.5 Metode Pengukuran	101
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	107
3.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi	107
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	112
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	126
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	133

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung	141
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	147
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	154
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	160
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	168
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	174
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	182
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	187
12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	194
13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah BBPOM di Bandar Lampung.....	200
14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandar Lampung Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium....	207
15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	215
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	220
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	226
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	236
19. Jumlah desa pangan aman.....	242

20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.....	246
21.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	251
22.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....	261
23.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	267
24.	Indeks Pelayanan Publik UPT.....	273
25.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....	281
27.	Nilai AKIP UPT BPOM	293
27.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....	308
28.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	315
3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	323
3.3	Pemanfaatan Informasi Kinerja	402
3.4	Realisasi Anggaran.....	422
3.5	Tingkat Efisiensi Anggaran	435
BAB IV PENUTUP.....		475
4.1	Kesimpulan.....	475
4.2	Saran/Rekomendasi	478

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan ABK.....	55
Tabel 2. Capaian Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024	61
Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	64
Tabel 4. Matrix Analisis SWOT.....	73
Tabel 5. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	81
Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung	83
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung	85
Tabel 8. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung	89
Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Awal Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung.....	93
Tabel 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi ke-1 Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung	96
Tabel 11. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi ke-2 dan ke-3 Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung	99
Tabel 12. Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan	102
Tabel 13. Sumber Predikat AKIP.....	103
Tabel 14. Koreksi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	104
Tabel 15. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi.....	104
Tabel 16. Kriteria Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (2029).....	105
Tabel 17. Kriteria Capaian Efisiensi	106
Tabel 18. Nilai Kinerja Organisasi	107
Tabel 19. Nilai Per Sasaran Kegiatan	111
Tabel 20. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	112

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	120
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	120
Tabel 23. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	123
Tabel 24. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	126
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO.....	128
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO.....	129
Tabel 27. Rincian pelaporan KTD/ESO Tahun 2025.....	131
Tabel 28. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	132
Tabel 29. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	133
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	137
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	137
Tabel 32. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	139
Tabel 33. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	141

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.....	144
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.....	144
Tabel 36. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.....	146
Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	147
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	150
Tabel 39. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	150
Tabel 40. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	152
Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder.....	154
Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	156
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	156
Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	157

Tabel 45. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder.....	159
Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	160
Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	164
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	164
Tabel 49. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ..	166
Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	168
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	170
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	171
Tabel 53. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	173
Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	174
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	178

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	179
Tabel 57. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..	181
Tabel 58. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	182
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	184
Tabel 60. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	184
Tabel 61. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan....	186
Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan.....	187
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	191
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	191
Tabel 65. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	193
Tabel 66. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar.....	194

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar.....	197
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar.....	198
Tabel 69. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar.....	199
Tabel 70. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	200
Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	202
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	203
Tabel 73. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT.....	206
Tabel 74. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	207
Tabel 75. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	210
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	211
Tabel 77. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	213

Tabel 78. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....	215
Tabel 79. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	216
Tabel 80. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	217
Tabel 81. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	219
Tabel 82. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	220
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	222
Tabel 84. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	223
Tabel 85. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	225
Tabel 86. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	226
Tabel 87. Kategori Tingkat Efektivitas KIE	228
Tabel 88. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator	229
Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	229

Tabel 90. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT.....	232
Tabel 91. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	236
Tabel 92. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....	238
Tabel 93. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....	239
Tabel 94. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....	240
Tabel 95. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Jumlah Desa Pangan Aman	242
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Jumlah Desa Pangan Aman.....	243
Tabel 97. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Jumlah Desa Pangan Aman	243
Tabel 98. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman.....	245
Tabel 99. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	246
Tabel 100. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	247
Tabel 101. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	248
Tabel 102. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	249
Tabel 103. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	251

Tabel 104. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	256
Tabel 105. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	257
Tabel 106. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	259
Tabel 107. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	261
Tabel 108. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	263
Tabel 109. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	263
Tabel 110. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	266
Tabel 111. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	267
Tabel 112. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	269
Tabel 113. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	270

Tabel 114. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar.....	271
Tabel 115. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT	273
Tabel 116. Kategori Nilai IPP	274
Tabel 117. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT	274
Tabel 118. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT.....	275
Tabel 119. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT.....	275
Tabel 120. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT	278
Tabel 121. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	281
Tabel 122. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....	283
Tabel 123. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....	283
Tabel 124. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....	284
Tabel 125. Hasil evaluasi PMPZI BBPOM di Bandar Lampung	285
Tabel 126. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....	287
Tabel 127. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai AKIP UPT BPOM	293
Tabel 128. Komponen Penilaian AKIP	294
Tabel 129. Predikat Nilai AKIP	294
Tabel 130. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator Nilai AKIP UPT BPOM.....	296

Tabel 131. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Nilai AKIP UPT BPOM	297
Tabel 132. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai AKIP UPT BPOM	297
Tabel 133. Hasil Evaluasi AKIP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025.....	298
Tabel 134. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	300
Tabel 135. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT BPOM	300
Tabel 136. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	308
Tabel 137. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran.....	310
Tabel 138. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....	310
Tabel 139. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....	311
Tabel 140. Penilaian IKPA BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025	312
Tabel 141. Penilaian EKA BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025	312
Tabel 142. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....	313
Tabel 143. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	315
Tabel 144. Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko	315
Tabel 145. Nilai Maturitas Manajemen Risiko	316
Tabel 146. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	317
Tabel 147. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	318
Tabel 148. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.....	320
Tabel 149. Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja	323
Tabel 150. Tindak Lanjut Rekomendasi Rincian Output	377
Tabel 151. Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2024.....	396

Tabel 152. Pemanfaatan Informasi Kinerja	402
Tabel 153. Realisasi Anggaran Tahun 2025	423
Tabel 154. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Indikator Kinerja....	424
Tabel 155. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan	430
Tabel 156. Realisasi Anggaran per Kegiatan	433
Tabel 157. Analisis Capaian Efisiensi Anggaran Indikator	435
Tabel 158. Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Kegiatan	464
Tabel 159. Capaian Efisiensi Anggaran Per Rincian Output	472

DAFTAR GAMBAR

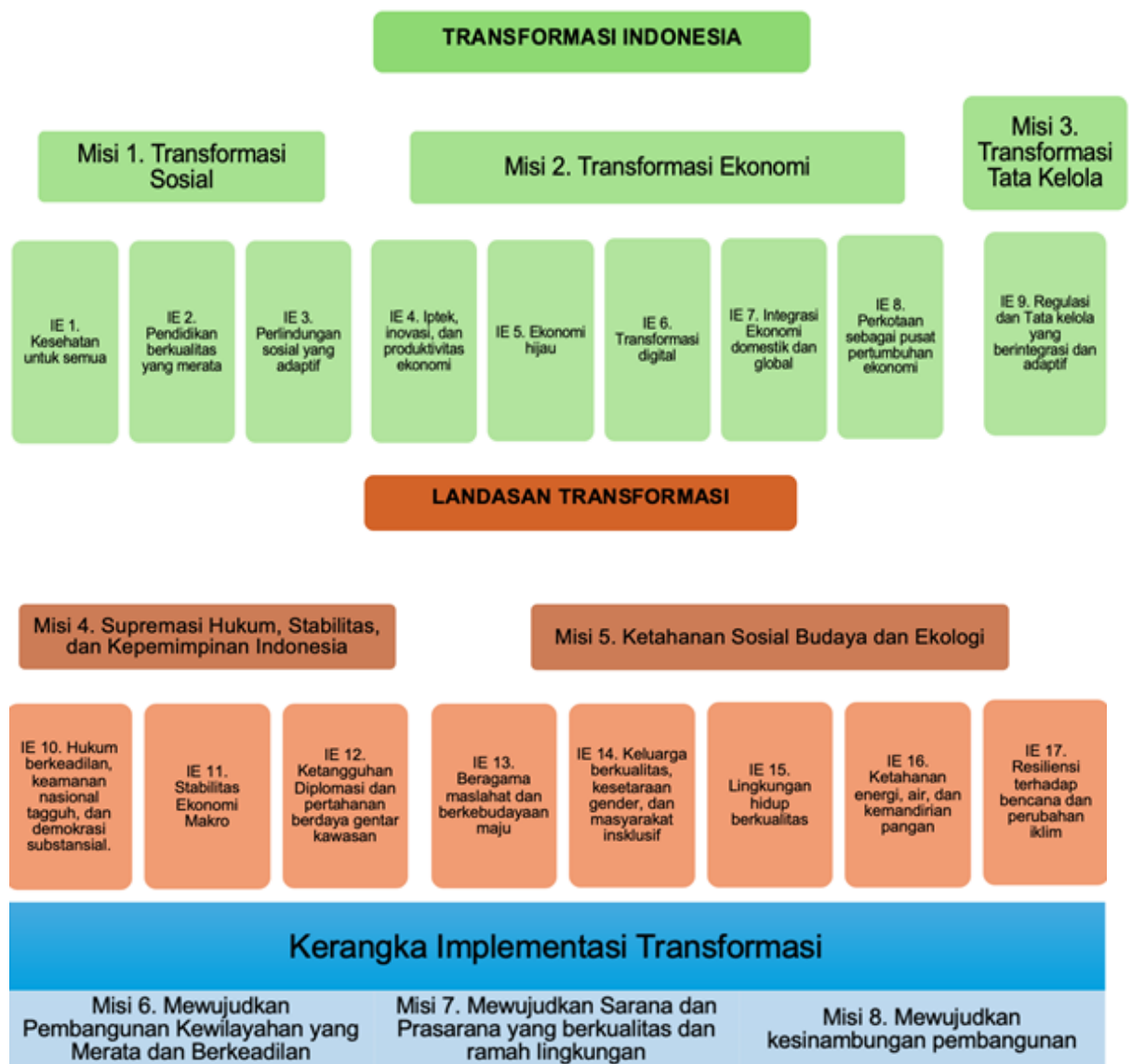
Gambar 1. Misi dan Arah Pembangunan dalam PJPN (Sumber: Bappenas)	42
Gambar 2. Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045 (Sumber: Bappenas)	43
Gambar 3. Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung	46
Gambar 4. Struktur organisasi BBPOM di Bandar Lampung	49
Gambar 5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	50
Gambar 6. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)	77
Gambar 7. Grafik Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025	107
Gambar 8. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE Unit Kerja	228

BAB I

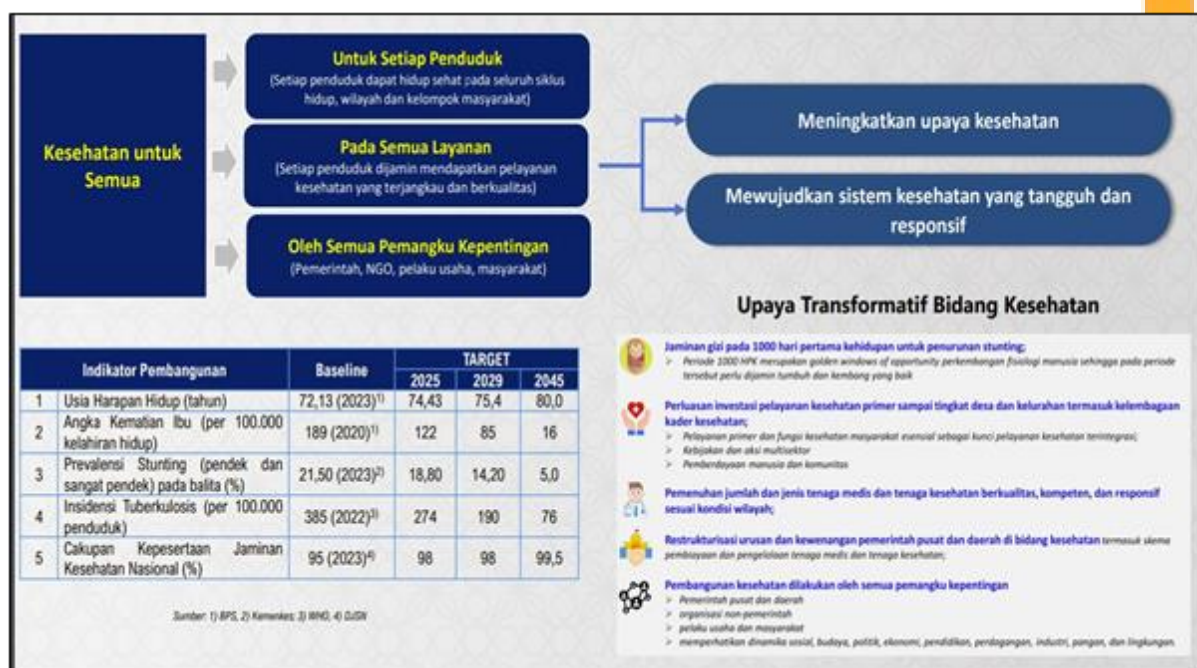
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan.



Gambar 1. Misi dan Arah Pembangunan dalam PJPN (Sumber: Bappenas)



Gambar 2. Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045 (Sumber: Bappenas)

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 -2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.



BBPOM di Bandar Lampung merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Lampung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Bandar Lampung bertanggung jawab memastikan bahwa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan olahan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2025 merupakan periode pelaksanaan rencana kinerja yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategis BPOM, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Rencana kinerja tersebut memuat target indikator kinerja utama, kegiatan prioritas, serta strategi pengawasan berbasis risiko yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan rencana kinerja tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung menyusun Laporan Kinerja sebagai media pertanggungjawaban kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks dinamika perkembangan sektor industri obat dan makanan, pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan transaksi perdagangan daring, tantangan pengawasan semakin kompleks. Peredaran produk ilegal, penyalahgunaan bahan berbahaya, serta klaim yang menyesatkan menjadi isu yang memerlukan penguatan pengawasan pre-market dan post-market, peningkatan kapasitas laboratorium, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.

Melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, BBPOM di Bandar Lampung berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat serta peningkatan daya saing produk lokal di wilayah Provinsi Lampung.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

BBPOM di Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berada di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Secara geografis, provinsi Lampung terletak pada $105^{\circ}45'BT$ sampai $103^{\circ}48'BT$ dan $3^{\circ}45'LS$ sampai $6^{\circ}45'LS$, yang meliputi areal daratan seluas $35.288,35 \text{ km}^2$, termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara, Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat. Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 215 kecamatan dan 2.463 desa.

BBPOM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBPOM di Bandar Lampung merupakan salah satu UPT Badan POM yang ada di wilayah Provinsi Lampung dengan cakupan pengawasan yang meliputi 10 Kabupaten/Kota dari total 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat (Gambar 3).



Gambar 3. Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
8. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain fungsi di atas, sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BBPOM di Bandar Lampung diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Hal ini tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yaitu dengan penerapan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,



dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi BBPOM di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya mengambil langkah-langkah signifikan dalam Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS), terutama dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyediaan layanan publik yang aksesibel. Untuk mencapai hasil yang lebih substansial, BBPOM di Bandar Lampung senantiasa memperkuat komitmen dan memperluas implementasi PUGIS.

Kontribusi BBPOM di Bandar Lampung terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BBPOM di Bandar Lampung membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BBPOM di Bandar Lampung beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BBPOM di Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

1.3 Struktur Organisasi

BBPOM di Bandar Lampung dalam struktur organisasinya terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas fungsi Ketatausahaan, fungsi Pengujian, fungsi Pemeriksaan, fungsi Penindakan dan fungsi Infokom (Informasi dan Komunikasi).



Gambar 4. Struktur organisasi BBPOM di Bandar Lampung

1.4 Isu Strategis

BBPOM di Bandar Lampung memproyeksikan serangkaian potensi dan permasalahan melalui analisis SWOT. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Bandar Lampung, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

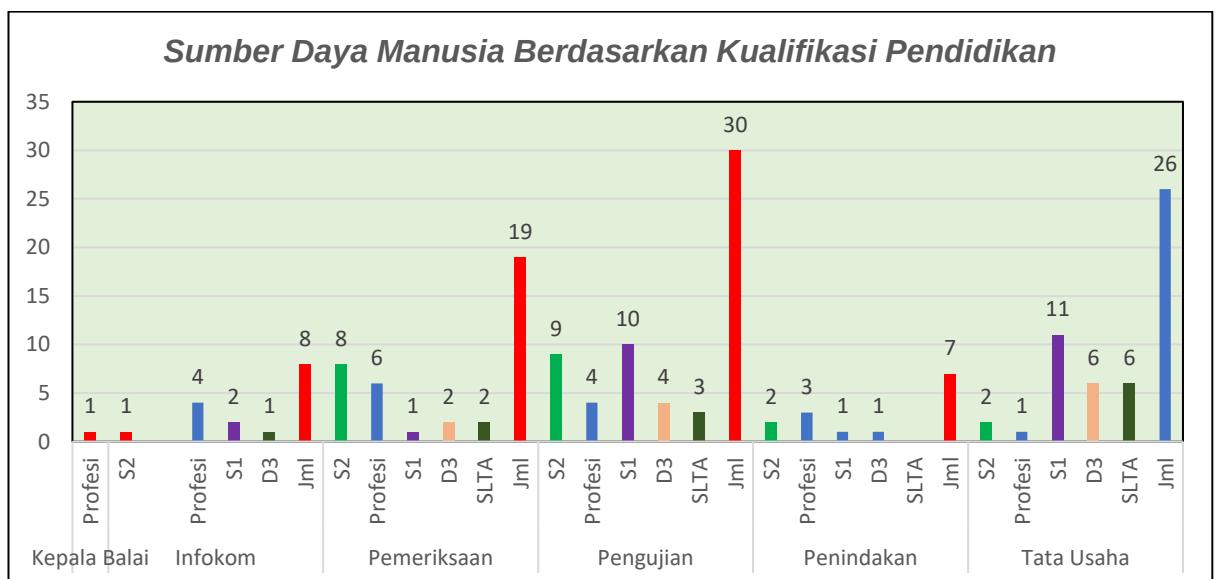
1.4.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BBPOM di Bandar Lampung keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Bandar Lampung di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

1. Kompetensi Pegawai BBPOM di Bandar Lampung Memadai

Pegawai BBPOM di Bandar Lampung memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mumpuni, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan profesional. Kompetensi ini menjadi dasar utama dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan penegakan regulasi yang akuntabel.

BBPOM di Bandar Lampung memiliki jumlah pegawai sebanyak 91 orang terdiri dari 34 laki-laki (37,36%) dan 57 perempuan (62,64%) dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut: S-2 sebanyak 23 pegawai, Profesi sebanyak 19 pegawai, S-1 sebanyak 24 pegawai, D-3 sebanyak 14 pegawai dan SLTA sebanyak 11 pegawai (Gambar 1.3).



Gambar 5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kompetensi pegawai BBPOM di Bandar Lampung senantiasa ditingkatkan melalui program pengembangan kompetensi yang disusun dalam Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) dan dimonitor pemenuhannya.

2. Pemanfaatan Anggaran yang Akuntabel

Pengelolaan akuntabilitas anggaran merupakan salah satu kekuatan utama yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggaran yang dikelola secara akuntabel memungkinkan BBPOM di Bandar Lampung untuk melaksanakan berbagai program pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum secara optimal dibuktikan dengan capaian nilai AKIP pada tahun 2024 sebesar 80,58 dengan predikat A (Sangat Baik).

Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek penting yang mendukung akuntabilitas lembaga ini. Pengelolaan anggaran yang terbuka melalui publikasi pada subsite <https://lampung.go.id>, ESR Menpan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini memberikan kepercayaan kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal, bahwa BBPOM bekerja dengan integritas tinggi dalam mendukung keamanan dan mutu obat serta makanan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Memadai

Pemanfaatan teknologi informasi yang memadai juga menjadi keunggulan BBPOM Bandar Lampung dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem pelaporan dan pengumpulan database telah menggunakan sistem elektronik. Dengan sistem berbasis teknologi memungkinkan pengolahan data pengawasan yang lebih cepat, penyampaian informasi kepada masyarakat yang lebih efektif, serta pengelolaan administrasi yang terintegrasi. BBPOM di Bandar Lampung telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui subsite <https://lampung.pom.go.id>; penggunaan portal APLIKASI-KU dimana didalamnya memuat informasi aplikasi internal BPOM, internal BBPOM di Bandar Lampung dan aplikasi eksternal; penggunaan aplikasi yang terintegrasi dengan lintas sektor/pemerintah daerah seperti OSS dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE).

4. Penerapan Sistem Mutu Terintegrasi

Dalam rangka memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, BBPOM di Bandar Lampung telah tersertifikasi berbagai sistem mutu, antara lain ISO 9001:2018 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Kompetensi Laboratorium Pengujian, SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapanan. Sebagai bukti komitmen dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan predikat WBBM (Wilayah Bersih Bebas Melayani) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.

5. Layanan Publik Dengan Kategori Pelayanan Prima

Kekuatan lainnya adalah integritas layanan publik yang telah diakui, mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Budaya Layanan SBM Hati (*Sikam Betik Melayani Haga Kuti Bahagia* = Melayani dengan tulus sampai pelanggan bahagia) selalu diterapkan oleh semua petugas Layanan di BBPOM Bandar Lampung. Letak geografis yang strategis, yaitu di pusat kota Bandar Lampung, juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan. Selain itu, keberagaman latar belakang pegawai dari berbagai suku menjadi cerminan budaya kerja inklusif di BBPOM, yang mendorong terciptanya kerja sama dan sinergi yang harmonis dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan berbagai kekuatan ini, BBPOM di Bandar Lampung terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memastikan bahwa sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerjanya aman, bermutu, dan bermanfaat. Strategi ini tidak hanya mendukung visi organisasi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan.

BBPOM di Bandar Lampung telah mencapai kategori Pelayanan Prima pada tahun 2024, selain itu juga mendapat penghargaan *Gold Winner* Anugerah Humas Indonesia kategori Pelayanan Informasi Publik dan Informatif sub kategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik tahun 2025, serta penghargaan

Bronze Winner Anugerah Humas Indonesia kategori PPID Terbaik sub kategori PPID Pelaksana pada tahun 2025.

6. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian Telah Optimum

Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang unggul yang terefleksi ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP) dan ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar tersebut merupakan acuan bagi BBPOM di Bandar Lampung untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan; menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan; serta monitoring ketersediaan peralatan laboratorium.

Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BBPOM di Bandar Lampung berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan masing-masing parameter pengujian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian laboratorium BBPOM di Bandar Lampung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai SRL yang diperoleh secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024 adalah 75,85%, 83,0%, 88,7%, dan 95,42%. Nilai SRL sebesar 95,42% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemenuhan standar ruang lingkup pengujian di laboratorium BBPOM Bandar Lampung telah mencapai tingkat optimal, dengan syarat minimal SRL > 65%. Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung juga

memiliki kemampuan pengujian yang baik, baik secara kimia maupun mikrobiologi, terhadap produk obat, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan.

1.4.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus meningkat, BBPOM di Bandar Lampung tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Bandar Lampung menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BBPOM di Bandar Lampung dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Bandar Lampung yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Gap Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Analisis Beban Kerja (ABK)

BBPOM di Bandar Lampung juga menghadapi beberapa kelemahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan. Salah satu kelemahan utama adalah jumlah SDM yang belum memenuhi Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga belum seimbang dengan kebutuhan operasional yang semakin kompleks. Selain itu, terdapat pegawai yang masih memerlukan peningkatan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien. Gap antara jumlah SDM dibandingkan dengan ABK sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan ABK

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala BBPOM di Bandar Lampung	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada BBPOM di Bandar Lampung	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	Fungsional	0	0	0	100%
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	Fungsional	0	0	0	100%
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	0	2	0%
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
9	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
10	Arsiparis Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
11	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
12	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
13	Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
14	Arsiparis Terampil	Fungsional	2	0	2	0%
15	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	3	2	1	67%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	16	15	1	94%

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	35	20	15	57%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	36	12	24	33%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	Fungsional	0	7	-7	100%
20	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	Fungsional	0	1	-1	100%
21	Perencana Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
22	Perencana Ahli Muda	Fungsional	2	0	2	0%
23	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	3	1	2	33%
24	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	1	0	100%
26	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
27	Pranata Komputer Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
28	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	2	3	-1	150%
29	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
30	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
31	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	1	0	100%
32	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
33	Analisis Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
34	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	0	4	-4	100%

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
35	Penata Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
36	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	3	-3	100%
37	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	0	5	-5	100%
38	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	0	2	-2	100%
39	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	0	2	-2	100%
TOTAL			120	91	29	

Berdasarkan data di atas, total kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja BBPOM di Bandar Lampung adalah 120 orang, namun baru terpenuhi sebanyak 91 pegawai, namun dari 91 pegawai tersebut hanya 65 pegawai yang memenuhi jabatan sesuai ABK. Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan beban kerja pada pegawai di BBPOM di Bandar Lampung.

2. Sistem Penyimpanan Data Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Makanan Belum Terintegrasi

Sistem penyimpanan data yang terpusat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Namun, salah satu kelemahan signifikan dalam pengawasan saat ini adalah ketidaktersediaan sistem penyimpanan data yang belum terpusat. Data terkait produk sediaan farmasi dan pangan olahan, seperti data inspeksi, sampling dan hasil uji laboratorium, data keracunan pangan sering kali tersebar di berbagai tim yang berbeda tanpa adanya sistem integrasi yang memadai. Ketidaktersediaan sistem data yang terpusat ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam proses pengawasan, diantaranya adalah:



Pertama, ketidakpastian dan keterlambatan dalam mengakses informasi menjadi hambatan utama. ASN atau petugas pengawas yang memerlukan data penting mengenai suatu produk obat atau makanan, seperti status registrasi atau riwayat inspeksi, harus mencari informasi tersebut di berbagai sumber yang berbeda. Proses ini memakan waktu dan meningkatkan potensi kesalahan, yang pada gilirannya mengurangi respons yang cepat terhadap masalah yang muncul. Selain itu, ketika data tidak terintegrasi dengan baik, maka tidak ada satu sumber informasi yang dapat diandalkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya duplikasi atau inkonsistensi dalam pengolahan data.

Kedua, tanpa sistem penyimpanan data yang terpusat, koordinasi antara berbagai tim. Hal ini juga mempersulit pelaporan dan analisis tren peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau berbahaya, karena tidak ada data yang dapat digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang ada.

Ketiga, ketidaktersediaan data terpusat menghambat penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan. Sistem berbasis teknologi, seperti analisis big data atau kecerdasan buatan, membutuhkan data yang lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. Tanpa data yang terpusat, kemampuan untuk menggunakan teknologi ini menjadi terbatas, yang memperlambat deteksi dini terhadap pelanggaran atau risiko yang mungkin muncul dalam distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, penting untuk mengembangkan dan menerapkan sistem penyimpanan data yang terpusat, yang memungkinkan akses data yang lebih cepat, akurat, dan konsisten. Implementasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi, seperti sistem manajemen data berbasis cloud atau basis data terpusat, akan memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, pelatihan bagi ASN dan petugas pengawas dalam menggunakan sistem baru ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengawasan sediaan



farmasi dan pangan olahan. Dengan sistem penyimpanan data yang terpusat, pengawasan akan menjadi lebih terkoordinasi, cepat, dan responsif terhadap tantangan yang ada.

1.4.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BBPOM di Bandar Lampung untuk memposisikan diri sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. BBPOM di Bandar Lampung memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu:

1. Pertumbuhan UMKM di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkembang pesat

Pertumbuhan UMKM di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkembang pesat memberikan kesempatan untuk memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha lokal agar mereka mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan mendukung UMKM, BBPOM tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi berperan dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Dukungan *Stakeholder* pada Program Pengawasan BBPOM di Bandar Lampung

BBPOM di Bandar Lampung mendapat dukungan yang cukup baik dari para stakeholder. Dukungan ini, baik dari pemerintah daerah, akademisi, maupun asosiasi pelaku usaha, menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan dan implementasi kebijakan yang relevan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan BBPOM juga menjadi dorongan positif bagi lembaga ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Kemudahan Akses Layanan Publik Melalui SPBE di BBPOM di Bandar Lampung

Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu dari pusat hingga ke daerah. Transformasi digital dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Penerapan SPBE BBPOM di Bandar Lampung diharapkan juga dapat turut andil dalam mendorong akselerasi transformasi digital Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan publik oleh seluruh masyarakat.

4. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk Meningkatkan Pertumbuhan Industri Domestik

Pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri (PDN) merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang

No.3 Tahun 2014 yang mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BU Swasta /Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara). Kebijakan pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) telah terbukti berdampak positif pada pertumbuhan industri nasional melalui peningkatan belanja pemerintah, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK), serta efek pengganda (*multiplier effect*) ekonomi. Melalui pengadaan PDN, pemerintah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri lokal serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Proses pengadaan ini dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat, yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan harga barang atau jasa yang diperoleh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah, melalui kebijakan yang mendukung, berupaya meningkatkan kemampuan industri domestik dan SDM yang terlibat dalam pengadaan, serta memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan.

5. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tabel 2. Capaian Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	71,00	82,64	116,39
2021	85,00	71,20	83,76
2022	87,00	75,29	86,54
2023	80,00	88,16	110,20
2024	91,00	95,37	104,80

Dalam era informasi yang semakin terbuka, kesadaran masyarakat mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu menjadi salah satu



elemen kunci dalam mendukung tugas BBPOM di Bandar Lampung. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga menjadi peluang besar bagi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Provinsi Lampung lebih efektif. Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu meningkat secara terus-menerus sejak tahun 2022 hingga 2024.

Kesadaran masyarakat yang meningkat membuat masyarakat lebih memahami pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu. Hal ini akan mendorong kepatuhan dalam mematuhi regulasi, seperti membeli produk berizin edar BPOM, membaca label produk, dan menghindari barang ilegal atau berbahaya.

Kesadaran masyarakat memungkinkan mereka untuk berperan sebagai pengawas aktif. BBPOM di Bandar Lampung membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan dan pelaporan akan adanya isu-isu di masyarakat terkait obat dan makanan melalui jalur pelaporan *Call Me Back* Ulun Lampung.

6. Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Adanya DAK dapat menjadikan peluang peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan inpres 3 tahun 2017. Sebagai implementasi terkait dengan Permendagri No.41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah, BPOM memberikan alokasi DAK non fisik sebagai stimulus pemerintah daerah meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai yang tertuang di Permendagri.

7. Sinergitas yang Baik dengan Lintas Sektor

BBPOM di Bandar Lampung senantiasa membangun sinergi dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Bentuk sinergi yang telah terbentuk antara lain dengan pelaksanaan Program Nasional Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar yang terintegrasi dengan Program Pemerintah Daerah setempat; pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersama Pemerintah Daerah; Kolaborasi dengan lintas sektor terkait pembinaan UMKM di Provinsi Lampung; Keterlibatan BBPOM di Bandar Lampung dalam Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) dan masuk dalam Tim Gerak Cepat penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di Provinsi Lampung; Penanganan program peenggulangan resistensi antibiotik bersama organisasi profesi kesehatan (Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia). Sinergitas yang terjalin memperkuat pelaksanaan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Lampung.

8. Keterbukaan Informasi Publik

BBPOM di Bandar Lampung sebagai badan publik senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penyediaan, pengumuman/publikasi, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Monev pengelolaan Informasi dan Dokumen telah dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung secara menyeluruh yang meliputi pengembangan media pelayanan, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik sehingga memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan seputar layanan, kinerja, dan anggaran. Dalam periode 2 tahun berturut-turut (2023-2024) mendapat penghargaan sebagai UPT dengan kategori “Informatif”. Hal ini

menggambarkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung telah menerapkan Keterbukaan Informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Tingginya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja BBPOM di Bandar Lampung

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, BBPOM harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan BBPOM untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjangkau masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

Sosialisasi terkait 3 unsur terendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta Waktu Penyelesaian layanan, telah dilakukan melalui subsite, media sosial dan media luar ruang. BBPOM Lampung sangat memperhatikan masukan dari masyarakat melalui SKM sebagai upaya memperbaiki dan lebih meningkatkan pelayanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Bandar Lampung cenderung meningkat dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	79,54	66,78	83,96
2022	81,37	77,51	95,26
2023	83,19	87,51	105,19
2024	87,60	88,74	101,30

1.4.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BBPOM di Bandar Lampung. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BBPOM di Bandar Lampung dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BBPOM di Bandar Lampung dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang :

1. Penggunaan Antibiotik yang Tidak Sesuai Ketentuan Menyebabkan *Anti Microbial Resistance* (AMR)

Antimicrobial Resistance (AMR), atau resistensi antimikroba, merupakan ancaman kesehatan global yang serius, dan dampaknya sudah terasa hingga ke tingkat lokal, termasuk di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung. Resistensi ini terjadi ketika mikroorganisme (seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit) menjadi kebal terhadap obat yang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhannya.

Penyebab utama dari meningkatnya AMR adalah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai ketentuan (misuse dan overuse). Di lapangan, BBPOM di Bandar Lampung menemukan beberapa hal yang berkontribusi pada masalah ini:

- **Pemberian Tanpa Resep yang Sah (Tanpa Pengawasan Tenaga Kesehatan):** Masih ditemukan praktik di mana obat-obatan, termasuk antibiotik, dapat diperoleh tanpa resep dokter yang benar di sarana Apotek. Kecenderungan tersebut seringkali disebabkan efisiensi biaya dibandingkan jika harus berobat dahulu ke dokter serta adanya rekomendasi dari teman atau kerabat. Berdasarkan data hasil pengawasan Tahun 2024, ditemukan sebanyak 74,51% dari 110 sarana Apotek yang telah diperiksa oleh BBPOM di Bandar Lampung masih melakukan penyerahan/penjualan antimikroba tanpa resep dokter. Hal ini menunjukkan masih tingginya “*supply and demand*” penggunaan antrimikroba yang tidak rasional di masyarakat. Penggunaan

antimikroba tanpa indikasi klinis yang jelas mempercepat seleksi bakteri resisten.

- **Ketidakpatuhan Pasien**

Pasien seringkali menghentikan pengobatan antimikroba dalam hal ini antibiotik sebelum waktunya ketika merasa gejalanya mereda. Dosis yang tidak tuntas ini tidak membunuh seluruh populasi bakteri penyebab infeksi, melainkan hanya menyisakan bakteri terkuat yang kemudian berkembang biak dan menjadi resisten.

- **Penggunaan pada Hewan yang Tidak Terkontrol**

Meskipun bukan wewenang inti BBPOM di Bandar Lampung, penggunaan antimikroba yang berlebihan dalam peternakan dan perikanan di wilayah Lampung dapat menyebarkan resistensi ke lingkungan dan pada akhirnya, ke manusia.

2. Serangan Siber terhadap Keamanan Data

Transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan langkah strategis yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) telah mendukung berbagai fungsi inti, termasuk registrasi elektronik, pelaporan efek samping, digitalisasi hasil pengujian laboratorium, serta penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, ketergantungan yang semakin tinggi terhadap sistem TI menjadikan sektor pengawasan obat dan makanan rentan terhadap berbagai risiko dan ancaman keamanan siber. Serangan seperti malware, ransomware, dan phishing berpotensi merusak sistem, mengganggu proses bisnis, serta mengakibatkan akses tidak sah terhadap data sensitif. Risiko kebocoran atau manipulasi data penting, seperti informasi produk, hasil uji laboratorium, maupun laporan efek samping, juga menimbulkan dampak signifikan terhadap kelangsungan layanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kredibilitas lembaga. Ancaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berdampak pada dimensi hukum, tata kelola, perlindungan data, serta



kepercayaan publik. Dengan demikian, identifikasi dan pengelolaan risiko keamanan TI merupakan bagian integral dalam pencapaian sasaran strategis organisasi.

Kerentanan pada aplikasi yang digunakan, baik berupa bug maupun celah keamanan, turut menjadi perhatian karena dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak berwenang. Ancaman dari dalam organisasi, termasuk potensi penyalahgunaan akses data oleh personel internal, semakin memperluas spektrum risiko. Selain itu, pemalsuan dokumen digital seperti izin edar atau sertifikasi keamanan produk menjadi isu yang semakin relevan seiring pesatnya perkembangan teknologi, sehingga menuntut penguatan pengamanan terhadap integritas data dan dokumen elektronik.

Dalam rangka memitigasi berbagai ancaman tersebut, diperlukan pendekatan pengamanan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Upaya penguatan keamanan siber dapat dilaksanakan melalui penerapan web application firewall, penggunaan enkripsi data pada proses penyimpanan maupun transmisi, serta optimalisasi mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk memastikan pengendalian akses yang tepat. Di samping itu, penguatan tata kelola keamanan informasi perlu dilakukan melalui penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan keamanan informasi, pelaksanaan audit keamanan secara berkala, serta pemantauan aktivitas pengguna secara berkesinambungan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terkait keamanan informasi menjadi komponen penting dalam mencegah insiden yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktahuan pengguna. Penguatan keamanan aplikasi melalui uji penetrasi (*penetration testing*) serta penerapan standar pengembangan yang sesuai regulasi dapat meminimalisasi potensi kerentanan. Selanjutnya, pelaksanaan pencadangan data (*backup*) dan penyusunan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional apabila terjadi gangguan atau insiden keamanan.

Kolaborasi dengan lembaga keamanan siber nasional, penyedia teknologi, serta aparat penegak hukum akan memperkuat kapasitas organisasi dalam mendeteksi, merespons, dan menanggulangi ancaman siber secara efektif.

Dengan penerapan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat senantiasa terjaga di tengah dinamika ancaman keamanan TI yang terus berkembang.

3. Modus Operandi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkembang

Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan menunjukkan pola yang semakin canggih dan kompleks. Modus operandi para pelaku kejahatan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk kesehatan dan pangan yang berkualitas. Salah satu ancaman utama adalah peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, termasuk produk palsu yang dipasarkan melalui jalur distribusi tidak resmi, seperti *e-commerce* dan media sosial. Produk-produk ini sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, terdapat upaya manipulasi data dan dokumen yang semakin sulit terdeteksi, seperti pemalsuan nomor registrasi BPOM, sertifikasi halal, atau dokumen pendukung lainnya. Pelaku juga menggunakan strategi pencampuran bahan berbahaya atau zat aktif dalam produk tanpa mencantumkannya pada label, sehingga konsumen tidak menyadari risiko yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, praktik relabeling dan repackaging juga menjadi modus yang sering digunakan untuk memperpanjang masa edar produk yang sudah kedaluwarsa atau mengelabui pengawasan.

Dalam konteks digital, kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan semakin sulit dilacak karena penggunaan teknologi canggih. Pelaku memanfaatkan jaringan perdagangan lintas negara untuk mendistribusikan produk ilegal, memanfaatkan *platform daring* yang menawarkan anonimitas. Beberapa bahkan menggunakan dark web untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang atau makanan berbahaya yang sulit diawasi oleh otoritas. Tantangan ini diperparah dengan kemampuan pelaku untuk menghindari deteksi, misalnya dengan mengubah kemasan, menyembunyikan produk di

antara barang legal, atau menggunakan dokumen palsu untuk menyamarkan kegiatan mereka.

Ancaman dari modus operandi yang semakin berkembang ini tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat tetapi juga mengancam stabilitas sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif. BPOM dan instansi terkait harus memperkuat teknologi pengawasan, seperti penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola distribusi mencurigakan. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum, otoritas internasional, dan pelaku industri juga menjadi kunci dalam membongkar jaringan kejahatan ini. Selain itu, edukasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap produk yang mereka konsumsi sangat penting untuk mengurangi ruang gerak pelaku.

Beberapa modus operandi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung antara lain:

- Menggunakan nomor izin edar palsu atau milik produk lain.
- Menggunakan kemasan, label, hologram, atau nomor batch palsu yang menyerupai produk asli.
- Mengedarkan produk kosmetik secara bundling (menggabungkan produk terdaftar dan tidak terdaftar dalam satu paket)
- memproduksi dan mengedarkan obat ilegal (obat setelan)
- Membuat akun toko baru setiap waktu tertentu untuk menghindari identifikasi petugas

Dengan pendekatan yang komprehensif, BBPOM di Bandar Lampung dapat menghadapi ancaman dari modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, sekaligus memastikan bahwa produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan terjamin keasliannya.

4. Peredaran Produk *Ilegal* Lintas Batas Akibat Globalisasi dan Pasar Bebas

Era globalisasi ditandai dengan meningkatnya konektivitas antar negara melalui perkembangan teknologi informasi, transportasi, dan sistem logistik

internasional. Perdagangan bebas yang diberlakukan melalui berbagai perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral mengurangi hambatan tarif, mempercepat arus barang, dan membuka akses pasar secara lebih luas. Kondisi ini membawa dampak positif dalam bentuk peningkatan pilihan produk, percepatan inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, globalisasi juga menghadirkan tantangan signifikan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menjaga keamanan, dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di dalam negeri.

Globalisasi menyebabkan tidak adanya lagi batasan antara satu negara dengan negara lainnya. Seseorang dapat terhubung di seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dengan teknologi dan kemudahan akses, perdagangan dunia akan semakin terbuka luas melewati batas suatu negara. Selain memberikan dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif seperti masuknya berbagai macam produk sediaan farmasi dan pangan olahan impor ilegal dari negara lain.

Perdagangan daring lintas batas (*cross-border marketplace*) terutama sediaan farmasi dan pangan olahan memungkinkan konsumen membeli produk langsung dari luar negeri tanpa melalui mekanisme verifikasi atau izin edar dari Badan POM. Platform digital juga kerap dimanfaatkan untuk menjual produk obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, atau pangan olahan yang tidak terdaftar. Kompleksitas rantai pasok global menyebabkan kesulitan dalam pelacakan asal produk, jalur distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab. Produk ilegal dapat memasuki pasar melalui penyelundupan baik skala besar maupun skala kecil yang dilakukan individu, *repackaging* dan pemalsuan dokumen impor. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan konsumen. Masuknya produk ilegal menciptakan persaingan tidak sehat karena harga jauh lebih murah, tidak membayar pajak dan bea masuk, kompleksitas arus barang yang masuk melalui pelabuhan besar dengan lalu lintas kontainer tinggi, jalur perbatasan darat yang panjang, transaksi digital yang tidak mudah ditelusuri, pengiriman paket kecil yang kini menjadi modus utama penyelundupan produk ilegal. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban pengawasan.

Menghadapi dinamika global ini, diperlukan pendekatan pengawasan yang menyeluruh, meliputi Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dengan:

- Pemanfaatan *risk profiling* pada importir, jalur logistik, barang kiriman, dan *marketplace*.
- Integrasi data antara BPOM, Bea Cukai, penyedia platform digital, dan otoritas terkait.
- Kolaborasi dengan institusi terkait.
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur melalui pelatihan SDM.
- Penyediaan perangkat rapid test di lokasi titik perbatasan.
- Edukasi dan Komunikasi Publik melalui kampanye literasi konsumen terkait ciri produk ilegal, bahaya produk tanpa izin edar, dan cara verifikasi izin edar.

Modus operandi lintas batas kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung antara lain:

- Sediaan farmasi dan pangan olahan yang berasal dari negara China diperoleh dari *marketplace* daring dan diedarkan kembali melalui *marketplace* daring oleh akun toko yang berupa sarana rumah.
- Sarana toko mengedarkan produk pangan olahan impor yang berasal dari negara Jepang modus pemasukannya dengan cara barang tentengan.

5. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) Pada Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Program ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia Emas tahun 2045. Penerima manfaat MBG adalah anak sekolah, pesantren, serta ibu hamil dan menyusui yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika program ini tidak dikelola dengan baik, ditambah dengan banyaknya jumlah penerima manfaat, maka berisiko mengakibatkan terjadinya keracunan pangan. Keracunan pangan menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menghambat tercapainya Indonesia Emas 2045. Di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung, implementasi program ini membawa serta risiko tinggi terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP), yang bukan hanya mengancam kesehatan penerima manfaat, tetapi juga

menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas dan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) itu sendiri.

BBPOM di Bandar Lampung merupakan anggota satuan tugas percepatan penyelenggaraan program MBG di provinsi Lampung. Selain itu BBPOM di Bandar Lampung adalah anggota Tim Gerak Cepat KLB-KP di Provinsi Lampung. Kejadian KLB-KP dalam Program MBG di wilayah Lampung akan memicu tiga ancaman utama bagi BBPOM di Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Kerusakan Reputasi dan Kepercayaan Publik

Ketika terjadinya KLB-KP, masyarakat akan mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Hasilnya adalah penurunan kepercayaan terhadap pangan olahan secara umum dan skeptisisme terhadap kemampuan BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi konsumen. Akibatnya, BBPOM terpaksa mengalokasikan sumber daya besar hanya untuk mengelola krisis dan melakukan klarifikasi, mengganggu tugas rutin lainnya, seperti pengawasan obat, kosmetik, atau program prioritas lain seperti Desa Pangan Aman.

2. Keterbatasan Sumber Daya Operasional (Investigasi Cepat)

Setiap KLB-KP memerlukan Tim Gerak Cepat (TGC) yang harus bergerak segera untuk penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel di lokasi, dan pengujian laboratorium. Akibatnya, BBPOM Bandar Lampung harus memobilisasi penuh tim pengawas dan analis laboratorium. Jika KLB terjadi secara simultan atau berulang di berbagai lokasi, kapasitas dan kecepatan uji lab akan mencapai batasnya, berpotensi menunda penemuan sumber kontaminasi dan penarikan produk.

3. Konflik Lintas Sektor dan Legalitas

KLB-KP merupakan urusan lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan (penanganan korban), Dinas Pendidikan/Sosial (pelaksanaan program), dan pihak penyedia (SPPG/katering). BBPOM bertugas menentukan sumber

kontaminasi pangan. Sehingga BBPOM Bandar Lampung akan berada di garis depan penegakan hukum terhadap penyedia pangan. Proses penyidikan dan penindakan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS) harus dilakukan dengan cermat dan tanpa cela untuk memastikan efek jera, sekaligus menjaga koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Daerah agar program MBG tetap berjalan aman.

Tabel 4. Matrix Analisis SWOT

<u>STRENGTH</u> 1. Kompetensi Pegawai BBPOM di Bandar Lampung Memadai 2. Pemanfaatan Anggaran yang Akuntabel 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Memadai 4. Penerapan Sistem Mutu Terintegrasi 5. Layanan Publik dengan Kategori Layanan Prima 6. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian Telah Optimum	<u>WEAKNESS</u> 1. Gap Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Analisis Beban Kerja (ABK) 2. Sistem Penyimpanan Data Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Belum Terintegrasi
<u>OPPORTUNITIES</u> 1. Pertumbuhan UMKM di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkembang Pesat 2. Dukungan <i>Stakeholder</i> Pada Program Pengawasan BBPOM di Bandar Lampung 3. Kemudahan Akses Layanan Publik Melalui SPBE di BBPOM di Bandar Lampung 4. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk Meningkatkan Pertumbuhan Industri Domestik	<u>THREATS</u> 1. Penggunaan Antibiotik yang Tidak Sesuai Ketentuan Menyebabkan Anti Microbial Resistance (AMR) 2. Serangan Siber terhadap Keamanan Data 3. Modus Operandi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkembang 4. Peredaran Produk Ilegal Lintas Batas Akibat Globalisasi dan Pasar Bebas



5. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 6. Sinergitas yang Baik dengan Lintas Sektor 7. Keterbukaan Informasi Publik 8. Tingginya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja BBPOM di Bandar Lampung	5. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) Pada Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BBPOM di Bandar Lampung telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BBPOM di Bandar Lampung dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, dan khususnya di wilayah kerja Provinsi Lampung. BBPOM di Bandar Lampung mempunyai visi yang secara langsung mendukung visi BPOM, dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BBPOM di Bandar Lampung untuk Renstra 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang *dapat* diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

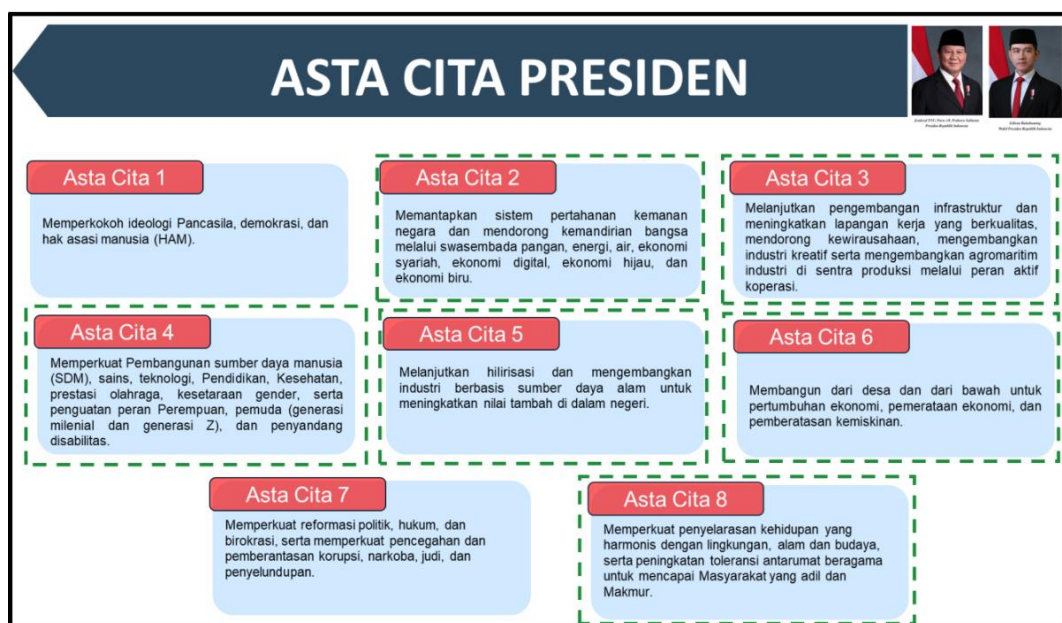
Visi BBPOM di Bandar Lampung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek *penting* yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman : Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BBPOM di Bandar Lampung. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu : BBPOM di Bandar Lampung berupaya *memastikan* bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja provinsi Lampung memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing : BBPOM di Bandar Lampung mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera : Tujuan akhir dari semua upaya BBPOM di Bandar Lampung adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BBPOM di Bandar Lampung terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BBPOM di Bandar Lampung untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing, di wilayah kerja yaitu di Provinsi Lampung.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPOM yang telah didukung secara langsung oleh BBPOM di Bandar Lampung telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi tersebut disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 6. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui

kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:
Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM						
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. BBPOM di Bandar Lampung sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahun 2025 disusun pada saat N-1 dengan reviu dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024. Uraian target setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	94
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	97,29
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Bandar Lampung	14
10	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	90,50
		Nilai AKIP	81,49
		Nilai Kinerja Anggaran	89,10
		Indeks Manajemen Risiko	3,40

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Pada Bulan Februari tahun 2025, dilakukan revaluasi kembali terkait Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja oleh Satuan Kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Unit Pengampu indikator terkait melalui penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029. Adanya perbedaan target antara dokumen RKT 2024 dan PK serta RAPK Tahun 2025 disebabkan karena RKT Tahun 2025 disusun pada saat N-1 dengan dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sedangkan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun 2025 ditetapkan melalui hasil revaluasi terhadap target RKT Tahun 2025 dengan pembahasan yang lebih detail dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 adalah PK dan RAPK Tahun 2025 dikarenakan RKT Tahun 2025 tidak digunakan kembali saat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sudah disahkan. Secara rinci terkait Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang meliputi 9 Sasaran Kegiatan dan 25 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13
2	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
3	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
4	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,60
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12
		03 - Jumlah desa pangan aman	5
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
7	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
8	08 - Layanan Publik UPT	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT	90
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80,90
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9

No	Kegiatan	Anggaran
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 21.121.903.000,-
2	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 11.707.584.000,-

Selanjutnya, pada bulan Agustus 2025 sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM maka dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 sehingga menjadi 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja sebagai target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025. Kemudian pada tanggal 1 Oktober dilakukan revisi PK ke-3 karena adanya pergantian Kepala BBPOM di Bandar Lampung. Pada laporan kinerja interim triwulan I sampai dengan III terdapat kesalahan pencantuman pagu program DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dimana seharusnya Rp 21.121.903.000 namun tercantum Rp 21.121.093.000. Secara rinci terkait Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun

2025 yang meliputi 8 Sasaran Kegiatan dan 28 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01-Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75
		02-Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03-Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		04-Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05-Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06-Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79
		07-Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5
		08-Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		09-Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5
		10-Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		11-Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73
		12-Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13-Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14-Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
		15-Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01-Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65
3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja UPT	01-Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		02-Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12
		03-Jumlah desa pangan aman	5
		04-Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01-Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,94
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01-Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,9
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9

No	Kegiatan	Anggaran
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 20.321.903.000,-
2	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 11.537.593.000,-

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Pada Bulan Februari, disusun dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk sebagai acuan kinerja BBPOM di Bandar Lampung yang memuat target kinerja per bulan beserta anggaran per indikator kinerja. Selanjutnya sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor: B-PM.02.01.55.03.25.148 Tentang Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025 tanggal 03 Maret 2025 terdapat perubahan tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan pelaksanaan program dikarenakan dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN Tahun 2025. Kemudian adanya kebijakan efisiensi juga berdampak pada berubahnya rencana aksi pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung. Oleh karena itu, dilakukan revisi RAPK ke-1 pada tanggal 20 Mei 2025. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2025 sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM maka dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ke-2 sehingga menjadi 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja sebagai target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025. Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451

perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tercantum instruksi bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Kemudian pada tanggal 1 Oktober dilakukan revisi RAPK ke-3 karena adanya pergantian Kepala BBPOM di Bandar Lampung. Secara rinci terkait perubahan RAPK dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Awal Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	585.971.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219.847.040
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90.294.320
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59.998.500

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3.738.080
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.368.720
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364.703.760
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91.175.940
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	19.140.000
2	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,38	24,38	48,75	51,46	51,46	51,46	51,46	65	65	65	65	65	27.051.000
3	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76,2	76,2	76,2	76,7	76,7	76,7	77,2	12.432.443.000
4	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	2.824.155.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	40	60	70	80	90	100	100	100	12	469.164.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	40	50	70	80	90	100	100	100	5	782.221.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	50	60	70	80	90	100	100	100	1	126.919.000
5	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3,33	13,3 3	22,5	36,6 7	45	58,3 3	61,6 7	66,6 7	83,5	85,3 3	90	91	187.396.000
6	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				10	21	33	45	54	59	67	75	85	334.197.000
7	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
8	08 - Layanan Publik UPT	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,70	206.651.000
9	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT												90	3.420.061.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80,9 0	3.420.061.500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.420.061.500

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,9	3.420.061.500
Total															32.829.487.000

Tabel 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi ke-1 Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	585.971.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219.847.040
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90.294.320
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59.998.500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3.738.080

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.368.720
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364.703.760
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91.175.940
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	19.140.000
2	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,38	24,38	48,75	51,46	51,46	51,46	51,46	65	65	65	65	65	27.051.000
3	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76,2	76,2	76,2	76,7	76,7	76,7	77,2	12.432.443.000
4	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	2.824.155.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pembudayaan keamanan pangan													
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
5	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3,33	13,3 3	22,5	50	65	71,6 7	76,6 7	81,6 7	88,3 3	93,3 3	96,6 7	91	187.396.000
6	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					10	21	34	45	55	65	75	85	334.197.000
7	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
8	08 - Layanan Publik UPT	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,70	206.651.000
9	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT												90	3.420.061.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80,9 0	3.420.061.500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.420.061.500

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,9	3.420.061.500
Total															32.829.487.000

Tabel 11. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi ke-2 dan ke-3 Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01-Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	88,7 5	88,7 5	88,7 5	88,7 5	88,7 5	585.971.000
		02-Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		03-Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	109.923.520
		04-Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		05-Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	45.147.160
		06-Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	64.369.500
		07-Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	4.709.981
		08-Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	79.396.819

		09-Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	351.007.960
		10-Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	93.215.740
		11-Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,1 3	93,1 3	93,1 3	93,1 3	93,1 3	93,1 3	93,1 3	93,7 3	93,7 3	93,7 3	93,7 3	93,7 3	13.398.000
		12-Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	5.742.000
		13-Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	7.285.000
		14-Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76,2	76,2	76,2	76,7	76,7	76,7	77,2	12.951.105.000
		15-Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	155.070.680
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01-Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,3 8	24,3 8	48,7 5	51,4 6	51,4 6	51,4 6	51,4 6	54,0 5	65	65	65	65	27.051.000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja UPT	01-Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	2.956.666.000
		02-Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000
		03-Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000

		04-Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01-Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3,33	13,33	22,5	50	65	71,67	76,67	81,67	88,33	93,33	96,67	16,94	187.396.000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01-Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					10	21	34	38	51	61	71	85	334.197.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	74.140.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	3.047.898.250
		Nilai AKIP UPT BPOM												80,9	3.047.898.250
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.047.898.250
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,9	3.047.898.250
Total															31.859.496.000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Bandar Lampung sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator kinerja. Selanjutnya dihitung capaian setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Bagian Tata Usaha. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Tabel 12. Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	●
Baik	90% < x ≤ 100%	●
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	●
Kurang	<60%	●

Selanjutnya, dilakukan penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- (1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan tertuang sebagai berikut:

(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin Capaian Indikator Kinerja, yaitu dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja maka normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- a) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- b) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

(2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Sumber Predikat AKIP

No	Unit Organisasi	Predikat AKIP
1.	BPOM	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari KemenpanRB
2.	Unit Kerja Eselon I (UK1)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
3.	Unit Kerja Eselon II (Satker Mandiri)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
4.	Unit Kerja Eselon II (non Satker Mandiri)	Menggunakan nilai UK1
5.	UPT	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 14. Koreksi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

- (3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP, dikalikan 100.

$$\text{Nilai Akhir: } \{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]\}$$

- (4) Total Capaian Perjanjian Kinerja Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja pada setiap indikator kinerja.
- (5) Nilai Kinerja Organisasi
 Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Penetapan predikat Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 15. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahunan dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 16. Kriteria Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (2029)

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Selanjutnya adalah pengukuran efisiensi dari kinerja yang diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

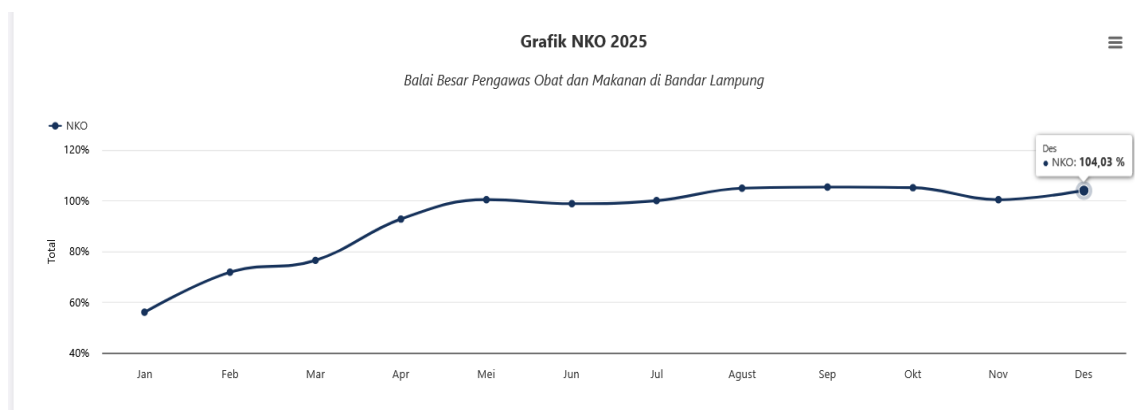
Tabel 17. Kriteria Capaian Efisiensi

NO	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi



Gambar 7. Grafik Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025

Penetapan Kinerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025 memuat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja sesuai Rancangan Awal Rencana Strategi Tahun 2025-2029. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **104,03%** dengan kriteria “**ISTIMEWA**” secara rinci pencapaian NKO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Nilai Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	97,7	110,08%	Normalisasi	110,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58%	-	102,58%	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%	-	109,89%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	-	100,00%	Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,29	115,64%	Normalisasi	110,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	87,07	110,22%	Normalisasi	110,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	96,88	107,05%	-	107,05%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,72	109,58%	-	109,58%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5	99,3	105,08%	-	105,08%	Sangat Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	92	99,32	107,96%	-	107,96%	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73	99,99	106,68%	-	106,68%	Sangat Baik
02	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92,2	101,32%	-	101,32%	Sangat Baik
03	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106,14	106,14%	-	106,14%	Sangat Baik
04	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2	81	104,92%	-	104,92%	Sangat Baik
04	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100,00%	-	100,00%	Baik
04	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	70,27	108,11%	-	108,11%	Sangat Baik
04	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	92,71	103,47%	-	103,47%	Sangat Baik
05	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	12	100,00%	-	100,00%	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
06	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00%	-	100,00%	Baik
07	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	-	100,00%	Baik
08	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,94	16,94	100,00%	-	100,00%	Baik
09	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85	85	100,00%	-	100,00%	Baik
09	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	98	108,89%	-	108,89%	Sangat Baik
09	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,7	4,85	103,19%	-	103,19%	Sangat Baik
09	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	90	89,35	99,28%	-	99,28%	Baik
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80,9	81,49	100,73%	-	100,73%	Sangat Baik
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5	5	100,00%	-	100,00%	Baik
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko	2,9	2,844	98,07%	-	97,93%	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
Total Capaian PK						2.912,80		
Nilai Kinerja Organisasi						104,03		
Predikat NKO						ISTIMEWA		

Tabel 19. Nilai Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Per Sasaran Kegiatan
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,08
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	108,11
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,87
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108,89
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	103,19
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,49

Penjelasan secara rinci terhadap capaian kinerja 28 indikator kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 01
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN
FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 20. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	88,75	97,7	110,08%	Tidak Dapat Disimpulkan	

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

- Persentase Sampel **Obat** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$
 - Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)

$$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$$
 Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
 - Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$$
 Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
 - Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%).$$
 Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
 Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.
 - Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$$
 Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian

2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling berdasarkan terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.

- Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

$10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

- Persentase Sampel **Obat Bahan Alam** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*)/\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

- Kesesuaian Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA *sampling*, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan})$

tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/di *sampling* dan diuji)
 $\times 100\%$

Catatan: Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan *sampling*.
Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA *sampling*, pengujian dan pelaporan

- Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman *sampling*/ jumlah sampel yang diuji) $\times 100\%$
- Catatan: Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan *sampling*
- . Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan: Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan *sampling*

- a. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times 100\%$

- Persentase Sampel **Suplemen Kesehatan** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

- *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
 - **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
 - ***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)
- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- Catatan: Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.
- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$
- Catatan: Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling
- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- Mencakup penentuan kesimpulan:
1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
- Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

- Persentase Sampel **Kosmetik** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen $a2$ mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan

2. Pemilihan parameter uji

Catatan: Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\% \right)$$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

$$\left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\% \right)$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Tanggapan atas surat tindak lanjut

$$\left(\frac{\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT}}{\text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik}} \times 100\% \right)$$

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar

2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Berdasarkan hasil pemutakhiran terhadap manual IKU pada bulan Agustus, perubahan pada indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah penajaman detail cara perhitungan untuk sampel Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (semula 6 komponen menjadi 5 komponen) dan sampel Kosmetik serta dengan memperjelas pembagian kinerja fungsi pengujian antara UPT penyampling dan UPT penguji. Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025, bahwa perhitungan realisasi kinerja menggunakan manual IKU lama digunakan pada bulan Januari sampai dengan Juli, selanjutnya mulai bulan Agustus perhitungan sudah menggunakan manual IKU baru.

Pada tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 97,7% dengan target 88,75%. Capaian yang diperoleh sebesar 110,08% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Capaian dipengaruhi oleh kesesuaian perencanaan *sampling*, kesesuaian pelaksanaan *sampling*, ketepatan dalam mengambil kesimpulan penandaan dan tanggapan surat tindak lanjut telah dilaksanakan tepat waktu sehingga mendukung kelancaran tercapainya target kinerja. Capaian melebihi 110% dikarenakan target tahun 2025 yang rendah dan akan menjadi evaluasi di tahun selanjutnya untuk menentukan target yang lebih tinggi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Perhitungan realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya karena indikator tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra

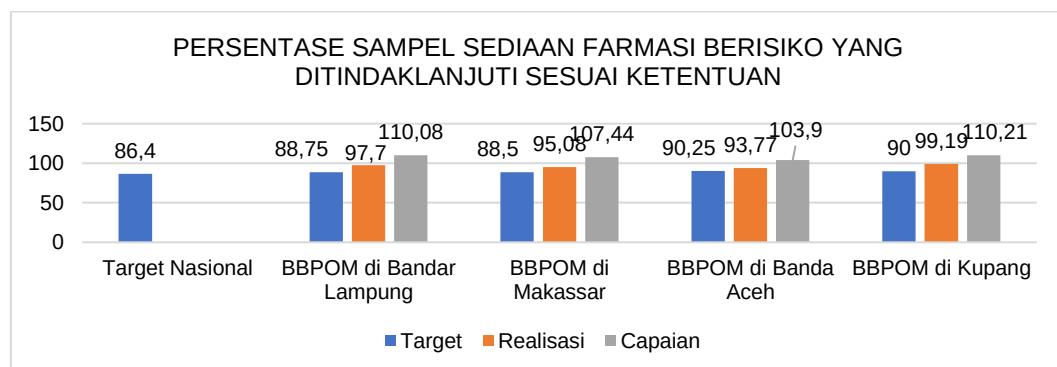
Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,75	97,7	104,21% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 97,7% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 93,75% sehingga capaian kinerja sebesar 104,21%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 86,4%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 88,75% dan berhasil merealisasikan sebesar 97,7%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 110,08%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 88,5% dengan realisasi sebesar 95,08% dan capaian kinerja sebesar 107,44%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 90,25% mampu merealisasikan sebesar 93,77%, sehingga mencapai 103,9% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 90% dan mencatatkan realisasi sebesar 99,19%, dengan capaian kinerja tertinggi yaitu 110,21%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Kupang, diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Makassar, dan BBPOM di Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2025, sebanyak 1086 sampel Sediaan Farmasi yang terdiri 276 sampel obat, 4 sampel rokok, 260 sampel obat bahan alam, 56 sampel suplemen kesehatan dan 490 sampel kosmetik yang telah disampling dan diperiksa sesuai ketentuan. Dari 1086 sampel tersebut, 1085 sampel telah diuji

sesuai ketentuan dan 1 sampel kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE). Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan tercapainya target kinerja antara lain:

1. Penguatan perencanaan dan prioritas pengawasan berbasis risiko
Penerapan pendekatan *risk-based surveillance* dalam penentuan prioritas sampel memungkinkan sumber daya difokuskan pada sediaan farmasi yang memiliki tingkat risiko tinggi.
2. Sistem koordinasi yang efektif
Kolaborasi yang baik antara petugas sampling dan laboratorium mempercepat alur tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi ketentuan. Mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur membantu mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan korektif.
3. Optimalisasi sistem monitoring dan pelaporan
Pemanfaatan sistem informasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara berkala memungkinkan pengendalian kinerja dilakukan secara real-time. Monitoring rutin membantu mencegah keterlambatan tindak lanjut serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi hasil pengujian maupun penandaan dan penanganan hasil pengujian semakin baik melalui pelatihan dan pembinaan teknis. Hal ini berdampak pada ketepatan dan kecepatan tindak lanjut terhadap sampel tidak memenuhi syarat.
5. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi
Adanya komitmen manajemen dalam mendorong pencapaian target kinerja, termasuk melalui monitoring dan evaluasi berkala, berkontribusi pada konsistensi pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan.
Selain itu, sistem regionalisasi laboratorium memungkinkan meningkatnya optimalisasi kapasitas pengujian dan pemerataan beban kerja. Sinergi antara penguatan manajerial dan pengaturan jejaring laboratorium regional

mendukung kelancaran proses sampling dan pengujian secara lebih terkoordinasi dan efisien.

6. Koordinasi dan komunikasi antar anggota Region Pekanbaru

Koordinasi dan komunikasi yang baik antara BBPOM di Bandar Lampung dengan anggota Region Pekanbaru mendukung selesainya pengujian antar balai regional sesuai pedoman, di antaranya melalui *sharing* reagen dan komitmen untuk mengirimkan sampel sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

7. Sesuai Pedoman Sampling, batas waktu pengujian komoditi obat tidak diatur, tetapi pelaporan hasil pengujian ditetapkan maksimal 15 hari . Hal ini memberikan kesempatan kepada penguji untuk menyelesaikan pengujian dengan lebih leluasa, utamanya untuk penguji laboratorium Mikrobiologi yang melakukan pengujian pada semua komoditi.

**f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (rekomen-
dasi perbaikan kinerja)**

Tabel 23. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada tahun 2025 terdapat 95 sampel OBA yang melewati <i>timeline</i> 15 HK dikarenakan: 1. Terjadi penumpukan sampel di laboratorium mikrobiologi karena semua komoditi diuji	- melakukan pengaturan waktu masuk sampel ke laboratorium - sampel komoditi pangan dan obat masuk ke lab pada minggu I sedangkan sampel	Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan rencana pelaksanaan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap	Maret 2026	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati timeline yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi,

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		parameter mikrobiologi 2. Keterbatasan jumlah pengujian di lab mikrobiologi dan juga peralatan uji sehingga pengerjaan sampel dari semua komoditi di lakukan secara bergiliran sehingga komoditi yang terakhir diuji akan melewati batas timeline pengujian 3. sampel OBA yang hasil uji nya TMS memerlukan pengulangan sehingga membutuhkan waktu pengujian yang lebih lama (>15 HK)	OBASKK dan Kosmetik masuk ke lab pada minggu ke 3.					pangan olahan, PIRT dan KLB
2	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel obat dari anggota balai Regional Pekanbaru ada yang diterima lebih dari tanggal 10 setiap bulannya (tidak sesuai kesepakatan regional) sehingga memperlambat proses pengerjaan sampel di BBPOM Bandar Lampung	Melakukan koordinasi dengan anggota region untuk melakukan pengiriman sampel sesuai dengan kesepakatan (maks tanggal 10 tiap bulannya)	- Mengingatkan seluruh anggota region terkait kesempatan pengiriman sampel - Membangun komitmen untuk melaksanakan	Juni 2026	Y	O-02	Pengiriman sampel dalam rangka pelaksanaan regionalisasi laboratorium tidak sesuai jadwal/pe

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				an kesepatan regional				rencanaa n

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator kinerja persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari kontribusi berbagai program dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Secara umum, keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh efektivitas pelaksanaan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, khususnya kegiatan pengawasan *post-market* terhadap sediaan farmasi.

Program pengawasan yang berfokus pada pendekatan berbasis risiko berperan penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran *sampling* dan percepatan tindak lanjut terhadap temuan sampel tidak memenuhi syarat. Kegiatan *sampling* terencana, pengujian laboratorium yang tepat waktu, serta mekanisme tindak lanjut hasil pengujian yang sistematis telah memperkuat rantai pengawasan sehingga setiap temuan sampel tidak memenuhi syarat dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selain itu, kegiatan penguatan koordinasi internal antar fungsi inspeksi dan pengujian turut mendukung kelancaran proses tindak lanjut.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga ditunjang oleh kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan teknis dan supervisi, serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pengendalian kinerja dilakukan secara berkelanjutan. Pemanfaatan data pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan meningkatkan efektivitas program dan mempercepat respons terhadap potensi risiko.

Di sisi lain, terdapat beberapa aspek kegiatan yang berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola secara optimal, antara lain peningkatan beban kerja akibat bertambahnya cakupan pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas penanganan kasus tertentu yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui perencanaan yang adaptif dan penguatan manajemen kinerja.

Secara keseluruhan, sinergi antara program pengawasan berbasis risiko, pelaksanaan kegiatan operasional yang konsisten, serta dukungan manajemen organisasi menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Upaya penyempurnaan program dan kegiatan perlu terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 24. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	26	26,67	102,58%	Sangat Baik	

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu

disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

- Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

- Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Pada tahun 2025, realisasi indikator indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO adalah 26,67% dengan target 26. Capaian yang diperoleh sebesar 102,58% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Perhitungan realisasi indikator persentase sampel persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

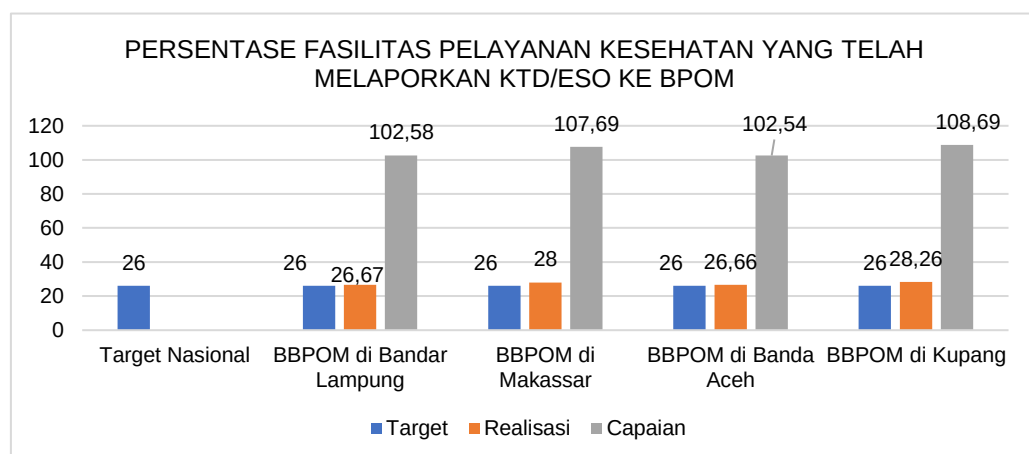
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	30	26,67	88,90% ▲	Akan Tercapai

Pada tahun 2025, realisasi kinerja pada indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM sebesar 26,67% dari target periode renstra sebesar 30%, sehingga capaian kinerja adalah 88,90% dengan kategori Akan Tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 26%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 26% dan berhasil merealisasikan sebesar 26,67%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,58%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 26% dengan realisasi sebesar 28% dan capaian kinerja sebesar 107,69%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 26% mampu merealisasikan sebesar 26,66%, sehingga mencapai 102,54% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 26% dan mencatatkan realisasi sebesar 28,26%, dengan capaian kinerja tertinggi yaitu 108,69%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Kupang, diikuti oleh BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar Lampung, dan BBPOM di Banda Aceh.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Target tahunan sebesar 26% merupakan target yang telah disepakati oleh unit pengampu IKU di Pusat (KMEI), BBPOM di Bandar Lampung serta Biro Perencanaan dan Keuangan. Target tersebut merupakan baseline awal untuk IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dan telah tercapai 26,67% dimana dari 45 fasyankes yang diberikan KIE telah melaporkan KTD/ESO sebanyak 12 Fasyankes. Selama tahun 2025, sebanyak 91 laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh fasyankes di provinsi Lampung, baik oleh fasyankes yang diberi KIE pada tahun berjalan maupun yang tidak diberi KIE pada tahun berjalan (namun untuk fasyankes yang tidak diberi KIE secara manual indikator tidak dapat diklaim sebagai capaian kinerja). Rincian pelaporan KTD/ESO tahun 2025 tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 27. Rincian pelaporan KTD/ESO Tahun 2025

No.	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diberi KIE Pada Tahun Berjalan	Jumlah Pelaporan
1	RS Airan Raya	ya	24
2	RS Santa Anna	ya	8
3	RS Budi Medika	ya	2
4	Klinik Kosasih Kemiling	ya	1
5	Klinik Kosasih Palapa	ya	1
6	RS Lampung Eye Center	ya	1
7	Klinik AP & AP	ya	1
8	RSUD A. Dadi Tjokrodipo	ya	1
9	RS Kartini	ya	1
10	RS Mata Permana Sari	ya	1
11	RS Bunda Liwa	ya	1
12	RS Bumi Waras	ya	1
13	RS Mardi Waluyo	tidak	6
14	RS Hermina	tidak	6
15	RSUD Bob Bazar	tidak	8
16	RS Immanuel	tidak	4
17	RSUD Abdul Moeloek	tidak	2
18	RS Urip Sumoharjo	tidak	15
19	RS Pertamina Bintang Amin	tidak	4
20	RSUD Pringsewu	tidak	1
21	RS Permata Hati Way Jepara	tidak	1
22	RS Advent	tidak	1

Keberhasilan kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Peran petugas BBPOM di Bandar Lampung yang cukup aktif dalam melakukan koordinasi dan pemantauan pelaporan KTD/ESO oleh petugas di fasyankes.
2. Tingkat pemahaman serta kesadaran yang cukup baik dari para petugas/tenaga kesehatan yang telah diberikan KIE untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui aplikasi e-Meso.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 28. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tenaga kesehatan di fasyankes tidak dapat melakukan pelaporan pada aplikasi e-MESO karena Lupa password, gangguan jaringan dan/atau pergantian operator	<i>Back up</i> laporan manual dengan form kuning, Komunikasi dengan PIC pusat terkait <i>user name</i> dan <i>password</i> pelapor	Koordinasi dengan PIC pelaporan KTD/ESO Fasyankes secara berkala	TW 2 - TW 4 tahun 2026	Y	S-34	Tenaga kesehatan di fasyankes tidak dapat melakukan pelaporan pada aplikasi e-MESO

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini didukung oleh terlaksananya:

1. Perencanaan kegiatan dengan baik

2. Pelaksanaan KIE yang baik sehingga dapat membangun pemahaman dan kesadaran tenaga kesehatan di fasyankes terkait KTD/ESO
3. Koordinasi dan komunikasi aktif petugas BBPOM di Bandar Lampung kepada tenaga kesehatan di fasyankes
4. Pemanfaatan teknologi yang optimal

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 29. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	91	100	109,89%	Sangat Baik	

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
- Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 - Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kadaluarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan : **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan: $(A1 + A2) / 2$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$.

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman *sampling*

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan:

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan:

$((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh: % B3 = Total pembilang $(B1+B2+B3)$ / Total penyebut $(B1+B2+B3) \times 100\%$

Berdasarkan hasil pemutakhiran terhadap manual IKU pada bulan Agustus, perubahan pada indikator persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah Penambahan informasi terkait Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan *sampling*.

Merujuk pada nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025, bahwa perhitungan realisasi kinerja menggunakan manual IKU lama digunakan pada bulan Januari sampai dengan Juli, selanjutnya mulai bulan Agustus perhitungan sudah menggunakan manual IKU baru.

Pada tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dengan target 91%. Capaian yang diperoleh sebesar 109,89% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, menginstruksikan bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II.

Perhitungan realisasi indikator persentase sampel persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

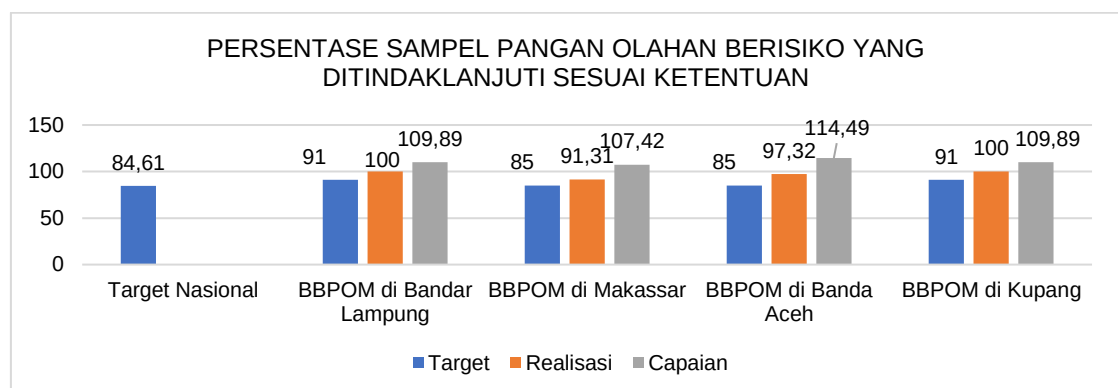
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95	100	105,26% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dibandingkan dengan target periode renstra sebesar 95% sehingga capaian kinerja sebesar 105,26%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa

keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 84,61%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 91% dan berhasil merealisasikan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 109,89%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 91,31% dan capaian kinerja sebesar 107,42%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 85% mampu merealisasikan sebesar 97,32%, sehingga mencapai 114,49% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 91% dan mencatatkan realisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja yaitu 109,89%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Kupang, diikuti oleh BBPOM di Banda Aceh, lalu BBPOM di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Selama tahun 2025, sebanyak 379 sampel pangan olahan telah disampling dan diperiksa sesuai ketentuan. Dari 379 sampel tersebut, 378 sampel telah diuji sesuai ketentuan dan 1 sampel Tanpa Izin Edar (TIE). Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan tercapainya target kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai Pedoman Sampling, yaitu batas waktu pengujian pangan olahan tidak diatur, namun demikian pelaporan hasil pengujian ditetapkan maksimal setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini memberikan kesempatan kepada penguji untuk menyelesaikan pengujian dengan lebih leluasa, utamanya untuk penguji laboratorium Mikrobiologi yang melakukan pengujian pada semua komoditi.
2. Target awal pangan olahan yang diawasi oleh BBPOM di Bandar Lampung adalah 404 sampel, namun seiring dengan bertambahnya

sampel kasus kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB-KP), maka dilakukan penurunan target sampel pangan olahan yang diawasi menjadi 379 sampel. enurunan target sampel pangan olahan ini telah mendapat persetujuan dari unit pengampu.

3. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara BBPOM di Bandar Lampung dengan anggota Region Pekanbaru mendukung selesainya pengujian antar balai regional sesuai pedoman, di antaranya melalui *sharing* reagen, dan penggunaan fasilitas laboratorium di BBPOM Palembang.
4. Dukungan kebijakan dan komitmen manajemen dalam mendorong pencapaian target kinerja, termasuk melalui monitoring dan evaluasi berkala, berkontribusi pada konsistensi pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan. Selain itu, sistem regionalisasi laboratorium memungkinkan meningkatnya optimalisasi kapasitas pengujian dan pemerataan beban kerja. Sinergi antara penguatan manajerial dan pengaturan jejaring laboratorium regional mendukung kelancaran proses sampling dan pengujian secara lebih terkoordinasi dan efisien.
5. Pemanfaatan kesempatan perubahan target pada TW 3 tahun 2025 dari 85% menjadi 91%, dengan mempertimbangkan realisasi pada TW sebelumnya, sehingga capaian pada akhir tahun diprediksi tetap dapat disimpulkan.

f. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 32. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Sampel Pangan Olahan	Pengujian sampel regional	Melakukan koordinasi dengan balai penguji agar	Membangun komunikasi intensif dengan balai	Setiap TW tahun 2026	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati time line yang telah

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Berisiko yang Ditindakan juti Sesuai Ketentuan	tidak selesai tepat waktu	mempercepat penyelesaian pengujian	penguji terkait progress pengujian sampel				ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang menunjang keberhasilan tercapainya target kinerja, antara lain:

1. Dalam pelaksanaan pengujian, petugas menerapkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta *timeline* yang telah disepakati.
2. Petugas inspeksi telah memanfaatkan Modul *E-learning* Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas sampling. Petugas sampling wajib lulus dan memperoleh E-sertifikat sebelum melaksanakan tugas sesuai dengan komoditi yang diawasi.
3. Laboratorium pengujian melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi personel penguji melalui *In House Training* dengan narasumber dari PPPOMN ataupun pelatihan secara daring yang menunjang kegiatan pengujian sampel pangan olahan. Semua program peningkatan kompetensi teknis yang direncanakan untuk tahun 2025 telah selesai dilaksanakan pada TW 3.
4. Petugas telah mengikuti sosialisasi pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Surat Keputusan Kepala badan POM nomor 95 tahun 2025 tentang Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 33. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	100	100	100%	Baik	

1. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
2. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 - a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
 - b. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh: % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3)

Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

- Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung adalah 100% dengan target 100%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Perhitungan realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

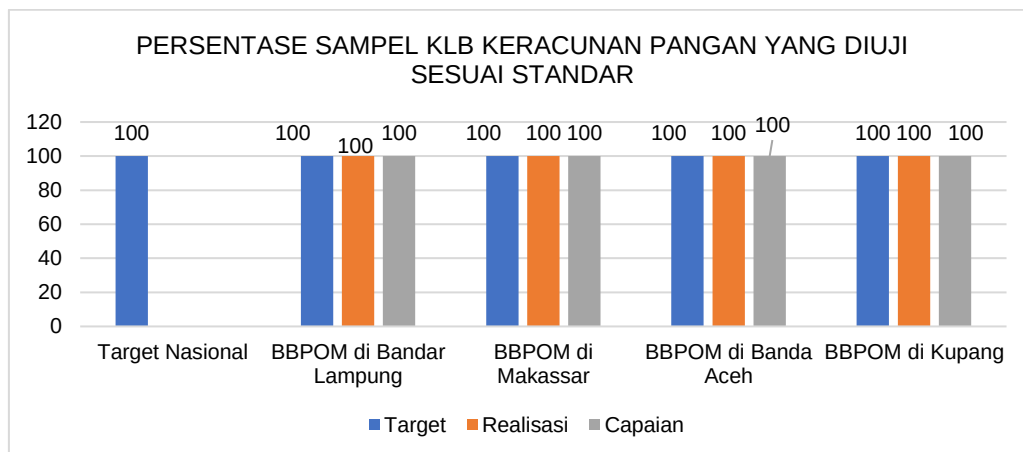
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah 100% dibandingkan dengan target periode renstra sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain Yang Sejenis

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu 100%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 100% dan berhasil merealisasikan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 100% mampu merealisasikan sebesar 100%, sehingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 100% dan mencatatkan realisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah mencapai target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi keempat UPT seluruhnya sama yaitu 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sepanjang tahun 2025 telah diuji sebanyak 74 sampel KLB-KP dengan rincian: 68 sampel KLB-KP yang berasal dari program MBG dan 6 sampel yang berasal dari masyarakat umum. Sampel tersebut berasal dari wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung dan BPOM di Tulang Bawang. Hasil uji terhadap sampel KLB-KP tersebut terkonfirmasi mengandung parameter uji terduga

penyebab keracunan sesuai hasil investigasi. Secara umum, penyebab keracunan terkonfirmasi disebabkan oleh faktor mikrobiologis. Pengujian terhadap sampel KLB-KP diprioritaskan sehingga hasil uji dapat segera diperoleh dan dilaporkan, serta tindak lanjut atas KLB-KP dapat segera ditetapkan.

f. Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 36. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung	Sampel KLB tidak representatif untuk diuji	Berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan sampling dengan memperhatikan kondisi sampel dan jumlahnya	1.Koordinasi dengan pihak terkait (<i>vokal point</i>) di lokasi kejadian agar lebih cepat dalam melakukan investigasi kejadian KLB dan pelaporan 2.Melakukan pengujian dengan sampel yang ada dengan tetap menerapkan JMHP	TW 2 Tahun 2026	Y	O-25	Sampel uji untuk KLB tidak representatif untuk uji

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Telah dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) BBPOM di Bandar Lampung dengan anggota yang berasal dari berbagai fungsi sehingga meningkatkan koordinasi internal dan penanganan KLB-KP.
2. Petugas TGC kompeten dan telah mengikuti bimbingan teknis penanganan KLB-KP yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan peredaran Pangan pada 9-11 Juli 2025.
3. BBPOM di Bandar Lampung telah tergabung dalam TGC kota Bandar Lampung dan satuan tugas penyelenggara MBG Provinsi Lampung sehingga koordinasi dan pelaksanaan tugas untuk penanganan KLB-KP dalam wilayah Bandar Lampung menjadi lebih mudah.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	85	98,29	115,64%	Tidak dapat disimpulkan	●

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.
- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel

UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)/ jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Note: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan (sebelum tanggal 15 dibulan berikutnya)

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

Pada tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,29% dari target 85%. Capaian yang diperoleh sebesar 115,64% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan pada awal tahun lebih rendah dari realisasi. Pelaksanaan sampling, pengujian dan tindak lanjut sampel PIRT telah dilaksanakan tepat waktu sehingga mendukung kelancaran tercapainya target kinerja. Seluruh kegiatan sampling dan pengujian telah selesai pada TW II dan tindak lanjut sampel TMS terpenuhi seluruhnya pada bulan Juli 2026. Seluruh realisasi dan capaian telah dilaporkan dengan target 85% dan belum sempat melakukan penyesuaian target pada TW III.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tercantum instruksi bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap

realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Pada indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan setelah dihitung menggunakan manual IKU yang lama dan baru tidak terdapat perubahan realisasi kinerja dan seluruh sampel telah selesai pada triwulan II. Perhitungan realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

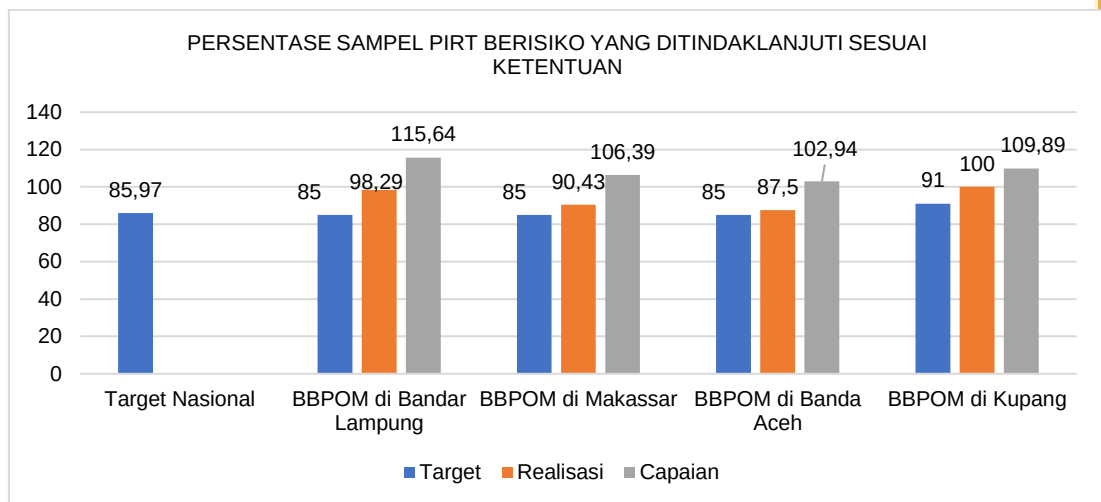
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	98,29	103,46% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,29% dibandingkan dengan target periode renstra sebesar 95% sehingga capaiannya adalah 103,46%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 85,97%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 85% dan berhasil merealisasikan sebesar 98,29%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 115,64%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 90,43% dan capaian kinerja sebesar 106,39%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 85% mampu merealisasikan sebesar 87,5%, sehingga mencapai 102,94% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 91% dan mencatatkan realisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja yaitu 109,89%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Kupang, diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Makassar, dan BBPOM di Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Seluruh target sampel PIRT tahun 2025 telah selesai disampling dan diuji pada TW II tahun 2025. Pelaksanaan pengujian telah sesuai dengan parameter uji kritis sesuai pedoman, begitu juga dengan pengambilan kesimpulan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari 35 sampel yang diperiksa dan diuji diperoleh 26 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 9 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel yang TMS antara lain 3 sampel TMS Angka Kapang Khamir, 1 sampel TMS pemerian, 1 sampel TMS kadar cemaran logan As, 1 sampel TMS kadar pewarna dan kadar siklamat, 1 sampel TMS siklamat, 1 sampel TMS kadar pengawet sorbat, dan 1 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka *Enterobacteriaceae*. Terhadap sampel TMS telah dilakukan tindak lanjut berupa dikirimkannya surat dinas terkait tindak lanjut hasil pengawasan kepada pemerintah daerah sesuai lokasi sarana produksi sampel PIRT tersebut. Tindak lanjut atas sampel PIRT yang TMS telah diselesaikan pada bulan Juli 2025.

Capaian persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 115,64%, termasuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan pada awal tahun lebih rendah dari realisasi. Pelaksanaan sampling, pengujian dan tindak lanjut sampel PIRT telah dilaksanakan tepat waktu sehingga mendukung kelancaran tercapainya target kinerja.

f. Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 40. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tindak lanjut atas sampel TMS tidak tepat waktu	Melakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut atas sampel TMS	Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut sampel TMS secara berkala	Setiap TW tahun 2026	T	-	Sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak ditindaklanjuti tepat waktu

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

1. Penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta timeline yang telah disepakati.
2. Pemanfaatan Modul *E-learning* Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas sampling. Petugas sampling wajib lulus dan memperoleh *E-Sertifikat* sebelum melaksanakan tugas sampling sesuai dengan komoditi yang diawasi.
3. Telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 95 tahun 2025 tentang Pedoman *Sampling* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	79	87,07	110,22%	Tidak Dapat Disimpulkan	

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

f. Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha** $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

B. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor** $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n.

Contoh: $\%B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 87,07% dengan target 79%. Capaian yang diperoleh sebesar 110,22% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Perhitungan indikator ini merupakan gabungan dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor. Capaian rekomendasi yang ditindak oleh pelaku usaha sebesar 74,15% dan capaian rekomendasi yang ditindak lanjut oleh lintas sektor sebesar 100%. Sehingga capaian indikator ini sebesar 87,07%. Target capaian indikator berdasarkan perjanjian

kinerja tahun 2025 sebesar 79%. Hal ini menyebabkan capaian indikator kinerja melebihi 110% sehingga tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Periode	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2021	64	41,98	65,59%
Tahun 2022	71	74,85	105,42%
Tahun 2023	71	78,03	109,90%
Tahun 2024	78,10	71,44	91,47%
Tahun 2025	79	87,07	110,22%

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder sebesar 110,22%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian ini meningkat dengan realisasi dan capaian kinerja tertinggi dari tahun 2020 hingga 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

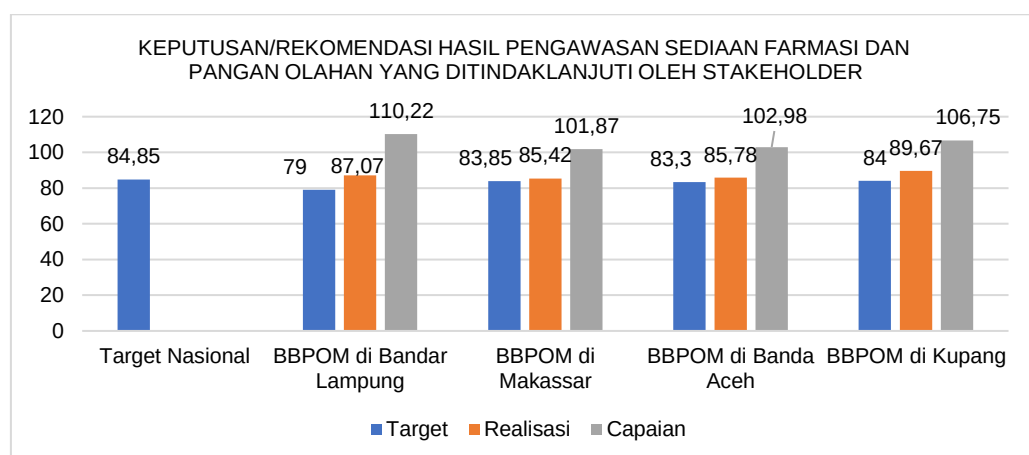
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83	87,07	104,90% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 87,07% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 83% sehingga capaiannya adalah 104,90%. Hal ini menandakan bahwa target periode Renstra terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti

oleh Stakeholder”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 84,85%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 79% dan berhasil merealisasikan sebesar 87,07%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 110,22%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 83,85% dengan realisasi sebesar 85,42% dan capaian kinerja sebesar 101,87%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 83,3% mampu merealisasikan sebesar 85,78%, sehingga mencapai 102,98% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 84% dan mencatatkan realisasi sebesar 89,67%, dengan capaian kinerja yaitu 106,75%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Kupang, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM Banda Aceh dan BBPOM di Makassar.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh dua hal tindak lanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha dan lintas sektor baik pemerintah daerah, organisasi profesi maupun institusi lain yang mempunyai kewenangan memberikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Penyebab keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

1. Koordinasi yang terjalin secara baik antara BBPOM di Bandar Lampung dengan lintas sektor terkait yaitu pemerintah daerah.
2. Salah satu hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah adalah sarana produksi PIRT. Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan PIRT telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebanyak 100 %.
3. Kesadaran pelaku usaha yang semakin tinggi dalam mengirimkan perbaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

4. BBPOM di Bandar Lampung memiliki aplikasi Klinik CAPA yang merupakan media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pembuatan CAPA.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 45. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pelaku usaha produksi pangan yang berskala UMKM belum seluruhnya mengirimkan perbaikan hasil temuan/CAPA	Monitoring dan Pemantaun CAPA secara berkala	Pemantaun CAPA melalui email dan link IKU Inspeksi	TW 1 Tahun 2026	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Koordinasi BBPOM di Bandar Lampung dengan pemerintah daerah dalam program pengawasan obat dan makanan.
2. Tersedia anggaran DAK non fisik obat dan makanan dari BPOM ke pemerintah daerah yang digunakan untuk program pengawasan obat dan makanan.

3. Sosialisasi pembuatan CAPA dan aplikasi klinik CAPA kepada pelaku usaha yang diadakan pada 19 Mei 2025 secara *zoom meeting*.
4. BBPOM di Bandar Lampung memiliki aplikasi Klinik CAPA yang merupakan media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pembuatan CAPA.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	90,5	96,88	107,05	Sangat Baik	

- a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

- c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan / Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan sesuai renlak / jumlah target sesuai renlak) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

3) Kesesuaian format laporan inspeksi

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Keterangan:

Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi. Target tahunan B12 minimal sejumlah target RO tahun berjalan.

% Sarprod Obat Bahan Alam = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa)X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Suplemen Kesehatan = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Pada tahun 2025, realisasi indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,88% dengan target 90,5%. Capaian yang diperoleh sebesar 107,05% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perhitungan realisasi indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

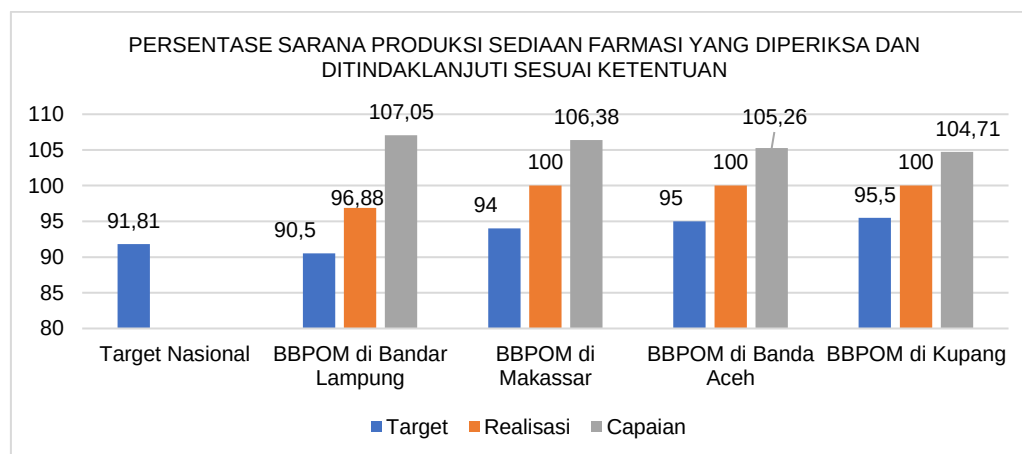
Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	96,88	100,39% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,88% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 96,5% sehingga capaiannya adalah 100,39%. Hal ini menandakan bahwa target periode Renstra terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 91,81%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 90,5% dan berhasil merealisasikan sebesar 96,88%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 107,05%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 94% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 106,38%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 95% mampu merealisasikan sebesar 100%, sehingga mencapai 105,26% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 95,5% dan mencatatkan realisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja yaitu 104,71%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Makassar, BBPOM di Banda Aceh, dan BBPOM di Kupang dengan nilai yang sama yaitu 100% kemudian diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sarana produksi Sediaan Farmasi telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2025, dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana produksi kosmetik di mana 2 di antaranya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dengan 1 sarana mendapatkan Sanksi berupa Pemberhentian Sementara Kegiatan (PSK). Untuk pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam dilakukan terhadap 4 sarana, dimana 1 di antaranya tutup.

Keberhasilan indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh kepatuhan dalam pelaksanaan:

1. Perencanaan pengawasan yang berbasis risiko

2. Pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana yang dilakukan oleh personil yang mempunyai kualifikasi Inspektur kosmetik dan inspektur OBA.
3. Sebagai acuan dalam inspeksi penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik, sedangkan untuk inspeksi penerapan cara pembuatan obat bahan alam mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap
4. Pelaksanaan pengawasan sarana produksi kosmetik mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.4.12.20.1141 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan
5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika.
6. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan melalui SIPT tepat waktu sesuai *timeline*.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 49. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monev surat tindak lanjut CAPA dan status pemeriksaan sarana kurang optimal karena data tersebar di petugas	Melakukan pemantauan surat tindak lanjut, CAPA dan IKU secara realtime melalui aplikasi internal	Pembuatan kertas kertas internal dan monev status CAPA	Desember 2026	Ya	O-18	Data pengawasan terkait surat tindak lanjut dan CAPA tidak tersedia real time

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Peningkatan kompetensi dengan mengikutkan satu orang petugas dalam pelatihan Inspektur Obat Bahan Alam pada 4 Agustus s.d 5 September 2025 dan dua orang petugas dalam pelatihan Inspektur Kosmetik yang diselenggarakan pada 8 September s.d. 13 Oktober 2025 oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan.
- Untuk menjaga kompetensi inspektur obat dilakukan kegiatan pendampingan inspeksi bersama Petugas Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor pada 18 s.d. 20 November 2025 ke PT Bromelain Enzyme sebagai Produsen bahan baku Obat.
- Adanya sistem pengawasan berjenjang dan berlapis pada saat pelaksanaan inspeksi pembuatan pelaporan dan tindak lanjut.
- Adanya sistem dokumentasi dan pengendalian rekaman yang baik sehingga sangat berguna untuk monitoring dan evaluasi kegiatan

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	91	99,72	109,58%	Sangat Baik	

- Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - Ketepatan waktu tindak lanjut
 - Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
 - b. kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka grading sebagai C (TMK).

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Pada tahun 2025, realisasi indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,72% dengan

target 91%. Capaian yang diperoleh sebesar 109,58% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, realisasi indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

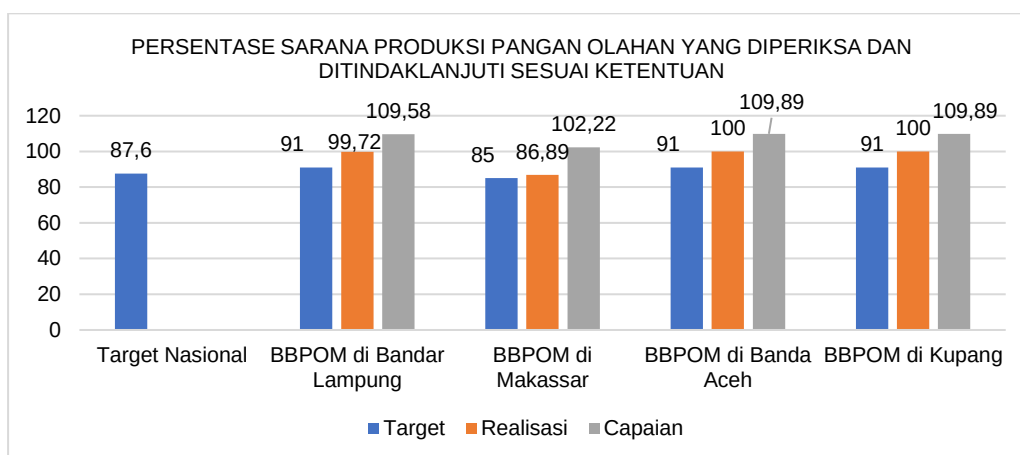
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,72	104,97% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,72% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 95% sehingga capaiannya adalah 104,97%. Hal ini menandakan bahwa target periode Renstra terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa tiga UPT yaitu BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Kupang menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 87,6%. Sedangkan BBPOM di Makassar belum mencapai target dengan realisasi kinerja 86,89%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 91% dan berhasil merealisasikan sebesar 99,72%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 109,58%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 86,89% dan capaian kinerja sebesar 102,22%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 91% mampu merealisasikan sebesar 100%, sehingga mencapai 109,89% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 91% dan mencatatkan realisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja yaitu 109,89%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Kupang dan BPOM di Banda Aceh dengan realisasi kinerja 100%, diikuti oleh BBPOM

di Bandar Lampung, dan kemudian BBPOM di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sarana produksi pangan olahan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai ketentuan didukung oleh komitmen internal dan eksternal.

Secara internal ketercapaian IKU ini dipengaruhi oleh

1. Tersedianya *data base* pengawasan dan perencanaan yang berbasis risiko
2. Pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana yang dilakukan oleh personil yang mempunyai kualifikasi Inspektur Pangan.
3. Pelaksanaan inspeksi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/m-ind/per/7/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*) dan peraturan lain.
4. Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan
5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan melalui SIPT tepat waktu sesuai *timeline*.

Secara eksternal hal yang mendukung keberhasilan IKU ini adalah

1. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan Kota/Kabupaten.
2. Adanya Tindak Lanjut oleh pemangku kepentingan terutama dalam pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi PIRT.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 53. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam melakukan pemeriksaan oleh pegawai hasil rotasi/pindahan	1. Melakukan peningkatan kompetensi pengawasan sarana secara <i>e-learning</i> dan pelatihan internal 2. Dilibatkan sebagai observer pada saat melakukan pemeriksaan sarana	1. Mengikutkan petugas dalam pelatihan daring melalui IDEAS 2. Program pelatihan internal dan mentoring	Des 2025	Ya	SDM-06	Kompetensi pegawai hasil rotasi belum memenuhi persyaratan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas dengan diikutkan dalam pelatihan Inspektur Pangan pada tanggal 20 Agustus s. d 18 September 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan dan Pelatihan Penyamaan Persepsi Pengawas Obat dan Makanan dengan mengundang narasumber dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

- Untuk penyamaan persepsi petugas maka dilaksanakan Bimtek CPPOB dan penulisan BAP dan CPPOB-IRT pada bulan September 2025 dengan narasumber Direktorat Pengawasan Pangan Olahan
- Adanya sistem pengawasan berjenjang dan berlapis pada saat pelaksanaan inspeksi pembuatan pelaporan dan tindak lanjut.
- Adanya sistem dokumentasi dan pengendalian rekaman yang baik sehingga sangat berguna untuk monitoring dan evaluasi kegiatan

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	94,5	99,3	105,08%	Sangat Baik	

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat, % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan, % fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak Lanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh

$$UPT = (A/B) \times 100\%$$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = $\{(A/C) + (B/C)\} / 2 \times 100\%$

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa})$

dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) $\times$ 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) $\times$ 100%

C. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) $\times$ 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) $\times$ 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) $\times$ 100%

D. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) $\times$ 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,3% dengan target 94,5%. Capaian yang diperoleh sebesar 105,08% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, realisasi kinerja indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

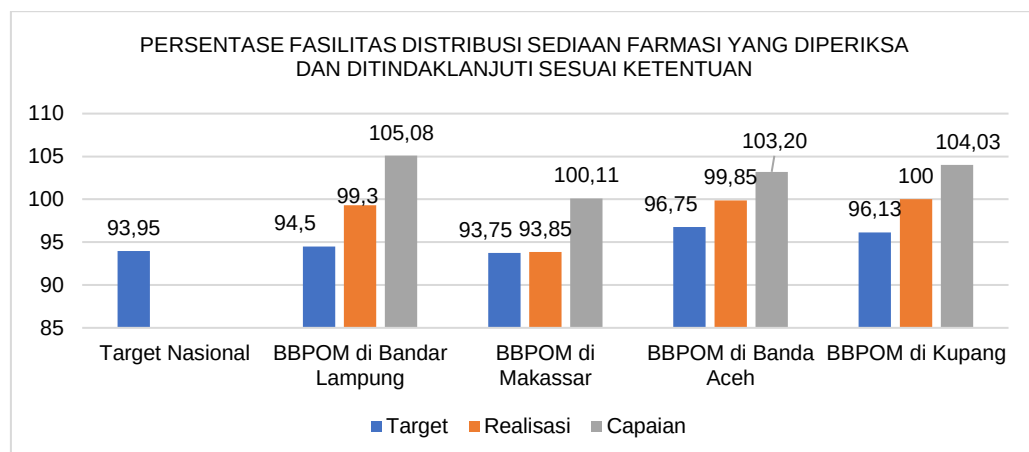
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,5	99,3	100,81% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,3% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 98,5% sehingga capaiannya adalah 100,81%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja periode Renstra terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa tiga UPT yaitu BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Kupang menunjukkan realisasi kinerja telah

melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 93,95%. Sedangkan BBPOM di Makassar tidak mencapai target nasional dengan realisasi kinerja 93,85%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 94,5% dan berhasil merealisasikan sebesar 99,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 105,08%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 93,75% dengan realisasi sebesar 93,85% dan capaian kinerja sebesar 100,11%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 96,75% mampu merealisasikan sebesar 99,85%, sehingga mencapai 103,2% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 96,13% dan mencatatkan realisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja yaitu 104,03%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Kupang, diikuti oleh di Banda Aceh, dan BBPOM di Bandar Lampung, kemudian BBPOM di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap fasilitas distribusi Sediaan Farmasi telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah:

1. Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Pemahaman dan kompetensi petugas terhadap ketentuan yang berlaku sudah baik dan progres capaian dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. BBPOM di Bandar Lampung telah membuat aplikasi monitoring dan evaluasi capaian IKU yang bisa dimonitoring oleh seluruh petugas dan ketua tim kerja.
3. Evaluasi terhadap kesesuaian pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan secara berjenjang dari supervisor, ketua tim dan kepala Balai.

4. Tersedia pedoman pemeriksaan sarana yang diterbitkan oleh unit pengampu.
5. Tersedia data base sarana yang update dan riwayat hasil pemeriksaan sarana yang digunakan dalam menyusun dokumen analisis risiko dalam pemeriksaan sarana.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 57. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana tidak sesuai dengan renlak awal karena adanya relaksasi anggaran	Melakukan penyesuaian renlak sesuai ketersediaan anggaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi TABIKPU N (Catatan Bukti Inspeksi dan Penyimpanan Unik)	Setiap triwulan Tahun 2026	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui Bimbingan Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik dengan narasumber dari Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 2025.
2. Tersedia sistem monitoring dan evaluasi yang dapat di monitoring oleh seluruh petugas dan dilakukan evaluasi secara berjenjang.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 58. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	92	99,32	107,96%	Sangat Baik	

- a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan = $(\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan} / \text{Jumlah Sarana yang Diperiksa}) \times 100\%$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- * Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak}) \times 100\%)$$
$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$
$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,32% dengan target 92%. Capaian yang diperoleh sebesar 107,96% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, realisasi kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

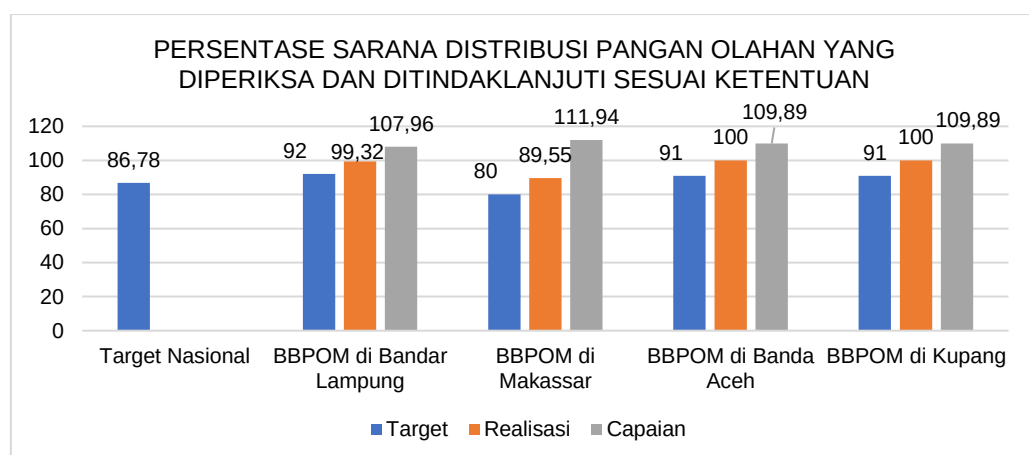
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	99,32	103,46% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,32% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 96% sehingga capaiannya adalah 103,46%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja periode akhir Renstra terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 86,78%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 92% dan berhasil merealisasikan sebesar 99,32%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 107,96%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 80% dengan realisasi sebesar 89,55% dan capaian kinerja sebesar 111,94%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 91% mampu merealisasikan sebesar 100%, sehingga mencapai 109,89% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 91% dan mencatatkan realisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja yaitu 109,89%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Kupang dengan nilai realisasi 100%, diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung, kemudian BBPOM di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi Pangan Olahan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah:

1. Pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Pemahaman dan kompetensi petugas terhadap ketentuan yang berlaku sudah baik dan progres capaian dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. BBPOM di Bandar Lampung telah membuat aplikasi monitoring dan evaluasi capaian IKU yang bisa dimonitoring oleh seluruh petugas dan ketua tim kerja.

3. Evaluasi terhadap kesesuaian pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan secara berjenjang dari supervisor, ketua tim dan kepala Balai.
4. Tersedia pedoman pemeriksaan sarana yang diterbitkan oleh unit pengampu.
5. Tersedia data base sarana dan riwayat hasil pemeriksaan yang digunakan dalam membuat analisis risiko pemeriksaan sarana.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 61. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana tidak sesuai dengan renlak awal karena adanya relaksasi anggaran	Melakukan penyesuaian renlak sesuai ketersediaan anggaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi TABIKPUN (Catatan Bukti Inspeksi dan Penyimpanan Unik)	Setiap triwulan Tahun 2026	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui Bimbingan Teknis Pedoman Pemeriksaan dan Tindak Lanjut serta Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dengan narasumber dari Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan BPOM RI yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 September 2025.
2. Peningkatan kompetensi petugas dengan diikutkan dalam pelatihan Inspektur Pangan pada tanggal 20 Agustus s. d 18 September 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan dan Pelatihan Penyamaan Persepsi Pengawas Obat dan Makanan dengan mengundang narasumber dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.
3. Tersedia sistem monitoring dan evaluasi yang dapat di monitoring oleh seluruh petugas dan dilakukan evaluasi secara berjenjang.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	93,73	99,99	106,68%	Sangat Baik	

- a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau

- perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
 - e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
 - f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
 - g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan= $(a+b)/2$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi/Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

Keterangan: untuk poin a dan b, nilai maksimal iklan yang diawasi adalah 100%.

A. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

B. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$
 - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$
 - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

Keterangan: perhitungan proporsi media iklan pada B1-B11 disesuaikan dengan jenis media yang dilakukan pemeriksaan di bulan tersebut secara kumulatif (dengan mengakumulasikan media iklan dari bulan sebelumnya). Sebagai contoh apabila pada B1 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (media A & B), maka proporsi yang dihitung di B1 adalah terhadap 2 media tersebut. Kemudian apabila di B2 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (C & D), maka proporsi media yang dihitung pada realisasi B2 adalah 4 media (A,B,C,D yang merupakan akumulasi B1-B2).

- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Pada tahun 2025, realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 99,99% dengan target 93,73%. Capaian yang diperoleh sebesar 106,68% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025 realisasi kinerja indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

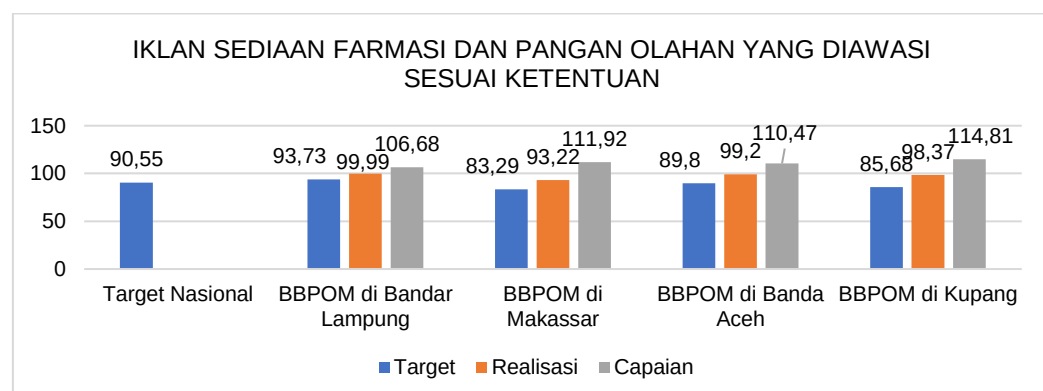
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99	99,99	101% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 99,99% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 99% sehingga capaiannya adalah 101%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja akhir periode Renstra terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain Yang Sejenis

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 90,55%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 93,73% dan berhasil merealisasikan sebesar 99,99%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 106,68%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 83,29% dengan realisasi sebesar 93,22% dan capaian kinerja sebesar 111,92%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 89,8% mampu merealisasikan sebesar 99,2%, sehingga mencapai 110,47% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 85,68% dan mencatatkan realisasi sebesar 98,37%, dengan capaian kinerja yaitu 114,81%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Bandar Lampung, diikuti oleh BBPOM di Banda Aceh, kemudian BBPOM di Kupang, dan yang terakhir BBPOM di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan didukung oleh:

1. Perencanaan pengawasan iklan yang sesuai target jumlah, jenis media serta lokus
2. Pelaksanaan pengawasan iklan yang dilakukan oleh personil yang terlatih
3. Pengawasan iklan obat mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat

4. Pengawasan iklan pangan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan
5. Pengawasan iklan kosmetik Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik
6. Pengawasan iklan OBA, SK dan Kuasi mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan
7. Tersedianya SOP Makro dan Mikro dalam pengawasan iklan obat dan makanan
8. Tersedianya fasilitas pengawasan diantaranya kamera, alat perekam, dan media televisi serta internet
9. Monitoring dan evaluasi dari pusat dan secara internal
10. Pencatatan hasil pengawasan iklan secara baik
11. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan melalui SIPT akurat dan tepat waktu sesuai *timeline*
12. Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan yang tepat
13. Adanya kerjasama/MoU dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 65. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	<i>Timeline</i>	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase iklan sediaan	Adanya perbedaan hasil	Monev perbedaan hasil evaluasi	Pemantauan hasil monev	Desember 2025	Ya	SDM-31	Perbedaan kesimpulan akhir hasil

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	pengawasan dengan evaluator pusat	pusat terhadap pengawasan iklan untuk meminimalkan kejadian berulang	pusat oleh ketua tim				pengawasan iklan antara pusat dengan UPT

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya bimtek pengawasan iklan obat pada 31 Juni 2025 dengan narasumber dari Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA.
2. Evaluasi dan monitoring kegiatan setiap bulan secara internal
3. Monitoring dan evaluasi iklan dari unit pengampu pusat
4. Adanya sistem pengawasan berjenjang dan berlapis pada saat pelaporan pengawasan iklan
5. Adanya sistem dokumentasi dan pengendalian rekaman yang baik sehingga sangat berguna untuk monitoring dan evaluasi kegiatan

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 66. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	91	92,2	101,32%	Sangat Baik	

- a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan

penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $(A+B)/2$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025, bahwa perhitungan realisasi kinerja indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar dimulai dari bulan Agustus.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar adalah 92,2% dengan target 91%. Capaian yang diperoleh sebesar 101,32% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

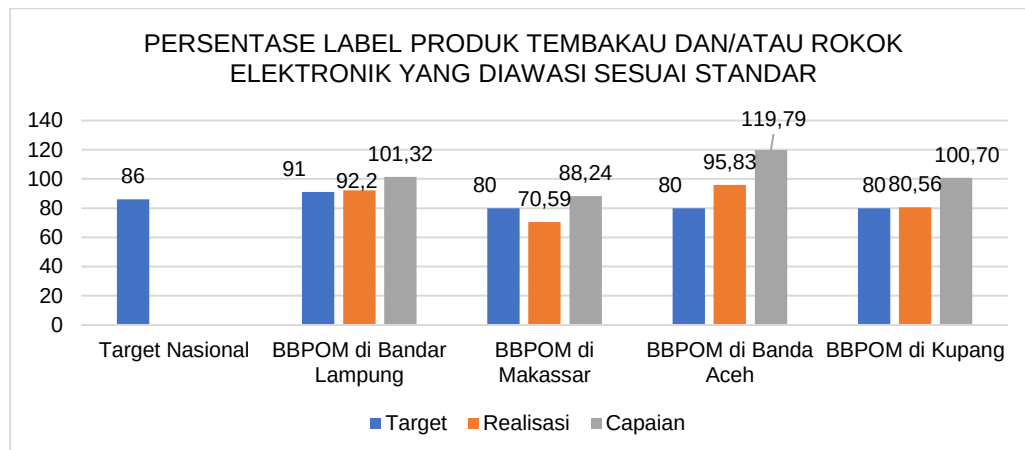
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	95	92,2	97,05% 	Akan Tercapai

Realisasi kinerja indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar adalah 92,2% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 95% sehingga capaiannya adalah 97,05%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja akhir periode Renstra terproyeksi akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain Yang Sejenis

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar”, dapat disampaikan bahwa target nasional yang ditetapkan adalah 86% dan UPT yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Banda Aceh. Sedangkan realisasi kinerja BBPOM di Makassar dan BBPOM di Kupang tidak mencapai target nasional.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 91% dan berhasil merealisasikan sebesar 92,2%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,32%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 80% dengan realisasi sebesar 70,59% dan capaian kinerja sebesar 88,24%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 80% mampu merealisasikan sebesar 95,83%, sehingga mencapai 119,79% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 80% dan mencatatkan realisasi sebesar 80,56%, dengan capaian kinerja yaitu 100,70%.

Berdasarkan data tersebut, tiga UPT yaitu BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banda Aceh, dan BBPOM di Kupang telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan, terdapat satu UPT yang tidak mencapai target yaitu

BBPOM di Makassar. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Banda Aceh, diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung, lalu BBPOM di Kupang, kemudian BBPOM di Makassar.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan indikator Persentase Label produk tembakau dan atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar didukung oleh:

1. Tersedia tenaga pengawas yang kompeten
2. Tersedianya sampel produk tembakau dan atau rokok elektronik yang akan disampling di pasaran
3. Perencanaan dan pelaksanaan yang baik untuk pengawasan Label produk tembakau dan atau rokok elektronik
4. Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur pengawasan tembakau dan rokok elektronik, Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2025: Menetapkan rokok elektronik sebagai zat adiktif dan mengatur tindak lanjut pengawasannya.
5. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan melalui SIPT tepat waktu sesuai *timeline*.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 69. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Label produk tembakau	Produk yang dibeli sudah pernah dilakukan	Pembuatan data base pengawasan rokok	Pembuatan data base pengawasan rokok	TW III tahun 2025	Ya	S-36	Terjadi pengulangan merek produk

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	pelaporan pengawasan sehingga potensi duplikasi		sehingga memudahkan petugas dalam melaksanakan pengawasan				tembakau/ rokok elektronik pada tahun yang sama saat sampling penandaan produk tembakau/ rokok elektrik

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Perencanaan pengawasan yang baik
2. Sampling produk tembakau dan atau rokok elektronik sesuai perencanaan
3. Pelaksanaan pengawasan label sesuai ketentuan
4. Pelaporan dan penginputan SIPT secara akurat dan tepat waktu
5. Adanya sistem dokumentasi dan pengendalian rekaman yang baik sehingga sangat berguna untuk monitoring dan evaluasi kegiatan

13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah BBPOM di Bandar Lampung

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 70. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	100	106,14	106,14%	Sangat Baik	

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan dan formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan **jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan** dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan bimbingan teknis** kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.**

- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan advokasi** dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.
- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan **Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter**.

Formula: Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT =
 $25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar Lampung adalah 106,14% dengan target 100%. Capaian yang diperoleh sebesar 106,14% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar Lampung merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

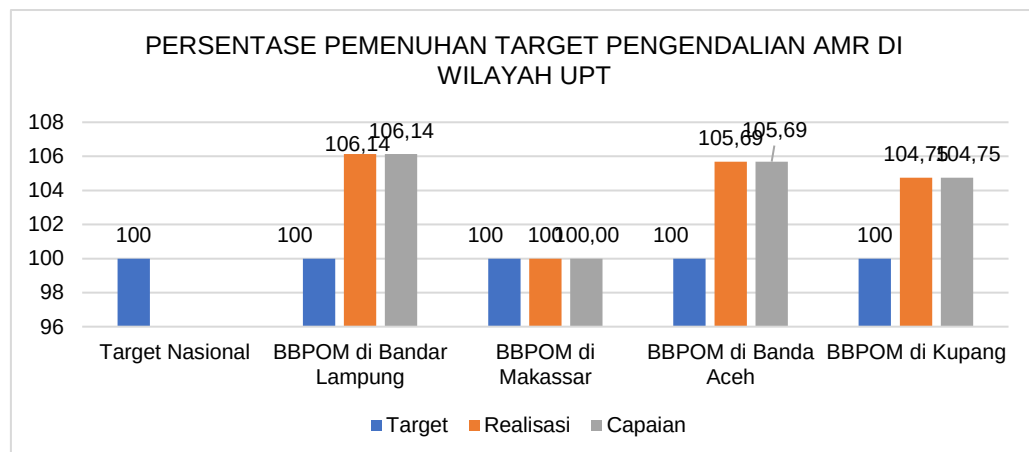
Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar	100	106,14	106,14% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT adalah 106,14% dibandingkan dengan target periode Renstra sebesar 100% sehingga capaiannya adalah 106,14%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja akhir periode Renstra terproyeksi tercapai/melampaui.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain Yang Sejenis

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu 100%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 100% dan berhasil merealisasikan sebesar 106,14%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 106,14%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 100% mampu merealisasikan sebesar 105,69%, sehingga mencapai 105,69% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 100% dan mencatatkan realisasi sebesar 104,75%, dengan capaian kinerja yaitu 104,75%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Capaian tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Bandar Lampung, diikuti oleh BBPOM di Banda Aceh lalu kemudian BBPOM di Kupang, dan yang terakhir BBPOM di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian AMR di wilayah UPT telah dilaksanakan secara efektif.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Terdapat 4 sub kegiatan dalam pencapaian IKU ini. Rincian capaian dari masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sub-kegiatan penggunaan *tools* antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan, memberikan sumbangan capaian yang paling tinggi dimana target capaian kesesuaian penggunaan dan pengisian adalah 80% dan terealisasi 99,31% sehingga persentase realisasi terhadap target pada komponen tersebut adalah 124,14%. Keberhasilan capaian ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan ke sarana Apotek sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan,
 - b. Petugas telah rutin melakukan pengisian *tools* pengawasan AMR pada saat pemeriksaan ke Sarana Pelayanan Kefarmasian.

- c. Adanya sistem pengisian hasil pengawasan di SIPT yang mengharuskan petugas mengisi data-data terkait AMR agar proses input SIPT bisa terkirim ke Supervisor.
2. Terselenggaranya Bimtek AMR sebanyak 1 kali pada 7 Agustus 2025 sesuai target yang telah ditetapkan yakni 1 kali dalam setahun. Bimtek diselenggarakan secara luring berkolaborasi dengan PT Anugerah Antar Medika. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Apoteker Penanggung Jawab Apotek berjumlah 60 orang (target yang ditetapkan oleh pusat adalah 30 peserta per kegiatan Bimtek). Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini karena adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara BBPOM di Bandar Lampung dengan stakeholder, dalam hal ini PBF.
 3. Target kegiatan publikasi adalah 2 kali dalam setahun yang dibagi dalam 2 periode yakni 1 kali di TW 3 dan 1 kali di TW 4. Telah dilakukan 2 kali publikasi dengan materi publikasi Hasil Pengawasan AMR Tahun 2024 dan Hasil Pengawasan AMR Tahun 2025 serta Informasi terkait pengendalian AMR. Publikasi dilakukan pada tanggal 29 September 2025 dan 31 Desember 2025 pada media publikasi Instagram, TikTok, dan Facebook. Keberhasilan capaian ini karena dukungan data dari Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP selaku pengampu IKU di pusat serta petugas/SDM di BBPOM di Bandar Lampung dengan kompetensi dalam mengolah data, membuat materi publikasi, serta berkoordinasi dengan tim media sosial sehingga publikasi dapat terlaksana dengan tepat waktu.
 4. Kegiatan Advokasi kepada lintas sektor dengan target pelaksanaan 1 kali dalam setahun terlaksana pada tanggal 24 November 2025. Kegiatan yang dilakukan secara *hybrid* ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, OPD Terkait, hingga organisasi profesi seperti IDI, IAI, IBI, dan PDHI. Salah satu keluaran dari kegiatan ini adalah penandatanganan komitmen dari perwakilan BBPOM di Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dan organisasi profesi terkait dalam pengendalian AMR di provinsi Lampung. Kedepannya diharapkan adanya

bentuk komitmen yang lebih nyata dari Lintas Sektor terutama Pemerintah Daerah dalam pengendalian antimikroba seperti terbitnya Surat Edaran.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 73. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Belum ada surat edaran pengendalian AMR sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan surat edaran pengendalian AMR	1. Membuat surat permohonan pengendalian AMR kepada pemerintah daerah. 2. Monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan surat edaran	1. TW 1 Tahun 2026 2. Setiap triwulan tahun 2026	T		Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian AMR

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini didukung oleh terlaksananya:

1. Perencanaan kegiatan dengan baik
2. Pelaksanaan pemeriksaan ke sarana Apotek sesuai dengan target tiap TW yang telah ditetapkan
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik

4. Pengarsipan/dokumentasi kegiatan yang baik
5. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan *stakeholder*

14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandar Lampung Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 74. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	77,2	81	104,92	Sangat Baik	

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

• **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, MakaSKar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

• **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Perhitungan Nilai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai tingkat laboratorium:

- A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 untuk Laboratorium Balai Regional $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 untuk Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi = $(50 \% \times a) + (20 \% \times b) + (20 \% \times c) + (10 \% \times d)$

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 untuk Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota = $(75 \times a) + (15 \% \times b) + (10 \% \times c)$

a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 untuk Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota $(75 \times a) + (15 \% \times b) + (10 \% \times c)$

a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Target dan realisasi UPT nasional diperoleh dari agregasi sesuai tingkat Laboratorium.

= (46 % x Rata-rata Nilai SKL Tingkat 4) + (31 % x Rata-rata Nilai SKL Tingkat 3) + (15% x Rata-rata Nilai SKL Tingkat 2) + (8 % x Rata-rata Nilai SKL Tingkat 1).

Pada tahun 2025, realisasi indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 81 dengan target 77,2. Capaian yang diperoleh sebesar 104,92% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terdapat perbedaan manual indikator antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 sehingga target dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

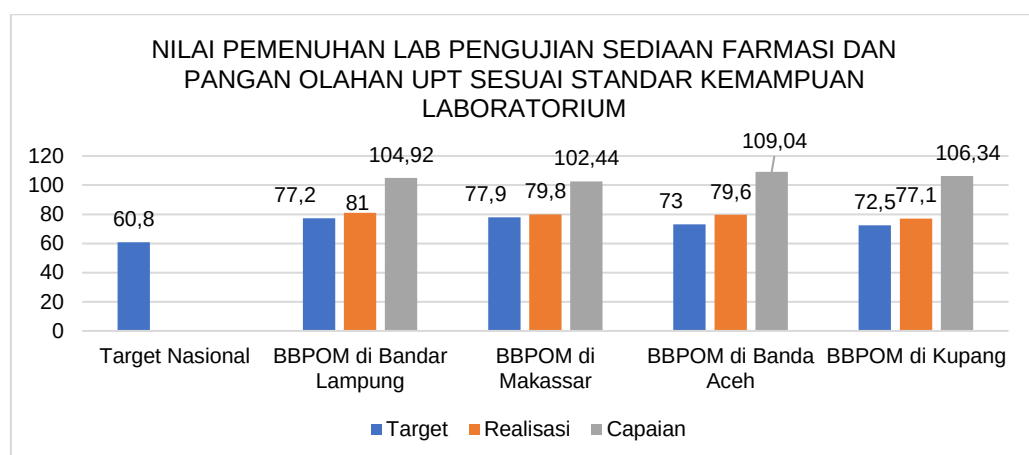
Tabel 75. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	88,1	81	91,94% 	Akan Tercapai

Realisasi kinerja indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 81 dibandingkan dengan target akhir Periode Renstra sebesar 88,1 sehingga capaiannya adalah 91,94%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja akhir periode Renstra terproyeksi akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain Yang Sejenis

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan

Laboratorium”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 60,8.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 77,2 dan berhasil merealisasikan sebesar 81, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104,92%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 77,9 dengan realisasi sebesar 79,8 dan capaian kinerja sebesar 102,44%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 73 mampu merealisasikan sebesar 79,6, sehingga mencapai 109,04% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 72,5 dan mencatatkan realisasi sebesar 77,1, dengan capaian kinerja yaitu 106,34%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Bandar Lampung, diikuti oleh BBPOM di Makassar lalu kemudian BBPOM di Banda Aceh, dan yang terakhir BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tercapainya Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada tahun 2025 didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Rencana target pemenuhan SKL sudah ditetapkan di awal tahun berdasarkan hasil simulasi (exercise) oleh Ketua Tim Pengujian dan masing-masing penyelia laboratorium Kimia dan laboratorium Mikrobiologi untuk komoditi Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, Kosmetik, dan Pangan Olahan dengan mempertimbangkan ketersediaan reagen, baku pembanding, peralatan, kompetensi personil dan beban kerja.
2. Pemantauan secara rutin oleh penyelia dan PIC peralatan terhadap realisasi target yang sudah direncanakan di awal tahun. Jika ada target yang belum terealisasi maka dicari solusi bersama dengan ketua tim. Misalnya, target SRL (Standar Ruang Lingkup) mikrobiologi belum tercapai sampai dengan

TW 2 dikarenakan beban kerja akibat sampel seluruh komoditi yang masuk bersamaan di awal bulan. Kemudian dilakukan koordinasi dengan tim inspeksi untuk mengubah jadwal sampling dibagi menjadi 2 tahap yaitu awal bulan untuk komoditi Obat dan Pangan Olahan, dan pertengahan bulan untuk komoditi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika, sehingga beban sampel tidak menumpuk dan SRL dapat dipenuhi sampai dengan TW 4.

3. Koordinasi dan komunikasi dengan fungsi inspeksi terkait pengadaan sampel dalam rangka pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL).
4. Monitoring dan evaluasi capaian target setiap Triwulan oleh PPPOMN sebagai unit pengampu.
5. Komitmen dari PPK terkait pengadaan alat laboratorium, reagen, media, suku cadang, dan alat penunjang secara tepat waktu untuk mendukung pemenuhan SKL
6. Komitmen dari tim pengujian untuk melaksanakan rencana pemenuhan SKL sebagai bagian dari target kinerja individu

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 77. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	Beberapa peralatan utama dlm kondisi rusak berat sehingga mengurangi nilai capaian	Pengadaan alat AAS 1 unit dan HPLC 2 unit	- Pengadaan alat AAS 2026 sesuai rencana pengadaan - Pengajuan permohonan rekomendasi	TW 2 2026	Y	A-05	Peralatan yang dimiliki belum memenuhi target standar

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	olahan UPT sesuai Standar Kemampu an Laboratori um	Standar Peralatan yaitu: - Alat AAS (1 unit) rusak berat dan tidak dapat diperbaiki karena sparepart diskontinu - Alat HPLC (2 unit) rusak berat karena perlu penggantian <i>mainboard</i>		pengadaan HPLC untuk tahun 2027 ke PPOMN				peralatan dalam SKL

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja meliputi;

1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi personil berupa *In House Training*, Magang, *On The Job Training*, dan Pelatihan baik secara luring maupun daring untuk personil laboratorium kimia dan mikrobiologi sehingga meningkatkan nilai pemenuhan SKL. Personil laboratorium dapat menggunakan alat berteknologi tinggi seperti Gas Chromatography Mass Spectrometry Head Space Sampler (GC-MS-HSS) untuk pengujian dioksan pada kosmetika, GC-MS untuk pengujian Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, dan GC-MS untuk melakukan pengujian Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG-DEG) pada obat, serta KCKT untuk pengujian *Natamisin* dan *Dehidroasetat* pada pangan olahan. Selain belajar mengoperasikan alat juga sekaligus melakukan verifikasi metode analisa.

2. Penggunaan aplikasi DIKOLABORASI (Digitalisasi Tata Kelola Peralatan Laboratorium dan Layanan Kalibrasi) milik Balai Kalibrasi PPPOMN, dimana database alat laboratorium dikelola dan terekam secara online. Dari Aplikasi ini dapat diketahui jenis dan jumlah alat laboratorium yang belum terpenuhi sesuai standar sehingga memudahkan dalam perencanaan pemenuhan SKL.
3. Pelaksanaan verifikasi Metode Analisa dan pengujian rutin sampel sesuai SKL dikerjakan dalam bentuk tim (bukan perorangan) berdampak terhadap semua personil dalam tim tersebut memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 78. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	20	20	100	Baik	

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
- b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah 20% dengan target 20%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

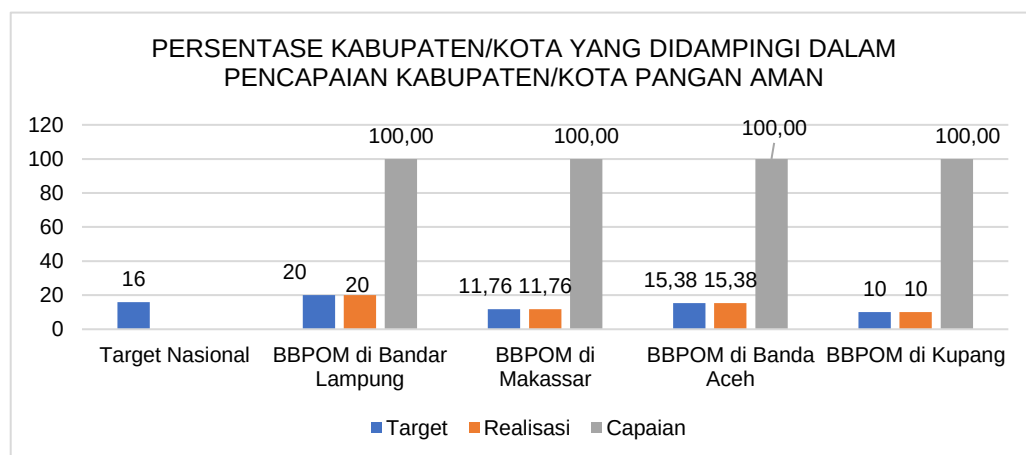
Tabel 79. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	20	20% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah 20%, merupakan breakdown target total Renstra, yaitu pendampingan kepada 10 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Target setiap tahun adalah mendampingi 2 Kabupaten/Kota (20%) sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra akan terpenuhi pendampingan kepada 10 Kabupaten/Kota. Dibutuhkan kinerja yang konsisten dan berkesinambungan, serta upaya maksimal untuk mencapai target. Capaian indikator ini akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya dikarenakan target setiap tahunnya adalah kumulatif sehingga akan tercapai di akhir tahun periode renstra yaitu tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain Yang Sejenis

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman”, dapat disimpulkan bahwa satu UPT yaitu BBPOM di Bandar Lampung menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 16% sedangkan tiga UPT lainnya tidak mencapai target nasional.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 20% dan berhasil merealisasikan sebesar 20%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 11,76% dengan realisasi sebesar 11,76% dan capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 15,38% mampu merealisasikan sebesar 15,38%, sehingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 10% dan mencatatkan realisasi sebesar 10%, dengan capaian kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Bandar Lampung, diikuti oleh BBPOM di Banda Aceh lalu kemudian BBPOM di Makassar, dan yang terakhir BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari dukungan pimpinan dan Unit Pengampu di Badan POM yang memberi dukungan untuk melakukan koordinasi ke Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kota yang menjadi area pengawasan BBPOM di Bandar Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab Lampung Selatan, Kab Pringsewu, Kab Pesawaran, Kab Tanggamus, Kab Lampung Tengah, Kab Lampung Timur, Kab Lampung Barat dan Kab Pesisir Barat. Tahapan kegiatan dimulai dengan melakukan Advokasi dan penyampaian pemberitahuan dari Kemendagri bahwa Badan POM ditunjuk sebagai penanggung jawab program ini bagi Kabupaten Kota. Komunikasi kepada Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung menetapkan 2 lokus intervensi program ini, yaitu di Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu. Setelah tahapan Advokasi, dilakukan koordinasi berkala kepada Tim dari Dinas Ketahanan Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu sebagai penanggung jawab pengisian tools mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Koordinasi kepada Pemerintah Daerah difokuskan untuk mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan data dukung berupa

1. Adanya payung hukum bagi daerah untuk melakukan program
2. Adanya program yang disusun lintas sektor terkait pangan aman di daerah
3. Adanya implementasi dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah terkait program
4. Adanya monitoring dan evaluasi program
5. Adanya inovasi dari Pemerintah Daerah yang memungkinkan program terkait Kabupaten/Kota Pangan Aman lebih mudah terwujud, lebih efisien dan berdampak secara luas.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 81. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Koordinasi lintas sektor kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam pengisian tools mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman	Melakukan koordinasi kepada penanggung jawab program yang ditunjuk di daerah secara berkala setelah Advokasi	Koordinasi untuk pengisian tools mandiri dengan penanggung jawab program di Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam sebulan	Agustus 2026	Y	S-37	Kabupaten/Kota tidak memahami tujuan program dan cara pengisian tools terkait Kab/Kota Pangan Aman yang melibatkan stakeholder lain terkait penilaian produk PSAT, PSAH, PSAI dan lainnya

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Strategi penetapan personil dan lembaga yang menjadi leader/kunci di masing-masing kabupaten/kota sangat mempengaruhi keberhasilan untuk melakukan komunikasi selanjutnya di Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu memetakan timeline tahapan kegiatan KKPA juga merupakan salah satu yang menunjang keberhasilan program diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tahapan program yang dilakukan adalah Advokasi, Implementasi, Monev dan adanya Inovasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Dilakukan koordinasi intensif kepada pihak Bappeda/Bapperida Kabupaten Kota untuk memfasilitasi pertemuan kepada semua OPD terkait dalam pengisian tools mandiri baik secara luring maupun daring. Saat pertemuan disampaikan bahwa pengisian tools mandiri penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi program, monev dan inovasi apa yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan keamanan pangan di daerah.

**SASARAN KEGIATAN 02
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA
PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI**

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 82. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	65	70,27	108,11%	Sangat Baik	

- Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
- Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 70,27% dengan target 65%. Capaian yang diperoleh sebesar 108,11% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang muncul pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

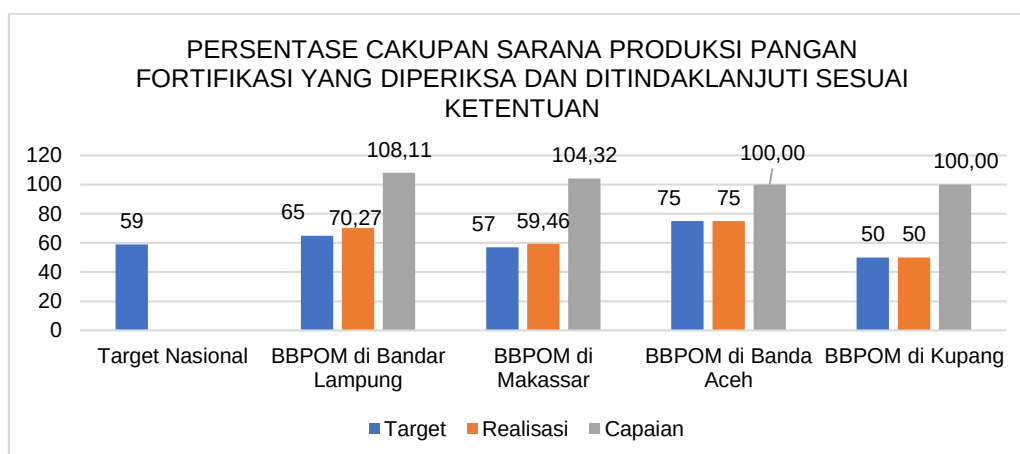
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	70,27	86,75% 	Akan Tercapai

Realisasi kinerja indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 70,27% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 81% sehingga capaiannya adalah 86,75%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi dapat akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain Yang Sejenis

Tabel 84. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 59%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 65% dan berhasil merealisasikan sebesar 70,27%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 108,11%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 57% dengan realisasi sebesar 59,46% dan capaian kinerja sebesar 104,32%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 75% mampu merealisasikan sebesar 75%, sehingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 50% dan mencatatkan realisasi sebesar 50%, dengan capaian kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Banda Aceh, diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung lalu kemudian BBPOM di Makassar, dan yang terakhir BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh:

- Sarana produksi pangan fortifikasi telah memenuhi persyaratan SNI, sesuai regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Garam Konsumsi Beriodium Secara Wajib, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan secara Wajib
- Tindak lanjut yang tepat terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian yang tidak memenuhi syarat
- pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana yang dilakukan oleh personil yang mempunyai kualifikasi Inspektur Pangan.
- Sebagai acuan dalam inspeksi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/m-ind/per/7/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (good Manufacturing Practices) dan peraturan lain.
- pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan
- tindak lanjut hasil pemeriksaan mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak

Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

- pelaporan hasil pengawasan dilakukan melalui SIPT tepat waktu sesuai *timeline*

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 85. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	<i>Timeline</i>	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak sinkron antara rencana inspeksi dengan pengujian	Penyusunan rencana inspeksi bersama rencana pengujian	Rapat perencanaan bersama antara tim inspeksi, tim sampling dan tim pengujian	Triwulan I tahun 2026	Ya	O-17	Rencana inspeksi Tidak sinkron dengan rencana pengujian sampel fortifikasi

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai rencana dan kajian risiko
- 2) Sampling produk pangan fortifikasi sesuai jadwal

- 3) Pengujian sampel secara laboratorium dengan parameter mutu, keamanan dan terhadap kadar fortifikan
- 4) Peningkatan kompetensi petugas dengan diikutkan dalam pelatihan Inspektur yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan dan Pelatihan Penyamaan Persepsi Pengawas Obat dan Makanan dengan mengundang narasumber dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.
- 5) Adanya sistem pengawasan berjenjang dan berlapis pada saat pelaksanaan inspeksi pembuatan pelaporan dan tindak lanjut.
- 6) Adanya sistem dokumentasi dan pengendalian rekaman yang baik sehingga sangat berguna untuk monitoring dan evaluasi kegiatan.

**SASARAN KEGIATAN 03
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI WILAYAH KERJA UPT**

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 86. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	89,6	92,71	103,47%	Sangat Baik	

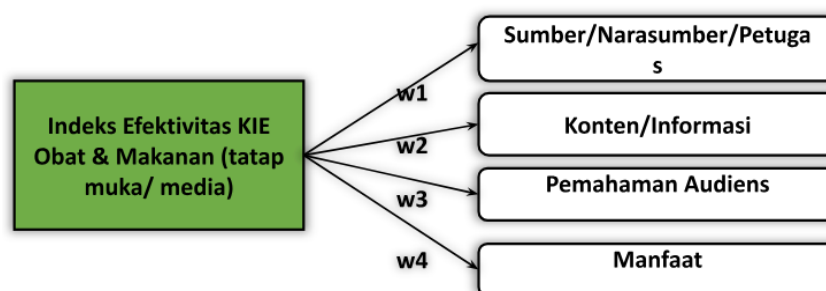
- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE Unit Kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$

Gambar 8. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE Unit Kerja

Tabel 87. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Pada tahun 2025, realisasi indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung adalah 92,71 dengan target 89,6. Capaian yang diperoleh sebesar 103,47% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung terdapat perbedaan manual indikator antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 sehingga target dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

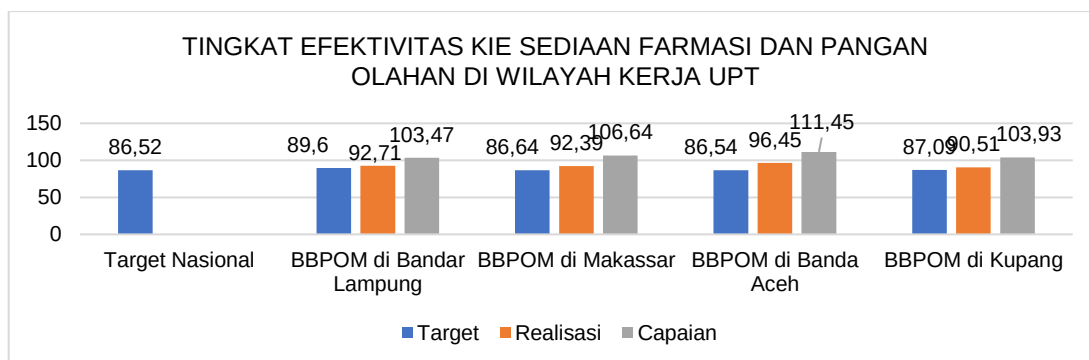
Tabel 88. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	93,19	92,71	99,48% 	Akan Tercapai

Realisasi kinerja indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah 92,71 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 93,19 sehingga capaiannya adalah 99,48%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja akhir periode Renstra terproyeksi akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain Yang Sejenis

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 86,52%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 89,6% dan berhasil merealisasikan sebesar 92,71%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,47%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 86,64% dengan realisasi sebesar 92,39% dan capaian kinerja sebesar 106,64%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 86,54% mampu merealisasikan sebesar 96,45%, sehingga mencapai 111,45% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 87,09% dan mencatatkan realisasi sebesar 90,51%, dengan capaian kinerja yaitu 103,93%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Banda Aceh, diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung, kemudian BBPOM di Makassar, dan yang terakhir BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Peningkatan Indeks Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2025 dipengaruhi oleh strategi pelaksanaan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif di tengah keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak menjadi hambatan signifikan, karena BBPOM di Bandar Lampung mampu mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, maupun dunia usaha. Lintas sektor antara lain Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Kwarcab dan Kwarda Pramuka, Perguruan tinggi dan komunitas budaya anak Lampung, Dinas Pendidikan, Bank Indonesia, Badan Gizi Nasional, Kejaksaan, ASDP Bakauheni, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan lainnya. Pola kolaborasi ini memungkinkan



pembiayaan bersama, pemanfaatan sarana dan prasarana mitra, serta integrasi kegiatan KIE dengan agenda besar yang telah direncanakan oleh mitra kerja, sehingga kegiatan edukasi tetap terlaksana secara masif dengan biaya yang relatif minimal.

Keberhasilan pelaksanaan KIE juga didukung oleh **luasnya jangkauan sasaran edukasi** yang mencakup pelajar, mahasiswa, pemuda, pelaku usaha, tenaga kesehatan, komunitas budaya, pengguna sarana transportasi, hingga masyarakat umum di ruang publik. Partisipasi BBPOM di Bandar Lampung dalam berbagai kegiatan strategis, seperti festival pariwisata dan ekonomi kreatif, pameran ekonomi syariah, kegiatan kepramukaan, pameran bersama aparat penegak hukum, edukasi di perguruan tinggi, serta KIE langsung di pelabuhan dan kapal penyeberangan, menjadikan pesan keamanan obat dan makanan lebih mudah menjangkau masyarakat secara langsung dan kontekstual. Pendekatan ini meningkatkan visibilitas peran BPOM sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang aman, bermutu, dan berizin edar.

Selain itu, **inovasi metode dan media KIE** menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja. Pelaksanaan KIE tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi dikembangkan melalui pendekatan kreatif dan tematik, seperti KIE Kosmetik Aman dalam festival estetika, edukasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan kepada pelaku usaha toko jamu, KIE *Antimicrobial Resistance* (AMR) bersama organisasi profesi kesehatan, KIE bertema stunting di daerah prioritas, serta inovasi BPOM Sunmorfe di area *Car Free Day*. Inovasi lainnya adalah penguatan fungsi Galeri dan Layanan Edukasi (Galaksi) melalui Tur Edukasi yang melibatkan Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi, sehingga KIE tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan berkelanjutan.

Pemanfaatan **media komunikasi yang beragam** turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Efektivitas KIE. Selain kegiatan tatap muka, BBPOM di Bandar Lampung secara aktif menyebarluaskan informasi

melalui media sosial, media digital, media elektronik, media cetak, serta media luar ruang seperti baliho. Strategi multi-kanal ini memungkinkan pesan KIE menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif di media digital, sekaligus memperkuat pengulangan pesan (*message reinforcement*) agar informasi yang disampaikan lebih melekat dan mudah diingat.

Namun demikian, **terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi ke depan**. Meskipun jumlah kegiatan dan jangkauan KIE mengalami peningkatan, pengukuran efektivitas pesan masih perlu diperkuat, khususnya dalam menilai perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat secara lebih terukur. Selain itu, konsistensi konten, frekuensi unggahan, serta interaksi dengan audiens di media sosial masih perlu ditingkatkan agar pesan KIE tidak hanya bersifat satu arah, tetapi mampu membangun keterlibatan (*engagement*) yang berkelanjutan. Peran mitra kerja juga perlu diperkuat tidak hanya sebagai pendukung kegiatan, tetapi sebagai agen edukasi yang secara aktif mereplikasi dan menyebarkan pesan KIE di lingkungan dan komunitas masing-masing.

Secara keseluruhan, **peningkatan Indeks Efektivitas KIE BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2025 mencerminkan keberhasilan strategi kolaboratif, inovasi pendekatan edukasi, serta optimalisasi berbagai media komunikasi**. Ke depan, keberlanjutan kinerja ini perlu didukung dengan evaluasi berbasis data, penguatan sinergi multipihak, serta peningkatan kualitas pesan agar dampak KIE tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas kegiatan, tetapi juga dari perubahan nyata perilaku masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk yang aman dan bermutu.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 90. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Keterbatasan Anggaran untuk Pelaksanaan KIE mandiri, Anggaran KIE dipangkas	Mempromosikan program inovasi seperti Galaksi lebih luas, Lebih memperkut Kerjasama dengan berbagai pihak (Eksternal)	- Postingan publikasi program KIE di Galaksi melalui Media sosial dan mensosialisasikan di wa grup komunitas serta adanya laporan KIE Galaksi - Menjalin Kerjasama dengan Pihak eksternal lainnya dalam hal pemenuhan pelaksanaan KIE	Desember 2026	Y	S-49	Keterbatasan target komunitas penerima KIE, Target nilai Indeks Efektivitas KIE tidak tercapai

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adanya Kegiatan KIE berupa kegiatan DIPA dan NON DIPA antara lain:

A. KIE Langsung antara lain:

1. KIE Kosmetik Aman bersama kegiatan festival *aesthetic* lampung kerjasama dengan Dinas Parekraf Lampung dan yayasan budaya anak Lampung,
2. KIE bersama pramuka yaitu dengan Kwarda Lampung, Kwarcab Bandar Lampung dan Saka Bakti Husada Kwarcab Pringsewu,
3. KIE Pameran yang bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam Fesyar (Festival Ekonomi Syariah) Lampung, Pameran bersama dengan Kejaksaan tinggi yang berlangsung di Bandar Lampung dan lampung Tengah.
4. Partisipasi dalam KIE dengan Perguruan Tinggi seperti UNILA dengan berpartisipasi dalam pemilihan muli mekhanai Unila Lampung yang menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan produk yang aman.
5. KIE bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemda Kota Metro dan juga Ikatan Apoteker Indonesia, Selain itu juga mengundang pelaku usaha toko jamu di Bandar Lampung dalam hal KIE terhadap Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan,
6. KIE *Antimicrobial Microba Resistance* bekerjasama dengan Organisasi Profesi seperti IAI, IDI, IBI, dll yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat dan bahaya AMR.
7. KIE dengan tema *Stunting* di Lampung Timur,
8. KIE langsung di sarana transportasi kerjasama dengan ASDP Lampung di pelabuhan dan kapal eksekutif ASDP penyeberangan Bakauheni-Merak dalam inovasi PIOM PINTAS.
9. KIE juga dilaksanakan dengan inovasi BPOM *Sunmorfe* di area CFD kerjasama dengan Dispora Bandar Lampung,
10. KIE Juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Universitas untuk

Inovasi KIE Tur Edukasi Galaksi (Galeri, Layanan Edukasi),

11. Kemudian KIE juga dilaksanakan bekerjasama dengan Anggota KOMISI IX DPR RI yang dilaksanakan di 10 titik yang tersebar di Provinsi Lampung.
12. KIE juga dilaksanakan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional dalam hal keamanan pangan dan persyaratan sarana produksi di SPPG,.
13. Capaian Indikator Tingkat efektivitas KIE juga didukung oleh peran Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan melibatkan Kader Keamanan Pangan yang telah terbentuk (melalui Bimbingan Teknis Keamanan Pangan).

B. KIE Melalui Media Sosial dan Kolaborasi

Media Sosial Antara lain *Subsite*, Instagram, *facebook*, Tiktok, *Youtube*, dan Twitter/X. Dengan adanya peningkatan *follower* menunjukkan peningkatan *engagement*, selain itu keterbukaan Informasi melalui *subsite* BBPOM di Bandar Lampung meraih predikat 1 untuk kategori UPT, capaian ini sudah diraih selama 3 tahun berturut turut. Selain itu BBPOM di Bandar Lampung juga mendapatkan kategori “Informatif” dengan nilai sempurna 100 dari Komisi Informasi Daerah Provinsi Lampung.

C. KIE melalui Media lainnya seperti :

1. KIE di Media Cetak seperti publikasi standar kebijakan layanan di Koran Lampost
2. KIE di Media Elektronik (Radio RRI dan Televisi TVRI)
3. KIE di Media Digital
4. KIE di Media *Online* (Pemberitaan)
5. KIE di Media Luar Ruang seperti di Baliho depan kantor, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Videotron yang bekerjasama dengan Parekraf, serta ILM di Pameran.
6. KIE di Alat transportasi seperti media suara dan TV di Kapal Eksekutif

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 91. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	12	12	100%	Baik	

1. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 - a) Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 - b) intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
 - c) Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - 1) Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
2. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan

yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

3. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika Kab/Kota banyak maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
- b) Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

4. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a) Sekolah Full Intervensi:

- 1) advokasi lintas sektor keamanan pangan
- 2) Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
- 3) Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
- 4) Monitoring Evaluasi, dan sertifikasi sekolah.
- 5) Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi keamanan.

b) Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Target 2025

- 489 Sekolah *Full* Intervensi
- 2.511 Sekolah Perluasan

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

c) Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan.

Pada tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 12 dengan target 12. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan terdapat perbedaan manual indikator antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 sehingga target dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

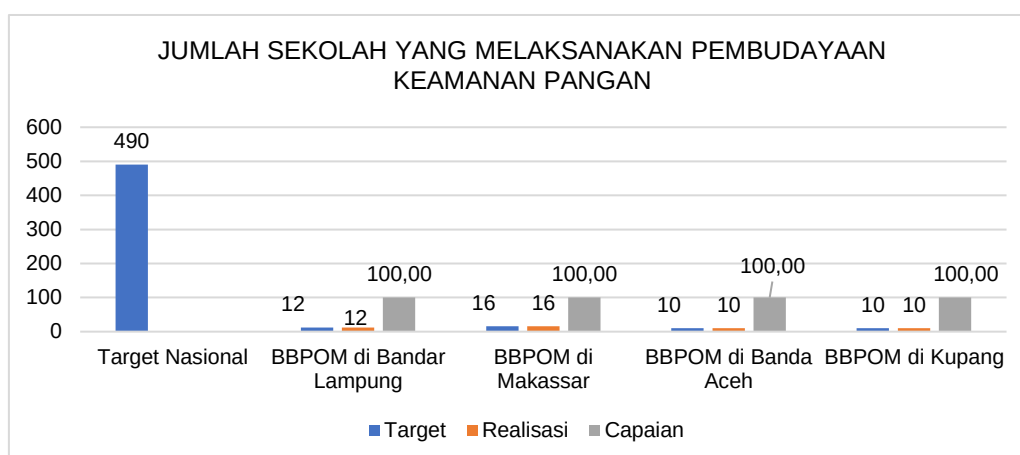
Tabel 92. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	22	12	54,55% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 12 dibandingkan dengan target periode akhir Renstra sebesar 22 sekolah sehingga capaiannya adalah 54,55%. Hal ini sesuai dengan target renstra dari tahun 2025 sampai dengan 2029 dimana di awal renstra tahun 2025 dengan target 12 sekolah dan naik secara bertahap dengan target 22 sekolah tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 93. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”, dapat disampaikan bahwa ke-empat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah mencapai target kinerja UPT masing-masing. Target nasional yang ditetapkan adalah 490 sekolah untuk seluruh target UPT secara nasional.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 12 sekolah dan berhasil merealisasikan sebanyak 12 sekolah, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. BBPOM di Makassar dengan target 16 sekolah dengan realisasi sebanyak 16 sekolah dan capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 10 sekolah mampu merealisasikan 10 sekolah, sehingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target 10 sekolah dan mencatatkan realisasi sebanyak 10 sekolah, dengan capaian kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Makassar,

diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung, kemudian BBPOM di Kupang dan BBPOM di Banda Aceh.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai target yang telah ditetapkan pada Renstra 2025 - 2029 di tengah efisiensi anggaran dimana dari anggaran yang diusulkan tahun 2025 hanya 10% yang bisa digunakan.

Strategi yang dilaksanakan adalah penyesuaian tahapan yang dilakukan oleh unit pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, juga dilaksanakan efisiensi di BBPOM di Bandar Lampung dengan penyesuaian biaya pelaksanaan kegiatan dan penggunaan transportasi petugas menggunakan mobil kantor sehingga anggaran uang harian petugas dapat dihemat menjadi 60%.

Koordinasi yang kuat dengan *stakeholder* dan pemanfaatan *whatsapp grup* dalam pelaksanaan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Koordinasi dan strategi yang tepat sasaran ini menghasilkan pelaksanaan tahapan kegiatan meliputi Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan dengan lancar. Demikian pula dengan Pengawasan bagi sekolah yang telah mendapatkan intervensi penuh program ini tahun 2024 dapat dilakukan dengan baik.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 94. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan akan pembudayaan keamanan pangan	tidak konsisten dalam melakukan implementasi program	Koordinasi rutin melalui whatsapp grup Sehingga pelaksanaan nya tidak terbatas pada saat Petugas Balai melaksanakan Monev onsite,	Mengaktifkan whatsapp grup	Akhir 2025	Y	S-31	Pihak sekolah/ madrasah yang diintervensi tidak konsisten dalam melakukan implementasi program

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dan kepala sekolah/madrasah dengan bersama-sama mendorong sekolah intervensi untuk menyusun dan melaksanakan program terkait keamanan pangan. Apabila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat melakukan replikasi program di sekolah/madrasah lainnya.

Juga adanya informasi pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan membuat semakin banyak sekolah di luar target intervensi yang melakukan kunjungan *Tour* Edukasi ke BBPOM di Bandar Lampung atau meminta pelaksanaan KIE dengan materi obat dan pangan yang aman.

19. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 95. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	5	5	100%	Baik	

1. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
2. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.
3. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.
4. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Pada tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah desa pangan aman adalah 5 dengan target 5. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada indikator Jumlah desa pangan aman terdapat perbedaan manual indikator antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 sehingga target dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

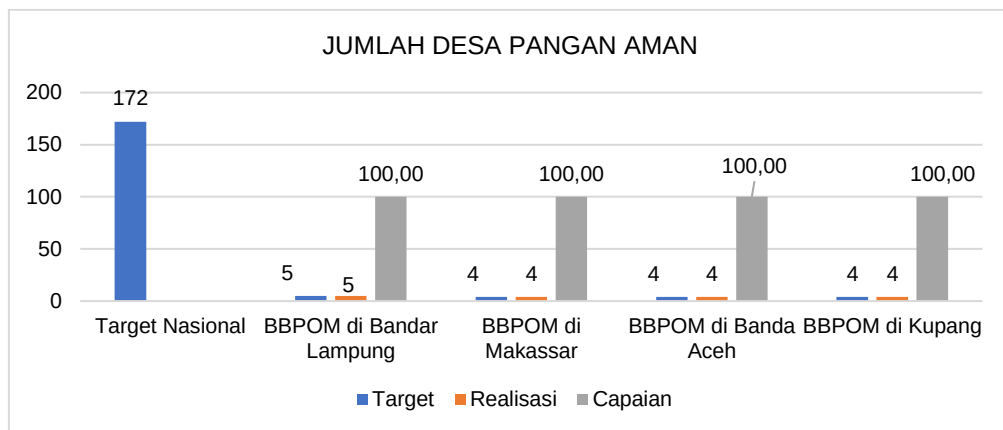
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	8	5	62,5% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator Jumlah desa pangan aman adalah 5 dibandingkan dengan target periode akhir Renstra sebanyak 8 desa sehingga capaiannya adalah 62,5%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja periode akhir Renstra terproyeksi Perlu Upaya Keras untuk mencapai target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 97. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Jumlah Desa Pangan Aman



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Jumlah desa pangan aman”, dapat disampaikan bahwa ke-empat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah mencapai target kinerja UPT masing-masing. Target nasional yang ditetapkan adalah 172 desa untuk seluruh target UPT secara nasional.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 5 desa dan berhasil merealisasikan sebanyak 5 desa, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. BBPOM di Makassar dengan target 4 desa dengan realisasi sebanyak 4 desa dan capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 4 desa mampu merealisasikan sebanyak 4 desa, sehingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target 4 desa dan mencatatkan realisasi sebanyak 4 desa, dengan capaian kinerja yaitu 100%.

Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Bandar Lampung, diikuti bersamaan oleh BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Kupang, dan BBPOM di Makassar.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Audiensi awal bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memfasilitasi pertemuan dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah terkait program menjadi faktor yang memudahkan komunikasi selanjutnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan. Peran

serta OPD ini dalam program menjadi salah satu faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman. Di antaranya mendorong pihak Tim Kader Desa yang dipimpin Kepala Desa, untuk menyusun program di Desa yang berkaitan dengan Keamanan Pangan. Selain itu OPD tersebut bersama Tim Kader Desa mendorong dan memastikan bahwa Kader Keamanan Pangan dari masyarakat yang sudah dilatih, melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis secara mandiri kepada minimal 4 komunitas masyarakat.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 98. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomenda si	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah desa pangan aman	Tahapan Bimtek kepada Komunitas dilakukan secara mandiri oleh Kader yang sudah dilatih, karena keterbatasan anggaran	Dialokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan Bimtek kepada Komunitas	Usulan adanya anggaran untuk Bimtek kepada Komunitas	Akhir tahun 2025	Ya	S-32	Aparat Desa dan kader keamanan pangan desa kurang berkomitmen dalam implementasi program Desa kepada masyarakat

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan yang bersama-sama mendorong setiap Desa intervensi untuk menyusun program terkait keamanan pangan. Apabila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat melakukan replikasi program di desa lainnya.

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 99. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	1	1	100%	Baik	

1. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
2. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
3. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.
4. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
5. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

6. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
7. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
8. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 1 dengan target 1. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Triwulan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas terdapat perbedaan manual indikator antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 sehingga target dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

Tabel 100. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

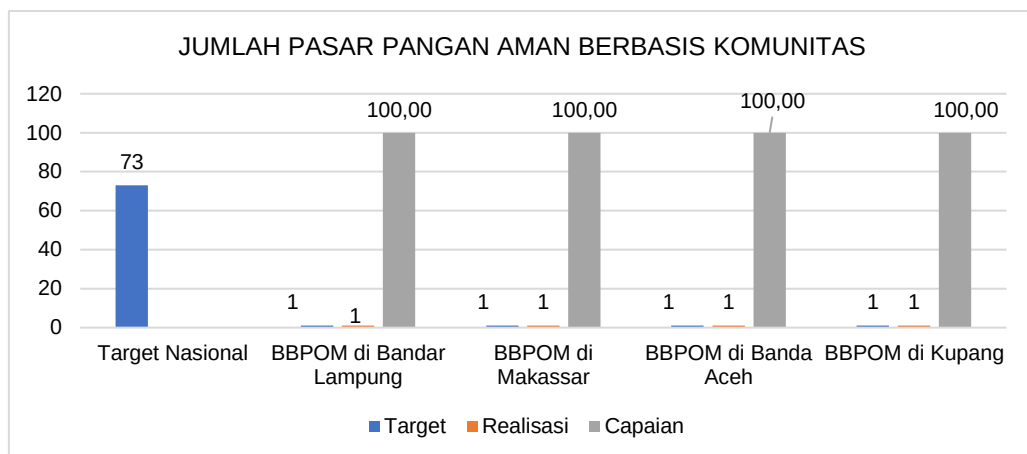
Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	1	50% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 1 dibandingkan dengan target periode akhir Renstra yaitu 2 pasar sehingga capaiannya adalah 50%. Hal ini sesuai dengan target renstra dari

tahun 2025 sampai dengan 2029 dimana di awal renstra tahun 2025 dengan target 1 pasar dan naik secara bertahap dengan target 2 pasar tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 101. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”, dapat disampaikan bahwa ke-empat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah mencapai target kinerja UPT masing-masing. Target nasional yang ditetapkan adalah 73 pasar untuk seluruh target UPT secara nasional.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 1 dan berhasil merealisasikan 1 pasar, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 1 dengan realisasi 1 pasar dan capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 1 mampu merealisasikan 1 pasar, sehingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 1 dan mencatatkan realisasi sebesar 1 pasar, dengan capaian kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT yaitu telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja keempat UPT seluruhnya sama yaitu 1 pasar.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target yang telah ditetapkan pada Renstra 2025 - 2029 di tengah efisiensi anggaran dimana dari anggaran yang diusulkan tahun 2025 hanya tinggal 13% yang bisa digunakan. Strategi yang dilaksanakan adalah penyesuaian tahapan yang dilakukan oleh unit pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, juga dilaksanakan efisiensi di BBPOM di Bandar Lampung dengan penyesuaian biaya pelaksanaan kegiatan dan penggunaan transportasi petugas menggunakan mobil kantor sehingga anggaran uang harian petugas dapat dihemat menjadi 60%.

Koordinasi yang kuat dengan *stakeholder* dan pemanfaatan *whatsapp grup* dalam pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas.

Koordinasi dan strategi yang tepat sasaran ini menghasilkan pelaksanaan tahapan kegiatan meliputi Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi pada kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas dapat berjalan dengan lancar. Demikian pula dengan Pengawasan bagi pasar yang telah mendapatkan intervensi penuh program ini tahun 2024 dapat dilakukan dengan baik.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 102. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya	Mengikutsertakan OPD terkait dalam melakukan program dan pengawasan dan melakukan sosialisasi serta kampanye langsung kepada pedagang dan masyarakat	Pengawasan bersama	Akhir 2025	Y	S-33	Pedagang masih menjual bahan pangan mengandung bahan berbahaya

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala UPT Pasar Natar dengan bersama-sama mendorong pasar intervensi untuk menyusun dan melaksanakan program terkait keamanan pangan. Apabila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat melakukan replikasi program di pasar lainnya.

**SASARAN KEGIATAN 04
MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM
PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU**

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 103. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	16,94%	16,94%	100%	Baik	

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan:

- 1) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- 2) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan

6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan *Start-up* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;

2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);

3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan

4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Perhitungan target tahunan (B12):

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun

berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Contoh:

UPT A memiliki target pendampingan UMKM:

Tahun 2025 = 4 UMKM

Tahun 2026 = 6 UMKM

Tahun 2027 = 8 UMKM

Tahun 2028 = 10 UMKM

Tahun 2029 = 10 UMKM

Perhitungan target tahun 2027 = $(4+6+8) / (4+6+8+10+10) \times 100\%$

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh:

UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulannya = $(\% \text{ Progress UMKM A} + \% \text{ Progress UMK B} + \dots + \% \text{ Progress UMKM E}) / 5$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

Berdasarkan hasil pemutakhiran terhadap manual IKU pada bulan Agustus, perubahan pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan terletak pada cara perhitungan yaitu:

Semula:

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = $(A + B + C) / 3$

A = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB / Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

B = jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap / Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

$C = \text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB} / \text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan} \times 100\%$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

Menjadi:

Perhitungan target tahunan (B12):

$(\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB} + \text{Jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap} + \text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}) / \text{Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029}$

Perhitungan target B1 - B11:

$\text{Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik} / \text{Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan}$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025, bahwa perhitungan realisasi kinerja menggunakan manual IKU lama digunakan pada bulan Januari sampai dengan Juli, selanjutnya mulai bulan Agustus perhitungan sudah menggunakan manual IKU baru.

Pada tahun 2025, realisasi tahapan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 16,94% dengan target 16,94%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berdasarkan nota dinas dari Sekretaris Utama nomor PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tercantum instruksi bahwa terhadap indikator yang mengalami perubahan

Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II.

Pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan terdapat perbedaan manual indikator antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 sehingga target dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

Tabel 104. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

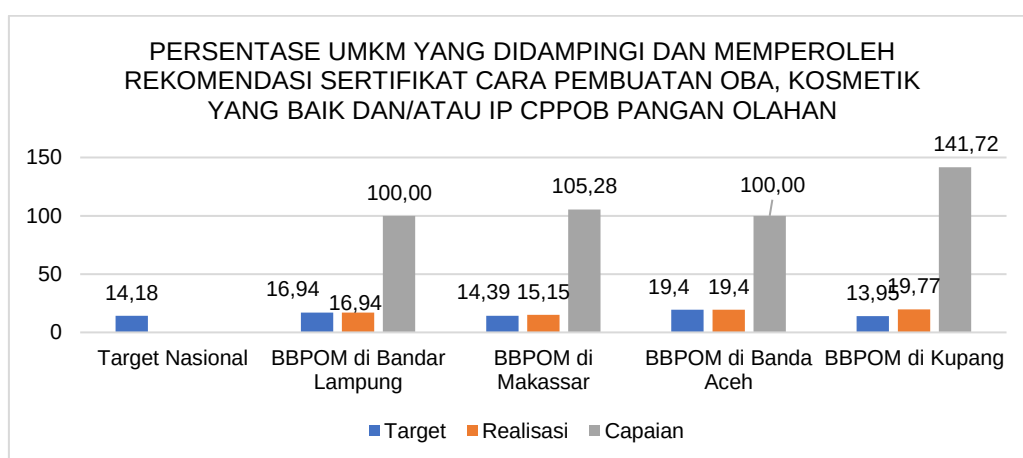
Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	16,94	16,94% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 16,94% dari target akhir periode akhir Renstra yaitu 100, maka capaiannya adalah 16,94%, sehingga untuk periode akhir Renstra diproyeksikan perlu upaya keras untuk mencapai target. Capaian indikator ini akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya dikarenakan realisasi

setiap tahunnya adalah kumulatif sehingga akan tercapai di akhir tahun periode renstra yaitu tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan”, dapat disimpulkan bahwa keempat UPT menunjukkan realisasi kinerja telah melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 14,18%.

Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBPOM di Bandar Lampung dengan target 16,94% dan berhasil merealisasikan sebesar 16,94%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 14,39% dengan realisasi sebesar 15,15% dan capaian kinerja sebesar 105,28%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 19,4% mampu merealisasikan sebesar 19,4%, sehingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 13,95% dan mencatatkan realisasi sebesar 19,77%, dengan capaian kinerja yaitu 141,72%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Kupang, diikuti oleh BBPOM di Banda Aceh, kemudian BBPOM di Bandar Lampung, dan yang terakhir BBPOM di Makassar.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) pada tahun 2025 mencapai 16,94% dari target 16,94%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja adalah 100% dengan kriteria Baik.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Tersedianya tahapan seleksi calon UMKM yang mengacu pada kriteria dalam Juknis Pendampingan, sehingga UMKM terpilih dinilai layak dan memiliki komitmen untuk mengikuti program pendampingan.
2. Tingginya antusiasme dan kesadaran UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetika untuk memperoleh izin edar BPOM melalui program pendampingan.
3. Kompetensi fasilitator internal dan eksternal (Mahasiswa Magang Program SAPA Kampus) dalam memberikan pendampingan berupa bimbingan penyiapan dokumen serta pemenuhan sarana dan prasarana.
4. Dukungan lintas sektor dari Dinas/Instansi/Organisasi terkait, baik melalui penyampaian data UMKM binaan maupun penyediaan fasilitas dan sarana pendukung bagi UMKM.
5. Komitmen UMKM Pangan Olahan untuk mengikuti program pendampingan hingga selesai, yang dibuktikan melalui penandatanganan surat pernyataan komitmen.

6. Ketersediaan panduan/Juknis pelaksanaan program pendampingan Pangan Olahan sebagai pedoman bagi petugas sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara terukur.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin oleh BBPOM di Bandar Lampung dan Direktorat Pengampu untuk memantau progres serta mengidentifikasi kendala selama proses pendampingan Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetika.
8. Terjalannya komunikasi yang efektif antara UMKM dengan fasilitator internal dan eksternal melalui grup WhatsApp maupun konsultasi langsung.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 106. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Tidak terdapat kendala pada pendampingan UMKM di TW 4	Untuk meningkatkan capaian kinerja Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu, maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut: - Perlu dipastikan pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan dan	1. pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan dan timeline yang tertera pada Petunjuk Teknis/Pedoman Pendampingan UMKM 2. Monev pendampingan UMKM	TW 4 2026	Y	S-29	Pelaku usaha mundur ditengah jalannya proses pendampingan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<i>timeline</i> yang tertera pada Petunjuk Teknis/Pedoman Pendampingan UMKM - Monitoring dan evaluasi kinerja pendampingan UMKM					

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya pencapaian BBPOM di Bandar Lampung ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

1. Pelaksanaan tugas secara aktif sebagai fasilitator UMK Pangan Olahan, UMKM Obat Bahan Alam dan UMKM Kosmetik
2. Sinergi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa SAPA (Sadar Pangan Aman) KAMPUS dengan skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri, di mana mahasiswa melakukan pendampingan intensif kepada UMK Pangan Olahan mulai dari gap assessment awal pemenuhan persyaratan CPPOB, identifikasi saran perbaikan, pendampingan penyusunan dokumen CPPOB, hingga pendampingan perbaikan sarana produksi secara komprehensif sebagai persiapan pengajuan IP CPPOB.
3. Peningkatan kompetensi fasilitator Pangan Olahan, Obat Bahan Alam, dan Kosmetika melalui keikutsertaan dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi secara luring maupun daring yang diselenggarakan oleh

Direktorat terkait, serta pemanfaatan media pembelajaran daring BPOM (IDEAS).

4. Peningkatan pemahaman dan wawasan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetika terkait standar sarana produksi yang baik melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.

SASARAN KEGIATAN 05
TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN
FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH
KERJA UPT

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 107. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	85	85	100%	Baik	

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
- $$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara *carryover* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$$

Pada tahun 2025, realisasi tahapan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung adalah 85% dengan target 85%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung terdapat

perbedaan manual indikator antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 sehingga target dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

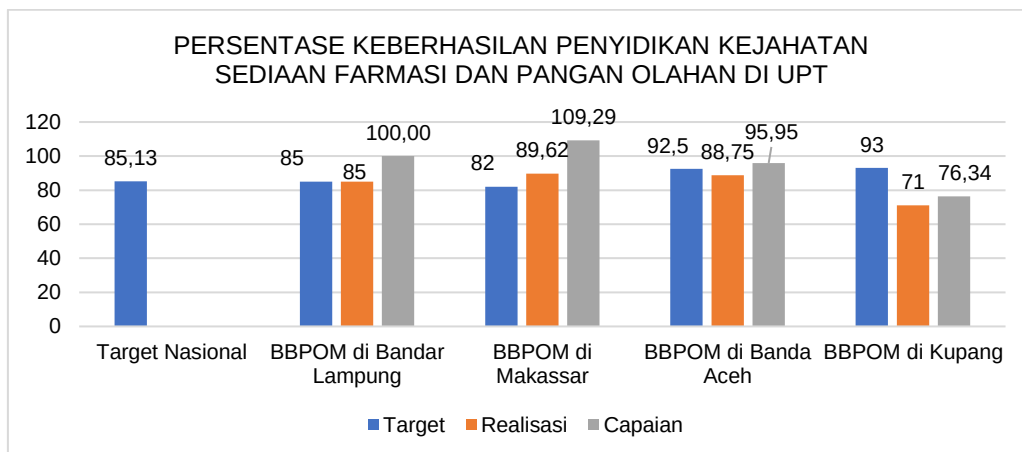
Tabel 108. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	89	85	95,51% 	Akan Tercapai

Realisasi kinerja indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT adalah 85% dibandingkan dengan target periode akhir Renstra sebesar 89% sehingga capaiannya adalah 95,51%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja periode akhir Renstra terproyeksi akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 109. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”, terdapat satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu BBPOM di Makassar dan BBPOM di Bandar Aceh yang melampaui target nasional yang ditetapkan yaitu 85,13%. Sedangkan realisasi BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Kupang tidak mencapai target nasional.

Pada tingkat UPT, BBPOM di Bandar Lampung dengan target 85% dan berhasil merealisasikan sebesar 85%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 82% dengan realisasi sebesar 89,62% dan capaian kinerja sebesar 109,29%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 92,5% mampu merealisasikan sebesar 88,75%, sehingga mencapai 95,95% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 93% dan mencatatkan realisasi sebesar 71%, dengan capaian kinerja yaitu 76,34%.

Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Makassar, diikuti oleh BBPOM di Banda Aceh, kemudian BBPOM di Bandar Lampung, dan yang terakhir BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi perkara tahun 2025 berjumlah 3 (tiga) perkara, dimana 2 (dua) perkara telah tahap 2 dan 1 (satu) perkara masih tahap 1 dengan capaian

kinerja 100% dengan kriteria Baik. Perkara yang ditangani BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2025 adalah 1 perkara memproduksi dan mengedarkan Obat Bahan Alam tidak memenuhi standar (mengandung Bahan Kimia Obat) dan 2 (dua) perkara mengedarkan Obat Bahan Alam tidak memenuhi standar (mengandung Bahan Kimia Obat). Karena pada dasarnya, kejahatan khususnya di bidang Obat dan Makanan tidak dapat diprediksi kapan, dimana, dan berapa jumlahnya yang akan terjadi. BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan diharuskan melakukan perlindungan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah:

1. Audiensi antara Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka penguatan sinergi antara dua institusi yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.
2. Audiensi antara Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung terkait penanganan perkara untuk mengungkap pelaku kejahatan Obat dan Makanan.
3. Koordinasi antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan Jaksa yang menangani perkara dengan baik.
4. Koordinasi antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan Korwas PPNS Polda Lampung terkait penangkapan dan penahanan, sehingga proses pemberkasan berjalan lancar.
5. Melakukan *profiling* siber dan operasi intelijen secara rutin terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang diedarkan secara daring.
6. Melakukan pelatihan berkelanjutan terkait teknik penyidikan dan pengumpulan barang bukti elektronik.
7. Koordinasi dengan tim siber Badan POM untuk mengungkap kejahatan peredaran Obat dan Makanan yang dilakukan secara daring.
8. Kerjasama dengan PT. Shopee Internasional Indonesia dalam pemenuhan

P-19 terkait sumber pengadaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 110. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase keberhasilan Penyidikan sediaan farmasi dan pangan olahan	Adanya perbedaan persepsi antara Jaksa dengan Penyidik terkait kualitas dan alat bukti pada pembuktian perkara	Koordinasi dengan Jaksa yang menangani berkas perkara	Koordinasi antara penyidik dengan Jaksa secara intensif terkait perkara yang ditangani	Desember 2026	Y	Resiko Operasional	Berkas perkara tidak dapat dilengkapi sesuai petunjuk jaksa karena kendala dalam pemenuhan P-19

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2025 adalah:

1. Intensifikasi *profiling* siber dan operasi intelijen terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang diedarkan secara daring.
2. Intensifikasi koordinasi antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan Korwas PPNS Polda Lampung dalam proses penyidikan.
3. Intensifikasi koordinasi antara Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan Jaksa dalam penyelesaian berkas perkara.

4. Monitoring dan evaluasi proses penyidikan perkara yang ditangani oleh Penyidik BBPOM di Bandar Lampung sesuai syarat formil.
5. Peningkatan kompetensi petugas terkait intelijen pada tanggal 11-12 November 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM.

SASARAN KEGIATAN 06
TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI
BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG
EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 111. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	90	98	108,89%	Sangat Baik	

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak *Digital (Profiling Siber)* yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan *Profiling*) UPT BPOM;

- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan

Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah 98% dengan target 90%. Capaian yang diperoleh sebesar 108,89% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru yang muncul pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

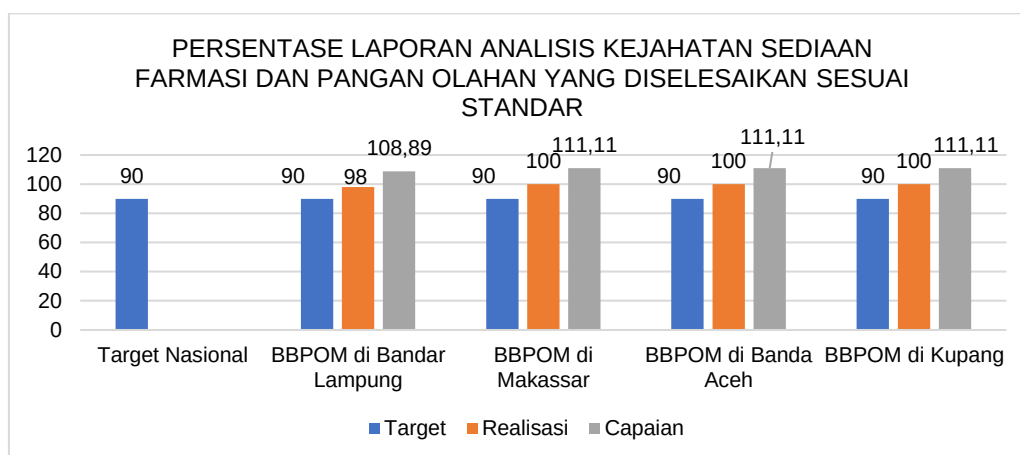
Tabel 112. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	98	104,26% 	Tercapai/Melampaui

Pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, realisasi capaian pada tahun 2025 sebesar 98% dan dibandingkan target periode akhir Renstra adalah 94%, sehingga capaiannya adalah 104,26%. Maka pencapaian kinerja pada akhir periode Renstra diproyeksikan akan tercapai/melampaui.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 113. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”, dapat disampaikan bahwa dari target nasional yang ditetapkan adalah 90%, keempat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah mencapai target nasional tersebut.

Pada tingkat UPT, BBPOM di Bandar Lampung dengan target 90% dan berhasil merealisasikan sebesar 98%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 108,89%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 111,11%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 90% mampu merealisasikan sebesar 100%, sehingga mencapai 111,11% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 90% dan mencatatkan realisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja yaitu 111,11%.

Berdasarkan data tersebut, keempat UPT telah melampaui target kinerja UPT yang ditetapkan. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Kupang, dan BBPOM di Makassar, terakhir diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebanyak 14 laporan, terdiri dari 12 laporan analisis penelusuran siber dan 2 laporan analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan. Realisasi indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 98% dari target 90%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 108,89% dengan kategori Sangat Baik.

Hal-hal yang mendukung tercapainya kinerja tersebut adalah :

1. Intensitas pelaksanaan dan perencanaan patroli siber yang baik menjadikan pelaksanaan tugas lebih terarah, konsisten, dan efektif dalam mendukung proses pengawasan.
2. Konsistensi pelaporan sesuai *timeline* hal ini mencerminkan budaya kerja yang akuntabel dan didukung oleh mekanisme pengawasan internal yang berjalan optimal.
3. Budaya berbagi pengalaman dan pengetahuan berkontribusi pada peningkatan kompetensi petugas, sehingga kinerja menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Laporan analisis kejahatan obat dan makanan yang disampaikan pada Triwulan IV merupakan bagian dari kegiatan yang telah direncanakan sejak Triwulan I dan berhasil diselesaikan sesuai tahapan yang ditetapkan. Laporan tersebut telah melalui proses penilaian oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan hasil yang baik agar dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penanganan kasus dan peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan pada periode berikutnya.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 114. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Keterbatasan kapasitas dan kompetensi petugas analisis	Peningkatan kompetensi petugas analisis karena adanya rotasi pegawai	Menyelenggarakan <i>sharing knowledge</i> terkait penyusunan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan,	Desember 2026	Y	SDM-35	Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak sesuai standar

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2025 adalah:

1. Penunjukan dan penugasan patroli siber dan *profiling* siber yang dilaksanakan tiap bulan.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil patroli siber dan *profiling* siber setiap bulan dan sesuai *timeline*.
3. Monitoring data *profiling* siber pada aplikasi dashboard penindakan sesuai *timeline*
4. Program *sharing knowledge* antar petugas terkait *profiling* siber dan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

SASARAN KEGIATAN 07 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 115. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	4,7	4,85	103,19%	Sangat Baik	

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

- d. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

- e. Kategori nilai:

Tabel 116. Kategori Nilai IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2025, capaian indeks pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung adalah 4,85 dari target 4,7 dengan capaian 103,19% sehingga kategorinya adalah **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 117. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Periode	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2021	4,35	4,50	103,45
Tahun 2022	4,45	4,46	100,22
Tahun 2023	4,40	4,78	108,64
Tahun 2024	4,85	4,87	100,41
Tahun 2025	4,7	4,85	103,19

Pada tahun 2025 capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung adalah 103,19%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian Indeks Pelayanan Publik BPOM cenderung fluktuatif. Capaian menurun pada

tahun 2022, dari sebelumnya 103,45% di tahun 2021 menjadi 100,22%. Kemudian naik kembali pada tahun 2023 menjadi 108,64%, dan turun lagi pada tahun 2024 menjadi 100,41%. Meskipun cenderung fluktuatif namun seluruhnya mencapai target kinerja setiap tahunnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

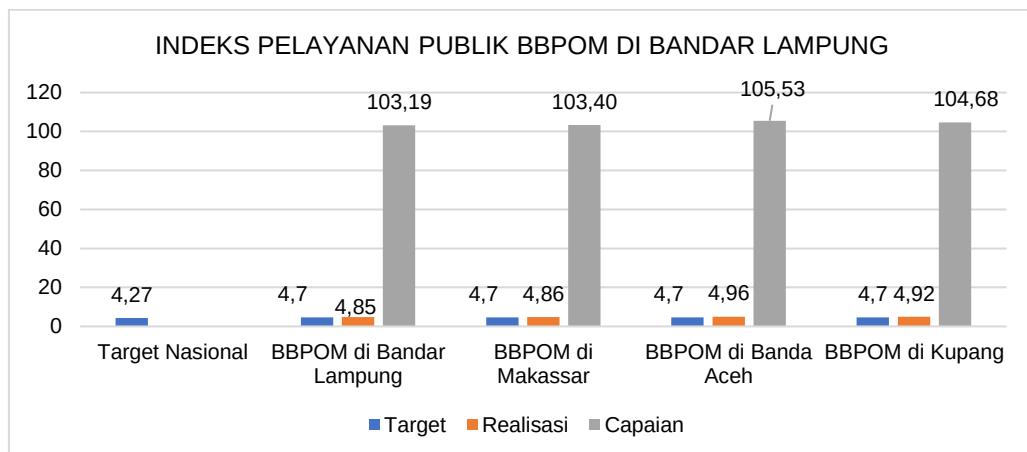
Tabel 118. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,9	4,85	98,98% 	Akan Tercapai

Pada tahun 2025, realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung adalah 4,85 dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 4,9 sehingga capaiannya adalah 98,98%. Maka dapat diproyeksikan bahwa target periode akhir Renstra akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 119. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik BBPOM”, dapat disampaikan bahwa target nasional yang ditetapkan adalah 4,27 dan keempat Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Makassar dan BBPOM di Kupang.

Pada tingkat UPT, BBPOM di Bandar Lampung dengan target 4,7 dan berhasil merealisasikan sebesar 4,85, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,19%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 4,7 dengan realisasi sebesar 4,86 dan capaian kinerja sebesar 103,40%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 4,7 mampu merealisasikan sebesar 4,96 sehingga mencapai 105,53% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 4,7 dan mencatatkan realisasi sebesar 4,92 dengan capaian kinerja yaitu 104,68%.

Berdasarkan data tersebut, ke-empat UPT telah melampaui target kinerja UPT dengan realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Banda Aceh, diikuti oleh BBPOM di Kupang, lalu BBPOM di Makassar, kemudian BBPOM di Bandar Lampung.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Nilai IPP BBPOM Bandar Lampung yang mencapai predikat “Pelayanan Prima” menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan sangat baik. Keberhasilan ini terjadi karena beberapa hal berikut:

1. Adanya komitmen kuat dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini membuat pelayanan menjadi lebih transparan, bebas dari praktik tidak terpuji, dan lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang rutin dilakukan. Melalui forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran. Masukan tersebut digunakan untuk memperbaiki layanan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Keterbukaan informasi melalui PPID. Informasi tentang prosedur, biaya, dan waktu pelayanan sudah lebih mudah diakses. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat.
4. Adanya berbagai inovasi pelayanan seperti QRIS PUSAKA, GALAKSI, LIVE BAGI BAGI KOMISI, PIOM PINTAS, dan Call Me Back “Ulun Lampung”. Inovasi ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis karena sebagian sudah berbasis digital.

Secara umum, peningkatan IPP terjadi karena pelayanan semakin cepat, jelas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Walaupun sudah sangat baik, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar nilai IPP tidak menurun. Informasi standar pelayanan belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama UMKM di daerah tertentu. Jika masyarakat tidak memahami prosedur layanan, dapat muncul persepsi bahwa pelayanan kurang jelas. Kemudian tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi digital. Jika sosialisasi dan pendampingan kurang,

sebagian masyarakat bisa mengalami kesulitan dalam mengakses layanan. Kemudian evaluasi kinerja pelayanan masih perlu dibuat lebih terbuka dan terukur. Misalnya dengan mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala agar publik mengetahui perkembangan kinerja dan kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi dan konsistensi SDM. Jika tidak terus ditingkatkan, kualitas layanan bisa tidak merata.

**f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan
(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Tabel 120. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	kurangnya kompetensi petugas terkait penguasaan bahasa isyarat untuk layanan kelompok rentan	Merencanakan Pelatihan, Pelaksanaan dan Evaluasi pelatihan kelompok rentan	Melakukan pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi layanan kelompok rentan	Des 26	Y	SDM-29	Pelayanan Publik untuk kelompok rentan tidak berjalan dengan baik, Nilai IPP belum tercapai
2	Indeks Pelayanan Publik UPT	Kurangnya pengetahuan dan media yang bisa digunakan masyarakat terhadap pengaduan obat dan makanan aman	Menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses di gerai gerai MPP	Melakukan penyediaan dan dokumentasi media pengaduan di gerai MPP	Des 26	Y	S-50	Layanan Pengaduan dan Informasi masyarakat terkait obat dan makanan tidak optimal
3	Indeks Pelayanan Publik	Adanya perubahan pada tools Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM tahun 2026	Merencanakan koordinasi internal terkait hal-hal yang menjadi komponen penilaian PEKPPP, mengikuti perkembangan dan mengikuti sosialisasi pra penilaian PEKPPP	Melaksanakan Koordinasi internal terkait hal-hal yang menjadi komponen penilaian PEKPPP, mengikuti perkembangan dan mengikuti	Des 26	Y	S-45	Adanya Penurunan IPP BBPOM di Bandar Lampung

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				sosialisasi pra penilaian PEKPPP				

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) BBPOM di Bandar Lampung didukung oleh berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan secara konsisten dan terukur, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mandiri BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan SKM Mandiri secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan. Hasil survei dianalisis dan ditindaklanjuti melalui perbaikan layanan yang relevan. Selain itu, hasil SKM dipublikasikan setiap bulan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
2. Pemutakhiran Media Layanan dan Informasi Secara Berkala Informasi pelayanan, edukasi obat dan makanan, serta publikasi kegiatan diperbarui setiap hari melalui subsite resmi dan media sosial BBPOM di Bandar Lampung. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses.
3. Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan Secara Aktif Pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan dilakukan secara sistematis melalui monitoring dan evaluasi berkala. Setiap aduan ditindaklanjuti sesuai prosedur, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap responsivitas pelayanan.
4. Implementasi Berbagai Inovasi Pelayanan Untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan, BBPOM di

Bandar Lampung mengimplementasikan sejumlah inovasi, antara lain:

- *Call Me Back* “Ulun Lampung”
 - GALAKSI
 - PIOM Pintas
 - QRIS-PUSAKA
 - Cawa-Cawa Bareng BPOM
 - *Live* Bagi-Bagi KOMISI
5. Inovasi tersebut dirancang untuk memperluas akses, mempercepat respon layanan, serta mendukung digitalisasi pelayanan publik.
 6. Evaluasi Kualitas Pelayanan melalui Sistem Nasional Evaluasi kualitas pelayanan publik dilakukan melalui aplikasi evortalapom.go.id. Sistem ini digunakan sebagai alat ukur kinerja pelayanan dan dasar perbaikan berkelanjutan.
 7. Revisi dan Optimalisasi Anggaran
Dilakukan penyesuaian dan revisi anggaran untuk memastikan kegiatan pelayanan publik dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan prioritas.
 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan fasilitas pelayanan dilakukan secara rutin untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran pelayanan, sekaligus meminimalkan kebutuhan anggaran perbaikan yang bersifat mendadak.
 9. Publikasi dan Sosialisasi Standar Pelayanan Terbaru
Standar pelayanan yang telah diperbarui disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik daring maupun luring. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur, persyaratan, waktu layanan, dan biaya yang berlaku.
 10. Pencapaian kinerja dalam mendukung Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung tidak hanya ditunjukkan melalui capaian nilai, tetapi juga melalui sistem pelayanan yang transparan, inovatif,

responsif, dan berkelanjutan. Berbagai langkah tersebut menjadi pondasi penting dalam mempertahankan predikat pelayanan prima serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

**SASARAN KEGIATAN 08
TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT
ORGANISASI YANG OPTIMAL**

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 121. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	90	89,35	99,28%	Baik	

- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien,

sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM
 - Baseline Data sebagai Dasar Perhitungan
 - Nilai ZI tahun 2022: 87,38 (sebagai baseline awal).
 - Pencapaian tahun 2023: 90,37 (melampaui target).
 - Tahun 2024 mengalami penurunan, sehingga perlu perbaikan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai.
 - Target Realistis dan Bertahap
 - Target 90,20 pada 2025 ditetapkan berdasarkan tren pencapaian sebelumnya dan mempertimbangkan adanya penurunan di 2024.
 - Kenaikan 0,2 per tahun adalah angka yang terukur dan dapat dicapai dengan perbaikan berkelanjutan tanpa membebani sumber daya yang tersedia.
 - Persyaratan Menuju Predikat WBBM
 - BBPOM Bandar Lampung telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 - Untuk menjadi calon penerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), nilai minimal yang harus diperoleh adalah 90,00.
 - Target 90,20 pada 2025 memastikan BBPOM Bandar Lampung tetap berada dalam jalur pencapaian WBBM.

Pada tahun 2025, capaian realisasi indikator Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung adalah 89,35 dari target 90 dengan capaian 99,28% sehingga kategorinya adalah **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 122. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Periode	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2021	83,50	83,46	99,95%
Tahun 2022	86,00	91,00	105,81%
Tahun 2023	88,50	90,37	102,11%
Tahun 2024	91,37	87,38	95,63%
Tahun 2025	90	89,35	99,28%

Pada tahun 2025, realisasi indikator Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung sebesar 99,28%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian ini meningkat, dimana pada tahun 2024 adalah 95,63%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 hingga 2023, maka capaian tahun 2025 cenderung menurun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

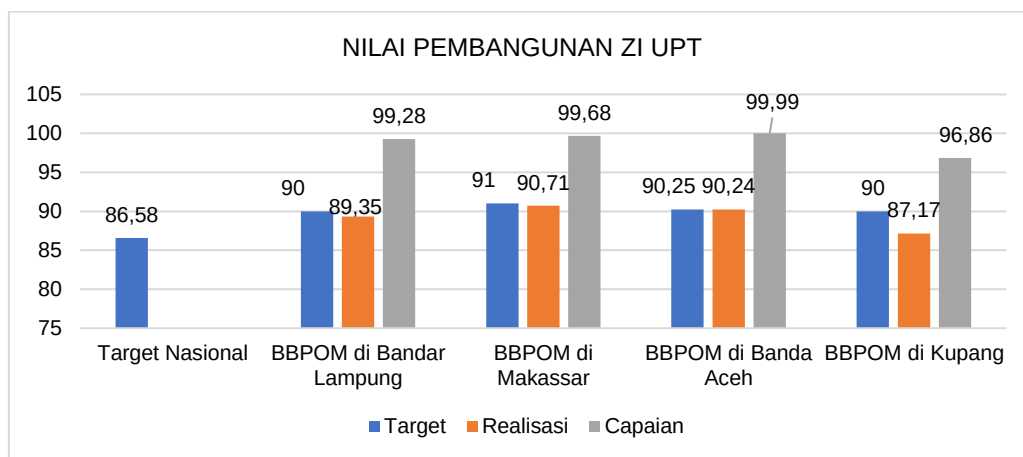
Tabel 123. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	94	89,35	95,05% 	Akan Tercapai

Pada tahun 2025, realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT adalah 89,35 dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 94 sehingga capaiannya adalah 95,05%. Maka dapat diproyeksikan bahwa target periode akhir Renstra akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 124. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI UPT”, dapat disampaikan bahwa target nasional yang ditetapkan adalah 86,58 dan keempat Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mencapai target nasional.

Pada tingkat UPT, BBPOM di Bandar Lampung dengan target 90 dan berhasil merealisasikan sebesar 89,35 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,28%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 91 dengan realisasi sebesar 90,71 dan capaian kinerja sebesar 99,68%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 90,25 merealisasikan sebesar 90,24 sehingga mencapai 99,99% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 90 dan mencatatkan realisasi sebesar 87,17%, dengan capaian kinerja yaitu 96,86%.

Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Makassar kemudian diikuti oleh BBPOM di Banda Aceh lalu BBPOM di Bandar Lampung, kemudian terakhir oleh BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilaksanakan desk dengan Inspektorat terkait kegiatan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) serta pemenuhan data dukung sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada BBPOM di Bandar Lampung sebesar 89,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125. Hasil evaluasi PMPZI BBPOM di Bandar Lampung

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,19	4,00	7,19	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	2,75	2,50	5,25	MS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,35	4,25	8,60	MS
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	3,91	8,91	MS
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	6,53	7,50	14,03	MS

			Pemenuhan	Reform	Nilai	MS/TMS)
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,85	4,86	9,71	MS
TOTAL PENGUNGKIT					53,69	
B.	Komponen Hasil	40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
I.	1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,89	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	TMS
	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
II.	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,28	MS
TOTAL HASIL					35,67	
NILAI PMPZI					89,35	

Berdasarkan hasil tersebut realisasi masih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 90,00.

Adapun hasil ringkasan evaluasi PMPZI dari Inspektorat sebagai berikut :

1. Penentuan anggota tim pembangunan ZI belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pada dokumen monitoring dan evaluasi rencana kerja belum terdapat perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan ZI.
3. Nilai implementasi BerAKHLAK (BerAKHLAK implementation index) BBPOM di Bandar Lampung di bawah rata-rata BPOM.
4. Monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital belum dilaksanakan untuk seluruh teknologi informasi yang digunakan baik untuk pelayanan internal maupun layanan publik.
5. Belum terdapat bukti bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah memperhatikan kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai).
6. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
7. Pemberian *reward* berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal oleh Kepala Unit Kerja.
8. Capaian kinerja telah dijadikan salah satu unsur dalam pemberian *reward and punishment*.
9. Terdapat inovasi terkait penguatan pengawasan, namun belum terdapat laporan implementasi inovasi tersebut.

10. Monitoring pengaduan telah dilakukan secara berkala, namun belum terdapat analisis atas hasil monitoring pengaduan yang nihil.
11. Belum seluruhnya rekomendasi laporan SKM ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.
12. Laporan inovasi pelayanan publik belum menjelaskan latar belakang, dampak, monitoring dan evaluasi implementasi secara lengkap.
13. Sebagian besar capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,72 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,86 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 3,75) tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 126. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Pembang unan ZI	Penentuan anggota tim pembangunan ZI belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan	Memastikan bahwa penentuan anggota tim sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.	Melaksan akan pembaha san pembent ukan anggota tim	Februari 2026	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Nilai Pembang unan ZI	Pada dokumen monitoring dan evaluasi rencana kerja belum terdapat perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan ZI.	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembanguna n ZI secara berkala dan lengkap meliputi perbandingan antara rencana dan realisasi program pembanguna n ZI, kendala, dan tindak lanjut apabila terdapat rencana kerja yang tidak terrealisasi.	Menyuas un perbandi ngan antara rencana kerja dan realisasi	Setiap TW	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
3	Nilai Pembang unan ZI	Nilai implementasi BerAKHLAK (BerAKHLAK implementatio n index) BBPOM di Bandar Lampung di bawah rata- rata BPOM.	Meningkatka n upaya internalisasi nilai BerAKHLAK kepada seluruh pegawai.	Melaksan akan Internalis asi/ Sosialis asi melalui Apel Internal rutin BBPOM di Bandar Lampung	Sepanja ng bulan sd Desemb er 2026	T		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Nilai Pembang unan ZI	Monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital belum dilaksanakan untuk seluruh teknologi informasi yang digunakan baik untuk pelayanan internal maupun layanan publik.	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital secara berkala terhadap seluruh teknologi informasi yang digunakan sehingga dapat diketahui dampak transformasi digital tersebut.	Melaksana kan monev setiap TW	Desemb er 2026	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
5	Nilai Pembang unan ZI	Belum terdapat bukti bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah memperhatika n kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai).	Memastikan bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah Memperhatik an kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai).	Pembaha san Baperjak at dengan memperti mbangka n kompete nsi jabatan	TW 1	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Nilai Pembang unan ZI	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembang an kompetensi belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembang an kompetensi agar dikaitkan dengan perbaikan kinerja belum dilakukan.	Melakuka n monev terhadap pengemb angan kompete nsi dikaitkan dengan perbaik an kinerja	Desemb er 2026	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
7	Nilai Pembang unan ZI	Pemberian <i>reward</i> berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal oleh Kepala Unit Kerja.	Menetapkan pemberian <i>reward</i> berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja.	Membuat SK untuk penetapa n pemberia n Reward	Setiap TW	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
8	Nilai Pembang unan ZI	Capaian kinerja telah dijadikan salah satu unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> .	Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> .	Melakuka n penilaian berdasar kan seluruh capaian kinerja	Setiap TW	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Nilai Pembang unan ZI	Terdapat inovasi terkait penguatan pengawasan, namun belum terdapat laporan implementasi inovasi tersebut.	Melengkapi laporan implementasi inovasi terkait area perubahan penguatan pengawasan.	Menyusu n laporan impleme ntasi inovasi pada area perubaha n penguata n pengawa san	Desemb er 2026	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
10	Nilai Pembang unan ZI	Monitoring pengaduan telah dilakukan secara berkala, namun belum terdapat analisis atas hasil monitoring pengaduan yang nihil.	Melakukan monitoring pengaduan secara berkala disertai dengan kendala yang dihadapi dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk analisis jika hasil monitoring pengaduan nihil.	Melakuka n Monev pengadu an dan melakuka n analisis terhadap pengadu an yang nihil	Setiap TW	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
11	Nilai Pembang unan ZI	Belum seluruhnya rekomendasi laporan SKM ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.	Menindaklanj uti seluruh rekomendasi laporan SKM sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut	Menyusu n rencana aksi tindak lanjut SKM	Desemb er 2026	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Nilai Pembang unan ZI	Laporan inovasi pelayanan publik belum menjelaskan latar belakang, dampak,monit oring dan evaluasi implementasi secara lengkap.	Melengkapi laporan inovasi pelayanan publik yang memuat latar belakang, dampak, monitoring dan evaluasi implementasi secara lengkap.	Menyusu n laporan inovasi layanan publik	Desemb er 2026	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
13	Nilai Pembang unan ZI	Sebagian besar capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan penguatan tata kelola kinerja, perbaikan layanan dan mendorong inovasi sehingga capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.	Membuat inovasi pemanta uan capaian kinerja untuk mendoro ng capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelum nya	Desemb er 2026	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai nilai pembangunan Zona Integritas pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan penguatan pada aspek monitoring dan evaluasi (monev) terhadap rencana kerja yang telah disusun. Hal ini sejalan dengan rekomendasi TPI pada hasil penilaian pembangunan ZI tahun 2025. Monev

yang berkala dan terstruktur akan membantu memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal, indikator capaian dapat terpenuhi, serta potensi kendala dapat diidentifikasi dan ditangani secara dini. Selain itu, diperlukan pemantauan target prioritas pembangunan Zona Integritas dan memastikan rencana aksi yang disusun untuk masing-masing target terlaksana dan terdokumentasi dengan baik oleh masing-masing pokja. Dengan penguatan pada kedua aspek tersebut, diharapkan pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

27. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 127. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	80,9	81,49	100,73%	Sangat Baik	

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Tabel 128. Komponen Penilaian AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

Tabel 129. Predikat Nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada tahun 2025, capaian realisasi Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung adalah 81,49 dari target 80,9 dengan capaian 100,73% sehingga kategorinya **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 130. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Periode	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2021	75,70	74,22	98,04
Tahun 2022	76,70	76,19	99,34
Tahun 2023	77,70	79,12	101,83
Tahun 2024	80,50	80,58	100,10
Tahun 2025	80,9	81,49	100,73

Pada tahun 2025, realisasi indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung sebesar 100,73%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian ini meningkat, dimana pada tahun 2024 adalah 100,10%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian 101,83%, maka capaian tahun 2025 cenderung menurun. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 dengan capaian masing-masing 98,04% dan 99,34%, capaian tahun 2025 meningkat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

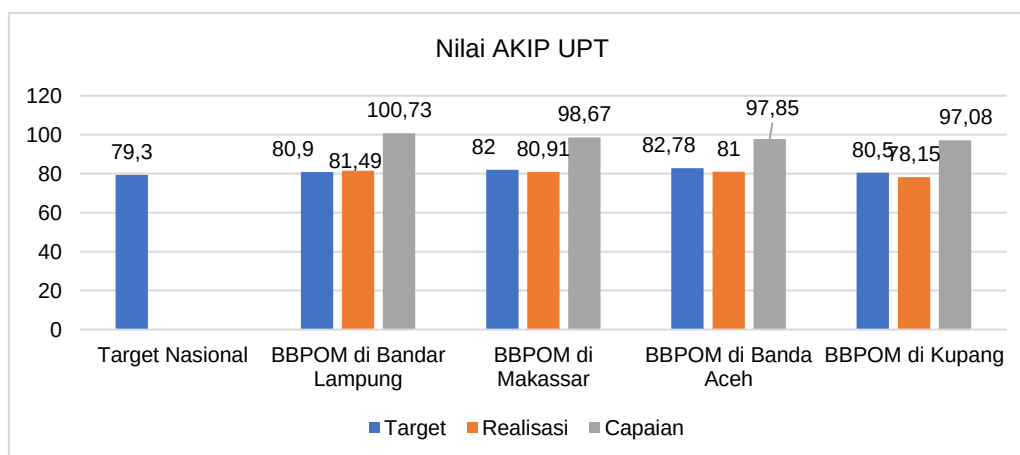
Tabel 131. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	82,9	81,49	98,3% 	Akan Tercapai

Pada tahun 2025, realisasi kinerja indikator Nilai AKIP UPT adalah 81,49 dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 82,9 sehingga capaiannya adalah 98,3%. Maka dapat diproyeksikan bahwa target periode akhir Renstra akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 132. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai AKIP UPT BPOM



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Nilai AKIP UPT”, dapat disampaikan bahwa secara umum menunjukkan capaian yang melampaui target. Dapat

disampaikan bahwa target nasional yang ditetapkan adalah 79,3 dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banda Aceh, dan BBPOM di Makassar. Sedangkan realisasi kinerja BBPOM di Kupang tidak mencapai target nasional.

Pada tingkat UPT, BBPOM di Bandar Lampung dengan target 80,9 dan berhasil merealisasikan sebesar 81,49, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,73%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 82 dengan realisasi sebesar 80,91 dan capaian kinerja sebesar 98,67%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 82,78 mampu merealisasikan sebesar 81, sehingga mencapai 97,85% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 80,5% dan mencatatkan realisasi sebesar 78,15%, dengan capaian kinerja yaitu 97,08%.

Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Bandar Lampung, diikuti oleh BBPOM di Banda Aceh, kemudian BBPOM di Makassar, dan yang terakhir BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 dikategorikan Nilai A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 133. Hasil Evaluasi AKIP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	19,68
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	10,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	16,66	14,77
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,58	81,49
Predikat			A	A

Berdasarkan pada penilaian tersebut komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal capaian tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024, sedangkan pada komponen Capaian kinerja capaian tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. BBPOM di Bandar Lampung telah melaksanakan implementasi perencanaan kinerja berikut:

a) Perencanaan Kinerja

- Dokumen Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025-2029 belum diformalkan dan belum dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen kinerja berkelanjutan;
- Telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, jangka pendek dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh stakeholder.

b) Pengukuran Kinerja

Dalam proses pengukuran kinerja, terdapat beberapa kriteria pada komponen pengukuran kinerja yang telah dipenuhi oleh BBPOM di Bandar Lampung, antara lain:

- Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Penyusunan Mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja;
- Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja;
- Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator;
- Penginputan data kinerja dan analisisnya pada Aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan

c) Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja BBPOM di Bandar Lampung telah menyajikan informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, antara lain:

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan dan tahunan;
- Upaya terkait keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan hambatan terkait kegagalan dalam pencapaian kinerja;

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dan analisisnya;
- Pemanfaatan informasi kinerja.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

BBPOM di Bandar Lampung telah menyusun laporan evaluasi internal secara berkala setiap triwulanan dengan menyajikan :

- Berita Acara Evaluasi Internal;
- Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan;
- Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);
- Kertas Kerja terkait capaian program/kegiatan dan indikator kinerja;
- Notulen rapat.

e) Capaian Kinerja

Tabel 134. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Kriteria	Tahun 2023		Tahun 2024		Keterangan
		Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	
5a	Kinerja output					
1	Target dapat dicapai	AA	3,75%	AA	3,75%	Indikator kinerja tahun 2024 tercapai seluruhnya
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A	3,00%	BB	2,76%	Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 26,32%
5b	Kinerja outcome					
1	Target dapat dicapai	A	5,17%	BB	4,6%	Indikator kinerja tahun 2024 yang tidak mencapai target sebanyak 26,47%
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	BB	4,74%	CC	3,66%	Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 41,38%

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 135. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Perencanaan							
1	Nilai AKIP	Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang	Memastikan keselarasan penyajian nomenklatur	Melakukan perbaikan terhadap ketidakselarasan	TW 2 2026	Y	S-54	Adanya ketidakselarasan nomenklatur pada

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai i risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		telah disusun, terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian antara lain: a. Adanya perbedaan penyajian nomenklatur Sasaran Strategis pada dokumen PK, RAPK, SK IKU dengan Draft Renstra b. Adanya perbedaan penyajian nomenklatur Indikator Kinerja pada dokumen PK dan RAPK dengan SK IKU	Sasaran Strategis pada dokumen PK, RAPK, SK IKU dengan Renstra	nomenklatur pada dokumen PK, RAPK, SK IKU dan Renstra				dokumen PK, RAPK, SK IKU dan Renstra
2	Nilai AKIP	Pada draft Renstra belum terdapat penjelasan masing-masing IKU	Memuat penjelasan masing-masing IKU pada dokumen Renstra	Melengkapi penjelasan masing-masing IKU pada dokumen Renstra	TW 2 2026	T		Penyusunan Dokumen RENSTRA tidak lengkap
3	Nilai AKIP	Pada draft Renstra menyajikan kerangka pendanaan per	Menyajikan kerangka pendanaan per program	Melengkapi kerangka pendanaan per	TW 2 2026	T		Penyusunan Dokumen RENSTRA tidak lengkap

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		program bukan per sasaran strategis dan tidak menjelaskan dari mana pendanaan tersebut berasal.	menjelaskan dari mana pendanaan tersebut berasal pada dokumen Renstra.	program dan menjelaskan asal pendanaan tersebut pada dokumen Renstra				
4	Nilai AKIP	Penetapan target 2025 awal belum seluruhnya dilengkapi Kertas Kerja Perhitungan dan Penetapan Target Indikator Kinerja yang menyajikan: a. Baseline data (data tahun sebelumnya/ benchmark/dll); b. Justifikasi perubahan target; c. Perhitungan; d. Penetapan target.	Memastikan kelengkapan penyusunan Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP untuk setiap indikator pada penetapan target,	Melengkapi penyusunan kertas kerja penetapan target indikator kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP untuk setiap indikator pada penetapan target	TW 2 2026	T		Penetapan target awal belum seluruhnya dilengkapi Kertas Kerja Perhitungan
B	Pengukuran kinerja							
1.	Nilai AKIP	Masih terdapat catatan terkait pengumpulan data kinerja melalui	Mengembangkan media pengumpulan data kinerja dengan	Bersama dengan Tim IT, melakukan pengembangan	Desember 2026	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		SIPADUPINTA R, pada Aplikasi tersebut input data dilakukan oleh ketua tim berdasarkan kertas kerja perhitungan yang dilakukan secara manual atau belum saling terkait secara langsung dengan media pengumpulan data kinerja sehingga masih perlu mekanisme kroscek untuk memastikan data yang diinput telah valid dan terhindar dari human error	mengintegrasikan antara kertas kerja perhitungan data kinerja dengan media pengumpulan data kinerja, sehingga data kinerja yang mengalir terhindar dari kesalahan dan meminimalkan kesalahan penginputan.	media pengumpulan data kinerja pada aplikasi SIPADUPI NTER secara terintegrasi				evaluasi AKIP
C.	Pelaporan Kinerja							
1.	Nilai AKIP	Pengisian realisasi dan capaian kinerja dilakukan secara tertib pada Aplikasi SIMETRIS, penyajian pada Aplikasi tersebut dijadikan dasar	Melakukan pengisian realisasi dan capaian kinerja dilakukan secara tertib pada Aplikasi SIMETRIS serta menyelaraskan dengan	Melakukan pengisian realisasi dan capaian kinerja secara tertib dan dilakukan cek dan recek	Setiap TW 2026	Y	SDM-19	Kesalahan perhitungan data realisasi kinerja

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		penyajian Laporan Evaluasi Internal (LEI), Laporan Kinerja Interim, dan Laporan Kinerja Tahunan, namun terdapat perbedaan penyajian data realisasi kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan Aplikasi SIMETRIS	Laporan Evaluasi Internal (LEI)					
2.	Nilai AKIP	Efisiensi penggunaan anggaran telah disajikan dalam Lapkin Interim dan Lapkin Tahunan, namun belum terdapat pembahasan efisiensi anggaran masing-masing indikator kinerja seperti belum menjelaskan upaya yang telah dilaksanakan jika disimpulkan hasilnya efisien dan kendala/	Melakukan analisis efisiensi anggaran secara memadai pada setiap indikator kinerja dengan menyajikan uraian upaya yang dilakukan ketika hasilnya efisien serta kendala atau justifikasi ketika terjadi ketidakefisienan, sehingga evaluasi penggunaan sumber daya	Melengkapi analisis efisiensi anggaran pada setiap indikator kinerja dengan menyajikan upaya yang telah dilakukank etika hasilnya efisien serta kendala atau justifikasi ketika terjadi ketidakefis	Setiap TW tahun 2026	Y	SDM-20	Kepatuhan Pelaporan kinerja belum optimal

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		hambatan maupun justifikasi jika disimpulkan hasilnya adalah adanya ketidakefisienan penggunaan sumber daya.	lebih komprehensif.	ienan, sehingga evaluasi penggunaan sumber daya lebih komprehe nsif.				
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1	Nilai AKIP	Rekomendasi atas hasil evaluasi telah disusun mulai periode TW 1 hingga TW2 2025, namun belum terlihat kesinambungan /keberlanjutan karena belum terlihat mana rencana aksi yang belum selesai berdasarkan rekomendasi;	Memastikan kesinambungan/ keberlanjutan pada rekomendasi dan rencana aksi yang telah disusun serta informasi penyelesaiannya pada setiap triwulan;	Melaksana kan monev secara berkala dengan memantau pelaksanaan rekomendasi dan rencana aksi setiap TW	Setiap TW tahun 2026	Y	SDM-20	Kepatuhan Pelaporan kinerja belum optimal
2	Nilai AKIP	Terdapat IKU yang capaiannya melebihi 120% pada SIMETRIS 2024 namun tidak diidentifikasi kendalanya antara lain: a. Persentase keberhasilan penindakan	Melakukan identifikasi kendala atau hambatan terhadap IKU terutama untuk yang tidak mencapai 100% dan yang melebihi 110%	Melaksana kan monev secara berkala dengan memantau dalam mengident ifikasi kendala atau hambatan	Setiap TW tahun 2026	Y	SDM-20	Kepatuhan Pelaporan kinerja belum optimal

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		di bidang Obat dan Makanan; b. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara. Target pada IKU tersebut memang tercapai namun dengan capaian lebih dari 120% menggambarnya bahwa perlunya mengidentifikasi kendala atau masalah pada pelaksanaan atau perencanaan.						
C.	Capaian Kinerja							
1	Nilai AKIP	Peningkatan Capaian Kinerja belum optimal	Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan memastikan rekomendasi pada evaluasi internal dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja	Melaksana kan evaluasi internal secara berkala dan melaksana kan setiap rekomend asi pada evaluasi internal	Setiap TW 2026	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. BBPOM di Bandar Lampung akan melakukan perbaikan atas saran/rekomendasi pada desk SAKIP.

Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 berupa:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun matriks reviu target untuk seluruh indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi penetapan target;
- b. Menyusun SK Penetapan IKU yang memuat seluruh indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pelaksanaan SOP Mikro yaitu Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dengan:
 - Penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja;
 - Menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data.
- b. Mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja pada Notulen rapat evaluasi internal;
- c. Menetapkan mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;
- d. Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.

3. Pelaporan Kinerja

a. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan

- Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;
- Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya;
- Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi;

b. Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;

c. Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Pada TW sebelumnya telah dilakukan pengisian LKE SAKIP dan menyiapkan data dukung untuk penilaian SAKIP

b. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:

- Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya;
- Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target;
- Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai).

c. Melaksanakan pengembangan kompetensi personil Tim SAKIP terkait implementasi SAKIP;

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 136. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	5	5	100	Baik	

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Tabel 137. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Pada tahun 2025, capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung adalah 5 (konversi dari nilai 95,48) dari target 5 dengan capaian 100% sehingga kategorinya adalah **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung terdapat perbedaan manual indikator antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 sehingga target dan realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

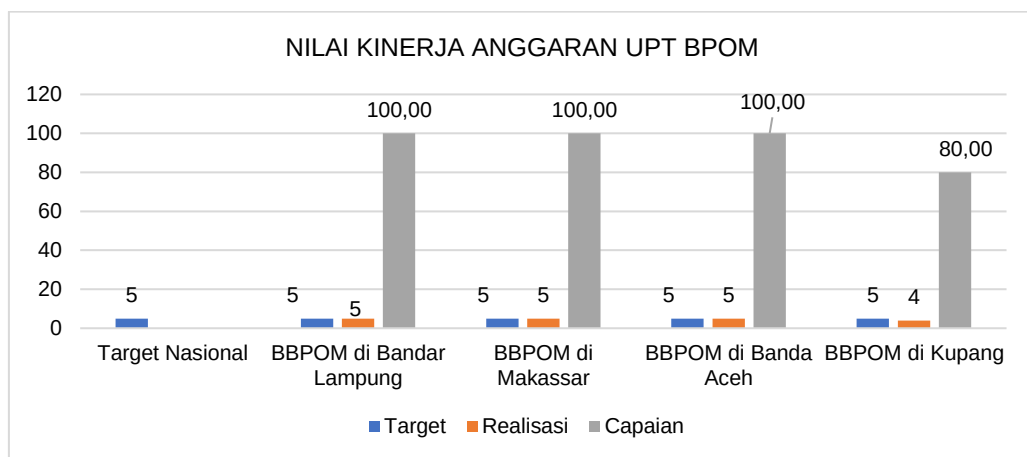
Tabel 138. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nama IKU	Target Periode Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5	5	100% 	Tercapai/ Melampaui

Pada tahun 2025, realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT adalah 5 dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 5 sehingga capaiannya adalah 100%. Maka dapat diproyeksikan bahwa target periode akhir Renstra akan tercapai/melampaui.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 139. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran UPT”, dapat disampaikan bahwa target nasional yang ditetapkan adalah 5 dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah mencapai target nasional adalah BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Makassar dan BBPOM di Banda Aceh. Sedangkan realisasi kinerja pada BBPOM di Kupang tidak mencapai target nasional.

Pada tingkat UPT, BBPOM di Bandar Lampung dengan target 5 dan berhasil merealisasikan sebesar 5, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 5 dengan realisasi sebesar 5 dan capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 5 mampu merealisasikan sebesar 5, sehingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 5 dan mencatatkan realisasi sebesar 4, dengan capaian kinerja yaitu 80%.

Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja tertinggi diperoleh bersama oleh BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Bandar Lampung, dan BBPOM di Makassar, lalu kemudian diikuti oleh BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Penilaian IKPA pada tahun 2025 sebesar 96,79. Berdasarkan penilaian 8 parameter IKPA, terdapat nilai yang kurang dari 100 yaitu nilai halaman III DIPA, sedangkan 6 parameter lainnya mendapatkan nilai 100 pada penyerapan anggaran, Revisi anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP dan Capaian Output dan pada parameter Dispensasi SPM tidak ada pengurangan nilai akibat dispensasi SPM Tidak tercapainya penilaian IKPA terkait parameter RPD disebabkan ketidaksesuaian dalam penginputan Belanja pegawai dan belanja modal yang berakibat besarnya deviasi (Melebihi 5 %).

Tabel 140. Penilaian IKPA BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	017	063	432850 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Nilai	100,00	78,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,79	100%	0,00	96,79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,79	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	89,29		100,00				100,00				

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaiannya efektifitas dan Efisiensi. Penilaian Efektifitas dihitung berdasarkan capaian output, sedangkan penilaian Efisiensi dihitung berdasarkan penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 3 parameter, nilai penggunaan SBK sebesar 100 sedangkan nilai capaian RO dan Efisiensi SBK kurang dari 100. Rendahnya nilai Efisiensi SBK karena penggunaan anggaran SBK melebihi 80 % anggaran yang tersedia.

Tabel 141. Penilaian EKA BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	063.01.432850	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	94,16	96,72	100,00	77,45

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 142. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeli ne	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Kinerja Anggaran	Capaian RPD tidak sesuai dengan target (!00%)	Melakukan pengawalan RPD dengan ketat	Melakukan pemantauan di minggu ke IV setiap bulan dan melakukan koordinasi ke setiap Substansi	Bulan berjalan sd Des 2026	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan
2	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai efektifitas Capaian RO dan Efisiensi SBK tidak 100 %	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian RO dan efisiensi SBK	Melakukan pemantauan setiap TW terhadap capaian RO dan melakukan pemantauan terhadap	Dese mber 2026	T		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeli ne	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				efisiensi SBK				

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan monev setiap bulan terhadap parameter Indikator Kinerja Pengelola Anggaran yaitu:

1. Kualitas perencanaan

- Pengawasan revisi anggaran. Berdasarkan penilaian IKPA nilai revisi anggaran sebesar 100
- Pengawasan Rencana Penarikan Dana setiap bulan maupun triwulan. Berdasarkan penilaian IKPA tahun 2025 Capaian nilai halaman III/RPD sebesar 78,57. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian dalam penginputan RPD pada aplikasi SAKTI

2. Kualitas Pelaksanaan anggaran

- Melakukan pengawasan realisasi anggaran. Hasil penilaian IKPA penyerapan anggaran sebesar 100 sesuai target karena adanya relaksasi
- Pemantauan terhadap belanja kontraktual. Hasil penilaian IKPA belanja kontraktual sebesar 100 sesuai target
- Pemantauan terhadap penyelesaian tagihan. Hasil penilaian IKPA penyelesaian tagihan adalah 100 %
- Pemantauan terhadap pengelolaan UP dan TUP. Hasil penilaian IKPA Pengelolaan UP dan TUP sebesar 100 %

3. Kualitas Hasil pelaksanaan Anggaran

Pemantauan Capaian Output. Hasil penilaian IKPA Capaian Output sebesar 100 %

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 143. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	2,9	2,84	97,93%	Baik	

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 144. Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 145. Nilai Maturitas Manajemen Risiko

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total/16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada tahun 2025, capaian realisasi indikator indeks manajemen risiko BBPOM di Bandar Lampung adalah 2,84 dimana target pada indikator ini adalah 2,9 sehingga capaiannya adalah 97,93% sehingga kategorinya adalah **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator indeks manajemen risiko BBPOM di Bandar Lampung merupakan indikator baru yang muncul pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra

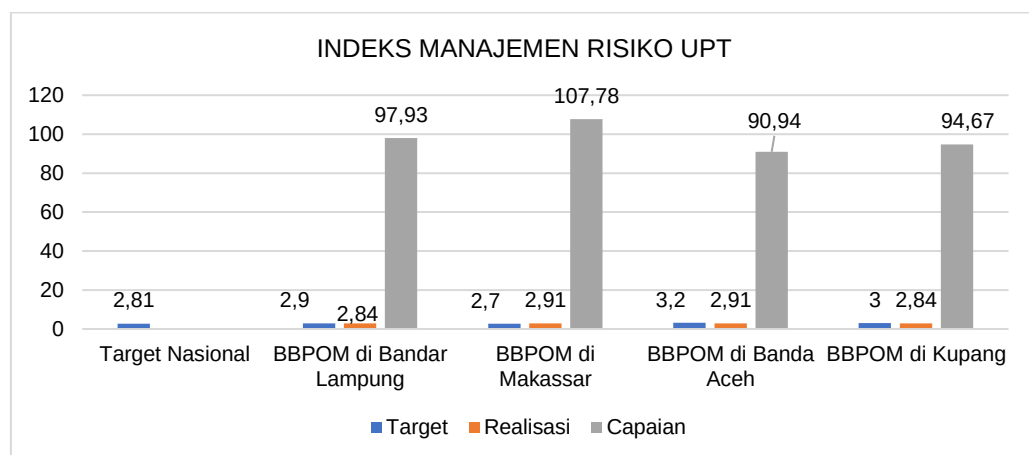
Tabel 146. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Periode Renstra Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Nama IKU	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung	3,1	2,84	91,61% 	Akan Tercapai

Pada tahun 2025, realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko UPT adalah 2,84 dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 3,1 sehingga capaiannya adalah 91,61%. Maka dapat diproyeksikan bahwa target periode akhir Renstra akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 147. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM



Berdasarkan realisasi indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko UPT”, dapat disampaikan bahwa target nasional yang ditetapkan adalah 2,81 dan keempat Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mencapai target nasional.

Pada tingkat UPT, BBPOM di Bandar Lampung dengan target 2,9 dan berhasil merealisasikan sebesar 2,84, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,93%. BBPOM di Makassar dengan target sebesar 2,7 dengan realisasi sebesar 2,91 dan capaian kinerja sebesar 107,78%. Selanjutnya, BBPOM di Banda Aceh dengan target 3,2 mampu merealisasikan sebesar 2,91 sehingga

mencapai 90,94% dari target yang ditetapkan. Adapun BBPOM di Kupang dengan target sebesar 3 dan mencatatkan realisasi sebesar 2,84 dengan capaian kinerja yaitu 94,67%.

Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Makassar dan BBPOM di Banda Aceh, lalu diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan pada penilaian Indeks Manajemen Risiko pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024, sehingga capaiannya hanya 97,93% terhadap target tahun 2025.

Adapun hasil ringkasan penilaian dari Inspektorat sebagai berikut:

- a. Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko;
- b. Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko ≥ 16 dengan respon risiko *reduce*, namun deskripsi tindakan mitigasi sama dengan aktivitas pengendalian saat ini (*existing control*);
- c. Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi atas risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, baik melalui *checklist* pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal;
- d. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
 - 1) Terdapat ketidakselarasan hasil penilaian efektivitas pengendalian dengan penurunan level risiko, sebagai contoh pada kode risiko SDM 16,17, dan 18, hasil penilaian efektivitas pengendalian adalah kelemahan signifikan dengan kesimpulan tidak efektif, namun terjadi penurunan level risiko sehingga risiko residual lebih kecil dibanding level risiko inheren;

- 2) Terdapat atribut pengendalian yang berupa aktivitas pengendalian saat ini (*existing control*), misalnya pada kode risiko O-07 dan O-09;
- 3) Terdapat *risk event* yang merupakan negasi dari indikator, misalnya pada kode risiko SDM-30, S-28, dan O-17;
- 4) Terdapat penyebab yang kurang spesifik dengan *risk event*, misalnya pada kode risiko S-28.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tabel 148. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Manajemen Risiko	Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko	Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/sertifikasi/refreshment/workshop/awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko;	1. Menyusun rencana pelatihan Manajemen Risiko tahun 2026 2. Melakukan sosialisasi 3. Melakukan sosialisasi/refreshment terkait manajemen Risiko pada apel pagi internal 4. Melibatkan seluruh personel dalam melakukan identifikasi risiko di tupoksi	Juli 2026	Y	S-51	Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode risiko	Peristiwa risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				masing- masing				
2	Indeks Manajemen Risiko	Masih terdapat kelemahan/ kesalahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko	Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaran Manajemen Risiko	1. Melakukan refreshment kepada seluruh personel melalui apel internal 2. Melakukan tinjauan terhadap dokumen manajemen risiko oleh pemilik risiko 3. Mengoptimalkan reviu dokumen manajemen risiko oleh tim auditor internal	Agus- tus 2026	Y	S-52	Penilaian atau reviu dokumen manajemen risiko oleh auditor internal belum dilakukan sesuai dengan juklak manajemen risiko

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2025 sudah dilakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi seluruh personel baik melalui sosialisasi dalam apel pagi ataupun melalui bimtek manajemen risiko dengan narasumber dari inspektorat II. Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek dilakukan secara daring dan belum dilengkapi dengan penugasan untuk melakukan penyusunan sehingga dirasa belum efektif untuk meningkatkan kompetensi terkait penyusunan daftar risiko.



Reviu risiko oleh auditor internal sudah dilakukan setelah penyusunan daftar risiko oleh masing-masing pemilik risiko sebelum dilaporkan melalui SAPA APIP pada semester 2 tahun 2025, akan tetapi persepsi dan kompetensi dari masing-masing auditor belum sama sehingga hasil reviu oleh auditor belum komprehensif.

Monev berkala terhadap pelaksanaan aktivitas pengendalian baik yang merupakan mitigasi risiko ataupun aktivitas pengendalian yang ada saat ini sudah dilakukan tetapi perlu ditingkatkan agar dapat berjalan dengan efektif, dan efisien sehingga dapat menurunkan level risiko.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 149. Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Adanya efisiensi anggaran diawal TW I mengakibatkan adanya perubahan perencanaan dan pelaksanaan sampling serta pengujian, jumlah sampel yang dilakukan pengawasan pada TW I mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum adanya efisiensi. 2. Perubahan dan penyusunan kembali rencana sampling sesuai dengan target efisiensi menyebabkan sampling sedikit terhambat sehingga berimbas terhadap waktu masuknya sampel ke laboratorium. Diperlukan strategi untuk dapat menyelesaikan sampel tepat waktu sehingga laporan hasil uji dapat dikirim ke pusat pada bulan yang sama dengan pelaksanaan sampling. 3. Beberapa surat permintaan tindak lanjut baru diterima di akhir TW I sehingga	Terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi yang Baik agar produk sediaan farmasi yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai. Selain itu juga mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi.	- Terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi yang beredar di Provinsi Lampung - Memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi yang Baik agar produk sediaan farmasi yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai. Selain itu juga mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi."	Close	- Terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi yang beredar di Provinsi Lampung - Memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi yang Baik agar produk sediaan farmasi yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai. Selain itu juga mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi.	Desember 2025	Y	S-01	Banyaknya hasil uji sampel sediaan farmasi, pangan olahan dan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat mutu dan keamanan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			belum dapat diselesaikan karena harus dilakukan monitoring dan evaluasi di sarana terkait.								
		Juni	- Terdapat 1 surat yang belum dilakukan monitoring TL pembersihan pasar, karena surat baru diterima pada tgl 25 Juni 2025 - Terdapat 27 sampel OBA bulan Mei yang baru selesai di bulan Juni dan melewati timeline 15 HK dikarenakan: 1. Terjadi penumpukan sampel di laboratorium mikrobiologi karena semua komoditi diuji parameter mikrobiologi 2. Keterbatasan jumlah penguji di lab mikrobiologi dan juga peralatan uji sehingga pengerjaan sampel dari semua komoditi di lakukan secara bergiliran sehingga komoditi yang terakhir diuji akan melewati batas timeline pengujian 3. sampel OBA yang hasil uji nya TMS memerlukan pengulangan sehingga membutuhkan waktu pengujian yang lebih lama (>15 HK)	- dilakukan monitoring bulan berikutnya - melakukan pengaturan waktu masuk sample ke laboratorium pada bulan juli sehingga tidak terjadi penumpukan sampel - sampel komoditi pangan dan obat masuk ke lab pada minggu I sedangkan sampel OBASKK dan Kosmetik masuk ke lab pada minggu ke 3, diharapkan dengan pembagian jadwal masuk ke lab ini timeline pengujian untuk semua komoditi tidak jatuh pada saat yang bersamaan - melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline	Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap	Close	Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap	30 Juli 2025	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati timeline yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			- Sampel Obat yang diuji di BBPOM Bandar Lampung sudah selesai semua baik sampel internal ataupun sampel regional, akan tetapi untuk sampel yang di sampling di BBPOM Bandar Lampung dan diuji di balai regional terdapat 18 sampel yang belum selesai uji diantaranya (7 sampel diuji di BPOM Jambi, 2 sampel diuji di BBPOM Palembang, 8 sampel diuji di BBPOM Pekanbaru dan 1 sampel vaksin diuji di Balai Pengujian produk Biologi)								
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	1. Perubahan timeline pada sampel obat bahan alam dan kosmetik menjadi 15 HK sedikit banyak menjadi kendala sekaligus tantangan bagi laboratorium pengujian untuk mencari strategi agar dapat mencapai target tersebut dengan keterbatasan kapasitas laboratorium yang ada saat ini. 2. Pada sampel obat dimana pengujian sampelnya dilakukan di beberapa Balai Anggota Region Pekanbaru sering	1. Melakukan pengaturan waktu masuk sample ke laboratorium pada bulan juli dan seterusnya sehingga tidak terjadi penumpukan sampel di lab mikrobiologi, sampel komoditi pangan dan obat masuk ke laboratorium pada minggu I sedangkan sampel OBASKK dan Kosmetik masuk ke laboratorium pada minggu ke III, diharapkan dengan pembagian jadwal masuk ke lab ini timeline pengujian untuk semua komoditi tidak jatuh pada saat yang bersamaan sehingga timeline pengujian dapat terpenuhi. 2. Melakukan koordinasi dengan anggota region Pekanbaru untuk	1. Sudah dilakukan pembagian masuknya sampel ke laboratorium menjadi 2 tahap di minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. 2. Sudah berkoordinasi dengan balai-balai anggota region Pekanbaru terkait percepatan pengujian dan pelaporan sampel, dan semua sampel sudah selesai uji pada bulan berikutnya dengan kondisi semua memenuhi timeline pengujiannya 3. Telah dilakukan	Close	1. Sudah dilakukan pembagian masuknya sampel ke laboratorium menjadi 2 tahap di minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. 2. Sudah berkoordinasi dengan balai-balai anggota region Pekanbaru terkait percepatan pengujian dan pelaporan sampel, dan semua sampel sudah selesai uji pada bulan berikutnya dengan kondisi semua memenuhi timeline pengujiannya 3. Telah dilakukan	30 Juli 2025	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati timeline yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			terjadi kendala terkait pemenuhan pelaporan tepat waktu karena proses pelaksanaan pengujian di balai lain berada di luar kendali BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit penyampling. 3. Beberapa surat permintaan tindak lanjut baru diterima di akhir TW 2 sehingga belum dapat diselesaikan karena harus dilakukan monitoring dan evaluasi di sarana terkait.	menyelesaikan pengujian sampel terutama sampel obat sesuai timeline pengujian. 3. Mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi dan juga melakukan monitoring terhadap Surat Edaran yang masuk pada bulan selanjutnya untuk memastikan semua SE sudah ditindaklanjuti.	tindaklanjut terhadap surat edaran monitoring sediaan farmasi tidak memenuhi syarat sampai dengan TW II, meliputi monitoring SE obat: 3 surat, OBA: 31 surat dan kosmetik: 51 surat edaran"		tindaklanjut terhadap surat edaran monitoring sediaan farmasi tidak memenuhi syarat sampai dengan TW II, meliputi monitoring SE obat: 3 surat, OBA: 31 surat dan kosmetik: 51 surat edaran"				
		Juli	- Terdapat 2 sampel regional yang belum selesai akan tetapi belum masuk batas timeline (Timeline pengujiannya di bulan agustus). Untuk sampel yang di sampling di BBPOM Bandar Lampung dan diuji di balai regional terdapat 7 sampel yang belum selesai uji yaitu (2 sampel diuji di BPOM Jambi, 2 sampel diuji di BBPOM Palembang, 1 sampel diuji di BBPOM Pekanbaru dan 2 sampel vaksin diuji di Balai Pengujian produk Biologi) - Sampel OBASKK-Kosmetik capaian	- hasil evaluasi terhadap pengaturan masuknya sampel OBASKK-Kosmetik menjadi minggu ke 3 (tidak berbarengan dengan masuknya sampel semua komoditi) dapat mengurai antrian sampel di lab mikrobiologi sehingga timeline pengujian untuk sampel OBASKK-Kosmetik pada bulan Juli dapat tercapai. Dengan begitu pengaturan masuknya sampel ke laboratorium akan terus dilanjutkan untuk bulan agustus dan seterusnya	Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap	Close	Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap	31 Agustus 2025	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati timeline yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pengujian nya belum dapat ikut diperhitungkan untuk bulan Juli karena sampel masih dalam proses uji pada akhir Juli. Sampel OBASKK-Kosmetik masuk pada minggu ke 3 Juli sehingga timeline pengujiannya pun jatuh pada minggu ke 2 agustus.								
		Agustus	- Ada 26 sampel yang disampling BBPOM Lampung yang masih proses uji dengan timeline di minggu pertama September - Sampel regional yang diuji di BBPOM Lampung ada 15 sampel yang masih proses uji dengan timeline di minggu pertama dan kedua september	- melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline	Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap	Close	Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap	31 september 2025	Y	O-02	Pengiriman sampel dalam rangka pelaksanaan regionalisasi laboratorium tidak sesuai jadwal/perencanaan
		September	- Ada 19 sampel yang disampling BBPOM Lampung yang masih proses uji dengan timeline di minggu pertama Oktober - Sampel regional yang diuji di BBPOM Lampung ada 2 sampel yang masih proses uji dengan timeline di minggu pertama Oktober	- melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline	Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap mempercepat pengirimn sampel yang harus dilakukan uji konfirmasi ke balai lain	Close	Tetap Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan yang sudah di rencanakan untuk split sampling dan pengujian menjadi 2 tahap mempercepat pengirimn sampel yang harus dilakukan uji konfirmasi ke balai lain	31 October 2025	Y	O-02	Pengiriman sampel dalam rangka pelaksanaan regionalisasi laboratorium tidak sesuai jadwal/perencanaan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Perubahan timeline pada sampel obat bahan alam dan kosmetik yang semula 30 HK menjadi 15 HK sedikit banyak menjadi kendala sekaligus tantangan bagi laboratorium pengujian untuk mencari strategi agar dapat mencapai target tersebut dengan keterbatasan kapasitas laboratorium yang ada saat ini. 2. Kerusakan pada alat uji (HPLC dan ICP) menyebabkan antrian pada pemakaian alat yang lain sehingga menghambat penyelesaian sampel. 3. Pada sampel obat dimana pengujian sampelnya dilakukan di beberapa Balai Anggota Region Pekanbaru sering terjadi kendala terkait pemenuhan pelaporan tepat waktu karena proses pelaksanaan pengujian di balai lain berada di luar kendali BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit penyampling. 4. Beberapa surat permintaan tindak lanjut baru diterima di akhir TW 3 sehingga belum dapat diselesaikan karena	1. Tetap melakukan monitoring dan evaluasi pengaturan waktu masuk sampel ke laboratorium menjadi 2 tahap seperti yang sudah dilakukan pada TW III 2. Melakukan koordinasi dengan anggota region Pekanbaru untuk menyelesaikan pengujian sampel terutama sampel obat sesuai timeline pengujian. 3. Mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi dan juga melakukan monitoring terhadap Surat Edaran yang masuk pada bulan selanjutnya untuk memastikan semua SE sudah ditindaklanjuti.	1. Sudah dilakukan pembagian masuknya sampel ke laboratorium menjadi 2 tahap di minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. 2. Sudah berkoordinasi dengan balai-balai anggota region Pekanbaru terkait percepatan pelngujian dan pelaporan sampel, dan semua sampel sudah selesai uji pada bulan berikutnya dengan kondisi semua memenuhi timeline pengujiannya 3. Telah dilakukan tindaklanjut terhadap surat edaran monitoring sediaan farmasi tidak memenuhi syarat sampai dengan TW II, meliputi monitoring SE obat: 3 surat, OBA: 31 surat dan kosmetik: 51 surat edaran"	Close	1. Sudah dilakukan pembagian masuknya sampel ke laboratorium menjadi 2 tahap di minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. 2. Sudah berkoordinasi dengan balai-balai anggota region Pekanbaru terkait percepatan pelngujian dan pelaporan sampel, dan semua sampel sudah selesai uji pada bulan berikutnya dengan kondisi semua memenuhi timeline pengujiannya 3. Telah dilakukan tindaklanjut terhadap surat edaran monitoring sediaan farmasi tidak memenuhi syarat sampai dengan TW II, meliputi monitoring SE obat: 3 surat, OBA: 31 surat dan kosmetik: 51 surat edaran"	TW IV 2025	Y	O-02	Pengiriman sampel dalam rangka pelaksanaan regionalisasi laboratorium tidak sesuai jadwal/perencanaan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			harus dilakukan pemeriksaan di sarana terkait. 5. Pergeseran renlak sampling obat yang disebabkan karena laboratorium regional penguji terdapat kendala ketersediaan reagen dan/atau kerusakan alat uji.								
		Oktober	- Ada 11 sampel obat yang disampling BBPOM Lampung yang masih proses uji di balai anggota regional Pekanbaru dengan timeline di minggu kedua bulan November - Semua sampel regional yang diuji di BBPOM Lampung sudah semua selesai diuji.	Melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline	Melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline	Close	Melakukan koordinasi dengan anggota region untuk penyelesaian sampel agar tetap sesuai timeline	November 2025	Y	O-02	Pengiriman sampel dalam rangka pelaksanaan regionalisasi laboratorium tidak sesuai jadwal/perencanaan
		November	- Ada 2 sampel Obat yang masih proses uji di BBPOM Palembang dan Balai Pengujian Produk Biologi, dan 11 sampel yang masih proses uji di BBPOM Bandar Lampung - Ada 2 sampel OBA yang menunggu uji konfirmasi karena diduga TMS - Ada 37 sampel yang disampling BBPOM Lampung dan 2 sampel yang di sampling BPOM Tulang bawang yang	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum batas waktu pengujian	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 12 Desember 2025	Close	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 12 Desember 2025	Desember 2025	Y	O-02	Pengiriman sampel dalam rangka pelaksanaan regionalisasi laboratorium tidak sesuai jadwal/perencanaan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			masih proses uji dengan timeline di minggu pertama Desember								
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTDESO	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Walaupun pelaporan KTD/ESO hingga Triwulan I 2025 telah sejalan dengan target tahunan (26% dari 45 sarana), tetap terdapat sejumlah kendala yang berpotensi menjadi risiko kegagalan jika tidak segera ditangani. Risiko ini penting untuk diidentifikasi sejak dini agar dapat dilakukan mitigasi secara tepat sasaran. Kendala yang telah kami identifikasi pada TW 1 yaitu tidak semua sarana terbiasa atau memiliki akses yang baik terhadap sistem pelaporan daring seperti e-MESO. Beberapa masih bergantung pada pelaporan manual yang membutuhkan waktu lebih lama. Untuk mengatasi hal ini, kami telah membuat WA grup untuk berkonsultasi mengenai tatacara pelaporan melalui e-MESO	1. Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting secara real-time. 2. Penyusunan Panduan Ringkas & Infografis Edukatif Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan. 3. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk melaporkan.	1. Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting secara real-time. 2. Penyusunan Panduan Ringkas & Infografis Edukatif Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan. 3. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk	Close	1.Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting secara real-time. 2.Penyusunan Panduan Ringkas & Infografis Edukatif Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan. 3. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk	Selama tahun 2025	Y	S-34	Tenaga kesehatan di fasyankes tidak dapat melakukan pelaporan pada aplikasi e-MESO

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					sarana lainnya untuk turut aktif melaporkan.		turut aktif melaporkan.				
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Walaupun pelaporan KTD/ESO hingga Triwulan II 2025 telah sejalan dengan target tahunan (26% dari 45 sarana), tetap terdapat sejumlah kendala yang berpotensi menjadi risiko kegagalan jika tidak segera ditangani. Risiko ini penting untuk diidentifikasi sejak dini agar dapat dilakukan mitigasi secara tepat sasaran. Kendala yang telah kami identifikasi pada TW II yaitu tidak semua sarana terbiasa atau memiliki akses yang baik terhadap sistem pelaporan daring seperti e-MESO. Beberapa masih bergantung pada pelaporan manual yang membutuhkan waktu lebih lama. Untuk mengatasi hal ini, kami telah membuat WA grup untuk berkonsultasi mengenai tatacara pelaporan melalui e-MESO	1. Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting secara real-time. 2. Penyusunan Panduan Ringkas & Infografis Edukatif Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan. 3. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk turut aktif melaporkan.	1. Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting secara real-time. 2. Penyusunan Panduan Ringkas & Infografis Edukatif Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan. 3. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk	closed	1. Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting secara real-time. 2. Penyusunan Panduan Ringkas & Infografis Edukatif Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan. 3. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk	Selama tahun 2025	Y	S-34	Tenaga kesehatan di fasyankes tidak dapat melakukan pelaporan pada aplikasi e-MESO

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					turut aktif melaporkan.		turut aktif melaporkan.				
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Secara keseluruhan, kegiatan telah terlaksana dengan baik tanpa kendala berarti. Namun, dengan telah tercapainya target tahunan pelaporan KTD/ESO oleh fasyankes yang diberikan KIE sampai dengan TW III, menimbulkan kendala baru. Mengingat bahwa kegiatan pelaporan oleh fasyankes tersebut adalah hal yang tidak dapat diprediksi sehingga memungkinkan dalam TW IV terjadi penambahan jumlah laporan yang membuat capaian terhadap IKU menjadi lebih dari 110%.	1. Pemberian penghargaan atau apresiasi (misalnya, sertifikat, publikasi di media sosial) kepada fasyankes atau tenaga kesehatan yang paling aktif dan konsisten dalam melakukan pelaporan. 2. Optimalisasi Grup Komunitas dengan memanfaatkan grup WhatsApp tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi studi kasus atau contoh keberhasilan pelaporan dari sesama fasyankes. Ini akan membangun komunitas dan semangat kolektif. 3. Pemberian penghargaan atau apresiasi (misalnya, sertifikat, publikasi di media sosial) kepada fasyankes atau tenaga kesehatan yang paling aktif dan konsisten dalam melakukan pelaporan.	1. Optimalisasi Grup Komunitas dengan memanfaatkan grup WhatsApp tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi studi kasus atau contoh keberhasilan pelaporan dari sesama fasyankes. Ini akan membangun komunitas dan semangat kolektif. 2. Pemberian penghargaan atau apresiasi (misalnya, sertifikat, publikasi di media sosial) kepada fasyankes atau tenaga kesehatan yang paling aktif dan konsisten dalam melakukan pelaporan.	closed	1. Telah selesai ditindaklanjuti: Optimalisasi Grup Komunitas dengan memanfaatkan grup WhatsApp tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi studi kasus atau contoh keberhasilan pelaporan dari sesama fasyankes. Ini akan membangun komunitas dan semangat kolektif. 2. Sedang Progres: Pemberian penghargaan atau apresiasi (misalnya, sertifikat, publikasi di media sosial) kepada fasyankes atau tenaga kesehatan yang paling aktif dan konsisten dalam melakukan pelaporan.	Desember 2025	Y	S-34	Tenaga kesehatan di fasyankes tidak dapat melakukan pelaporan pada aplikasi e-MESO
		Oktober	Tidak ada kendala	Melakukan pemantauan pelaporan KTS ESO melalui aplikasi E-Meso	Melakukan pemantauan pelaporan KTD ESO melalui aplikasi E-Meso	closed	Melakukan pemantauan pelaporan KTD ESO melalui aplikasi E-Meso	Desember 2025	Y	S-34	Tenaga kesehatan di fasyankes tidak dapat melakukan pelaporan pada aplikasi e-MESO
		November	Tidak ada kendala	Melakukan pemantauan pelaporan KTS ESO melalui aplikasi E-Meso	Melakukan pemantauan pelaporan KTD ESO melalui aplikasi E-Meso	closed	Melakukan pemantauan pelaporan KTD ESO melalui aplikasi E-Meso	Desember 2025	Y	S-34	Tenaga kesehatan di fasyankes tidak dapat melakukan pelaporan pada aplikasi e-MESO
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	Juni	Sebanyak 115 sampel yang disampling telah selesai uji balai sendiri	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait	closed	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait	31 Juli 2025	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati time line yang telah ditetapkan pada

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		sebanyak 114 sampel, 1 sampel TIE.	parameter uji yang belum selesai	parameter uji yang belum selesai		parameter uji yang belum selesai				sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Sampel dengan sebagian parameter uji dikerjakan balai lain kadangkala menjadi kendala dalam memenuhi target pelaporan tepat waktu karena proses pelaksanaan pengujian di balai lain berada di luar kendali BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit penyampling.	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai agar pengujian dapat dipercepat dan hasil uji dapat dilaporkan tepat waktu. Selain itu, untuk perbaikan kinerja, terus dilakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di Provinsi Lampung untuk memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Cara Distribusi Pangan Olahan agar produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai	closed	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Jambi terkait parameter uji yang belum selesai	15 Agustus 2025	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati time line yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB
		September	Sebanyak 22 sampel belum selesai uji	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 Oktober 2025	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 Oktober 2025	closed	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 Oktober 2025	15 Oktober 2025	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati time line yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Kerusakan alat uji (ICP-MS) yang menyebabkan pengujian menjadi terhambat dan membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang. 2. Sampel dengan sebagian parameter uji dikerjakan balai lain kadangkala menjadi	Terus dilakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di Provinsi Lampung untuk memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik agar produk pangan olahan yang beredar di	Pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di Provinsi Lampung untuk memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan	closed	Pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di Provinsi Lampung untuk memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan	TW IV Tahun 2025	Y	O-03	Peralatan laboratorium tidak berfungsi dengan baik, tidak stabil dan rentan mengalami kerusakan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kendala dalam memenuhi target pelaporan tepat waktu karena proses pelaksanaan pengujian di balai lain berada di luar kendali BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit penyampling.	masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.	Olahan yang Baik dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik agar produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.		Olahan yang Baik dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik agar produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.				
		Oktober	Sebanyak 30 sampel belum selesai uji	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 November 2025	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel, koordinasi dengan balai Pekanbaru untuk mempercepat pelaporan hasil uji sampel regional	closed	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel, koordinasi dengan balai Pekanbaru untuk mempercepat pelaporan hasil uji sampel regional	15 November 2025	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati time line yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB
		November	sebanyak 8 sampel masih dalam proses uji	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 November 2025	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 Desember 2025	closed	Mempercepat proses pengujian dan pelaporan sampel sebelum 15 Desember 2025	15 Desember 2025	Y	S-03	Penyelesaian pengujian melewati time line yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Jumlah sampel tidak memenuhi syarat pengujian 5plo untuk uji mikrobiologi.	Melakukan koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait melalui partisipasi dalam Tim Gerak Cepat penanganan KLB dan satuan tugas Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, dalam rangka menjaga validitas pengujian dan menemukan agen penyebab keracunan, BBPOM di Bandar Lampung melakukan investigasi dan menerapkan JMHP dalam setiap proses pengujian atas sampel KLB KP yang diterima.	Koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait melalui partisipasi dalam Tim Gerak Cepat penanganan KLB dan satuan tugas Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, dalam rangka menjaga validitas pengujian dan menemukan agen penyebab keracunan, BBPOM di Bandar Lampung melakukan investigasi dan menerapkan JMHP dalam setiap proses pengujian atas	closed	Koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait melalui partisipasi dalam Tim Gerak Cepat penanganan KLB dan satuan tugas Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, dalam rangka menjaga validitas pengujian dan menemukan agen penyebab keracunan, BBPOM di Bandar Lampung melakukan investigasi dan menerapkan JMHP dalam setiap proses pengujian atas	TW IV Tahun 2025	Y	O-25	Sampel uji untuk KLB tidak representatif untuk uji

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					sampel KLB KP yang diterima.		sampel KLB KP yang diterima.				
		Oktober	Jumlah sampel tidak memenuhi syarat pengujian 5plo untuk uji mikrobiologi	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	closed	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	30 Oktober 2025	Y	O-25	Sampel uji untuk KLB tidak representatif untuk uji
		November	Jumlah sampel tidak memenuhi syarat pengujian 5plo untuk uji mikrobiologi	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	closed	Tetap melaksanakan pengujian dengan menerapkan JMHP sesuai kondisi sampel yang diterima	30 November 2025	Y	O-25	Sampel uji untuk KLB tidak representatif untuk uji
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Karena beban pengujian sampel Obat dan Makanan yang tinggi, hasil pengujian sampel PIRT yang TMS baru dapat diketahui pada akhir bulan Juni sehingga tindak lanjut terhadap 6 sampel TMS baru dapat dilaksanakan pada awal bulan Juli. Namun demikian target tahunan tetap tercapai.	Terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan industri rumah tangga pangan yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk industri rumah tangga pangan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat.	Melakukan pengawasan terhadap produk sediaan industri rumah tangga pangan yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk industri rumah tangga pangan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat.	closed	Melakukan pengawasan terhadap produk sediaan industri rumah tangga pangan yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk industri rumah tangga pangan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat.	TW IV Tahun 2025	Y	S-48	Tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi, sampel pangan olahan, sampel KLB keracunan, sampel PIRT berisiko yang Tidak Memenuhi Syarat melebihi SLA yang telah ditetapkan
6	Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	Januari	Belum memberikan rekomendasi hasil inspeksi ke lintas sektor	Melakukan monitoring feed back rekomendasi dari lintas sektor jika sudah ada rekomendasi yang diterbitkan	Melakukan monitoring feed back rekomendasi dari lintas sektor jika sudah ada rekomendasi yang diterbitkan	closed	Melakukan monitoring feed back rekomendasi dari lintas sektor jika sudah ada rekomendasi yang diterbitkan	TW 2 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
		Februari	Sarana distribusi belum memberikan feed back TL	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin	- Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi	closed	- Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi	TW2 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	oleh stakeholder			2. Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online	pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online - Menyusun KAK Inovasi "Klinik CAPA"		pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online - Menyusun KAK Inovasi "Klinik CAPA"				
		Maret	Sarana produksi khususnya UMKM belum memberikan feed back rekomendasi	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin 2. Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online	1. KAK kegiatan sudah disusun 2. Aplikasi pendaftaran konsultasi di inovasi "Klinik CAPA" telah selesai dan akan diluncurkan pada Bulan Mei 2025 3. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha	closed	1. KAK kegiatan sudah disusun 2. Aplikasi pendaftaran konsultasi di inovasi "Klinik CAPA" telah selesai dan akan diluncurkan pada Bulan Mei 2025 3. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha	TW 2 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
		Mei	Terdapat sarana produksi MD UMKM dan saryanfar yang belum memberikan CAPA	Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA	Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA	closed	Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA	TW 2 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
		Juni	Rendahnya feed back tindak lanjut dari sarana produksi MD UMKM dan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah seperti PKM, RS dan IFK	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	closed	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW 3 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
		Juli	Rendahnya feed back tindak lanjut dari sarana produksi MD UMKM dan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan	closed	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan	TW 4 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			seperti PKM, RS dan IFK		koordinasi lintas sektor		koordinasi lintas sektor				
		Agustus	Rendahnya feed back tindak lanjut dari sarana produksi MD UMKM dan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah seperti PKM, RS dan IFK	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	closed	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW 4 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
		September	Rendahnya feed back tindak lanjut dari sarana produksi MD UMKM dan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah seperti PKM, RS dan IFK	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	closed	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW 4 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh produsen pangan olahan khususnya UMKM masih rendah jika dibandingkan dengan sarana yang lain. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman terkait pembuatan CAPA masih perlu ditingkatkan. 2. Pengiriman surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke pelaku usaha masih menggunakan nomor WA pribadi petugas sehingga berpotensi terjadinya conflict of interest.	Sebagai upaya penyempurnaan ke depan maka perlu dioptimalkan pemakaian aplikasi "Klinik CAPA" sebagai media konsultasi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA. Selain itu, upaya perbaikan terkait peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam membuat CAPA dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan lintas sektor lain terkait seperti organisasi profesi.	1. Peluncuran inovasi Klinik CAPA 2. Bimtek pembuatan CAPA kepada pelaku usaha 3. Terdapat no WA layanan di substansi inspeksi yang dipergunakan dalam mengirim surat TL kepada pelaku usaha yang tidak memiliki email	closed	1. Peluncuran inovasi Klinik CAPA 2. Bimtek pembuatan CAPA kepada pelaku usaha 3. Terdapat no WA layanan di substansi inspeksi yang dipergunakan dalam mengirim surat TL kepada pelaku usaha yang tidak memiliki email	Des 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Oktober	Rendahnya feed back tindak lanjut dari sarana produksi MD UMKM dan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah seperti PKM, RS dan IFK	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	closed	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW 4 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
		November	Rendahnya feed back tindak lanjut dari sarana produksi MD UMKM dan sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah seperti PKM, RS dan IFK	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	closed	- Mengaktifkan aplikasi klinik CAPA sebagai media pelaku usaha berkonsultasi terkait kesulitan membuat CAPA - meningkatkan koordinasi lintas sektor	TW 4 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	Terdapat 1 UMOT Tutup	Pembuatan BA dan Pernyataan Tutup dari Pemilik UMOT yang tutup	BA Pemeriksaan sarana produksi dan surat pernyataan sudah dilaksanakan	closed	BA Pemeriksaan sarana produksi dan surat pernyataan sudah dilaksanakan	April 2025	Y	O-18	Data pengawasan terkait surat tindak lanjut dan CAPA tidak tersedia real time
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Kendala yang dihadapi adalah adanya sarana yang tutup permanen termasuk satu sarana produksi UMOT yang berada di Bandar Lampung.	Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilaksanakan sesuai renlak dan melakukan sosialisasi terhadap pedoman IKU / Definisi operasional dan pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi kosmetik melalui media internal (inspection index)	- Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilaksanakan sesuai renlak - Sosialisasi terhadap pedoman IKU / Definisi operasional dan pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi kosmetik melalui media internal (inspection index)	closed	- Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilaksanakan sesuai renlak - Sosialisasi terhadap pedoman IKU / Definisi operasional dan pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi kosmetik melalui media internal (inspection index)	Juni 2026	Y	O-18	Data pengawasan terkait surat tindak lanjut dan CAPA tidak tersedia real time
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Kendala yang dihadapi adalah kurang cepatnya petugas yang disebabkan kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut dan penginputan	Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah dengan melakukan sosialisasi pedoman IKU / definisi operasional dan pedoman tindak lanjut	-Sosialisasi pedoman IKU / definisi operasional dan pedoman tindak lanjut pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana	closed	-Sosialisasi pedoman IKU / definisi operasional dan pedoman tindak lanjut pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana	Oktober 2025	Y	SDM-06	Kompetensi pegawai hasil rotasi belum memenuhi persyaratan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			hasil pemeriksaan ke dalam SIPT.	pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam dan kosmetik melalui media informasi internal (inspection index).	produksi obat bahan alam dan kosmetik melalui media informasi internal (inspection index).		produksi obat bahan alam dan kosmetik melalui media informasi internal (inspection index).				
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	-	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	closed	Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Februari	-	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	closed	Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Maret	-	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	closed	Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Pelaku usaha produksi pangan olahan didominasi oleh UMKM dengan keterbatasan pengetahuan dan sarana prasarana sehingga kesulitan dalam pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. 2. Pelaku usaha masih enggan dan sebagian belum paham dalam membuat CAPA terhadap temuan/rekomendasi yang disampaikan.	1. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital 2. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi 3. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA 4. Melakukan Pembinaan melalui surat tindak lanjut atau melalui KIE secara tematik kepada pelaku usaha terkait	1. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital 2. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi 3. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA 4. Melakukan Pembinaan melalui surat tindak lanjut atau melalui KIE secara tematik kepada pelaku usaha terkait"	closed	1. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital 2. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi 3. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA 4. Melakukan Pembinaan melalui surat tindak lanjut atau melalui KIE secara tematik kepada pelaku usaha terkait"	TW III 2025	Y	SDM-29	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA
		April	Terdapat 1 tindaklanjut yang terlambat	Komunikasi TL dengan Ditwasprod PO	Koordinasi TL berupa PSK dengan Ditwasprod PO	closed	Koordinasi TL berupa PSK dengan Ditwasprod PO	Mei 2025	T		Terlambatnya surat keputusan PSK
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	1. Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian IKU	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sesuai renlak dan revisi target	- Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan	closed	- Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan	TW IV 2025	Y	O-18	Data pengawasan terkait surat tindak lanjut dan CAPA tidak tersedia real time

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Lemahnya dokumentasi pelaksanaan inspeksi yang dilakukan 3. Kurangnya sosialisasi petugas terhadap pola tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi pangan olahan	sehingga capaian kinerja tidak dalam status melampaui. Kesesuaian koordinasi terutama untuk sarana PIRT perlu ditingkatkan terutama dengan pemerintah kabupaten/kota.	olahan sesuai renlak - Revisi target sehingga capaian kinerja tidak dalam status melampaui. - Kesesuaian koordinasi terutama untuk sarana PIRT perlu ditingkatkan terutama dengan pemerintah kabupaten/kota.		olahan sesuai renlak - Revisi target sehingga capaian kinerja tidak dalam status melampaui. - Kesesuaian koordinasi terutama untuk sarana PIRT perlu ditingkatkan terutama dengan pemerintah kabupaten/kota.				
		September	-	Pemeriksaan sesuai renlak	Pemeriksaan sesuai renlak	closed	Pemeriksaan sesuai renlak	Oktober 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Kurangnya jumlah inspektur pangan 2. Belum adanya spesialisasi kompetensi inspektur pada komoditi sediaan farmasi dan pangan olahan dalam penugasan inspeksi	Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sesuai renlak serta ketepatan dan kecepatan pelaporan hasil pemeriksaan yang harus dilakukan sesuai pedoman. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan pelaksanaan inspeksi tidak berbeda dengan rencana. Selain itu pengendalian rekaman/arsip hasil pemeriksaan merupakan hal penting untuk dikendalikan.	- Melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sesuai renlak serta ketepatan dan kecepatan pelaporan hasil pemeriksaan yang harus dilakukan sesuai pedoman. - Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan pelaksanaan inspeksi tidak berbeda dengan rencana. - Pengendalian rekaman/arsip hasil pemeriksaan merupakan hal penting untuk dikendalikan.	closed	- Melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sesuai renlak serta ketepatan dan kecepatan pelaporan hasil pemeriksaan yang harus dilakukan sesuai pedoman. - Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan pelaksanaan inspeksi tidak berbeda dengan rencana. - Pengendalian rekaman/arsip hasil pemeriksaan merupakan hal penting untuk dikendalikan.	TW IV	Y	SDM-06	Kompetensi pegawai hasil rotasi belum memenuhi persyaratan
		Oktober	-	Pemeriksaan sesuai renlak	Pemeriksaan sesuai renlak	closed	Pemeriksaan sesuai renlak	November 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		November	-	Pemeriksaan sesuai renlak	Pemeriksaan sesuai renlak	closed	Pemeriksaan sesuai renlak	Desember 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	Prosentase jumlah sarana yang diperiksa dibandingkan dengan gtarget tahunan masih rendah	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	closed	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Juni 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Juni	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 49,80 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	closed	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Juli 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Target sarana yang harus diperiksa menumpuk ke TW2 sampai TW4. Adanya wacana efisiensi di TW1 mengakibatkan capaian jumlah sarana yang diperiksa belum optimal sehingga beban kerja menumpuk di TW selanjutnya.	Agar kinerja dapat dipertahankan maka perlu dilakukan revisi renlak menyesuaikan dengan perubahan target tahunan kembali ke target awal.	Telah dilakukan revisi renlak pasca relaksasi	closed	Telah dilakukan revisi renlak pasca relaksasi	TW III Tahun 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Juli	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 61,48 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	closed	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Agustus	-	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	closed	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		September	-	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	closed	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Belum semua petugas mengikuti pelatihan inspektur sehingga perlu dilakukan supervisi dalam	Upaya penyempurnaan kinerja ke depan agar capaian indikator kinerja tetap terjaga maka kompetensi petugas agar senantiasa ditingkatkan mengikuti perkembangan isu	Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan inetrnal bagi petugas pengawas	closed	Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan inetrnal bagi petugas pengawas	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			melakukan pemeriksaan sarana.	pengawasan obat dan makanan terkini. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sarana distribusi farmasi perlu ditingkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait rekomendasi hasil pemeriksaan.	pada tanggal 27-28 Oktober 2025		pada tanggal 27-28 Oktober 2025				
		Oktober	-	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	closed	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		November	-	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	closed	Pemeriksaan sarana berdasarkan renlak pasca relaksasi anggaran	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Target sarana masih mengikuti target efisiensi	Menyesuaikan kembali renlak setelah dilakukan relaksasi	Menyusun renlak relaksasi	closed	Menyusun renlak relaksasi	TW 2 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Februari	Target sarana masih mengikuti target efisiensi	Menyesuaikan renlak setelah dilakukan relaksasi	Menyusun renlak relaksasi	closed	Menyusun renlak relaksasi	TW 2 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Maret	Target sarana masih mengikuti target efisiensi	Menyesuaikan renlak setelah dilakukan relaksasi	Menyusun renlak relaksasi	closed	Menyusun renlak relaksasi	TW 2 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Mei	Prosentase jumlah sarana yang diperiksa dibandingkan dengan target tahunan masih rendah	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Realisasi sesuai renlak relaksasi	closed	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Juni 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Juni	Capaian jumlah sarana yang diperiksa terhadap target tahunan 52,34 %	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Realisasi sesuai renlak relaksasi	closed	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Juli 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	Jumlah sarana yang telah diperiksa pada TW2 masih kecil jika dibandingkan dengan target tahunan	- Pemeriksaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan - Monitoring dan evaluasi capaian secara berkala	- Pemeriksaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan - Monitoring dan evaluasi capaian secara berkala	closed	- Pemeriksaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan - Monitoring dan evaluasi capaian secara berkala	TW III Tahun 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Juli	-	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	-	closed	-	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Agustus	-	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	-	closed	-	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		September	-	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	-	closed	-	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Kompetensi petugas pemeriksa sarana yang belum merata. Belum semua petugas mengikuti pelatihan inspektur sehingga perlu dilakukan supervisi dalam melakukan pemeriksaan sarana.	Upaya penyempurnaan kinerja ke depan agar capaian indikator kinerja tetap terjaga maka kompetensi petugas agar senantiasa ditingkatkan mengikuti perkembangan isu pengawasan obat dan makanan terkini. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sarana distribusi pangan perlu ditingkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait rekomendasi hasil pemeriksaan.	Peningkatan kompetensi petugas dilaksanakan pada tanggal 11-12 September 2025 Koordinasi terkait hasil pengawasan ke pemerintah daerah telah dilakukan bersamaan dengan monev pelaksanaan DAK non fisik obat dan makanan	closed	Peningkatan kompetensi petugas dilaksanakan pada tanggal 11-12 September 2025 Koordinasi terkait hasil pengawasan ke pemerintah daerah telah dilakukan bersamaan dengan monev pelaksanaan DAK non fisik obat dan makanan	Des 2025	Y	SDM-06	Kompetensi pegawai hasil rotasi belum memenuhi persyaratan
		Oktober	-	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	closed	Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan renlak	Des 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
		November	-	Seluruh kegiatan telah selesai	Seluruh kegiatan telah selesai	closed	Seluruh kegiatan telah selesai	November 2025	Y	O-35	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Ketidaksesuaian petugas dalam melakukan pengawasan iklan menurut proporsi yang sudah ditentukan, misalnya media cetak, online, elektronik dan luar ruang. 2. Kesulitan dalam mendapatkan iklan obat keras dengan porsi 10% dari total iklan obat yang diawasi. Sesuai	1. Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan. 2. Memastikan pedoman pengawasan iklan dipenuhi dengan melakukan rapat monitoring pengawasan iklan secara internal.	1. Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan. 2. Memastikan pedoman pengawasan iklan dipenuhi dengan melakukan rapat monitoring pengawasan iklan secara internal.	closed	1. Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan. 2. Memastikan pedoman pengawasan iklan dipenuhi dengan melakukan rapat monitoring pengawasan iklan secara internal.	TW II 2025	Y	SDM-31	Perbedaan kesimpulan akhir hasil pengawasan iklan antara pusat dengan UPT

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			peraturan BPOM nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan obat, maka iklan obat hanya dapat diiklankan melalui media periklanan berupa media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah kefarmasian.								
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	1. Tidak tersedianya media dengan jumlah yang ditargetkan, diantaranya media elektronik. 2. Kesulitan untuk mendapatkan iklan obat keras terutama pada media spesifik berbasis farmasi maupun kedokteran.	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai renlak dengan memperhatikan pedoman pengawasan iklan. Selain itu diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan.	1. Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai renlak dengan memperhatikan pedoman pengawasan iklan. 2. Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan.	closed	1. Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai renlak dengan memperhatikan pedoman pengawasan iklan. 2. Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan.	TW III 2025	T		Tidak tersedianya media dengan jumlah yang ditargetkan, terutama media elektronik.
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Tidak sinkronnya jadwal dan lokus pemeriksaan sarana dan pengawasan iklan 2. Tidak tersedianya media sesuai jumlah yang ditargetkan, diantaranya media elektronik 3. Kesulitan untuk mendapatkan iklan obat keras terutama pada media spesifik berbasis farmasi maupun kedokteran	Untuk peningkatan kinerja maka diperlukan upaya sbb: a. Perlu dipastikan kegiatan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai renlak dan sesuai pedoman pengawasan iklan. b. Kompetensi petugas pengawas iklan dengan mengikuti sosialisasi/pelatihan c. Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan secara berkala.	a. kegiatan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai renlak dan sesuai pedoman pengawasan iklan. b. Kompetensi petugas pengawas iklan dengan mengikuti sosialisasi/pelatihan c. Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan secara berkala.	closed	a. kegiatan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai renlak dan sesuai pedoman pengawasan iklan. b. Kompetensi petugas pengawas iklan dengan mengikuti sosialisasi/pelatihan c. Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan secara berkala.	Desember 2025	Y	O-35	Pemeriksaan/pengawasan terhadap sarana produksi, sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan
		Oktober	-	Pengawasan iklan sesuai renlak	Pengawasan iklan sesuai renlak	closed	Pengawasan iklan sesuai renlak	November 2025	T		Pelaksanaan pengawasan iklan tidak sesuai renlak
		November	-	Pengawasan iklan sesuai renlak	Pengawasan iklan sesuai renlak	closed	Pengawasan iklan sesuai renlak	Desember 2025	T		Pelaksanaan pengawasan iklan tidak sesuai renlak

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Tidak tersedianya sampel produk tembakau dan atau rokok elektronik di sarana peredaran sesuai dengan merk yang telah ditetapkan oleh unit pengampu sehingga beberapa kali harus mengajukan perubahan merk. 2. Seringkali pelaporan terkendala teknis di SIPT, dikarenakan aplikasi yang belum selesai dikembangkan.	Untuk mempertahankan kinerja perlu dipastikan bahwa kegiatan pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik sesuai renlak dengan memperhatikan pedoman pengawasan atau manual IKU. Selain itu diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan secara berkala.	- kegiatan pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik sesuai renlak dengan memperhatikan pedoman pengawasan atau manual IKU. - monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan secara berkala.	closed	- kegiatan pengawasan label produk tembakau dan atau rokok elektronik sesuai renlak dengan memperhatikan pedoman pengawasan atau manual IKU. - monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan secara berkala.	TW IV 2025	Y	S-32	Terjadi pengulangan merek produk tembakau/rokok elektronik pada tahun yang sama saat sampling penandaan produk tembakau/rokok elektrik
		Oktober	-	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	closed	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	November 2025	T		Pengawasan tidak sesuai target dan atau dilaporkan melebihi time line
		November	-	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	closed	Pengawasan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu	Desember 2025	T		Pengawasan tidak sesuai target dan atau dilaporkan melebihi time line
13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah BBPOM di Bandar Lampung	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang dilaksanakan di pertengahan tahun anggaran menimbulkan tantangan manajerial dan operasional yang signifikan. Hal ini menuntut penyesuaian mendadak dalam dua komponen sumber daya yang paling penting, yaitu Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Mengoptimalkan SDM yang dapat berperan dalam pencapaian IKU dengan cara: a. Mensosialisasikan kepada petugas untuk melakukan pengisian Tools pengawasan AMR dengan lengkap pada saat pemeriksaan di Apotek karena target terkait pengisian ini dipantau hingga akhir tahun. b. Monitoring dan evaluasi pengawasan AMR secara berkala melalui SIPT sebagai sumber data untuk publikasi pengawasan AMR. c. Berkoordinasi dengan lintas sektor dan Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP secara intensif dalam rangka pelaksanaan kegiatan Advokasi.	a. Sosialisasi kepada petugas untuk tetap rutin melakukan pengisian tools AMR dengan lengkap pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek b. Melakukan pemantauan pada aplikasi SIPT c. Melakukan koordinasi dengan Ditwasdis ONPP d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia	closed	a. Sosialisasi kepada petugas untuk tetap rutin melakukan pengisian tools AMR dengan lengkap pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek b. Melakukan pemantauan pada aplikasi SIPT c. Melakukan koordinasi dengan Ditwasdis ONPP d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia	31 Desember 2025	T		Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian AMR

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				2. Melakukan revisi anggaran secepat mungkin agar alokasi dana untuk pencapaian kinerja tersedia, terutama anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Advokasi kepada lintas sektor.							
		Oktober	1. Tidak ada kendala dalam hal pengisian tools maupun publikasi 2. Dilakukan pembahasan lebih lanjut. Dengan pertimbangan adanya kegiatan lain yang sifatnya lebih prioritas sehingga kegiatan yang tadinya direncanakan tanggal 13 November 2025 direschedule menjadi 24 November 2025.	Melaksanakan kegiatan advokasi sesuai pembahasan dari hasil rapat	1. Menyusun kepanitian pelaksanaan kegiatan Advokasi 2. Melakukan koordinasi dengan Ditwasdis ONPP 3. Sosialisasi kepada petugas untuk tetap rutin melakukan pengisian tools AMR dengan lengkap pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek	closed	1. Menyusun kepanitian pelaksanaan kegiatan Advokasi 2. Melakukan koordinasi dengan Ditwasdis ONPP 3. Sosialisasi kepada petugas untuk tetap rutin melakukan pengisian tools AMR dengan lengkap pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek	November 2025	T		Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian AMR
		November	1. Tidak ada kendala dalam hal pengisian tools maupun publikasi 2. Telah dilakukan kegiatan Advokasi AMR dan penggalangan komitmen bersama pada tanggal 24 November 2025	Menyiapkan materi publikasi untuk bulan depan	1. Sosialisasi kepada petugas untuk tetap rutin melakukan pengisian tools AMR dengan lengkap pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek 2. Koordinasi dengan tim publikasi dan ditwasdir ONPP untuk menyiapkan materi dan membuat infografis untuk publikasi	closed	1. Sosialisasi kepada petugas untuk tetap rutin melakukan pengisian tools AMR dengan lengkap pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek 2. Koordinasi dengan tim publikasi dan ditwasdir ONPP untuk menyiapkan materi dan membuat infografis untuk publikasi	Desember 2025	T		Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian AMR
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Terdapat perbedaan tools SRL komoditi MBM yang digunakan saat perencanaan dengan saat monitoring evaluasi	1. Dilakukan pemantauan capaian SKL oleh PIC masing-masing komponen (SRL, Peralatan, Kompetensi Laboratorium, MA terverifikasi) secara berkala untuk	- Pemantauan rutin setiap bulan oleh PIC SKL dan koordinasi dengan PPK dan Penyelia - Berkoordinasi dengan	closed	- Pemantauan rutin setiap bulan oleh PIC SKL dan koordinasi dengan PPK dan Penyelia - Berkoordinasi dengan	TW 4 2025	Y	A-05	Peralatan yang dimiliki belum memenuhi target standar peralatan dalam SKL

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		sehingga capaian SRL lebih rendah dari target. 2. Efisiensi anggaran di TW 1 dengan adanya Inpres Nomor 1 tahun 2025 menyebabkan peralatan tidak sepenuhnya dapat diadakan dengan memilih pengadaan peralatan prioritas	memastikan pelaksanaan pemenuhan SKL sesuai dengan rencana sehingga target pada Triwulan berikutnya dapat tercapai. 2. Berkoordinasi dengan PIC dari PPPOMN jika terdapat kendala	PIC SKL PPPOMN terkait kelengkapan dokumen SKL		PIC SKL PPPOMN terkait kelengkapan dokumen SKL				
		Agustus	Beberapa sampel obat untuk penambahan SRL tidak tersedia di Lampung atau masa kadaluarsa pendek	- Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi atau UPT lain terkait sampling sampel-sampel tersebut - Inspeksi berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi Provinsi untuk sampel artesunate steril	-	closed	-	TW 3 2025	Y	S-06	Ruang Lingkup Pengujian belum memenuhi SRL dalam SKL
		September	Sampel untuk penambahan SRL tidak tersedia di Lampung	- Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi atau UPT lain terkait sampling sampel-sampel tersebut - Inspeksi berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi Provinsi untuk sampel artesunate steril	-	closed	-	TW 3 2025	Y	S-06	Ruang Lingkup Pengujian belum memenuhi SRL dalam SKL
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Beban sampel mikrobiologi yang meningkat pada Triwulan II setelah relaksasi anggaran dan juga maraknya kasus keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) menyebabkan SDM diprioritaskan melakukan pengujian sampel-sampel tersebut. Hal ini berdampak dengan realisasi pemenuhan SRL. Pada bulan Juli terdapat kesepakatan	1. Melaksanakan peningkatan SKL sesuai yang telah direncanakan di Triwulan IV yaitu penambahan SRL, pengembangan kompetensi, dan metode analisa terverifikasi untuk semua komoditi 2. Berkoordinasi dengan substansi Inspeksi terkait ketersediaan sampel untuk pemenuhan SRL dengan Tim Inspeksi 3. Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi terkait sampling untuk dibagi menjadi 2 tahap (awal dan pertengahan bulan) dan	1. Melaksanakan peningkatan SKL sesuai yang telah direncanakan di Triwulan IV yaitu penambahan SRL, pengembangan kompetensi, dan metode analisa terverifikasi untuk semua komoditi 2. Berkoordinasi dengan substansi Inspeksi terkait ketersediaan sampel untuk pemenuhan SRL dengan Tim	closed	1. Melaksanakan peningkatan SKL sesuai yang telah direncanakan di Triwulan IV yaitu penambahan SRL, pengembangan kompetensi, dan metode analisa terverifikasi untuk semua komoditi 2. Berkoordinasi dengan substansi Inspeksi terkait ketersediaan sampel untuk pemenuhan SRL dengan Tim	TW 3 2025	Y	S-09	Belum semua metode uji yang tercantum dalam Standar Ruang Lingkup telah diverifikasi

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dengan Tim Inspeksi bahwa sampel masuk laboratorium sebanyak 2 tahap. 2. Keterbatasan ketersediaan sampel di pasaran terutama sampel obat seperti sampel artesunate steril injeksi, sampel ondansetron cair, sampel meloxicam rektal suppositoria sulit ditemukan di sarana peredaran. Terdapat sampel dengan masa kadaluarsa pendek kurang dari 6 bulan seperti Nystatin tablet. Sampai dengan Triwulan III sampel meloxicam rektal suppositoria dan ondansetron belum ditemukan di peredaran.	sudah berjalan sejak bulan Juli 2025	Inspeksi 3. Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi terkait sampling untuk dibagi menjadi 2 tahap (awal dan pertengahan bulan) dan sudah berjalan sejak bulan Juli 2025"		Inspeksi 3. Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi terkait sampling untuk dibagi menjadi 2 tahap (awal dan pertengahan bulan) dan sudah berjalan sejak bulan Juli 2025"				
		Oktober	Sampel untuk penambahan SRL tidak tersedia di Lampung	Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi terkait sampel pengganti	Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi terkait sampel pengganti	closed	Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi terkait sampel pengganti	TW 4 2025	Y	S-06	Ruang Lingkup Pengujian belum memenuhi SRL dalam SKL
		November	- Alat AAS (1 unit) rusak berat dan tidak dapat diperbaiki karena sparepart diskontinu - Alat HPLC (2 unit) rusak berat karena perlu penggantian mainboard	Pemenuhan target SKL melalui pemenuhan komponen standar lainnya seperti pemenuhan SRL, kompetensi laboratorium dan MA terverifikasi	Laboratorium melakukan pemenuhan SRL, kompetensi laboratorium, dan MA terverifikasi sesuai rencana yang telah dibuat	closed	Laboratorium melakukan pemenuhan SRL, kompetensi laboratorium, dan MA terverifikasi sesuai rencana yang telah dibuat	TW 4 2025	Y	A-05	Peralatan yang dimiliki belum memenuhi target standar peralatan dalam SKL
15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Tidak ada anggaran bagi Program ini, sehingga tidak bisa melakukan koordinasi secara langsung	Koordinasi berkelanjutan kepada OPD di Kabupaten Kota untuk persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan	Koordinasi berkelanjutan kepada OPD di Kabupaten Kota untuk persiapan dokumen-dokumen	closed	Koordinasi berkelanjutan kepada OPD di Kabupaten Kota untuk persiapan dokumen-dokumen	TW IV Tahun 2025	T		Tidak adanya anggaran yang dialokasikan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		kepada semua Kabupaten Kota.	sebagai data dukung untuk dapat disiapkan mulai saat ini.	yang diperlukan sebagai data dukung untuk dapat disiapkan mulai saat ini.		yang diperlukan sebagai data dukung untuk dapat disiapkan mulai saat ini.				
		Oktober, November	Beberapa kabupaten kota masih minim data dukung dari OPD yang berkaitan dengan KKPA	Memaksimalkan pendampingan kepada 2 kabupaten/kota yang menjadi target capaian KKPA di catchment area BBPOM di Bandar Lampung	Verifikasi data dukung Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu sebagai target, dengan nilai di atas 60	closed	Verifikasi data dukung Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu sebagai target, dengan nilai di atas 60	30 September 2025	Y	S-37	Kabupaten/Kota tidak memahami tujuan program dan cara pengisian tools terkait Kab/Kota Pangan Aman yang melibatkan stakeholder lain terkait penilaian produk PSAT, PSAH, PSAI dan lainnya
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Terbatasnya sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa 2. Sebagian sarana produksi pangan fortifikasi sudah tutup/tidak berproduksi karena alasan ketidaktersediaan bahan baku. 3. Pelaku usaha produksi pangan olahan didominasi oleh UMKM dengan keterbatasan pengetahuan dan sarana prasarana sehingga kesulitan dalam pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.	1. Dilakukan perencanaan yang lebih akurat terkait target cakupan sarana produksi pangan fortifikasi 2. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital 3. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi 4. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA	1. Perencanaan yang lebih akurat terkait target cakupan sarana produksi pangan fortifikasi 2. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital 3. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi 4. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA	closed	1. Perencanaan yang lebih akurat terkait target cakupan sarana produksi pangan fortifikasi 2. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital 3. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi 4. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA	TW III 2025	Y	O-35	Tidak ada data real time penggunaan anggaran sebagai dasar pengambilan keputusan
		Juni	Pemeriksaan sarana mengikuti jadwal sampling pangan fortifikasi	Penyesuaian renlak	Penyesuaian renlak	closed	Penyesuaian renlak	TW III 2025	Y	O-17	Rencana inspeksi Tidak sinkron dengan rencana pengujian sampel fortifikasi
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	1. Kurang pahamnya penanggung jawab IKU terhadap kebutuhan	penyesuaian renlak pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui revisi	- Penyesuaian renlak pemeriksaan sarana produksi pangan	closed	- Penyesuaian renlak pemeriksaan sarana produksi pangan	TW IV 2025	Y	SDM-06	Kompetensi pegawai hasil rotasi belum memenuhi persyaratan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			revisi 2. Terdapat beberapa sarana produksi pangan olahan yang tidak berproduksi lagi dengan alasan ketidaktersediaan bahan baku	dan pelaksanaan pada TW III sehingga ditargetkan 24 sarana secara akumulatif dapat tercapai. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan secara berkala.	fortifikasi melalui revisi dan pelaksanaan pada TW III sehingga ditargetkan 24 sarana secara akumulatif dapat tercapai. -Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan secara berkala.		fortifikasi melalui revisi dan pelaksanaan pada TW III sehingga ditargetkan 24 sarana secara akumulatif dapat tercapai. -Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan secara berkala.				
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Beberapa sarana produksi tidak berproduksi sehingga diperlukan penggantian sarana untuk diperiksa. 2. Adanya perubahan renlak pelaksanaan pemeriksaan.	Untuk target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sudah selesai dilaksanakan. Berdasarkan data yang diperoleh, tindak lanjut dari indikator ini adalah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi fortifikasi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.	Pembinaan terhadap sarana produksi fortifikasi yang diperiksa	closed	Pembinaan terhadap sarana produksi fortifikasi yang diperiksa	TW IV 2025	Y	O-35	Tidak ada data real time penggunaan anggaran sebagai dasar pengambilan keputusan
		September, Oktober, November	-	Pemeriksaan sesuai renlak	Pemeriksaan sesuai renlak	closed	Pemeriksaan sesuai renlak	September 2025	Y	O-17	Rencana inspeksi Tidak sinkron dengan rencana pengujian sampel fortifikasi
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan KIE 2. Perlunya penambahan kompetensi petugas KIE	Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah: 1. Lebih memperkuat Kerjasama dengan berbagai pihak (Eksternal) 2. Meefektifkan KIE melalui media sosial	Kerjasama dengan berbagai pihak (Eksternal) dan Meefektifkan KIE melalui media sosial	closed	Kerjasama dengan berbagai pihak (Eksternal) dan Meefektifkan KIE melalui media sosial	TW IV Tahun 2025	Y	S-49	Keterbatasan target komunitas penerima KIE, Target nilai Indeks Efektivitas KIE tidak tercapai
		Oktober	-	Melaksanakan KIE lebih banyak dan koordinasi dengan pihak eksternal	Melaksanakan KIE dengan kerjasama parekraf dan Bank Indonesia	closed	Melaksanakan KIE dengan kerjasama parekraf dan Bank Indonesia	Desember 2025	Y	S-49	Keterbatasan target komunitas penerima KIE, Target nilai Indeks Efektivitas KIE tidak tercapai
		November	-	Melaksanakan KIE lebih banyak dan koordinasi dengan pihak eksternal	Melaksanakan KIE dengan kerjasama	closed	Melaksanakan KIE dengan kerjasama	Desember 2025	Y	S-49	Keterbatasan target komunitas penerima KIE, Target nilai Indeks

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					parekras dan Bank Indonesia		parekras dan Bank Indonesia				Efektivitas KIE tidak tercapai
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Adanya Inpres No. 1 tahun 2025 berkaitan efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kegiatan Program berupa pengurangan tahapan dan beberapa kali revisi anggaran sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus. 2. Pelantikan kepala daerah di bulan Februari 2025 dan padatnya kegiatan kepala daerah di bulan Ramadhan dan ditambah cuti bersama.	Telah dilakukan perencanaan kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah pada bulan April 2025 (TW 2). Setelah dilakukan kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025.	sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025.	closed	sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025.	TW II Tahun 2025	T		Pelaksanaan advokasi dilaksanakan di TW 2 2025
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Padatnya kegiatan sekolah/madrasah dengan adanya kurikulum yang baru sehingga perlu dilakukan komunikasi yang intens dengan kepala sekolah/madrasah untuk pelaksanaan tahap Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.	Untuk tahap Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan melakukan koordinasi yang lebih intens dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah serta pendampingan kepada sekolah/madrasah untuk melaksanakan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah berupa SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Surat Pernyataan Komitmen Kepala Sekolah untuk Menjaga	koordinasi yang lebih intens dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah serta pendampingan kepada sekolah/madrasah untuk melaksanakan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah berupa SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Surat Pernyataan Komitmen Kepala	closed	koordinasi yang lebih intens dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah serta pendampingan kepada sekolah/madrasah untuk melaksanakan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah berupa SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Surat Pernyataan Komitmen Kepala	TW IV Tahun 2025	T		Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan terlaksana sampai bulan Juli 2025

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada siswa dan orang tua siswa serta evaluasi pemahaman siswa dan orang tua siswa/komite sekolah setelah diberikan sosialisasi keamanan pangan melalui pre test dan post test.	Sekolah untuk Menjaga Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada siswa dan orang tua siswa serta evaluasi pemahaman siswa dan orang tua siswa/komite sekolah setelah diberikan sosialisasi keamanan pangan melalui pre test dan post test.		Sekolah untuk Menjaga Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada siswa dan orang tua siswa serta evaluasi pemahaman siswa dan orang tua siswa/komite sekolah setelah diberikan sosialisasi keamanan pangan melalui pre test dan post test.				
		Oktober, November	-	Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah/madrasah dan kader keamanan pangan sekolah	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	closed	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	Agustus 2025	T		Pelaksanaan pengawalan sekolah mundur di bulan Agustus 2025
19	Jumlah desa pangan aman	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Beberapa pemahaman komunitas masyarakat yang masih perlu mendapat pendampingan terkait Bimtek Komunitas yang memerlukan data pre test dan post test. Tapi bisa diatasi dengan dipandu dengan link yang memudahkan untuk mengisi pre dan post test, termasuk data dukung pelaksanaan seperti foto kegiatan.	Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah: Akan melakukan Advokasi di triwulan 1 pada tahun 2026 untuk dapat memulai tahapan berikutnya lebih cepat dan memenuhi timeline. Melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan Kepala Desa dan Tim Desa, juga stakeholder terkait di Pemda Kabupaten Lampung	Akan melakukan Advokasi di triwulan 1 pada tahun 2026 untuk dapat memulai tahapan berikutnya lebih cepat dan memenuhi timeline. Melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan Kepala Desa dan Tim Desa, juga stakeholder terkait di Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat	closed	Akan melakukan Advokasi di triwulan 1 pada tahun 2026 untuk dapat memulai tahapan berikutnya lebih cepat dan memenuhi timeline. Melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan Kepala Desa dan Tim Desa, juga stakeholder terkait di Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat	Desember 2025	Y	S-32	Aparat Desa dan kader keamanan pangan desa kurang berkomitmen dalam implementasi program Desa kepada masyarakat

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				Selatan untuk dapat mengawal Rencana Aksi Keamanan Pangan di Desa.	mengawal Rencana Aksi Keamanan Pangan di Desa.		mengawal Rencana Aksi Keamanan Pangan di Desa.				
		Oktober, November	-	Berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk implementasi Rencana Aksi Desa intervensi	Koordinasi dengan Dinas PMD untuk implementasi rencana aksi Desa Pangan Aman	closed	Koordinasi dengan Dinas PMD untuk implementasi rencana aksi Desa Pangan Aman	September 2025	Y	S-32	Aparat Desa dan kader keamanan pangan desa kurang berkomitmen dalam implementasi program Desa kepada masyarakat
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	-	Melakukan perencanaan dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan dinas perdagangan kab. Lampung Barat dan kota Bandar Lampung, kepala UPT Pasar dan petugas pasar.	Koordinasi dengan dinas perdagangan Kab. Lampung Barat dan kota Bandar Lampung, kepala UPT Pasar untuk pelaksanaan pegawalan pasar	closed	Koordinasi sudah dilaksanakan dan pengawalan pasar sudah terlaksana bukan Agustus 2025	Desember 2025	T		Pengawalan pasar intervensi tahun 2024 terlaksana di bulan Agustus 2025
		Oktober, November	-	Melakukan koordinasi dengan dinas Perdagangan Kab. Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung, Ka UPT Pasar Liwa, pasar Tamin, pasar Cimeng	Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	closed	Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi tahun 2024 dilaksanakan bulan Agustus 2025	Agustus 2025	T		Pelaksanaan pengawalan mundur ke bulan Agustus 2025
21	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Oktober	1 UMKM OBA yang didampingi belum mampu memenuhi persyaratan pengajuan CPOTB Bertahap hingga bulan Oktober 2025	Mencari UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan terhadap realisasi tahap pendampingan UMKM OBA pengganti sesuai yang telah ditetapkan	Mencari UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan terhadap realisasi tahap pendampingan UMKM OBA pengganti sesuai yang telah ditetapkan	closed	Mencari UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan terhadap realisasi tahap pendampingan UMKM OBA pengganti sesuai yang telah ditetapkan	Oktober 2025	Y	S-30	Tidak ada UMKM Obat Bahan Alam (OBA) untuk didampingi
		November	-	Pendampingan UMKM sesuai renlak	Pendampingan UMKM sesuai renlak	closed	Pendampingan UMKM sesuai renlak	November 2025	Y	SDM-07	Penerbitan surat rekomendasi / sertifikat layanan sertifikasi melampaui SLA
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Tidak ada kendala selama TW III dalam pelaksanaan pendampingan UMKM. Kegiatan pendampingan UMKM telah dilaksanakan sesuai tahapan dan	1. Untuk meningkatkan capaian kinerja Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu, maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut: 2. Perlu dipastikan pelaksanaan	1. pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan dan timeline yang tertera pada Petunjuk Teknis/Pedoman Pendampingan	closed	1. pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan dan timeline yang tertera pada Petunjuk Teknis/Pedoman Pendampingan	Desember 2025	Y	S-29	Pelaku usaha mundur di tengah jalannya proses pendampingan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			timeline yang tertera pada Petunjuk Teknis/Pedoman Pendampingan UMKM.	pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan dan timeline yang tertera pada Petunjuk Teknis/Pedoman Pendampingan UMKM 3. Monitoring dan evaluasi kinerja pendampingan UMKM	UMKM 2. Movev pendampingan UMKM		UMKM 2. Movev pendampingan UMKM				
		Oktober	1 UMKM OBA yang didampingi belum mampu memenuhi persyaratan pengajuan CPOTB Bertahap hingga bulan Oktober 2025	Mencari UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan terhadap realisasi tahap pendampingan UMKM OBA pengganti sesuai yang telah ditetapkan	Mencari UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan terhadap realisasi tahap pendampingan UMKM OBA pengganti sesuai yang telah ditetapkan	closed	Mencari UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan terhadap realisasi tahap pendampingan UMKM OBA pengganti sesuai yang telah ditetapkan	Oktober 2025	Y	S-29	Pelaku usaha mundur di tengah jalannya proses pendampingan
		November	-	Pendampingan UMKM sesuai renlak	Pendampingan UMKM sesuai renlak	closed	Pendampingan UMKM sesuai renlak	November 2025	Y	SDM-07	Penerbitan surat rekomendasi / sertifikat layanan sertifikasi melampaui SLA
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	September	-	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	Koordinasi dengan Jaksa terkait perkara kedua yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan baik	closed	Koordinasi dengan Jaksa terkait perkara kedua yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung dengan baik	31 Oktober 2025	Y	O-32	Berkas perkara tidak dapat dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa karena kendala dalam pemenuhan P-19
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Beberapa informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil profiling siber masih memerlukan verifikasi lebih lanjut karena kurangnya data pendukung yang valid. Hal ini menyebabkan proses pendalaman informasi dan penetapan target operasi penindakan memerlukan waktu yang lebih lama. Pada TW III tahun 2025, koordinasi antara Penyidik Balai	Upaya perbaikan yang akan dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/meningkatkan kinerja adalah : 1. Intensifikasi profiling siber dan operasi intelijen terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang diedarkan secara daring. 2. Koordinasi dengan Jaksa dan Korwas PPNS terkait proses penyidikan perkara yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung secara intensif. 3. Melakukan pelatihan berkelanjutan terkait teknik	1. Telah dilakukan intensifikasi profiling siber dan operasi intelijen terhadap target yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan. 2. Koordinasi dengan Jaksa dan Korwas PPNS telah dilakukan dengan baik terkait proses penyidikan perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung. 3. Telah	closed	1. Telah dilakukan intensifikasi profiling siber dan operasi intelijen terhadap target yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan. 2. Koordinasi dengan Jaksa dan Korwas PPNS telah dilakukan dengan baik terkait proses penyidikan perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung. 3. Telah	Desember 2025	Y	O-32	Berkas perkara tidak dapat dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa karena kendala dalam pemenuhan P-19

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Besar POM di Bandar Lampung dengan Jaksa dan Korwas PPNS terkait proses penyidikan perkara yang ditangani Penyidik Balai Besar POM di Bandar Lampung telah dilakukan dengan baik, sehingga proses penyelesaian berkas perkara sesuai timeline.	penyidikan, pengumpulan barang bukti elektronik, dan penyusunan berkas perkara	dilakukan Bimtek penindakan peredaran peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara online dan offline dengan Narasumber dari Direktorat Penyidikan Badan POM pada tanggal 11 September 2025.		dilakukan Bimtek penindakan peredaran peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara online dan offline dengan Narasumber dari Direktorat Penyidikan Badan POM pada tanggal 11 September 2025.				
		Oktober	-	a. Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung b. Melakukan operasi penindakan terhadap hasil operasi intelijen yang menjadi target (telah memadai)	a. Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung b. Operasi penindakan terhadap hasil operasi intelijen yang menjadi target (telah memadai)	closed	a. Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung b. Operasi penindakan terhadap hasil operasi intelijen yang menjadi target (telah memadai)	31 Oktober 2025	Y	O-32	Berkas perkara tidak dapat dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa karena kendala dalam pemenuhan P-19
		November	-	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	Koordinai dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	closed	Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	30 November 2025	Y	O-32	Berkas perkara tidak dapat dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa karena kendala dalam pemenuhan P-19
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Pelaku kejahatan obat dan makanan yang mengedarkan produknya secara daring pada marketplace seperti shopee, tokopedia dan lainnya menggunakan beberapa akun toko dan akun produk yang telah dilakukan	1. Kerjasama antar instansi pemerintah seperti Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga terkait lainnya untuk terus ditingkatkan. 2. Petugas penerima Informasi dari masyarakat untuk dapat mengelola dan mengidentifikasi informasi yang diterima secara detail, sehingga efektif dan	1. Telah dilakukan kolaborasi dengan Polri terkait bantuan penelusuran pelaku kejahatan obat dan makanan melalui media daring (cek post). 2. Telah dibuat Nota Dinas No. PD.04.01.6A.10.25.99 tanggal 21 Oktober	closed	1. Telah dilakukan kolaborasi dengan Polri terkait bantuan penelusuran pelaku kejahatan obat dan makanan melalui media daring (cek post). 2. Telah dibuat Nota Dinas No. PD.04.01.6A.10.25.99 tanggal 21 Oktober	31 Oktober 2025	Y	SDM 02	Petugas tidak cermat dalam memverifikasi akun produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar yang tidak memenuhi standar

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			takedown oleh kementerian komunikasi dan digital atas rekomendasi BPOM biasanya oleh pelaku kejahatan biasanya akan membuat akun produk yang baru. 2. Kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan penelusuran siber kejahatan obat dan makanan secara daring masih terbatas baik dalam jumlah maupun kompetensinya.	efisien untuk menindaklanjuti informasi tersebut.	2025 ke substansi infokom (petugas penerima informasi dari masyarakat) lebih lengkap dan rinci dalam memberikan data pelapor dan terlapor (nama, alamat, nomor kontak, komoditi)		2025 ke substansi infokom (petugas penerima informasi dari masyarakat) lebih lengkap dan rinci dalam memberikan data pelapor dan terlapor (nama, alamat, nomor kontak, komoditi)				
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Belum semua petugas memiliki kemampuan teknis yang sama dalam melakukan profiling, atau penilaian risiko terhadap akun-akun di marketplace. 2. Ketergantungan pada beberapa personil yang berpengalaman menimbulkan risiko penurunan kinerja apabila terjadi rotasi dan mutasi. 3. Kegiatan berbagi pengalaman sering dilakukan tanpa dukungan biaya pelatihan formal, sehingga proses peningkatan kapasitas cenderung bersifat informal dan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan tersebut, BBPOM di Bandar Lampung akan melaksanakan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai berikut: 1. Menyusun rencana kegiatan patroli dan profiling siber dengan penetapan prioritas berdasarkan tingkat risiko dan potensi pelanggaran 2. Meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan berkala dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan tetap sesuai target dan jadwal. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil patroli dan profiling siber sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penindakan. 4. Melaksanakan pelatihan teknis berkelanjutan dalam	1. Membuat surat tugas bulanan kepada petugas patroli siber untuk melakukan profiling siber terhadap akun-akun yang diduga mengedarkan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak memenuhi ketentuan. 2. Dilakukan monitoring tiap bulan terhadap pelaporan patroli siber dan profiling siber sesuai timeline 3. Telah dilakukan Monev terhadap laporan profiling siber tiap bulan 4. Telah dilakukan pelatihan Forum Komunikasi Intelijen di BPOM tanggal 11-12	closed	1. Membuat surat tugas bulanan kepada petugas patroli siber untuk melakukan profiling siber terhadap akun-akun yang diduga mengedarkan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak memenuhi ketentuan. 2. Dilakukan monitoring tiap bulan terhadap pelaporan patroli siber dan profiling siber sesuai timeline 3. Telah dilakukan Monev terhadap laporan profiling siber tiap bulan 4. Telah dilakukan pelatihan Forum Komunikasi Intelijen di BPOM tanggal 11-12	Desember 2025	Y	SDM 02	Petugas tidak cermat dalam memverifikasi akun produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar yang tidak memenuhi standar

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			bergantung pada inisiatif individu	bidang intelijen, patroli dan profiling siber. 5. Menjadikan kegiatan berbagi pengetahuan sebagai agenda rutin untuk membahas temuan, teknik baru dalam pelacakan atau profiling terhadap target.	November 2025 dan Pelatihan Refresment Operasi Siber Obat dan Makanan di BPOM tanggal 13 Nov 2025. 5. Sharing knowledge dilakukan tiap bulan pada saat rapat perencanaan dan evaluasi penindakan		November 2025 dan Pelatihan Refresment Operasi Siber Obat dan Makanan di BPOM tanggal 13 Nov 2025. 5. Sharing knowledge dilakukan tiap bulan pada saat rapat perencanaan dan evaluasi penindakan				
		Oktober	-	Laporan dikirim sebelum timeline	Input data pada lembar excel untuk laporan patroli siber dan profiling pada ADP maksimal tgl 25 Oktober	closed	Input data pada lembar excel untuk laporan patroli siber dan profiling pada ADP maksimal tgl 25 Oktober	25 Oktober 2025	Y	SDM 02	Petugas tidak cermat dalam memverifikasi akun produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar yang tidak memenuhi standar
		November	-	Laporan dikirim sebelum timeline	Input data pada aplikasi inawebcrawler untuk laporan Patroli Siber dan ADP untuk laporan Profiling Siber	closed	Input data pada aplikasi inawebcrawler untuk laporan Patroli Siber dan ADP untuk laporan Profiling Siber	28 November 2025	Y	SDM 02	Petugas tidak cermat dalam memverifikasi akun produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar yang tidak memenuhi standar
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Belum terupdatenya secara keseluruhan Layanan Informasi melalui PPID. 2. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Berdasarkan perhitungan tersebut.	Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah: Mempertahankan aspek pemenuhan IPP.	Mempertahankan aspek pemenuhan IPP.	closed	Mempertahankan aspek pemenuhan IPP.	TW IV Tahun 2025	Y	S-45	Adanya Penurunan IPP BBPOM di Bandar Lampung
		Oktober	-	Mempertahankan aspek pemenuhan IPP	Melaksanakan IPP sesuai perencanaan	closed	Melaksanakan IPP sesuai perencanaan	Oktober 2025	Y	S-45	Adanya Penurunan IPP BBPOM di Bandar Lampung
		November	-	Mempertahankan aspek pemenuhan IPP	Melaksanakan IPP sesuai perencanaan	closed	Melaksanakan IPP sesuai perencanaan	November 2025	Y	S-45	Adanya Penurunan IPP BBPOM di Bandar Lampung
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM	Rekomendasi dari tahun 2024	-	Memastikan inovasi yang dibangun telah diimplementasikan dan memiliki dampak bagi unit kerja dalam	Telah dilakukan pengendalian risiko terhadap inovasi	closed	Telah dilakukan pengendalian risiko terhadap inovasi	Tahun 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Bandar Lampung			penilaian dan pengendalian risiko							
		Rekomendasi dari tahun 2024	-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik terhadap daftar informasi publik yang dipublikasi secara berkala, serta merta, setiap saat, dan yang dikecualikan	Monitoring baru dilakukan dengan penarikan data dari apk Simpel LPK. Akan mengadakan pertemuan untuk pembahasan monev KIP TW 1 oleh Tim PPID BBPOM di Bandar Lampung	closed	Monitoring baru dilakukan dengan penarikan data dari apk Simpel LPK. Akan mengadakan pertemuan untuk pembahasan monev KIP TW 1 oleh Tim PPID BBPOM di Bandar Lampung	Mei 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
		Rekomendasi dari tahun 2024	-	Memastikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan penyusunan perencanaan kinerja	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan perencanaan	closed	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan perencanaan	28 Maret 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
		Rekomendasi dari tahun 2024	-	Menetapkan hasil penilaian dari pengguna layanan sebagai kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pemberi layanan	-	closed	-	Tahun 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
		Januari	Penilaian RB tahun 2023 tidak tercapai	Melakukan pembahasan pelaksanaan rekomendasi dari Inspektorat	Pembuatan SK tim RB Melakukan pembahasan rekomendasi Inspektorat secara detail	closed	Pembuatan SK tim RB Melakukan pembahasan rekomendasi Inspektorat secara detail	28-Feb-25	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
		Februari	-	Pemenuhan pengisian LKE dan data dukung sesuai rekomendasi tahun sebelumnya	Ketua Pokja RB mengkoordinir pengisian LKE Mengumpulkan data dukung untuk pengisian LKE	closed	Ketua Pokja RB mengkoordinir pengisian LKE Mengumpulkan data dukung untuk pengisian LKE	15-Apr-25	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
		Maret	-	Pemenuhan pengisian LKE dan data dukung sesuai rekomendasi tahun sebelumnya	Ketua Pokja RB mengkoordinir pengisian LKE Mengumpulkan data dukung untuk pengisian LKE	closed	Ketua Pokja RB mengkoordinir pengisian LKE Mengumpulkan data dukung untuk pengisian LKE	15-Apr-25	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Beberapa anggota tim ZI masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal penyusunan rencana kerja, pengisian LKE, dan pemenuhan data dukung sesuai kriteria penilaian. Hal ini berpengaruh pada kualitas dokumen yang dihasilkan serta kecepatan respons terhadap reviu dari auditor internal maupun TPI. 2. Waktu untuk fokus pada pembangunan ZI menjadi terbatas. Ini mempengaruhi kelancaran penyusunan dokumen, tindak lanjut monev, dan penyusunan tindak korektif atas temuan. 3. Belum dilakukan back up data yang terpusat untuk memudahkan pengisian LKE selanjutnya, selain itu juga untuk ketertelusuran dan terdapat histori	Diperlukan komitmen dari seluruh Pokja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Seluruh pokja telah diminta membuat back up data dukung LKE yang telah dikirim kepada Tim Penilai Internal dan mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan ZI TW 2 sd TW 4 tahun 2025 secara akurat untuk mempermudah pengisian LKE di tahun 2026. Back up data di dokumentasikan dalam Aplikasiku. Selain itu, pada LKE tahun 2025 juga telah dilakukan perbaikan terhadap hasil penilaian (rekomendasi TPI) tahun 2024 sehingga diharapkan nilai pembangunan ZI tahun 2025 dapat tercapai sesuai target. Dalam rangka memenuhi ketepatan waktu penyampaian LKE ke Inspektorat, Tim Auditor agar menyusun jadwal mulai dari pengisian LKE sampai dengan	monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Seluruh pokja telah diminta membuat back up data dukung LKE yang telah dikirim kepada Tim Penilai Internal dan mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan ZI TW 2 sd TW 4 tahun 2025 secara akurat untuk mempermudah pengisian LKE di tahun 2026. Back up data di dokumentasikan dalam Aplikasiku. Selain itu, pada LKE tahun 2025 juga telah dilakukan perbaikan terhadap hasil penilaian (rekomendasi TPI) tahun 2024 sehingga diharapkan nilai pembangunan ZI tahun 2025 dapat tercapai sesuai target. Dalam rangka memenuhi ketepatan waktu penyampaian LKE ke Inspektorat, Tim Auditor agar menyusun jadwal mulai dari pengisian LKE sampai dengan	closed	monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Seluruh pokja telah diminta membuat back up data dukung LKE yang telah dikirim kepada Tim Penilai Internal dan mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan ZI TW 2 sd TW 4 tahun 2025 secara akurat untuk mempermudah pengisian LKE di tahun 2026. Back up data di dokumentasikan dalam Aplikasiku. Selain itu, pada LKE tahun 2025 juga telah dilakukan perbaikan terhadap hasil penilaian (rekomendasi TPI) tahun 2024 sehingga diharapkan nilai pembangunan ZI tahun 2025 dapat tercapai sesuai target. Dalam rangka memenuhi ketepatan waktu penyampaian LKE ke Inspektorat, Tim Auditor agar menyusun jadwal mulai dari pengisian LKE sampai dengan	Selama tahun 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					perbaiki dan revidi kembali oleh Tim Auditor. Sebelum melaksanakan revidi, perlunya dilakukan penyamaan persepsi Tim Auditor dan Seluruh Pokja RB		perbaiki dan revidi kembali oleh Tim Auditor. Sebelum melaksanakan revidi, perlunya dilakukan penyamaan persepsi Tim Auditor dan Seluruh Pokja RB				
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	1. Beberapa anggota tim ZI masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal penyusunan rencana kerja, pengisian LKE, audit internal dan pemenuhan data dukung sesuai kriteria penilaian. Hal ini berpengaruh pada kualitas dokumen yang dihasilkan serta kecepatan respons terhadap revidi dari auditor internal maupun TPI. 2. Waktu untuk fokus pada pembangunan ZI menjadi terbatas. Ini mempengaruhi kelancaran penyusunan dokumen, tindak lanjut movev, dan penyusunan tindak korektif atas temuan.	- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tim RB ZI melalui sosialisasi, sharing seSKion oleh Balai lain yang telah memperoleh WBBM - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman auditor internal melalui Bimbingan teknis/pelatihan	- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tim RB ZI melalui sosialisasi, sharing seSKion oleh Balai lain yang telah memperoleh WBBM - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman auditor internal melalui Bimbingan teknis/pelatihan	closed	- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tim RB ZI melalui sosialisasi, sharing seSKion oleh Balai lain yang telah memperoleh WBBM - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman auditor internal melalui Bimbingan teknis/pelatihan	Semester II Tahun 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Nilai total LKE kurang dari 90 dan Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 3,75) tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan	Dalam rangka upaya perbaikan diperlukan komitmen dari seluruh Pokja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Seluruh	1. Memastikan bahwa penentuan anggota tim belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan monitoring dan	closed	1. Memastikan bahwa penentuan anggota tim belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan monitoring dan	TW IV Tahun 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			KemenPANRB sehingga tidak dapat diusulkan untuk WBBM. 2. Beberapa anggota tim ZI masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal penyusunan rencana kerja, pengisian LKE, audit internal dan pemenuhan data dukung sesuai kriteria penilaian. Hal ini berpengaruh pada kualitas dokumen yang dihasilkan serta kecepatan respons terhadap reviu dari auditor internal maupun TPI. 3. Waktu untuk fokus pada pembangunan ZI menjadi terbatas. Ini mempengaruhi kelancaran penyusunan dokumen, tindak lanjut monev, dan penyusunan tindak korektif atas temuan.	pokja telah diminta membuat back up data dukung LKE yang telah dikirim kepada Tim Penilai Internal dan mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan ZI TW 3 sd TW 4 tahun 2025 secara akurat untuk mempermudah pengisian LKE di tahun 2026. Back up data di dokumentasikan dalam Aplikasiku. Selain itu, pada LKE tahun 2025 juga telah dilakukan perbaikan terhadap hasil penilaian (rekomendasi TPI) tahun 2024. Berdasarkan hasil penilaian PMPZI oleh Inspektorat, BBPOM di Bandar Lampung belum dapat mengajukan WBBM pada tahun 2025. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam memperoleh capaian kinerja dan perbaikan LKE, sehingga dapat mempersiapkan dalam meraih WBBM. Upaya perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut : 1. Memastikan bahwa penentuan anggota tim belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan lengkap meliputi perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan ZI, kendala, dan tindak lanjut apabila terdapat rencana kerja yang tidak	evaluasi rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan lengkap meliputi perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan ZI, kendala, dan tindak lanjut apabila terdapat rencana kerja yang tidak terealisasi. 3. Meningkatkan upaya internalisasi nilai BerAKHLAK kepada seluruh pegawai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital secara berkala terhadap seluruh teknologi informasi yang digunakan sehingga dapat diketahui dampak transformasi digital tersebut. 5. Memastikan bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah memperhatikan kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai). 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan		evaluasi rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan lengkap meliputi perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan ZI, kendala, dan tindak lanjut apabila terdapat rencana kerja yang tidak terealisasi. 3. Meningkatkan upaya internalisasi nilai BerAKHLAK kepada seluruh pegawai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital secara berkala terhadap seluruh teknologi informasi yang digunakan sehingga dapat diketahui dampak transformasi digital tersebut. 5. Memastikan bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah memperhatikan kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai). 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan				

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				terealisasi. 3. Meningkatkan upaya internalisasi nilai BerAKHLAK kepada seluruh pegawai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital secara berkala terhadap seluruh teknologi informasi yang digunakan sehingga dapat diketahui dampak transformasi digital tersebut. 5. Memastikan bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah memperhatikan kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai). 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi agar dikaitkan dengan perbaikan kinerja belum dilakukan. 7. Menetapkan pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja. 8. Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai unsur dalam pemberian reward and punishment. 9. Melengkapi laporan implementasi inovasi terkait area perubahan penguatan pengawasan. 10. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala disertai dengan kendala yang dihadapi dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan,	kompetensi agar dikaitkan dengan perbaikan kinerja belum dilakukan. 7. Menetapkan pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja. 8. Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai unsur dalam pemberian reward and punishment. 9. Melengkapi laporan implementasi inovasi terkait area perubahan penguatan pengawasan. 10. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala disertai dengan kendala yang dihadapi dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk analisis jika hasil monitoring pengaduan nihil. 11. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi laporan SKM sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut. 12. Melengkapi laporan inovasi pelayanan publik yang memuat		kompetensi agar dikaitkan dengan perbaikan kinerja belum dilakukan. 7. Menetapkan pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja. 8. Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai unsur dalam pemberian reward and punishment. 9. Melengkapi laporan implementasi inovasi terkait area perubahan penguatan pengawasan. 10. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala disertai dengan kendala yang dihadapi dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk analisis jika hasil monitoring pengaduan nihil. 11. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi laporan SKM sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut. 12. Melengkapi laporan inovasi pelayanan publik yang memuat				

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				termasuk analisis jika hasil monitoring pengaduan nihil. 11. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi laporan SKM sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut. 12. Melengkapi laporan inovasi pelayanan publik yang memuat belakang, dampak, monitoring dan evaluasi implementasi secara lengkap. 13. Melakukan penguatan tata kelola kinerja, perbaikan layanan dan mendorong inovasi sehingga capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. 14. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.	belakang, dampak, monitoring dan evaluasi implementasi secara lengkap. 13. Melakukan penguatan tata kelola kinerja, perbaikan layanan dan mendorong inovasi sehingga capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. 14. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.		belakang, dampak, monitoring dan evaluasi implementasi secara lengkap. 13. Melakukan penguatan tata kelola kinerja, perbaikan layanan dan mendorong inovasi sehingga capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. 14. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.				
		Oktober	Nilai LKE ZI tahun 2025 kurang dari 91	Pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas	Ketua Pokja mengkoordinir pengisian rencana kerja pembangunan Zona Integritas Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian RB	closed	Ketua Pokja mengkoordinir pengisian rencana kerja pembangunan Zona Integritas Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian RB	31 October 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90
		November	Nilai LKE ZI tahun 2025 kurang dari 90	Pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas	Ketua Pokja mengkoordinir pengisian rencana kerja pembangunan Zona Integritas Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian RB	closed	Ketua Pokja mengkoordinir pengisian rencana kerja pembangunan Zona Integritas Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian RB	30 November 2025	Y	F-24	Nilai LKE kurang dari 90

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
26	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	Januari	-	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line	25 Januari 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		Februari	-	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line	25 Februari 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		Maret	-	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line	30 Maret 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
			-	Membuat pedoman Reward dan punishment kinerja	-	closed	-	30 Maret 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
			-	Tim penyusunan laporan kinerja telah mengikuti pengembangan kompetensi secara online dengan memanfaatkan Ideas melalui SIASN	Beberapa tim akuntabilitas belum mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP	closed	Beberapa tim akuntabilitas belum mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP	TW 2 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
			-	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib	Pemantauan pengisian Simetris	closed	Pemantauan pengisian Simetris	TW 4 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Pelaksanaan Reward dan punishment TW I 2025 untuk kinerja TW 4 tahun 2024 masih mengikuti sistem	1. Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment kinerja memberikan penghargaan pada Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan	1. Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada	closed	1. Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada	Selama tahun 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			penilaian yang lama dan belum memakai pedoman/SOP Mikro 2. Beberapa anggota tim akuntabilitas masih memerlukan peningkatan pengembangan kompetensi SAKIP 3. Terdapat rekomendasi Inspektorat pada penilaian SAKIP tahun 2024 yang merupakan kelemahan yang harus ditindaklanjuti	untuk memberikan punishment kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran. 2. Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment pegawai secara individu sesuai dengan pedoman 3. Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP 4. Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan 5. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP tahun 2024 Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja	Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan punishment kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran. 2. Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment pegawai secara individu sesuai dengan pedoman 3. Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP 4. Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan 5. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP tahun 2024 Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam		Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan punishment kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran. 2. Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment pegawai secara individu sesuai dengan pedoman 3. Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP 4. Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan 5. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP tahun 2024 Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam				

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					mengelola pelaporan kinerja		mengelola pelaporan kinerja				
		April	Nilai NKO TW 1 dengan predikat butuh perbaikan	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 1 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 1 2. Pengiriman laporan sesuai time line	20-Apr-25	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		Mei	Nilai NKO TW 1 dengan predikat butuh perbaikan	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 1 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 1 2. Pengiriman laporan sesuai time line	30-May-25	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	1. Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada TW 1 dengan kriteria Butuh Perbaikan 2. Tidak semua pegawai BBPOM di Bandar Lampung memahami SAKIP 3. Terdapat rekomendasi Inspektorat pada penilaian SAKIP tahun 2024 yang merupakan kelemahan yang harus ditindaklanjuti	- Melaksanakan evaluasi SAKIP dengan melakukan pengisian LKE disertai data dukung - Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline.	- Melaksanakan evaluasi SAKIP dengan melakukan pengisian LKE disertai data dukung - Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline.	closed	- Melaksanakan evaluasi SAKIP dengan melakukan pengisian LKE disertai data dukung - Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline.	Tahun 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		Juli	Nilai NKO TW 2 dengan predikat Baik	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai	31 Juli 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					pada TW 2 2. Pengiriman laporan sesuai time line		pada TW 2 2. Pengiriman laporan sesuai time line				
		Agustus	Nilai NKO TW 2 dengan predikat Baik	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 2 dan bulan Agustus 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 2 dan bulan Agustus 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	31 Agustus 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		September	Nilai NKO TW 2 dengan predikat Baik	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 2 dan bulan September 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU yang tidak tercapai pada TW 2 dan bulan September 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	30 September 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Penentuan kertas kerja penetapan target yang belum memenuhi semua aspek SMART-C 2. Belum semua pegawai BBPOM di Bandar Lampung memahami SAKIP 3. Perbedaan persepsi antara Inspektorat dan Biro Perencanaan dan keuangan terkait dengan penyusunan Lapkin	Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan kinerja adalah: • Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan • Melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja • Melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 dengan melibatkan substansi. • Melaksanakan desk SAKIP tahun 2025 dengan Inspektorat dan menindaklanjuti perbaikan	• Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan • Melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja • Melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 dengan melibatkan substansi. • Melaksanakan desk SAKIP tahun 2025	closed	• Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan • Melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja • Melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 dengan melibatkan substansi. • Melaksanakan desk SAKIP tahun 2025	TW IV Tahun 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				hasil desk tersebut • Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan punishment kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran. • Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment pegawai secara individu sesuai dengan pedoman • Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP. Pada TW 3 ini seluruh tim pengelola akuntabilitas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait SAKIP • Pengembangan inovasi SIPADUPINTER sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja • Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline.	dengan Inspektorat dan menindaklanjuti perbaikan hasil desk tersebut • Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan punishment kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran. • Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment pegawai secara individu sesuai dengan pedoman • Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP. Pada TW 3 ini seluruh tim pengelola akuntabilitas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait SAKIP • Pengembangan inovasi SIPADUPINTER		dengan Inspektorat dan menindaklanjuti perbaikan hasil desk tersebut • Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan punishment kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran. • Melaksanakan SOP mikro Reward dan punishment pegawai secara individu sesuai dengan pedoman • Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP. Pada TW 3 ini seluruh tim pengelola akuntabilitas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait SAKIP • Pengembangan inovasi SIPADUPINTER				

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja • Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline.		sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja • Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline.				
		Oktober	Tidak ada kendala, Nilai NKO TW 2 dengan predikat Istimewa	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU pada TW 3 dan bulan Oktober 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU pada TW 3 dan bulan Oktober 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	31 October 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
		November	Tidak ada kendala, Nilai NKO TW 2 dengan predikat Istimewa	Monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai timeline	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU pada TW 3 dan bulan Oktober 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	closed	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKU pada TW 3 dan bulan Oktober 2025 2. Pengiriman laporan sesuai time line	30 November 2025	Y	S-44	Terjadi penurunan nilai komponen capaian kinerja pada evaluasi AKIP
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	Rekomendasi dari tahun 2024	-	Dilakukan monitoring secara ketat terhadap pengelolaan UP/TUP sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan	Monitoring UP/TUP	closed	Monitoring UP/TUP	Des 2025	Y	S-16	Penilaian TUP pada komponen IKPA terjadi penurunan
		Rekomendasi dari tahun 2024	-	Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revisi dan adanya keterlambatan penyampaian SPM	Monitoring revisi dan penyampaian SPM	closed	Monitoring revisi dan penyampaian SPM	Desember 2025	Y	SDM-18	Dispensasi SPM
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	1. Adanya efisiensi anggaran akan mengubah perencanaan kegiatan	1. Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas	1. Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk	closed	1. Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk	TW II Tahun 2025	Y	S-16	Penilaian TUP pada komponen IKPA terjadi penurunan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan anggaran baik operasional perkantoran maupun kegiatan di substansi 3. Penghematan Sumber daya energi dan air 4. Belum seluruh penanggung jawab kegiatan memahami kebijakan baru terkait perpajakan, hal ini dapat mempengaruhi timeline pemenuhan pertanggungjawaban baik UP/TUP maupun pengadaan	2. Melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya 3. Menyusun kembali perencanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia 4. Adanya kebijakan baru terkait perpajakan yang dimulai pada TW 1 tahun 2025, perlu dilakukan sosialisasi coretax perpajakan	kegiatan prioritas 2. Melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya 3. Menyusun kembali perencanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia 4. Adanya kebijakan baru terkait perpajakan yang dimulai pada TW 1 tahun 2025, perlu dilakukan sosialisasi coretax perpajakan		kegiatan prioritas 2. Melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya 3. Menyusun kembali perencanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia 4. Adanya kebijakan baru terkait perpajakan yang dimulai pada TW 1 tahun 2025, perlu dilakukan sosialisasi coretax perpajakan			SDM-37	Penyetoran Pajak tidak tertib
		April	Adanya Efisiensi dan relaksasi anggaran pada bulan sebelumnya terdapat parameter IKPA yang belum optimal	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD, penyerapan anggaran, UP/TUP)	Memutakhirkan RPD TW 2 dan memantau pelaksanaannya Memonitor penyerapan anggaran memantau UP dan TUP	closed	Memutakhirkan RPD TW 2 dan memantau pelaksanaannya Memonitor penyerapan anggaran memantau UP dan TUP	Apr-25	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan
		Mei	Adanya Efisiensi dan relaksasi anggaran pada bulan sebelumnya terdapat parameter IKPA yang belum optimal	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD, penyerapan anggaran)	Memantau pelaksanaan RPD Memonitor penyerapan anggaran memantau UP dan TUP	closed	Memantau pelaksanaan RPD Memonitor penyerapan anggaran memantau UP dan TUP	Mei 2025	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	1. Adanya efisiensi anggaran akan mengubah perencanaan kegiatan 2. Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan anggaran baik operasional perkantoran maupun kegiatan di substansi 3. Penghematan	- Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas. - Dalam rangka efisiensi anggaran, salah satunya dengan melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya. - Pemantauan parameter	- Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas. - Dalam rangka efisiensi anggaran, salah satunya dengan melakukan penghematan sumber daya energi dan air	closed	- Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas. - Dalam rangka efisiensi anggaran, salah satunya dengan melakukan penghematan sumber daya energi dan air	TW III Tahun 2025	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Sumber daya energi dan air 4. Belum seluruh penanggung jawab kegiatan memahami kebijakan baru terkait perpajakan, hal ini dapat mempengaruhi timeline pemenuhan pertanggungjawaban baik UP/TUP maupun pengadaan	penilaian IKPA TW 2 yang tidak tercapai yaitu parameter Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada detail penilaian RPD terdapat deviasi minus pada belanja barang dan deviasi plus pada belanja pegawai dan belanja modal. Berdasarkan data tersebut maka pada awal TW 3 awal bulan Juli dilakukan pemutakhiran RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.	untuk menekan biaya. - Pemantauan parameter penilaian IKPA TW 2 yang tidak tercapai yaitu parameter Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada detail penilaian RPD terdapat deviasi minus pada belanja barang dan deviasi plus pada belanja pegawai dan belanja modal. Berdasarkan data tersebut maka pada awal TW 3 awal bulan Juli dilakukan pemutakhiran RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.		untuk menekan biaya. - Pemantauan parameter penilaian IKPA TW 2 yang tidak tercapai yaitu parameter Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada detail penilaian RPD terdapat deviasi minus pada belanja barang dan deviasi plus pada belanja pegawai dan belanja modal. Berdasarkan data tersebut maka pada awal TW 3 awal bulan Juli dilakukan pemutakhiran RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.				
		Juli	Adanya Efisiensi dan relaksasi anggaran pada bulan sebelumnya terdapat parameter IKPA yang belum optimal	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD)	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	closed	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	31 Juli 2025	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan
		Agustus	Terdapat parameter IKPA yang belum optimal	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD)	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	closed	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	31 Agustus 2025	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan
		September	Terdapat parameter IKPA yang belum optimal	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD)	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	closed	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	30 September 2025	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	1. Adanya efisiensi anggaran akan mengubah perencanaan kegiatan	Upaya perbaikan yang akan dilakukan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka mempertahankan/peningkatan	• Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk	closed	• Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk	TW IV Tahun 2025	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan anggaran baik operasional perkantoran maupun kegiatan di substansi 3. Capaian RPD tidak sesuai dengan target karena ketidaksesuaian penginputan di SAKTI pada saat pemutakhiran di TW 3 ini	kinerja adalah: • Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas. • Dalam rangka efisiensi anggaran, salah satunya dengan melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya. • Pemantauan parameter penilaian IKPA TW 3 yang tidak tercapai yaitu parameter Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada detail penilaian RPD terdapat deviasi plus pada belanja pegawai dan deviasi minus pada belanja barang dan belanja modal. Berdasarkan data tersebut maka pada awal TW 4 awal bulan Oktober dilakukan pemutakhiran RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada TW 4.	kegiatan prioritas. • Dalam rangka efisiensi anggaran, salah satunya dengan melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya. • Pemantauan parameter penilaian IKPA TW 3 yang tidak tercapai yaitu parameter Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada detail penilaian RPD terdapat deviasi plus pada belanja pegawai dan deviasi minus pada belanja barang dan belanja modal. Berdasarkan data tersebut maka pada awal TW 4 awal bulan Oktober dilakukan pemutakhiran RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada TW 4		kegiatan prioritas. • Dalam rangka efisiensi anggaran, salah satunya dengan melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya. • Pemantauan parameter penilaian IKPA TW 3 yang tidak tercapai yaitu parameter Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada detail penilaian RPD terdapat deviasi plus pada belanja pegawai dan deviasi minus pada belanja barang dan belanja modal. Berdasarkan data tersebut maka pada awal TW 4 awal bulan Oktober dilakukan pemutakhiran RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada TW 4				
		Oktober	Terdapat parameter IKPA yang belum optimal	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD)	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	closed	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	31 October 2025	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan
		November	Terdapat parameter IKPA yang belum optimal	Pemantauan parameter penilaian IKPA yang tidak tercapai (RPD dan belanja kontraktual)	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	closed	Memantau pelaksanaan RPD dan parameter penilaian IKPA lainnya	30 November 2025	Y	SDM-16	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM	Januari	-	Dilakukan pemantauan terhadap pengendalian yang sudah direncanakan / dilakukan	Melakukan pemantauan dan pengecekan data	closed	Melakukan pemantauan dan pengecekan data	20 Juli 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	di Bandar Lampung				dukung pengendalian risiko		dukung pengendalian risiko				
		Februari	-	Dilakukan pemantauan terhadap pengendalian yang sudah direncanakan / dilakukan	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	closed	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT
		Maret	Ada Integrasi antara simakin (SKP) dengan Daftar Risiko yang diinput di SAPA APIP, Integrasi baru dilakukan di Akhir TW 1 (Maret) sedangkan Identifikasi Risiko dilakukan di awal Januari dan sudah di upload di SAPA APIP tanggal 20 Januari sehingga ada beberapa RHK yang belum teridentifikasi risiko nya	RHK yang belum ada identifikasi risiko nya bisa di lakukan identifikasi risiko nya dan nanti dilakukan upload ke SAPA APIP di TW 3 (20 Juli 2025)	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	closed	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT
		Lapkin Interim TW I Tahun 2025	Integrasi antara Manajemen Kinerja (simakin) dengan Manajemen Risiko (Daftar Risiko yang diinput di SAPA APIP) dilakukan di Akhir TW 1 (Maret) sedangkan Identifikasi Risiko dilakukan di awal Januari dan sudah di upload di SAPA APIP tanggal 20 Januari sehingga ada beberapa RHK yang belum teridentifikasi risiko nya. Identifikasi risiko pada RHK tersebut akan dilakukan di TW 2 dan	Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan capaian Indeks Manajemen Risiko sekaligus untuk menjawab kelemahan penerapan manajemen risiko dari hasil penilaian inspektorat adalah sebagai berikut: 1. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko telah dilakukan secara berkesinambungan; 2. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan seluruh target kinerja akan	1. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko telah dilakukan secara berkesinambungan; 2. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan seluruh target kinerja akan tercapai;	closed	1. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko telah dilakukan secara berkesinambungan; 2. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan seluruh target kinerja akan tercapai;	Selama tahun 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			akan dilaporkan melalui SAPA APIP di awal TW 3 (20 Juli 2025). Dengan begitu diharapkan identifikasi risiko lebih komprehensif dan akan menunjang pencapaian Indeks Manajemen Risiko di BBPOM Bandar Lampung	tercapai; 3. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai; 4. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko; 5. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit dalam proses reviu risiko; 6. Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko.	3. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai; 4. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko; 5. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit dalam proses reviu risiko; 6. Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko.		3. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai; 4. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko; 5. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit dalam proses reviu risiko; 6. Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko.				
		April	-	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	closed	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT
		Mei	-	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	closed	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT
		Juni	-	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko dan menyusun Daftar Risiko untuk semester II	closed	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko dan menyusun Daftar Risiko untuk semester II	20 Juli 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Lapkin Interim TW II Tahun 2025	-	- Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko. - Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini dan memastikan data dukung nya.		closed			Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT
		Juli	-	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	closed	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	31 Desember 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT
		Agustus	-	Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini (melengkapi data dukung)	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	closed	Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	31 Desember 2025	Y	S-39	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT
		September	Ada beberapa risiko yang perlu direviu dan dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut dari bimtek	Melakukan reviu risiko yang ada di daftar risiko semester 2	masing-masing substansi mereviu risiko yang ada di substansi nya dan melengkapi data dukung nya	closed	masing-masing substansi mereviu risiko yang ada di substansi nya dan melengkapi data dukung nya	30 September 2025	Y	S-52	Penilaian atau reviu dokumen manajemen risiko oleh auditor internal belum dilakukan
		Lapkin Interim TW III Tahun 2025	Pemahaman pegawai dalam menyusun identifikasi risiko masih belum seragam sehingga perlu terus dilakukan pengembangan kompetensi baik melalui bimbingan teknis atau internalisasi dan sharing dari pegawai yang sudah mengikuti pelatihan atau dari tim manajemen risiko melalui media apel pagi yang diselenggarakan setiap	Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan capaian Indeks Manajemen Risiko sekaligus untuk menjawab kelemahan penerapan manajemen risiko dari hasil penilaian inspektorat adalah sebagai berikut: i. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko telah dilakukan secara berkesinambungan; ii. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan	i. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko telah dilakukan secara berkesinambungan; ii. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan seluruh target kinerja akan	closed	i. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko telah dilakukan secara berkesinambungan; ii. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan seluruh target kinerja akan	TW IV Tahun 2025	Y	S-51	Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pagi di BBPOM Bandar Lampung	seluruh target kinerja akan tercapai; iii. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai; iv. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko; pada pelaporan risiko melalui SAPA APIP untuk semester 2 sudah diakomodir peran auditor internal melalui form pemantauan manajemen risiko yang harus diisi oleh auditor internal v. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit dalam proses reviu risiko; vi. Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko. vii. Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini dan memastikan data dukung nya.	tercapai; iii. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai; iv. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko; pada pelaporan risiko melalui SAPA APIP untuk semester 2 sudah diakomodir peran auditor internal melalui form pemantauan manajemen risiko yang harus diisi oleh auditor internal v. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit dalam proses reviu risiko; vi. Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko. vii. Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini dan		tercapai; iii. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai; iv. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko; pada pelaporan risiko melalui SAPA APIP untuk semester 2 sudah diakomodir peran auditor internal melalui form pemantauan manajemen risiko yang harus diisi oleh auditor internal v. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit dalam proses reviu risiko; vi. Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko. vii. Pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian yang dilakukan saat ini dan				

No	Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					memastikan data dukung nya.		memastikan data dukung nya.				
		Oktober	Pada saat dilakukan pemantauan / rivi risiko terhadap risiko yang dimitigasi masih ditemukan hasil yang belum sesuai dengan target yang diinginkan, misalnya pada RPD	Penilaian efektivitas mitigasi risiko	Melakukan evaluasi terhadap rencana mitigasi apakah memang sudah tepat atau pelaksanaannya yang belum konsisten	closed	Melakukan evaluasi terhadap rencana mitigasi apakah memang sudah tepat atau pelaksanaannya yang belum konsisten	31 Desember 2025	Y	S-52	Tindakan mitigasi yang dipilih tidak tepat
		November	Pada saat dilakukan pemantauan / rivi risiko terhadap risiko yang dimitigasi masih ditemukan hasil yang belum sesuai dengan target yang diinginkan, misalnya pada RPD	Penilaian efektivitas mitigasi risiko	Melakukan evaluasi terhadap rencana mitigasi apakah memang sudah tepat atau pelaksanaannya yang belum konsisten	closed	Melakukan evaluasi terhadap rencana mitigasi apakah memang sudah tepat atau pelaksanaannya yang belum konsisten	31 Desember 2025	Y	S-52	Tindakan mitigasi yang dipilih tidak tepat

Tabel 150. Tindak Lanjut Rekomendasi Rincian Output

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
DR.3165.A EA - Koordinasi	001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Oktober	Tidak ada kendala , hanya karena aplikasi inaweb crawler sedang bermasalah sehingga input data dan pelaporan melalui excel.	Perencanaan patroli siber pada awal bulan	Input dan pelaporan data patroli siber tidak melewati tanggal 25 bulan berjalan	30 Oktober 2025	Input dan pelaporan data patroli siber dengan rekomendasi takedown pada akun-akun produk sediaan farmasi dan pangan olahan pada e-commerce tidak memenuhi ketentuan	Target tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
		November	Tidak ada kendala	Perencanaan analisis penelusuran Siber (Profiling siber dan patroli siber)	Input data dan Laporan Patroli siber dan profiling siber paling lama tgl 28 November 2025.	28 November 2025	Input dan pelaporan data patroli siber dan profiling siber tidak melewati tanggal 28 November 2025	Target tercapai	Close
		Desember	Tidak ada kendala	Perencanaan analisis penelusuran Siber (Profiling siber dan patroli siber)	Input data Laporan Patroli siber, profiling siber dan laporan cegah tangkal paling lama tgl 31 Desember 2025.	31 Desember 2025	Laporan Patroli siber, profiling siber dan laporan cegah tangkal paling lama tgl 31 Desember 2025.	Target tercapai	Close
DR.3165.BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	April	Tidak ada kendala	Evaluasi perizinan dalam rangka Sertifikasi dilakukan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	April - Des 2025	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	target tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
		Oktober	Tidak ada kendala	Evaluasi perizinan dalam rangka Sertifikasi dilakukan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	s.d. Des 2025	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	target tercapai	Close
		November	Tidak ada kendala	Evaluasi perizinan dalam rangka Sertifikasi dilakukan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	s.d. Des 2025	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	target tercapai	Close
		Desember	Tidak ada kendala	Evaluasi perizinan dalam rangka Sertifikasi dilakukan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	s.d. Des 2025	Pelaksanaan evaluasi dalam rangka Sertifikasi dilaksanakan tepat waktu	target tercapai	Close
DR.3165.B DC - Fasilitasi dan	001 - Masyarakat yang ditingkatkan	Oktober	Tidak ada kendala	KIE terlaksana	Melaksanakan KIE kolaborasi dengan Saka POM Bakti Husada Pringsewu	Des 25	Melaksanakan KIE kolaborasi dengan Saka POM Bakti Husada Pringsewu	target tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
Pembinaan Masyarakat	pengetahuannya melalui KIE	November	Tidak ada kendala	KIE terlaksana	Melaksanakan KIE kolaborasi dengan Berbagi Pihak	Des 25	Melaksanakan KIE kolaborasi dengan BGN, Univ Malahayati, dan UMA (Kejaksaan Negeri)	target tercapai	Close
		Desember	Tidak ada kendala	KIE terlaksana	Melaksanakan KIE kolaborasi dengan Berbagi Pihak	Des 25	Melaksanakan KIE kolaborasi dengan BGN, Univ Malahayati, dan UMA (Kejaksaan Negeri)	target tercapai	Close
DR.3165.B KB - Pemantauan produk	001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Sampai dengan Maret	Adanya efisiensi anggaran tidak mempengaruhi capaian RO	tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan	Merencanakan kegiatan prioritas	Desember 2025	Melaksanakan kegiatan sesuai prioritas	target RO tercapai	Close
		April	Efisiensi Anggaran	Beberapa kegiatan terpadu dan kegiatan lain tidak dapat dilaksanakan	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas	31 September 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	Close
		Oktober	Efisiensi Anggaran	Beberapa kegiatan terpadu dan kegiatan lain tidak dapat dilaksanakan	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas	31 Oktober 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	Close
		November	Efisiensi Anggaran	Beberapa kegiatan terpadu dan kegiatan lain tidak dapat dilaksanakan	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas	30 November 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	Close
		Desember	Efisiensi Anggaran	Beberapa kegiatan terpadu dan kegiatan lain	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas	30 Desember 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
				tidak dapat dilaksanakan					
DR.3165.B MB - Komunikasi Publik	001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Sampai dengan Maret	Tidak ada kendala	Pelaksanaan layanan informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan sesuai target	Mempertahankan kinerja	Desember 2025	Pelaksanaan layanan informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan sesuai target	target RO tercapai	Close
		Oktober	Efisiensi Anggaran	Tidak ada anggaran publikasi yang memadai	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan priorotas	s/d Des 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	Close
		November	Efisiensi Anggaran	Tidak ada anggaran publikasi yang memadai	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan priorotas	s/d Des 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	Close
		Desember	Efisiensi Anggaran	Tidak ada anggaran publikasi yang memadai	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan priorotas	s/d Des 2025	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas	Target tercapai	Close
DR.3165.C AB - Sarana Bidang Kesehatan	001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Oktober, November dan Desember	Efisiensi anggaran	Pengadaan tidak dapat terlaksana	-	Desember 2025	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
DR.3165.CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	Sampai dengan Maret	Kegiatan tidak dapat berproses karena adanya kebijakan efisiensi anggaran	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal karena efisiensi anggaran	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi anggaran	Desember 2025	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi anggaran	Belum ada kegiatan yang dapat direalisasikan	Close
		April	Efisiensi anggaran	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	April-Des 2025	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	Memiliki rekap kebutuhan dan rencana pengadaan	Close
		Oktober, November dan Desember	Efisiensi anggaran	Pengadaan tidak dapat terlaksana	-	Desember 2025	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Close
DR.3165.CBV - Prasarana Bidang Kesehatan	001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Sampai dengan Maret	Kegiatan tidak dapat berproses karena adanya kebijakan efisiensi anggaran	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal karena efisiensi anggaran	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi anggaran	Desember 2025	Menyusun perencanaan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi anggaran	Belum ada kegiatan yang dapat direalisasikan	Close
		April	Efisiensi anggaran	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	April-Des 2025	Menyusun rekap kebutuhan dan rencana pengadaan agar dapat dilaksanakan ketika blokir anggaran dibuka	Memiliki rekap kebutuhan dan rencana pengadaan	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
		Oktober, November dan Desember	Efisiensi anggaran	Pengadaan tidak dapat terlaksana	-	Desember 2025	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Pengadaan tidak dapat terlaksana	Close
		Oktober	Tidak ada kendala	- pelaksanaan pengadaan reagen dan suku cadang sesuai dengan perencanaan	Melaksanakan kegiatan yang sudah di rencanakan untuk bulan Oktober sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Mei - Des 2025	- mengawal proses pengadaan suku cadang dan reagen yang akan dilaksanakan di bulan September	- pengadaan reagen, media dan suku cadang terlaksana sesuai kontrak	Close
		November	Tidak ada kendala	- pelaksanaan pengadaan reagen dan suku cadang sesuai dengan perencanaan - pelaksanaan pelatihan sistem mutu sesuai perencanaan - pelaksanaan kalibrasi sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan yang sudah di rencanakan untuk bulan November sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Mei - Des 2025	- mengawal proses pengadaan suku cadang dan reagen yang akan dilaksanakan di bulan November - mengikuti pelatihan sistem mutu di bulan November - kalibrasi peralatan di bulan November	- pengadaan reagen, media dan suku cadang terlaksana sesuai kontrak - pelatihan sistem mutu terlaksana dengan baik - kalibrasi peralatan terlaksana sesuai jadwal	Close
		Desember	Tidak ada kendala	- pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan yang	Mei - Des 2025	- mengawal proses pengadaan suku cadang dan	- pengadaan reagen, media	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
				pengadaan reagen dan suku cadang sesuai dengan perencanaan - pelaksanaan kalibrasi sesuai perencanaan - pembelian bahan penunjang sesuai perencanaan	sudah di rencanakan untuk bulan Desember sesuai dengan perencanaan yang telah disusun		reagen yang akan dilaksanakan di bulan Desember - kalibrasi peralatan di bulan November - pembelian bahan penunjang lab	dan suku cadang terlaksana sesuai kontrak - kalibrasi peralatan terlaksana sesuai jadwal - pembelian bahan penunjang sesuai rencana	
DR.3165.Q CD - Perkara Hukum Badan Usaha	U28 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	Oktober	Tidak ada kendala	Perkara kedua yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung telah P-21	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait proses penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	31 Oktober 2025	Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	Perkara kedua telah tahap 2	Close
		November	Tidak ada kendala	SPDP perkara ketiga sudah disampaikan ke Jaksa	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait proses penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	30 November 2025	Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	Perkara ketiga telah tahap 1	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
		Desember	Koordinasi dengan Jaksa peneliti belum optimal karena adanya pergantian Jaksa di Kejati Lampung sehingga ada perbedaan persepsi kualitas dan alat bukti pada pembuktian dalam berkas perkara	Adanya P19 perkara ketiga yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung	Melakukan koordinasi dengan Jaksa terkait proses penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	31 Desember 2025	Koordinasi dengan Jaksa secara intensif terkait penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	Pemenuhan P-19 oleh Penyidik terhadap perkara yang ditangani	Close
DR.3165.Q DB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Oktober	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Agustus 2025	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 12 sekolah dan pengawalan 20 sekolah (intervensi tahun 2024)	Close
		November	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Agustus 2025	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 12 sekolah dan pengawalan 20 sekolah (intervensi tahun 2024)	Close
		Desember	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Agustus 2025	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 12 sekolah dan pengawalan 20	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
								sekolah (intervensi tahun 2024)	
DR.3165.Q DB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Desa Pangan Aman	Oktober, November dan Desember	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	September 2025	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 12 sekolah dan pengawalan 20 sekolah (intervensi tahun 2024)	Close
DR.3165.Q DB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Agustus 2025	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 1 pasar dan pengawalan 3 pasar (intervensi tahun 2024)	Close
		November	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Agustus 2025	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 1 pasar dan pengawalan 3 pasar (intervensi tahun 2024)	Close
		Desember	Tidak ada kendala	Terlaksana 100%	Tidak ada	Agustus 2025	Tidak ada	Terlaksananya semua tahapan intervensi 1 pasar dan pengawalan 3 pasar (intervensi tahun 2024)	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
DR.3165.Q DC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	Oktober, November dan Desember	Tidak ada kendala	Seluruh kegiatan telah selesai bulan Februari 2025	-	Februari 2025	Seluruh kegiatan telah selesai bulan Februari 2025	Target tercapai	Close
									Close
DR.3165.Q DG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Juli	Tidak ada kendala	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	s.d. Des 2025	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai renlak	realisasi sesuai renlak	Close
		Oktober	1 UMKM OBA yang didampingi belum mampu memenuhi persyaratan pengajuan CPOTB Bertahap hingga bulan Oktober 2025	UMKM OBA yang didampingi belum mampu memenuhi persyaratan pengajuan CPOTB Bertahap hingga bulan Oktober 2025 yakni dalam perbaikan sarana produksi	Mencari UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan terhadap realisasi tahap pendampingan UMKM OBA pengganti sesuai yang telah ditetapkan	Okt 2025	Mencari UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan terhadap realisasi tahap pendampingan UMKM OBA pengganti sesuai yang telah ditetapkan	Telah diperoleh UMKM OBA pengganti dan dilakukan percepatan pendampingan. Hingga akhir Oktober 2025 telah dilakukan Bimtek CPOTB, pendampingan penyusunan dokumen, hingga pengajuan Sertifikasi CPOTB Bertahap di sistem e-sertifikasi oleh UMKM	Close
		November	Tidak ada kendala	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	s.d. Des 2025	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai renlak	realisasi sesuai renlak	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
		Desember	Tidak ada kendala	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	s.d. Des 2025	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai renlak	realisasi sesuai renlak	Close
		Agustus	Tidak ada kendala	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	s.d. Des 2025	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai renlak	realisasi sesuai renlak	Close
		September	Tidak ada kendala	Sesuai	Pendampingan UMKM sesuai renlak	Sesuai renlak	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai renlak	realisasi sesuai renlak	Close
DR.3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sampai dengan Maret	Kebijakan Inpres 1 Tahun 2025, dilakukan Efisiensi anggaran berjalan sampai bulan Maret 2025 menyebabkan penyesuaian jumlah target dalam setahun. Selanjutnya adanya relaksasi anggaran target kembali ke target awal sehingga capaian RO sampai TW1 masih sangat kecil	Capaian 10,93% dari target 439 produk	Menyusun Renlak dengan mendistribusikan sisa sampel (391 sampel), dan melaksanakan sampling sesuai renlak bulan April-Desember 2025	Desember 2025	-Pelaksanaan sampling sesuai dengan renlak	target RO tercapai sesuai renlak	Close
		April	Relaksasi anggaran pada awal TW 2 menyebabkan perubahan renlak sampling sehingga	Realisasi jumlah sampel yang di sampling sampai bulan april masih	- membuat renlak baru pasca relaksasi anggaran - Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan	April - Des 2025	- Menyusun renlak baru pasca relaksasi anggaran - Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan pasca relaksasi anggaran	Target tahunan dapat tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
			membutuhkan penyesuaian	rendah dibandingkan dengan target tahunan	pasca relaksasi anggaran				
		Oktober	tidak ada kendala	realisasi sampling sesuai target	melaksanakan sampling sesuai renlak	November 2025	melaksanakan sampling 34 sampel	Realisasi sesuai renlak	Close
		November	tidak ada kendala	realisasi sampling sesuai target	melaksanakan sampling sesuai renlak	Desember 2025	melaksanakan sampling 6 sampel	Realisasi sesuai renlak	Close
		Desember	tidak ada kendala	realisasi sampling sesuai target	melaksanakan sampling sesuai renlak	Desember 2025	melaksanakan sampling	Realisasi sesuai renlak	Close
DR.3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Sampai dengan Maret	Kebijakan Inpres 1 Tahun 2025, dilakukan Efisiensi anggaran berjalan sampai bulan Maret 2025 menyebabkan penyesuaian jumlah target dalam setahun. Selanjutnya adanya relaksasi anggaran target kembali ke target awal sehingga capaian RO sampai TW1 masih sangat kecil	Capaian 7,37% dari target 1085 produk	Menyusun Renlak dengan mendistribusikan sisa sampel (1005 sampel), dan melaksanakan sampling sesuai renlak bulan April-Desember 2025	Desember 2025	-Pelaksanaan sampling sesuai dengan renlak	target RO tercapai sesuai renlak	Close
		April	Relaksasi anggaran pada	Realisasi jumlah	- membuat renlak baru pasca	April - Des 2025	- Menyusun renlak baru pasca relaksasi anggaran	Target tahunan dapat tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
			awal TW 2 menyebabkan perubahan renlak sampling sehingga membutuhkan penyesuaian	sampel yang di sampling sampai bulan april masih rendah dibandingkan dengan target tahunan	relaksasi anggaran - Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan pasca relaksasi anggaran		- Melaksanakan renlak yang sudah disesuaikan pasca relaksasi anggaran		
		Oktober	tidak ada kendala	realisasi sampling sesuai target	melaksanakan sampling sesuai renlak	November 2025	melaksanakan sampling 72 sampel	Realisasi sesuai renlak	Close
		November	tidak ada kendala	realisasi sampling sesuai target	melaksanakan sampling sesuai renlak	Desember 2025	melaksanakan sampling 19 sampel	Realisasi sesuai renlak	Close
		Desember	tidak ada kendala	realisasi sampling sesuai target	melaksanakan sampling sesuai renlak	Desember 2025	melaksanakan sampling	Realisasi sesuai renlak	Close
DR.3165.Q IC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Oktober	Tidak ada kendala	Realisasi pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan sesuai renlak	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sesuai renlak	November 2025	melaksanakan pemeriksaan 15 sarana	Realisasi sesuai renlak	Close
		November	Tidak ada kendala	Realisasi pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan sesuai renlak	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sesuai renlak	November 2025	melaksanakan pemeriksaan 15 sarana	Realisasi sesuai renlak	Close
		Desember	Tidak ada kendala	Realisasi pemeriksaan sarana	Melaksanakan pemeriksaan	tidak ada	melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak	Realisasi sesuai renlak	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
				produksi obat dan makanan sesuai renlak	sarana produksi sesuai renlak				
DR.3165.Q IC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	Oktober	Tidak ada kendala	Realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai renlak	Target sarana yang diperiksa telah selesai	tidak ada	tidak ada	Renlak sudah terlaksana	Close
		November	Tidak ada kendala	Realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai renlak	Target sarana yang diperiksa telah selesai	tidak ada	tidak ada	Renlak sudah terlaksana	Close
		Desember	Tidak ada kendala	Realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai renlak	Target sarana yang diperiksa telah selesai	tidak ada	tidak ada	Renlak sudah terlaksana	Close
DR.3165.Q IC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang	April	Adanya relaksasi anggaran menyebabkan target dalam satu tahun berubah mengikuti target awal	Realisasi Jumlah sarana masih rendah dibandingkan dengan target tahunan	Melaksanakan renlak penyesuaian pasca relaksasi anggaran	April - Des 2025	Melaksanakan renlak penyesuaian pasca relaksasi anggaran	Realisasi tahunan tercapai sesuai target	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
	Diperiksa oleh UPT	Juli	Tidak ada kendala	Capaian terhadap target setahun 62,92 %	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Target tercapai 100 %	Close
		Agustus	Tidak ada kendala	Capaian terhadap target setahun 75,23 %	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Target tercapai 100 %	Close
		September	Tidak ada kendala	Target sarana yang diperiksa telah sesuai dengan renlak	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Target pemeriksaan sarana selesai tepat waktu	Close
		Oktober	Tidak ada kendala	Realisasi 94,08 %	Target sarana yang diperiksa telah sesuai dengan renlak	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Target pemeriksaan sarana selesai tepat waktu	Close
		November	Tidak ada kendala	Realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai renlak	Target sarana yang diperiksa telah sesuai dengan renlak	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	Target pemeriksaan sarana selesai tepat waktu	Close
		Desember	Tidak ada kendala	Realisasi pemeriksaan sarana	Target sarana yang diperiksa telah	Des 2025	Melaksanakan renlak yang telah disusun dengan baik	Target pemeriksaan	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
				produksi pangan olahan sesuai renlak	sesuai dengan renlak		agar capaian target dapat tercapai tepat waktu	sarana selesai tepat waktu	
DR.3165.R AB - Sarana Bidang Kesehatan	001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sampai dengan Maret	Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga harus dilakukan pembatalan kontrak pengadaan alat laboratorium yang sudah berkontrak pra Dipa (Desember 2024) dan kontrak Bulan Januari 2025. Relaksasi anggaran pengadaan alat laboratorium baru terbit pada bulan februari sehingga harus dilakukan proses pengadaan ulang	Realisasi pengadaan alat laboratorium terlambat	Pelaksanaan proses pengadaan alat laboratorium sesuai prioritas dan kecukupan anggaran segera setelah relaksasi anggaran belanja modal alat laboratorium	TW II dan III	Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Close
		April	Adanya blokir pada sebagian anggaran alat laboratorium	Pengadaan alat lab dilakukan sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	Melaksanakan pengadaan alat laboratorium sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	April - Des 2025	Melaksanakan pengadaan alat laboratorium sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	Target pengadaan alat laboratorium dapat tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
		Oktober	Tidak ada kendala	Pengadaan alat lab dilakukan sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	Melaksanakan pengadaan alat laboratorium sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	April - Des 2025	Melaksanakan pengadaan alat laboratorium sesuai skala prioritas dan kecukupan anggaran	Target pengadaan alat laboratorium dapat tercapai	Close
		November	Tidak ada kendala	Pengadaan sudah selesai	-	April - Des 2025	-	Pengadaan selesai	Close
		Desember	Tidak ada kendala	Pengadaan sudah selesai	-	April - Des 2025	-	Pengadaan selesai	Close
WA.6384.E BA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	Oktober	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran tersedia	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas	31 October 2025	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas	Target Tercapai	Close
		November	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran	30 November 2025	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas	Target Tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
				anggaran tersedia	yang tersedia dan sesuai prioritas				
		Desember	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran tersedia	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas	31 December 2025	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas	Kegiatan tahun 2025 telah selesai dilaksanakan	Close
	994 - Layanan Perkantoran	Sampai dengan Maret	adanya kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi capaian RO	tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan	merencanakan kegiatan prioritas dan melakukan penghematan	Desember 2025	melaksanakan kegiatan prioritas dan penghematan energi dan air	target RO tercapai	Close
		April	Adanya Efisiensi Anggaran	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Menyusun perencanaan sesuai dengan anggaran tersedia	April - Des 2025	Membuat renlak menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	Target Tercapai	Close
		Oktober	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran tersedia	31 October 2025	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas	Target Tercapai	Close
		November	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran tersedia	30 November 2025	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas	Target Tercapai	Close

KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT	BULAN	KENDALA	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE PENYELESAIAN	RENCANA AKSI	KONDISI AKHIR	STATUS (PROGRES/ CLOSE)
		Desember	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran tersedia	31 December 2025	Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas	Target Tercapai	Close

Tabel 151. Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
A	Perencanaan Kinerja			
	A1. Menyusun matriks revidi target untuk seluruh indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi penetapan target	Menyusun kertas kerja penetapan target IKSK tahun 2025-2029 IKU Utama dan Direktif penugasan BBPOM di Bandar Lampung	TW I TAHUN 2025	1. Kertas Kerja Penetapan Target IKU tahun 2025-2029 2. Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Direktif Tahun 2025
	A2. Menyusun SK Penetapan IKU yang memuat seluruh indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	Menyusun SK IKU Tahun 2025 dan disahkan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029	TW I TAHUN 2025	1. SK IKU Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	A3. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Melakukan crosscek untuk memastikan bahwa penyajian target dan realisasi indikator kinerja pada dokumen SAKIP telah selaras.	TW I Tahun 2025 - TW I TAHUN 2026	1. Laporan Kinerja Tahun 2024 2. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 2024 3. RAPK Bulan Desember Tahun 2024 dan 2025 4. Laporan Evaluasi Internal TW I-III Tahun 2025 5. Laporan Kinerja Interim TW I-III Tahun 2025 6. Laporan Kinerja Tahun 2025
B	Pengukuran Kinerja			
	B1. Menyempurnakan SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja : • Penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja	Melakukan revisi dokumen SOP mikro terkait SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dengan menyempurnakan penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dan menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data	TW II TAHUN 2025	1. SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja BBPOM di Bandar Lampung.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	Menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data			
	B2. Mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja pada Notulen rapat evaluasi internal;	Arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja telah terdokumentasi pada laporan evaluasi internal TW IV Tahun 2024 dan TW 1 Tahun 2025 dan disahkan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung.	TW I Tahun 2025 - TW I TAHUN 2026	Laporan Evaluasi Internal BBPOM di Bandar Lampung TW IV Tahun 2024 dan TW I-IV Tahun 2025
	B3. Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;	Menyusun SOP pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi.	TW I TAHUN 2025	1. SOP Mikro Nomor POM-10.01/CFM.01/SOP.08/IK.6A.01 tentang Pemberian Reward (Penghargaan) Pegawai 2. SOP Mikro Nomor POM-10.01/CFM.01/SOP.08/IK.6A.02 tentang Penjatuhan Punishment (Sanksi) Pegawai 3. SOP Mikro Nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.6A.03 tentang Pemberian Reward dan Punishment Kinerja dan Anggaran
	B4. Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai	Menginput analisis kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.	TW I Tahun 2025 - TW I TAHUN 2026	1. Tangkapan Layar Simetris E-Performance Tahun 2024 2. Tangkapan Layar/Hasil download Simetris E-Performance Tahun 2025
C	Pelaporan Kinerja			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	C1. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan • Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja; • Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya • Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi	Menyusun laporan kinerja interim yang dilengkapi dengan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya, dan Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi	TW IV TAHUN 2025	LAPORAN KINERJA INTERIM TW I-III TAHUN 2025
	C2. Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;	Menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai.	TW I Tahun 2025	Laporan Kinerja Tahun 2024
	C3. Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Melakukan crosscek untuk memastikan bahwa penyajian target dan realisasi indikator kinerja pada dokumen SAKIP telah selaras.	TW I Tahun 2025 - TW I TAHUN 2026	1. Laporan Kinerja Tahun 2024 2. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 2024 3. RAPK Bulan Desember Tahun 2024 dan 2025 4. Laporan Evaluasi Internal TW I-IV Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
				5. Laporan Kinerja Interim TW I-III Tahun 2025 6. Laporan Kinerja Tahun 2025
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	D1. Menyusun SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung yang menetapkan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja;	Menyusun SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan menetapkan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.	TW II Tahun 2025	SK TIM AKUNTABILITAS dengan penetapan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.
	D2. Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim SAKIP terkait implementasi SAKIP	Personil TIM SAKIP yang terdiri dari Ketua Tim, Tim Lapkin dan Pokja Akuntabilitas melaksanakan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP seluruhnya di TW 2.	TW II Tahun 2025	Laporan Pengembangan Kompetensi SAKIP Tahun 2025.
	D3. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya; Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target; dan Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai)	TW I TAHUN 2026	1. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 2024 2. Laporan Evaluasi Internal TW I-IV Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	• Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya • Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target; • Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai)			

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Tabel 152. Pemanfaatan Informasi Kinerja

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Hasil dari kinerja tahun 2025 pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, khususnya dalam penentuan prioritas tindak lanjut terhadap sampel tidak memenuhi syarat. Data capaian kinerja menjadi acuan dalam menyempurnakan mekanisme koordinasi antar fungsi pemeriksaan dan pengujian laboratorium sehingga proses tindak lanjut dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, informasi kinerja dimanfaatkan untuk optimalisasi penggunaan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, agar difokuskan pada kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap percepatan tindak lanjut sampel tidak memenuhi syarat. Dalam aspek perencanaan kinerja, informasi capaian indikator menjadi dasar dalam penetapan target yang lebih adaptif dan realistis pada periode berikutnya.
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Laporan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ini memberikan informasi terkait persentase jumlah pelaporan KTD/ESO oleh fasyankes yang telah diberikan KIE Farmakovigilans, serta efisiensi anggaran yang digunakan untuk melakukan KIE dan koordinasi dengan

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		Tenaga Kesehatan di fasyankes. Laporan kinerja ini sangat bermanfaat karena tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan (capaian target), tetapi juga memberikan wawasan mengenai efektivitas strategi yang diterapkan dan potensi tantangan ke depan. Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk: 1. Mengkonfirmasi bahwa strategi yang digunakan (KIE, koordinasi aktif, dan pemanfaatan teknologi) terbukti efektif dalam mencapai target. Manajemen dapat mempertahankan dan mereplikasi strategi ini (termasuk penggunaan <i>Zoom</i>, Grup <i>WhatsApp</i>, dan materi digital mandiri) untuk program sejenis di masa depan. 2. Sebagai dasar untuk mengukur dan mengakui kontribusi petugas dalam mencapai sasaran IKU dalam memberikan penghargaan dan evaluasi bagi petugas yang terlibat (baik internal maupun eksternal), sehingga meningkatkan motivasi dan loyalitas. 3. Menunjukkan keberhasilan KIE yang dilakukan sehingga menghasilkan tingkat pemahaman serta kesadaran yang cukup baik dari tenaga kesehatan. 4. Memberikan wawasan bahwa kualitas materi, kemudahan akses (digital), dan komunikasi berkelanjutan (WAG) adalah kunci efektivitas edukasi, yang harus dipertahankan atau ditingkatkan di kegiatan KIE Farmakovigilans selanjutnya.
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 diketahui bawah target kinerja telah tercapai dengan kategori sangat baik dan pemanfaatan anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut efisien. Pelaksanaan sampling, pengujian dan monitoring tindak

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	lanjut sampel TMS, TIE, kadaluwarsa, maupun rusak dilaksanakan berkelanjutan sampai dengan akhir tahun anggaran, dimana pelaksanaan hal-hal tersebut mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Proporsi sampel pangan olahan meliputi sampel pangan olahan, sampel PIRT, dan sampel emerging issue/pangan tertentu. Dalam hal jumlah sampel <i>emerging issue</i> yang meningkat mengakibatkan berkurangnya proporsi target sampel pangan olahan. Dengan demikian dapat diusulkan kenaikan target kinerja untuk tahun 2026 menjadi 100% namun dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki seperti jumlah dan kompetensi personel serta ketersediaan anggaran.
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Melalui laporan kinerja ini dapat diketahui bahwa capaian IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah 100%. Peran BBPOM di Bandar Lampung dalam penanganan KLB-KP di wilayah pengawasannya cukup signifikan. Koordinasi dan sinergitas lintas sektoral diperlukan untuk memperoleh hasil investigasi yang tepat dalam rangka mengetahui agen terduga penyebab keracunan.
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Berdasarkan informasi capaian kinerja Lapkin tahun 2025 diketahui bahwa target tahunan sampel PIRT telah tercapai. Seluruh target sampel tahun 2025 telah diperiksa, diuji, dan ditindaklanjuti 100%. Realisasi sebesar 98,29% dari target 85%

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		menjadikan capaian yang diperoleh termasuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut maka dapat diusulkan peningkatan target tahun 2026 menjadi 98,29% agar capaian masuk dalam kategori baik.
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Capaian indikator ini dapat memberikan informasi terkait: 1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana. 2. Tingkat keberhasilan dalam koordinasi dengan lintas sektor pemerintah daerah. 3. Pemerintah daerah yang telah aktif dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BBPOM di Bandar Lampung. 4. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 87,07 % dipergunakan sebagai dasar pengusulan target tahun 2026.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terhadap IKU persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana produksi produk farmasi selama 2025 dapat digunakan lebih lanjut untuk melakukan: 1. <i>Update database</i> sarana sehingga terbentuk <i>track record</i> yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada saat pengawasan tahun 2026 2. Penyempurnaan sistem monitoring anggaran sehingga rencana pengendalian dana (RPD) dapat dikendalikan 3. Peningkatan kompetensi dan <i>updating data base</i> kompetensi tenaga pengawas

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terhadap IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana produksi produk pangan olahan selama 2025 dapat digunakan lebih lanjut untuk melakukan : 1. <i>Update database</i> sarana sehingga terbentuk <i>track record</i> yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada saat pengawasan tahun 2026 2. Penyempurnaan sistem monitoring anggaran sehingga rencana pengendalian dana (RPD) dapat dikendalikan 3. Peningkatan kompetensi dan <i>updating data base</i> kompetensi tenaga pengawas 4. Adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pengawasan sarana PIRT
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pencapaian Indikator kinerja ini dapat memberikan informasi terkait : 1. Kesesuaian sistem pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung dengan ketentuan yang ada. 2. Perencanaan kegiatan yang disusun telah memperhatikan prinsip efisiensi anggaran. 3. Perencanaan pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko. 4. Data sarana yang diperiksa dijadikan sebagai data base sarana yang akan dipergunakan dalam penyusunan analisis resiko tahun 2026.

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pencapaian Indikator kinerja ini dapat memberikan informasi terkait : 1.Kesesuaian sistem pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung dengan ketentuan yang ada. 2.Perencanaan kegiatan yang disusun telah memperhatikan prinsip efisiensi anggaran. 3.Perencanaan pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko. 4.Data sarana yang diperiksa dijadikan sebagai data base sarana yang akan dipergunakan dalam penyusunan analisis resiko tahun 2026.
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Terhadap IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dan evaluasi pengawasan iklan obat dan makanan selama 2025 dapat digunakan lebih lanjut untuk melakukan: 1. Tindak Lanjut hasil pengawasan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpusat untuk menjadi input informasi kepada pemilik iklan 2. Bahan masukan untuk KPI dan stake holder lain sebagai pengguna hasil pengawasan iklan 3. Masyarakat mendapatkan iklan obat dan makanan yang benar, mendidik, tidak menyesatkan dan sudah sesuai regulasi.
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	Terhadap IKU Persentase Label produk tembakau dan atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dan evaluasi hasil

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
	elektronik yang diawasi sesuai standar	pemeriksaan sarana produksi produk pangan olahan selama 2025 dapat digunakan lebih lanjut untuk melakukan: 1. Perencanaan pengawasan secara bersama pemeriksaan sarana dan pengawasan iklan 2. Penyempurnaan sistem monitoring anggaran sehingga rencana pengendalian dana (RPD) dapat dikendalikan 3. Peningkatan kompetensi petugas pengawas.
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Laporan kinerja Pemenuhan Target Pengendalian AMR ini memberikan informasi terkait tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur pengawasan AMR di Apotek, efektivitas kolaborasi dengan stakeholder dalam edukasi, dan keberhasilan pemanfaatan media digital dalam publikasi. Berdasarkan informasi tersebut, laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk: 1. Mempertahankan kolaborasi dengan PBF/<i>stakeholder</i> lain sebagai strategi efisiensi anggaran namun tetap efektif dalam menyelenggarakan Bimtek/KIE. 2. Menjamin kesinambungan penggunaan SIPT sebagai kunci untuk memastikan integritas dan kelengkapan data pengawasan AMR. 3. Metode pelaksanaan kegiatan secara <i>hybrid</i> terbukti mampu mengoptimalkan anggaran tanpa mendegradasi target sasaran.
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan	Dari hasil kinerja tahun 2025 diperoleh informasi yang akan dimanfaatkan untuk:

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
	Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Monitoring dan evaluasi setiap Triwulan baik yang dilakukan oleh Laboratorium maupun oleh PPPOMN menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan di Triwulan atau tahun selanjutnya 2. Perencanaan tahun 2026 terhadap semua komponen SKL dibuat berdasarkan hasil evaluasi SKL tahun 2025.
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Informasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi daerah untuk menyiapkan payung hukum terkait keamanan pangan, baik berupa Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, maupun Surat Keputusan. Daerah juga diharapkan dapat menyiapkan inovasi yang berkaitan dengan peningkatan implementasi Kabupaten/Kota Pangan Aman untuk memudahkan, dan mempercepat penerapan program terpadu keamanan pangan di daerah.
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terhadap IKU Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana produksi produk pangan olahan selama 2025 dapat digunakan lebih lanjut untuk melakukan: 1. Update database sarana pangan olahan fortifikasi sehingga terbentuk <i>track record</i> yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada saat pengawasan tahun 2026 2. Perencanaan pemeriksaan dan sampling secara bersama antara tim inspeksi dan tim pengujian

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		3. Tindak lanjut yang tepat dan sesuai <i>timeline</i> terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian 4. Penyempurnaan sistem monitoring anggaran sehingga rencana pengendalian dana (RPD) dapat dikendalikan 5. Peningkatan kompetensi dan updating data base kompetensi tenaga pengawas 6. Adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pengawasan sarana PIRT.
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Pemanfaatan hasil pengukuran Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan oleh BBPOM di Bandar Lampung telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam seluruh siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dihasilkan tidak hanya digunakan sebagai bahan pelaporan, tetapi dimanfaatkan secara nyata sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan penyempurnaan pelaksanaan program KIE secara berkelanjutan. 1. Pemanfaatan Informasi Kinerja pada Tahap Perencanaan Pada tahap perencanaan kinerja, informasi hasil pengukuran Indeks Efektivitas KIE dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan melalui usulan revisi target kinerja agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kapasitas sumber daya serta kondisi pelaksanaan kegiatan. Selain itu,

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		informasi kinerja digunakan untuk menyusun strategi pencapaian target yang lebih efektif, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dan pemilihan pendekatan KIE yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat Provinsi Lampung. Hasil evaluasi ini juga menjadi bahan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya, termasuk penyempurnaan indikator kinerja dan manual indikator kinerja. 2. Pemanfaatan Informasi Kinerja pada Tahap Pengukuran Pada tahap pengukuran kinerja, BBPOM di Bandar Lampung telah memanfaatkan informasi kinerja melalui penguatan mekanisme pengumpulan data Indeks Efektivitas KIE. Pengukuran dilakukan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan survei efektivitas KIE pada berbagai kanal, termasuk kegiatan tatap muka dan media sosial. Untuk menjamin konsistensi dan akurasi data, telah ditetapkan Penanggung Jawab (PJ) survei efektivitas KIE pada setiap pelaksanaan kegiatan KIE. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam menilai ketercapaian target serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. 3. Pemanfaatan Informasi Kinerja pada Tahap Pelaporan Pada tahap pelaporan kinerja, hasil pengukuran Indeks Efektivitas KIE telah disajikan secara sistematis dalam Laporan Kinerja BBPOM di Bandar Lampung. Informasi kinerja tidak hanya disampaikan sebagai data capaian, tetapi juga dilengkapi dengan analisis tren, perbandingan antar

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		periode, serta penjelasan atas dinamika pencapaian target, khususnya peningkatan signifikan pada Triwulan II Tahun 2025. Pelaporan ini berfungsi sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, serta media pembelajaran bagi perbaikan pelaksanaan program. 4. Pemanfaatan Informasi Kinerja pada Tahap Evaluasi Pada tahap evaluasi kinerja, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan KIE. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, termasuk efektivitas pesan, ketepatan pemilihan sasaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, antara lain penyesuaian aktivitas KIE, penguatan pemanfaatan media komunikasi, serta peningkatan peran mitra kerja dalam mendukung keberhasilan program. 5. Pemanfaatan Informasi Kinerja terhadap Capaian Kinerja Pemanfaatan informasi kinerja secara konsisten dalam seluruh siklus SAKIP telah memberikan dampak nyata terhadap pencapaian kinerja BBPOM di Bandar Lampung. Hal ini tercermin dari meningkatnya Nilai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2025, terutama pada Triwulan II. Peningkatan capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan secara efektif sebagai

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		instrumen pengendalian dan perbaikan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan KIE menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak bagi masyarakat.
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang capaian tahapan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, sekolah yang dilakukan intervensi penuh, sekolah perluasan dan pengawalan sekolah tahun sebelumnya, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi serta menetapkan upaya-upaya pencapaian target seperti yang telah direncanakan. Juga mendapatkan informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyusun strategi untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
19	Jumlah desa pangan aman	Informasi Kinerja ini bisa menjadi dasar untuk menentukan rencana atau strategi implementasi program apabila ada pemotongan kembali anggaran untuk penyusunan petunjuk teknis terbaru, agar salah satu tahapan berupa Bimtek kepada Komunitas dapat berjalan efektif, walau hanya dilakukan oleh Kader yang sudah dilatih. Petunjuk Teknis harus benar-benar bisa menjamin informasi sampai kepada sasaran komunitas yang ditetapkan walau dilakukan secara mandiri oleh Kader, sehingga saat tahapan Monitoring Evaluasi diharapkan kelengkapan bukti telah dilakukannya Bimtek juga bisa didapat dengan mudah.
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang capaian tahapan pelaksanaan program pasar aman berbasis komunitas dan pengawalan pasar tahun sebelumnya, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		serta menetapkan upaya-upaya pencapaian target seperti yang telah direncanakan. Juga mendapatkan informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyusun strategi untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Informasi kinerja tahun 2025 dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, melalui: 1. Penyesuaian aktivitas dan strategi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pencapaian target kinerja. 2. Penyesuaian penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran. 3. Evaluasi capaian kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi perbaikan. 4. Penyempurnaan perencanaan kinerja pada periode berikutnya, termasuk penyesuaian indikator kinerja, manual indikator kinerja, maupun target kinerja sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	Laporan kinerja keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan memiliki peran penting dalam memantau efektifitas, efisiensi dan keberhasilan BBPOM di Bandar Lampung dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Laporan kinerja ini berguna untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan perencanaan selanjutnya, dan bermanfaat untuk :

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		1. Perencanaan kegiatan operasi intelijen dan operasi penindakan menjadi lebih baik sehingga target kinerja dapat tercapai. 2. Menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan, sehingga masyarakat akan terlindungi dari peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Laporan kinerja merupakan instrumen yang mendokumentasikan capaian, tantangan, dan data operasional dari BBPOM di Bandar Lampung. Dalam konteks analisis kerawanan terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan, laporan ini memiliki nilai strategis dalam melakukan perencanaan yang akan datang dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk: 1. Mengidentifikasi pola dan kecenderungan pelanggaran, seperti jenis produk yang paling sering disalahgunakan, serta memetakan wilayah yang berpotensi tinggi terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. 2. Mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan guna menilai sejauh mana intervensi yang dilakukan telah berjalan optimal dan menentukan area yang memerlukan penguatan pengawasan. 3. Menyusun peta risiko dan strategi mitigasi yang tepat sasaran, sehingga prioritas pengawasan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	Informasi kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang tertuang dalam Laporan Kinerja BBPOM di Bandar Lampung tidak hanya digunakan sebagai laporan administratif, tetapi dimanfaatkan secara strategis sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi berkelanjutan, serta penyempurnaan perencanaan kinerja pada periode berikutnya seperti: 1. Penyesuaian Perencanaan dan Target Kinerja Hasil pengukuran IPP tahun 2025 dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dokumen perencanaan. BBPOM di Bandar Lampung melakukan usulan revisi atas target indikator kinerja IPP tahun 2025 agar lebih realistis, terukur, dan menantang (<i>achievable but progressive</i>). Penyesuaian ini mencakup: • Penyempurnaan indikator dan manual pengukuran kinerja (Manual IK); • Penetapan target yang berbasis pada capaian riil tahun sebelumnya; • Penguatan aspek kualitas, bukan hanya kuantitas layanan. Dengan demikian, perencanaan kinerja periode berikutnya menjadi lebih adaptif dan berbasis data (<i>evidence-based planning</i>). 2. Penyesuaian Aktivitas dan Program Pelayanan Informasi capaian IPP dimanfaatkan untuk menyesuaikan aktivitas dan program pelayanan publik, terutama pada aspek

yang masih memerlukan peningkatan, seperti partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2025 dilaksanakan:

- Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan lima unsur *pentahelix*, yaitu pemerintah, pelaku usaha (responden/pelanggan), akademisi, media, dan tokoh masyarakat. Forum ini bertujuan memperoleh masukan konkret terkait kualitas pelayanan serta menyusun rencana aksi perbaikan sesuai petunjuk teknis dari Badan POM.
- Forum Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi sarana dialog dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak akses informasi publik serta transparansi layanan.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk evaluasi partisipatif yang memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Hasil pengukuran IPP juga digunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan. Rekomendasi dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), FKP, serta evaluasi internal ditindaklanjuti melalui:

- Penyempurnaan standar pelayanan;
- Perbaikan alur layanan agar lebih sederhana dan cepat;
- Penguatan monitoring dan evaluasi konsultasi serta pengaduan;
- Peningkatan kompetensi SDM pelayanan.

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rekomendasi tidak berhenti pada dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi rencana aksi yang terukur.

4. Penyesuaian Penggunaan Anggaran

Informasi kinerja IPP turut menjadi dasar dalam melakukan revisi dan optimalisasi anggaran. Penyesuaian anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan, seperti:

- Penguatan sarana dan prasarana pelayanan;
- Pengembangan inovasi layanan;
- Kegiatan sosialisasi standar pelayanan;
- Pelaksanaan FKP dan forum keterbukaan informasi.

Selain itu, dilakukan pemeliharaan rutin fasilitas untuk mencegah pemborosan akibat perbaikan mendadak. Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan berorientasi pada hasil (*result-oriented budgeting*).

5. Perluasan Akses Pelayanan sebagai Tindak Lanjut Evaluasi Sebagai bagian dari penyesuaian strategi pelayanan tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung memperluas akses pelayanan melalui kehadiran layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) di:

- Lampung Tengah
- Kota Metro
- Kota Bandar Lampung
- Lampung Selatan (baru tahun 2025)

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		Langkah ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses layanan yang lebih dekat, cepat, dan terintegrasi. Perluasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan persepsi kemudahan layanan yang menjadi komponen penting dalam penilaian IPP. Pemanfaatan informasi kinerja IPP di BBPOM Bandar Lampung telah dilakukan secara komprehensif melalui: • Penyesuaian target dan perencanaan kinerja; • Penyempurnaan aktivitas dan program pelayanan; • Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi; • Optimalisasi penggunaan anggaran; • Perluasan akses dan inovasi pelayanan. Dengan pendekatan berbasis data dan partisipatif, informasi kinerja IPP tidak hanya menjadi alat ukur capaian, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	Laporan kinerja Tahun 2025 memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Laporan ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pelaksanaan rencana kerja dan pemenuhan indikator ZI telah berjalan sesuai yang diharapkan. Dari hasil evaluasi laporan kinerja tahun 2025 dan penilaian oleh Inspektorat, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan ditingkatkan. Informasi ini sangat krusial untuk

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		menyusun rencana aksi cepat (<i>quick wins</i>) dalam rangka persiapan menuju WBBM di masa yang akan datang.
26	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, nilai hasil evaluasi AKIP BBPOM di Bandar Lampung adalah 81,49 dengan tingkat akuntabilitas kinerja A dengan target pada tahun 2025 sebesar 80,90. Untuk mengawal agar pada tahun ini nilai meningkat dilakukan tindak lanjut rekomendasi SAKIP tahun 2025 dan terus mengawal pengembangan inovasi yang ada untuk memudahkan dalam pengelolaan pelaporan serta upaya peningkatan kompetensi pengelola SAKIP untuk mengikuti Bimbingan Teknis baik melalui <i>online</i> maupun <i>offline</i> . Selain itu pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> atas capaian kinerja dan kinerja anggaran sebagai wujud motivasi yang diberikan kepada Substansi. Pada tahun 2025 hasil penilaian AKIP melebihi target yang ditetapkan. BBPOM di Bandar Lampung akan terus mengawal dan meningkatkan dalam pencapaian AKIP di tahun mendatang.
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 bahwa target tahun 2025 sebesar 5 dan capaian 5 terpenuhi dengan kategori Baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai kinerja anggaran dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan dan monitoring parameter yang mempengaruhi penilaian IKPA dan Nilai Kinerja Perencanaan. Nilai IKPA dapat diketahui setiap bulan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara

No	Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		berkala dalam pelaksanaannya untuk mencapai target tahun 2026. Selain itu peningkatan kompetensi terhadap SDM yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan terus dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan POM maupun dari kementerian keuangan. Pemberian <i>Reward dan Punishment</i> atas capaian kinerja dan kinerja anggaran sebagai wujud motivasi yang diberikan kepada Substansi. BBPOM di Bandar Lampung akan terus mengawal dan meningkatkan dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran di tahun mendatang.
28	Indeks Manajemen Risiko	Laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025 memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko di BBPOM Bandar Lampung. Laporan ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko telah berjalan sesuai yang diharapkan. Dari hasil evaluasi laporan kinerja TW IV dan penilaian oleh Inspektorat, dapat diidentifikasi poin-poin yang memerlukan perbaikan dan ditingkatkan. Informasi ini sangat penting untuk menyusun rencana aksi dalam pencapaian target di tahun 2026.

3.4 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan mempunyai tugas mengelola keuangan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan UU No.9 Tahun 2020 dan Kepres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, untuk melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung menerima pagu anggaran sebesar **Rp32.829.487.000,00** kemudian dilakukan *Automatic Adjustment* sehingga pagu akhir menjadi **RP31.915.508.000,00 (pagu penuh) atau 21.597.563.000,00** (pagu efektif).

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran selama tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA 1 (DJA): Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Belanja sebesar Rp13.647.396.000,00.
2. Revisi DIPA 2 (DJA): Revisi dalam hal pergeseran Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja antar satuan kerja sebesar -Rp580.451.000,00 dan pemenuhan belanja operasional.
3. Revisi DIPA 3 (DJA): Revisi pembukaan blokir yang semula nilai blokir sebesar Rp13.647.396.000,00.menjadi Rp10.369.621.000,00.
4. Revisi DIPA 4 (Kanwil): Revisi Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Revisi Kewenangan KPA.
5. Revisi DIPA 5 (DJA): Revisi anggaran antar satker dengan pengurangan pagu sebesar -Rp389,540,000,00.

6. Revisi DIPA 6 (Kanwil): Revisi Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Revisi Kewenangan KPA.
7. Revisi DIPA 7 (DJA): Revisi anggaran antar satker dengan penambahan pagu sebesar RP56.012.000,00.
8. Revisi DIPA 8 (Kanwil): Revisi pergeseran anggaran antar jenis belanja dan pemutakhiran Halaman III DIPA.
9. Revisi DIPA 9 (Kanwil): Revisi dalam hal pagu anggaran tetap dan pemutakhiran Halaman III DIPA.
10. Revisi DIPA 10 (DJA): Revisi pengurangan blokir semula Rp10.369.621.000,00 menjadi Rp10.317.945.000 dengan selisih blokir sebesar Rp51.676.000,00.
11. Beberapa kali revisi kewenangan KPA sesuai jadwal revisi internal.

Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran serta percepatan pengadaan barang dan jasa terutama untuk alat laboratorium yang mendesak untuk dilakukan pengadaan dikarenakan anggaran belanja modal masih dalam kebijakan efisiensi.

Berikut adalah realisasi anggaran yang dicapai oleh BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025:

Tabel 153. Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	(KODE) PROGRAM	KETERANGAN	B.PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	REALISASI
1	(3165) Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Pagu	0	9.360.137.000	10.961.766.000	20,321,903,000
		Realisasi	0 (0%)	5.110.402.109 (54,60%)	6.478.033.080 (59,10%)	11,588,435,189 (57,02%)
		Sisa	0	4.249.734.891	4.483.732.920	8.733.467.811
2	(6384)	Pagu	6.862.833.000	4.730.772.000	0	11,593,605,000

NO	(KODE) PROGRAM	KETERA- NGAN	B.PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	REALISASI
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Realisasi	6.844.384.422 (99,73%)	3.101.992.892 (65,57%)	0 0%	9,946,377,314 (85,79%)
		Sisa	18.448.578	1.628.779.108	0	1,647,227,686
Grand Total		Pagu	6.862.833.000	14.090.909.000	10.961.766.000	31.915.508.000
		Realisasi	6.844.384.422 (99,73%)	8.212.395.001 (58,28%)	6.478.033.080 (59,10%)	21.534.812.503 (67,47%)
		Sisa	18.448.578	5.878.513.999	4.483.732.920	10.380.695.497

Sumber: Aplikasi OMSPAN

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan realisasi kinerja BBPOM di Bandar Lampung dibandingkan dengan realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 154. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	97,7	110,08	585.971.000	585.317.985	99,89
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah	26	26,67	102,58	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	kerja BBPOM di Bandar Lampung	melaporkan KTD/ESO						
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	264.994.200	264.957.798	99,99
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	82.442.640	82.431.315	99,99
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,29	115,64	45.147.160	45.140.958	99,99
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	87,07	110,22	63.106.900	63.092.244	99,98
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	90,5	96,88	107,05	4.709.981	4.704.098	99,88

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	kerja BBPOM di Bandar Lampung	ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,72	109,58	79.396.819	79.297.649	99,88
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5	99,3	105,08	360.718.740	360.697.260	99,99
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	99,32	107,96	93.369.060	93.363.690	99,99
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73	99,99	106,68	9.499.700	9.499.700	100,00
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	91	92,2	101,32	4.071.300	4.071.300	100,00

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	elektronik yang diawasi sesuai standar						
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106,1	106,14	4.252.500	4.252.500	100,00
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2	81	104,92	8.598.927.000	8.597.356.104	99,98
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Kabupaten/Kot a yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kot a Pangan Aman	20	20	100,00	-	-	-
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	65	70,27	108,11	27.051.000	27.049.300	99,99

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
17	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	92,71	103,47	741.962.000	741.938.453	100,00
18	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	12	100,00	46.809.000	46.672.900	99,71
19	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00	67.385.000	67.084.140	99,55
20	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	16.370.000	16.370.000	100,00
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,94	16,94	100,00	17.000.000	16.999.638	100,00

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85	85	100,00	334.197.000	297.544.762	89,03
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	98	108,89	9.795.000	9.794.000	99,99
24	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,7	4,85	103,19	74.140.000	74.138.657	100,00
25	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	90	89,35	99,28	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82
26	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80,9	81,49	100,73	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82
27	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5	5	100,00	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
28	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko	2,9	2,84	97,93	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82

c. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Perbandingan anggaran per Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

Tabel 155. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	585.971.000	585.317.985	99,89
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	-
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	264.994.200	264.957.798	99,99
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	82.442.640	82.431.315	99,99
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	45.147.160	45.140.958	99,99
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	63.106.900	63.092.244	99,98

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4.709.981	4.704.098	99,88
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79.396.819	79.297.649	99,88
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	360.718.740	360.697.260	99,99
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.369.060	93.363.690	99,99
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	9.499.700	9.499.700	100
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	4.071.300	4.071.300	100
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	4.252.500	4.252.500	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8.598.927.000	8.597.356.104	99,98
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	-
		TOTAL SK1	10.196.607.000	10.194.182.601	99,98
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	27.051.000	27.049.300	99,99

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		TOTAL SK2	27.051.000	27.049.300	99,99
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	741.962.000	741.938.453	100
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	46.809.000	46.672.900	99,71
		Jumlah desa pangan aman	67.385.000	67.084.140	99,55
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16.370.000	16.370.000	100,00
		TOTAL SK3	872.526.000	872.065.493	99,95
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17.000.000	16.999.638	100
		TOTAL SK4	17.000.000	16.999.638	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	334.197.000	297.544.762	89,03
		TOTAL SK5	334.197.000	297.544.762	89,03
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	9.795.000	9.794.000	99,99
		TOTAL SK6	9.795.000	9.794.000	99,99

No.	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	74.140.000	74.138.657	100
		TOTAL SK7	74.140.000	74.138.657	100
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82
		Nilai AKIP UPT BPOM	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82
		TOTAL SK8	10.066.247.000	10.048.202.999	99,82

d. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Realisasi anggaran per kegiatan di BBPOM di Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

Tabel 156. Realisasi Anggaran per Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	122.664.000	9.794.000	7,98%
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1.200	1.369	114,08	74.140.000	74.138.657	100,00 %
3.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.283	3.495	37,65	2.824.155.000	685.040.166	24,26%
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	524.000.000	96.660.738	18,45%

5.	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	35	112,90	132.511.000	56.898.287	42,94%
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0,00	50.000.000	-	0,00%
7.	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	8	0	0,00	80.000.000	-	0,00%
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0,00	1.318.662.000	-	0,00%
9.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100,00	2.187.493.000	2.187.477.024	100,00 %
10.	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	3	3	100,00	334.197.000	297.544.762	89,03%
11.	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12	12	100,00	469.164.000	46.672.900	9,95%
12.	Desa Pangan Aman	5	5	100,00	782.221.000	67.084.140	8,58%
13.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00	126.919.000	16.370.000	12,90%
14.	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	38.700.000	-	0,00%
15.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	21	100,00	187.396.000	16.999.638	9,07%
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	439	439	100,00	392.584.000	392.530.071	99,99%
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.085	1.086	100,09	585.971.000	585.317.985	99,89%
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	124	127	102,42	93.452.000	93.335.274	99,88%
19.	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	24	26	108,33	27.051.000	27.049.300	99,99%
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	642	662	103,12	525.673.000	525.643.167	99,99%

	Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT						
21.	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100,00	9.444.950.000	6.409.879.080	67,87%
22.	Layanan BMN	1	1	100,00	8.000.000	170.000	2,13%
23.	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	11.585.605.000	9.946.396.491	85,85%

3.5 Tingkat Efisiensi Anggaran

Perhitungan capaian efisiensi anggaran dilakukan terhadap 28 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 157. Analisis Capaian Efisiensi Anggaran Indikator

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	97,7	110,08	585.971.000	585.317.985	99,89	1,10	0,10	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja berjalan secara efisien. Hal ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: Pertama, pelaksanaan program dan kegiatan telah mengedepankan prinsip perencanaan berbasis prioritas dan risiko, sehingga alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		Kedua, penerapan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan pengendalian internal yang efektif mendorong efisiensi dalam penggunaan biaya operasional. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta pengaturan jadwal kegiatan yang terkoordinasi, mampu menekan biaya pelaksanaan tanpa menghambat pencapaian output. Dengan demikian, hubungan antara capaian kinerja yang tinggi dan realisasi anggaran yang terkendali menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memenuhi prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.								
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa tidak ada anggaran yang tersedia dikarenakan seluruh anggaran pada Rincian Output Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans diblokir seluruhnya. Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa strategi efisiensi yang telah diupayakan, yakni: 1. Pemanfaatan Platform Daring (<i>Zoom meeting</i>) untuk KIE Kegiatan KIE dilaksanakan secara daring melalui <i>platform Zoom meeting</i> untuk menjangkau lebih banyak peserta dari 45 sarana pelayanan kesehatan tanpa kendala geografis. Pelaksanaan daring ini menghemat waktu, biaya perjalanan, dan logistik. Dengan Zoom, interaksi dua arah tetap berjalan baik melalui fitur Q&A dan diskusi langsung.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		2. Optimalisasi Grup <i>WhatsApp</i> (WAG) untuk Komunikasi dan Monitoring Dibentuknya grup <i>WhatsApp</i> antar peserta KIE dan petugas Badan POM menjadi media komunikasi yang responsif, cepat, dan informal. Grup ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan teknis secara <i>real-time</i>, menyampaikan pengingat pelaporan,serta menyebarkan informasi dan materi tambahan. 3. Penyediaan Bahan Digital Mandiri Materi edukasi pelaporan KTD/ESO disediakan dalam bentuk <i>e-book</i>, infografis, dan video tutorial, yang bisa diakses kapan saja oleh petugas. Bahan ini disusun ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan konteks praktik pelayanan kesehatan di lapangan. Dengan tersedianya bahan pembelajaran ini memberikan fleksibilitas waktu kepada petugas dan membantu memperkuat pemahaman di luar sesi KIE formal.								
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	264.994.200	264.957.798	99,99	1,10	0,10	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh pelaksanaan sampling dan perjalanan dinas sesuai target dan pelaksanaan pengadaan reagen dan media pengujian sesuai perencanaan. Dalam rangka mencapai efisiensi, penggunaan anggaran telah diatur sedemikian rupa sehingga mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan. Pengadaan reagen dan media pengujian telah dilaksanakan								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		pada triwulan pertama dan kedua sehingga pelaksanaan pengujian sampel pangan olahan berjalan lancar. Pengadaan reagen dan media dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhitungkan kebutuhan berdasarkan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025. Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan sampling meliputi pengadaan sampel dan perjalanan dinas sampling, telah dibuat perencanaan sampling selama 12 bulan dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan mengacu kepada pedoman sampling sediaan farmasi dan pangan olahan.								
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	82.442.640	82.431.315	99,99	1,00	0,00	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan serta pengadaan sampel. Dalam rangka mencapai efisiensi, penggunaan anggaran telah diatur sedemikian rupa sehingga mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan. Pengadaan reagen dan media pengujian telah dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua sehingga pelaksanaan pengujian sampel pangan olahan berjalan lancar. Pengadaan reagen dan media dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhitungkan kebutuhan berdasarkan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,29	115,64	45.147.160	45.140.958	99,99	1,16	0,16	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan dan pengadaan sampel. Dalam rangka mencapai efisiensi, penggunaan anggaran telah diatur sedemikian rupa sehingga mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan. Pengadaan reagen dan media pengujian telah dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua sehingga pelaksanaan pengujian sampel pangan olahan berjalan lancar. Pengadaan reagen dan media dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhitungkan kebutuhan berdasarkan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.								
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	87,07	110,22	63.106.900	63.092.244	99,98	1,10	0,10	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan yang tidak membutuhkan anggaran biaya seperti sosialisasi cara pembuatan CAPA menggunakan media zoom meeting, monitoring <i>feedback</i> rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ke lintas sektor								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		bersamaan dengan kegiatan yang lain seperti pemeriksaan sarana dan monev DAK Non Fisik Obat dan Makanan.								
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	96,88	107,05	4.709.981	4.704.098	99,88	1,07	0,07	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan dilakukan monitoring penggunaan anggaran. Untuk rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran maka dilakukan penggabungan beberapa kegiatan dalam satu perjalanan dinas.								
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,72	109,58	79.396.819	79.297.649	99,88	1,10	0,10	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan dilakukan monitoring penggunaan anggaran. Untuk rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran maka dilakukan penggabungan beberapa kegiatan dalam satu perjalanan dinas.								
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	94,5	99,3	105,08	360.718.740	360.697.260	99,99	1,05	0,05	100 % (Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dua kegiatan atau lebih dilakukan secara bersamaan seperti pemeriksaan sarana dalam kota dan luar kota berbarengan dengan sampling, pemeriksaan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan berbarengan dengan kegiatan sampling, dan sebagainya.								
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	99,32	107,96	93.369.060	93.363.690	99,99	1,08	0,08	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh pembuatan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dengan memperhatikan penggunaan anggaran seefisien mungkin. Seperti pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan ke daerah/luar kota berbarengan dengan tim pemeriksaan sarana distribusi yang lain yaitu sarana distribusi kosmetik/obat bahan alam/sarana pelayanan kefarmasian.								
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	93,73	99,99	106,68	9.499.700	9.499.700	100,00	1,07	0,07	100 % (Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	diawasi sesuai ketentuan	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung perencanaan anggaran yang berbasis efisiensi dan perencanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi serta dilakukan monitoring penggunaan anggaran. Untuk rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran maka dilakukan penggabungan kegiatan pemeriksaan dan sampling dalam satu perjalanan dinas. Pengawasan Iklan tidak memiliki Rincian Output (RO) tersendiri dan masih menginduk pada RO pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.								
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92,2	101,32	4.071.300	4.071.300	100,00	1,01	0,01	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan dilakukan monitoring penggunaan anggaran. Untuk rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran maka dilakukan penggabungan kegiatan sampling produk tembakau dan atau rokok elektronik dalam satu perjalanan dinas dengan kegiatan pemeriksaan sarana dan pengawasan iklan.								
13		100	106,1	106,14	4.252.500	4.252.500	100,00	1,06	0,06	100 % (Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh beberapa strategi efisiensi yang telah dilakukan, seperti: 1. Kolaborasi kegiatan Bimtek AMR pada acara yang diselenggarakan oleh <i>stakeholder</i> (PBF) dengan narasumber yang melibatkan petugas BBPOM di Bandar Lampung, yang mana peserta pada kegiatan tersebut selaras dengan target peserta yang ditetapkan pada Petunjuk Teknis. Dengan kolaborasi ini, kegiatan dapat terlaksana dengan baik dengan penggunaan anggaran yang sangat efisien. 2. Pengumpulan data serta materi publikasi secara digital, baik yang diberikan langsung oleh Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP, tarikan data melalui SIPT, serta dokumentasi kegiatan pada saat pengawasan rutin pada sarana Apotek dilakukan oleh Petugas BBPOM di Bandar Lampung. 3. Pelaksanaan kegiatan Advokasi diselenggarakan secara <i>hybrid</i> . Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan ketersediaan anggaran dengan dampak kegiatan yang utamanya untuk meningkatkan <i>awareness</i> Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya tentang pentingnya pengendalian AMR terutama di Provinsi Lampung.								
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar	77,2	81	104,92	8.598.927.000	8.597.356.104	99,98	1,05	0,05	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	Kemampuan Laboratorium	sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh : 1. Prioritas pengadaan peralatan laboratorium sebagai salah satu komponen dalam pemenuhan SKL 2. Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, seperti pengadaan reagen, media, suku cadang, alat gelas dan penunjang sesuai kebutuhan dan timeline, pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai anggaran, pengadaan penambah daya tahan tubuh sesuai target per bulan yang sudah ditetapkan, pelaksanaan kalibrasi peralatan sesuai kebutuhan. 3. Pengelolaan anggaran berupa revisi sesuai jadwal jika terdapat perubahan kebutuhan atau perubahan realisasi pelaksanaan.								
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa tidak ada anggaran yang tersedia khusus untuk kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman dikarenakan keterbatasan anggaran BBPOM di Bandar Lampung TA. 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan. Pencapaian target kinerja tahun 2025 dilaksanakan dengan melakukan efektivitas dua kegiatan secara bersamaan terkait koordinasi Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan koordinasi Desa Pangan Aman dalam rangka efisiensi anggaran. Kegiatan lain yang dilakukan secara bersamaan adalah saat tahapan Monev dan Pengawasan Desa Pangan Aman.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	70,27	108,11	27.051.000	27.049.300	99,99	1,08	0,08	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan dilakukan monitoring penggunaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran maka dilakukan penggabungan kegiatan pemeriksaan dan sampling dalam satu perjalanan dinas.								
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	92,71	103,47	741.962.000	741.938.453	100,00	1,03	0,03	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh pelaksanaan KIE Dipa dan Non Dipa diantaranya KIE Langsung, KIE melalui Media Sosial dan KIE non Media Sosial. Hal ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: 1. Optimalisasi Skema KIE DIPA dan Non-DIPA melalui Kolaborasi Multipihak Pelaksanaan KIE tidak hanya bertumpu pada pembiayaan DIPA, tetapi juga memanfaatkan skema Non-DIPA melalui kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif ini secara signifikan menekan beban biaya operasional. Beberapa bentuk efisiensi yang dihasilkan antara lain:								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		- Kolaborasi lintas sektor pada kegiatan publik berskala besar, seperti: - Festival aesthetic Lampung bersama Dinas Parekraf Lampung dan Yayasan Budaya Anak Lampung. - Partisipasi dalam Fesyar Lampung bersama Bank Indonesia. - Pameran bersama Kejaksaan Tinggi di Bandar Lampung dan Lampung Tengah. - Melalui pola ini, biaya sewa tempat, publikasi, dan mobilisasi peserta dapat diminimalisir karena memanfaatkan kegiatan yang telah diselenggarakan mitra. - Kemitraan dengan organisasi kepemudaan dan pendidikan, seperti: - Kwarda Lampung, Kwarcab Bandar Lampung, dan Saka Bakti Husada Kwarcab Pringsewu. - Partisipasi dalam pemilihan Muli Mekhanai Unila. - Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan universitas dalam inovasi KIE Tur Edukasi Galaksi. - Model ini memungkinkan penyebaran informasi secara masif melalui jejaring komunitas tanpa memerlukan biaya rekrutmen audiens yang besar. - Sinergi dengan organisasi profesi dan instansi teknis, seperti: - IAI, IDI, IBI dalam KIE Antimicrobial Resistance (AMR). - Dinas Kesehatan Kota Metro dan Ikatan Apoteker Indonesia. - Badan Gizi Nasional dalam aspek keamanan pangan. - Kolaborasi ini meningkatkan kredibilitas pesan sekaligus mengurangi kebutuhan narasumber eksternal berbayar. Dengan pendekatan tersebut, biaya kegiatan dapat ditekan namun jangkauan sasaran semakin luas. 2. Integrasi KIE dalam Program Nasional dan Komunitas Efisiensi juga diperoleh melalui integrasi KIE dengan program nasional seperti: - Program PJAS Aman - Desa Pangan Aman - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		Melalui pembentukan dan pembinaan Kader Keamanan Pangan, terjadi efek multiplikasi informasi (<i>multiplier effect</i>) tanpa memerlukan pembiayaan berulang untuk sosialisasi langsung. Strategi ini menurunkan biaya per sasaran (cost per beneficiary) sekaligus meningkatkan keberlanjutan program. 3. Inovasi Pelaksanaan KIE Berbasis Ruang Publik dan Transportasi Inovasi seperti: • PIOM PINTAS di kapal eksekutif ASDP Bakauheni–Merak, • BPOM Sunmorfe di area CFD, • KIE di sarana transportasi dan pelabuhan, • KIE di area pameran merupakan strategi efisien karena memanfaatkan konsentrasi massa yang sudah ada. Dengan demikian, biaya mobilisasi peserta hampir tidak ada, sementara tingkat eksposur sangat tinggi. 4. Optimalisasi Media Sosial dan Media Massa KIE melalui media sosial (Subsite, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter/X) menunjukkan peningkatan engagement dan follower, yang berarti efektivitas penyebaran informasi meningkat dengan biaya relatif rendah dibandingkan metode tatap muka konvensional. Prestasi keterbukaan informasi publik dengan predikat terbaik kategori UPT selama tiga tahun berturut-turut serta kategori “Informatif” dengan nilai 100 dari Komisi Informasi Daerah Provinsi Lampung juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital dilakukan secara optimal tanpa pemborosan anggaran. Selain itu, diversifikasi media (cetak, radio, televisi, media online, baliho, videotron, ILM, dan media transportasi) dilakukan melalui pola kemitraan sehingga biaya publikasi dapat ditekan.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		5. Pengendalian Internal dan Manajemen Operasional yang Terkelola Efisiensi anggaran juga didukung oleh: • Penjadwalan kegiatan yang terkoordinasi sehingga mengurangi duplikasi perjalanan dinas. • Pemanfaatan sarana dan prasarana internal. • Perencanaan berbasis prioritas dan risiko. • Fokus pada kegiatan berdampak langsung terhadap indikator kinerja. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki kontribusi langsung terhadap capaian output dan outcome.								
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	12	100,00	46.809.000	46.672.900	99,71	1,00	0,00	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh penyesuaian biaya pelaksanaan kegiatan dan penggunaan transportasi petugas menggunakan mobil kantor sehingga anggaran uang harian petugas dapat dihemat menjadi 60%. Terdapat 5 tahapan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, yaitu 1. Advokasi lintas sektor keamanan pangan 2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah 3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah 4. Monitoring Evaluasi dan sertifikasi sekolah 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi keamanan								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		Pelaksanaan advokasi lintas sektor keamanan pangan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas sehingga terjadi sharing biaya antar kegiatan. Sosialisasi keamanan pangan sekolah dilaksanakan secara hybrid (kombinasi offline / tatap muka dan online). Bimtek kader keamanan pangan sekolah dilaksanakan di aula BBPOM di Bandar Lampung sehingga tidak menggunakan transport untuk petugas. Monitoring evaluasi dan sertifikasi sekolah lebih mengaktifkan whatsapp grup dan komunikasi langsung dengan dinas terkait, kepala sekolah/madrasah, kader keamanan pangan, sampai pihak sekolah/madrasah melakukan evaluasi mandiri (Self Assessment). Petugas BBPOM di Bandar Lampung melakukan verifikasi hasil self asesment yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah. Pelaksanaan pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan di kab. Lampung Barat dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas.								
19	Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00	67.385.000	67.084.140	99,55	1,00	0,00	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh penyesuaian tahapan program sesuai petunjuk teknis terbaru dari Unit Pengampu, dengan melakukan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan kepada pihak Kader dan Tim Kader dari Desa untuk memastikan semua Kader yang sudah dilatih melakukan Sosialisasi kepada komunitas.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	16.370.000	16.370.000	100,00	1,00	0,00	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh penyesuaian biaya pelaksanaan kegiatan dan penggunaan transportasi petugas menggunakan mobil kantor sehingga anggaran uang harian petugas dapat dihemat menjadi 60%.								
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,94	16,94	100,00	17.000.000	16.999.638	100,00	1,00	0,00	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya dan anggaran berada pada kategori Efisien dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sepenuhnya dan terserap secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja, dilakukan optimalisasi sumber daya melalui beberapa strategi, yaitu: 1. Sinergi Program Magang SAPA KAMPUS dengan skema MBKM Mandiri Dilaksanakan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program magang terintegrasi MBKM Mandiri, di mana mahasiswa melakukan pendampingan intensif kepada UMK Pangan Olahan mulai dari <i>gap assessment</i> pemenuhan CPPOB, penyusunan rekomendasi dan								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		dokumen CPPOB, hingga pendampingan perbaikan sarana produksi sebagai persiapan pengajuan IP CPPOB. Skema ini memperkuat pembinaan dengan dukungan SDM tambahan tanpa menambah beban anggaran signifikan. 2. Pelaksanaan kegiatan secara kombinasi luring dan daring Sosialisasi dan Bimtek CPPOB dalam Program Pendampingan dilaksanakan secara daring melalui Zoom, video call, dan WhatsApp agar menekan biaya perjalanan dan operasional, sementara pendampingan yang memerlukan verifikasi langsung ke sarana produksi tetap dilakukan secara luring secara selektif dan berbasis kebutuhan. Pendekatan ini menjaga efektivitas pembinaan sekaligus mendukung efisiensi anggaran. 3. Prioritas pendampingan berbasis tingkat kesiapan UMK Dilakukan pemetaan awal (<i>pre-assessment</i>) untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan UMK dalam pemenuhan CPPOB sehingga pendampingan lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas intervensi, dan memperbesar peluang keberhasilan pengajuan IP CPPOB. 4. Pemanfaatan materi dan template digital terstandar Disusun dan dimanfaatkan format dokumen CPPOB, panduan teknis, serta materi pembinaan dalam bentuk digital yang dapat digunakan berulang oleh UMK. Langkah ini mengurangi kebutuhan								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		pendampingan berulang, mempercepat proses pemenuhan dokumen, dan menekan biaya operasional. Melalui strategi tersebut, efisiensi anggaran tetap selaras dengan pencapaian target kinerja yang optimal dan terukur.								
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85	85	100,00	334.197.000	297.544.762	89,03	1,12	0,12	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran perjadi; tidak digunakannya anggaran sewa kendaraan pada saat tahap 2 (penyerahan Tersangka dan Barang Bukti); anggaran penangkapan dan penahanan hanya digunakan 1 (satu) kali dari 3 (tiga) perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung, dimana 2 (dua) perkara lainnya tersangka tidak dilakukan penahanan hanya wajib lapor selama proses penyidikan. Selain itu hasil efisiensi anggaran digunakan untuk peningkatan kompetensi petugas karena anggaran peningkatan kompetensi petugas pada komponen anggaran laporan analisis kejahatan obat dan makanan tidak tersedia.								
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	90	98	108,89	9.795.000	9.794.000	99,99	1,09	0,09	100 % (Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan untuk peningkatan kompetensi petugas dilakukan secara daring dan peningkatan kompetensi petugas yang dilakukan secara luring menggunakan anggaran hasil efisiensi pada komponen anggaran perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan. Pelaksanaan kegiatan secara daring tersebut berkontribusi terhadap optimalisasi serapan anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun capaian kinerja yang ditetapkan.								
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,7	4,85	103,19	74.140.000	74.138.657	100,00	1,03	0,03	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan program yang mendukung pelaksanaan IPP Efisiensi tersebut dapat dianalisis melalui beberapa aspek strategis berikut: 1. Perencanaan Berbasis Prioritas dan Risiko Pelaksanaan program pendukung IPP dirancang dengan pendekatan berbasis prioritas dan manajemen risiko. Anggaran difokuskan pada								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		komponen yang secara langsung berkontribusi terhadap indikator IPP, seperti: • Peningkatan kualitas pelayanan, • Transparansi informasi publik, • Responsivitas terhadap pengaduan, • Inovasi pelayanan berbasis digital. Pendekatan ini menghindari pembiayaan kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan, sehingga setiap alokasi anggaran memiliki korelasi yang jelas dengan indikator kinerja. 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mandiri yang Efisien Pelaksanaan SKM Mandiri dilakukan secara berkala dengan pengelolaan internal, sehingga tidak memerlukan biaya konsultan eksternal. Hasil survei dianalisis dan ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan layanan. Publikasi hasil SKM setiap bulan juga memanfaatkan media digital yang telah tersedia, sehingga: • Tidak memerlukan biaya publikasi tambahan, • Meningkatkan transparansi,								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		• Mendukung aspek akuntabilitas dalam IPP. Model ini menunjukkan efisiensi karena proses evaluasi mutu layanan dilakukan secara berkelanjutan dengan biaya minimal namun berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan. 3. Optimalisasi Media Informasi dan Digitalisasi Layanan Pemutakhiran subsite dan media sosial dilakukan setiap hari sebagai sarana utama penyebaran informasi pelayanan. Strategi digitalisasi ini menghasilkan efisiensi dalam beberapa hal: • Menekan biaya publikasi cetak, • Mengurangi kebutuhan tatap muka untuk konsultasi dasar, • Mempercepat penyebaran informasi standar layanan terbaru. Digitalisasi juga diperkuat melalui berbagai inovasi pelayanan, seperti: • Call Me Back “Ulun Lampung” • GALAKSI • PIOM Pintas • QRIS-PUSAKA • Cawa-Cawa Bareng BPOM • Live Bagi-Bagi KOMISI Inovasi tersebut berbasis sistem dan teknologi, sehingga dalam jangka panjang menurunkan biaya operasional manual (paperless system, efisiensi waktu pelayanan, pengurangan antrian fisik).								

4. Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan Secara Sistematis

Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengaduan dilakukan melalui sistem terintegrasi, sehingga:

- Meminimalkan risiko maladministrasi,
- Mengurangi potensi komplain berulang,
- Meningkatkan kepercayaan publik tanpa perlu biaya kampanye tambahan.

Penanganan pengaduan yang cepat dan tepat sasaran berdampak langsung pada peningkatan persepsi kualitas pelayanan, yang merupakan komponen penting dalam IPP.

5. Evaluasi Kinerja Melalui Sistem Nasional (evortal.pom.go.id)

Pemanfaatan sistem evaluasi nasional sebagai alat ukur kualitas pelayanan menunjukkan efisiensi karena:

- Tidak memerlukan pengembangan aplikasi baru secara mandiri,
- Memanfaatkan sistem terpusat yang sudah tersedia,
- Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan berbasis data.

Pendekatan ini memastikan bahwa peningkatan IPP dilakukan secara terukur tanpa pemborosan sumber daya.

6. Revisi dan Optimalisasi Anggaran Secara Adaptif

Penyesuaian dan revisi anggaran dilakukan untuk mengalihkan sumber daya pada kegiatan prioritas pelayanan publik. Hal ini mencerminkan:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		- o Fleksibilitas pengelolaan anggaran, - o Respons terhadap dinamika kebutuhan pelayanan, - o Pencegahan pemborosan pada pos yang kurang strategis. Dengan demikian, realisasi anggaran tetap terkendali namun indikator pelayanan tetap meningkat. 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Secara Preventif Pemeliharaan rutin fasilitas pelayanan dilakukan untuk mencegah kerusakan besar yang membutuhkan biaya tinggi. Strategi preventif ini lebih efisien dibandingkan perbaikan reaktif yang bersifat mendadak. Langkah ini juga menjaga kenyamanan pengguna layanan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai kepuasan masyarakat. 8. Transparansi dan Sosialisasi Standar Pelayanan Publikasi standar pelayanan terbaru dilakukan melalui media daring dan luring yang telah tersedia, sehingga: • Tidak memerlukan biaya sosialisasi besar, • Mengurangi miskomunikasi, • Menurunkan potensi sengketa pelayanan. Transparansi ini berkontribusi langsung terhadap indikator akuntabilitas dan kualitas pelayanan dalam IPP.								
25		90	89,35	99,28	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82	0,99	-0,01	75 % (Tidak Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja tidak efisien. Hal ini disebabkan karena realisasi kinerja Pembangunan ZI lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Ketidak efisiennya pada indikator ini disebabkan Hasil penilaian ZI Tidak Memenuhi Syarat karena : a). Nilai Capaian Kinerja Lebih Baik < 3,75 • Kriteria Kinerja Output pada Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan nilai 2,76 % (Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 26,32%) • Kriteria Kinerja Outcome pada Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan nilai 3,66% (Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 41,38%) b). Nilai total LKE < 90 • Nilai seluruh komponen pengungkit (Manajemen Perubahan, penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Memenuhi Syarat								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		• Nilai Komponen Hasil Birokrasi Bersih dan Akuntabel pada Capaian Kinerja lebih baik adalah Tidak Memenuhi Syarat, sedangkan pada Komponen yang lain Memenuhi Syarat Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam upaya implementasi RB antara lain : 1. Faktor SDM, meskipun tidak tersedia SDM khusus, efisiensi bisa ditingkatkan dengan pembagian tugas yang jelas dan proporsional dalam tim ZI. Pada masing-masing pokja telah disusun sasaran kerja pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya pada pengisian LKE ZI dan pemantauan rencana kerja. 2. Sinergi kegiatan ZI dengan kegiatan rutin sehingga mempermudah memperoleh data dukung seperti : sampai dengan TW 2 tahun 2025 sinergi kegiatan QMS dan SPIP dengan pokja tata laksana, sinergi kegiatan tata usaha dengan pokja akuntabilitas dan SDM, sinergi kegiatan pelayanan publik (infokom dan sertifikasi) dengan pokja pelayanan publik, sinergi kegiatan manajemen risiko dan SMAP dengan pokja pengawasan (sampai dengan TW 2). Sedangkan dari TW 3 sampai dengan TW 4 tahun 2025 persiapan implementasi Sistem Manajemen POM Terintegrasi. 3. Meningkatkan Capaian AKIP pada komponen Capaian Kinerja dengan Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan memastikan rekomendasi pada evaluasi internal dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja								
26		80,9	81,49	100,73	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82	1,01	0,01	100 % (Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh realisasi kinerja lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja supaya lebih efisien antara lain : 1. Pembagian tugas yang jelas dan proporsional atas penanggungjawab IKU 2. Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan 3. Melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan melibatkan Ketua Tim 4. Melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 dengan melibatkan Ketua Tim. 5. Melaksanakan desk SAKIP tahun 2025 dengan Inspektorat dan menindaklanjuti perbaikan hasil desk tersebut 6. Melaksanakan SOP mikro <i>Reward dan punishment</i> kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan <i>punishment</i> kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		7. Melaksanakan SOP mikro <i>Reward dan punishment</i> pegawai secara individu sesuai dengan pedoman 8. Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP. Pada tahun 2025 seluruh tim pengelola akuntabilitas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait SAKIP 9. Pengembangan inovasi SIPADUPINTER sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja 10.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 11.Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan dengan penekanan IKU yang tidak tercapai serta pelaporan sesuai <i>timeline</i> .								
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5	5	100,00	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82	1,00	0,00	100 % (Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Hal ini didukung oleh perencanaan anggaran yang berbasis efisiensi dan koordinasi secara intensif dengan seluruh Substansi terkait dengan kinerja anggaran. Serapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Adapun upaya untuk mencapai efisiensi pada tahun 2025 adalah Melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat pada seluruh parameter penilaian IKPA terutama untuk parameter RPD. Setiap minggu keempat dilakukan evaluasi atas capaian RPD masing-masing Substansi.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		- Melakukan koordinasi dengan seluruh substansi/bidang atas capaian realisasi dan pemenuhan ketercapaian RPD serta percepatan pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan dilaksanakan. - Melakukan pengawalan pada parameter penilaian Nilai Kinerja Perencanaan (EKA) yang meliputi Efektifitas (Capaian RO) dan Efisiensi (penggunaan SBK dan efisiensi SBK). - Melakukan koordinasi dengan substansi yang menggunakan SBK supaya penggunaan dan efisiensi SBK terpenuhi.								
28	Indeks Manajemen Risiko	2,9	2,84	97,93	2.516.561.750	2.512.050.750	99,82	0,98	-0,02	75 % (Tidak Efisien)
		Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja tidak efisien. Hal ini disebabkan karena realisasi Indeks Manajemen Risiko lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Anggaran yang terserap dimanfaatkan untuk kegiatan ketatausahaan dalam rangka peningkatan manajemen risiko BBPOM di Bandar Lampung. Inefisiensi pada indikator ini disebabkan karena : a. Nilai Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 2,84 sehingga target tahun 2025 yaitu sebesar 2,9 tidak tercapai. b. Pada tahun 2025 sudah dilakukan upaya perbaikan terhadap kelemahan di tahun 2024 akan tetapi masih ditemukan kelemahan lain di tahun 2025.								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam upaya implementasi Manajemen Risiko di BBPOM Bandar Lampung antara lain : 1. Internalisasi Manajemen Risiko kepada seluruh personel di BBPOM Bandar Lampung melalui zoom apel pagi yang disampaikan sebanyak 3 kali di tahun 2025 yaitu pada tanggal 13 Maret 2025, 7 Agustus 2025 dan 6 November 2025. 2. Bimtek Manajemen Risiko oleh narasumber dari Inspektorat 2 yang diselenggarakan tanggal 17 September 2025 yang diawali dengan pretest, dilanjutkan dengan materi dan ditutup dengan posttest dan evaluasi kegiatan. Dari 87 peserta yang mengikuti bimtek dinyatakan lulus dengan nilai posttest > 70. 3. Review Dokumen manajemen risiko oleh tim auditor internal, mulai semester 2 tahun 2025 sudah dilakukan review dokumen manajemen risiko oleh auditor internal sebelum dilaporkan ke SAPA APIP tanggal 20 Juli 2025 sesuai dengan permintaan inspektorat dalam Surat Edaran pelaporan manajemen risiko. 4. Sinergi kegiatan implementasi manajemen risiko dengan kegiatan rutin sehingga mempermudah memperoleh data dukung seperti : sinergi kegiatan manajemen risiko dan SMAP dengan pokja pengawasan dan juga SPIP. 5. Meningkatkan Capaian Indeks Manajemen Risiko dengan memperkuat pelaksanaan review daftar risiko oleh pemilik risiko, tim manajemen risiko ataupun auditor internal secara berkala dan								

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
		memastikan rekomendasi inspektorat dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja.								

Berdasarkan tabel tersebut, rentang tingkat efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara -0,02 – 0,16. Dapat diketahui bahwa dari perhitungan efisiensi anggaran pada 28 indikator utama didapatkan sebanyak 26 indikator efisien dan 2 indikator tidak efisien. Inefisiensi pemanfaatan anggaran pada 2 indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung dan Indeks Manajemen Risiko disebabkan karena target kinerja tahun 2025 tidak tercapai namun anggaran telah dimanfaatkan secara optimal.

Selanjutnya, tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 158. Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,08	99,98	1,06	0,06	100 % (Efisien)
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	108,11	99,99	1,08	0,08	100 % (Efisien)
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,87	99,95	1,01	0,01	100 % (Efisien)
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00	100,00	1,00	0,00	100 % (Efisien)
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	89,03	1,12	0,12	100 % (Efisien)

No	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108,89	99,99	1,09	0,09	100 % (Efisien)
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	103,19	100,00	1,03	0,03	100 % (Efisien)
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,49	99,82	1,00	0,00	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada 8 Sasaran Kegiatan yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, terdapat 7 Sasaran Kegiatan yang efisien dan 1 Sasaran Kegiatan yang tidak efisien dengan analisa sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar 10.194.182.601 dari pagu anggaran 10.196.607.000 atau 99,98% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 106,08%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Efisiensi anggaran ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan telah mengedepankan prinsip perencanaan berbasis prioritas dan risiko; penerapan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan pengendalian internal yang efektif mendorong efisiensi dalam penggunaan biaya operasional; pemanfaatan Platform Daring (*Zoom meeting*) untuk KIE farmakovigilans, Optimalisasi Grup *WhatsApp* (WAG) untuk Komunikasi dan Monitoring laporan KTD/ESO; penyediaan Bahan Digital Mandiri terkait materi KTD/ESO; pengadaan reagen dan media dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhitungkan kebutuhan berdasarkan rencana

pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025; optimalisasi berbagai kegiatan yang tidak membutuhkan anggaran biaya seperti sosialisasi cara pembuatan CAPA menggunakan media zoom meeting, monitoring *feedback* rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ke lintas sektor bersamaan dengan kegiatan yang lain seperti pemeriksaan sarana dan monev DAK Non Fisik Obat dan Makanan; penggabungan beberapa kegiatan dalam satu perjalanan dinas; Kolaborasi kegiatan Bimtek AMR pada acara yang diselenggarakan oleh *stakeholder* (PBF) dengan narasumber yang melibatkan petugas BBPOM di Bandar Lampung; Pengumpulan data serta materi publikasi secara digital; Pelaksanaan kegiatan Advokasi diselenggarakan secara *hybrid*; prioritas pengadaan peralatan laboratorium sebagai salah satu komponen dalam pemenuhan SKL; Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat; dan pengelolaan anggaran berupa revisi sesuai jadwal jika terdapat perubahan kebutuhan atau perubahan realisasi pelaksanaan.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar 27.049.300 dari pagu anggaran 27.051.000 atau 99,99% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 108,11%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Efisiensi anggaran ini didukung oleh perencanaan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan dilakukan monitoring penggunaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran maka dilakukan penggabungan kegiatan pemeriksaan dan sampling dalam satu perjalanan dinas.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar 872.065.493 dari pagu anggaran 872.526.000 atau 99,95% dengan capaian Sasaran Kegiatan 100,87%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Efisiensi anggaran ini didukung oleh optimalisasi skema KIE DIPA dan Non-DIPA melalui kolaborasi multipihak, integrasi KIE dalam program nasional dan komunitas, inovasi pelaksanaan KIE berbasis ruang publik dan transportasi, optimalisasi media sosial dan media massa, pengendalian internal dan manajemen operasional yang terkelola, penyesuaian biaya pelaksanaan kegiatan dan penggunaan transportasi petugas menggunakan mobil kantor sehingga anggaran uang harian petugas dapat dihemat menjadi 60%, Pelaksanaan advokasi lintas sektor keamanan pangan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas sehingga terjadi sharing biaya antar kegiatan, sosialisasi keamanan pangan sekolah dilaksanakan secara hybrid (kombinasi offline / tatap muka dan online). Bimtek kader keamanan pangan sekolah dilaksanakan di aula BBPOM di Bandar Lampung sehingga tidak menggunakan transport untuk petugas, monitoring evaluasi dan sertifikasi sekolah lebih mengaktifkan whatsapp grup dan komunikasi langsung dengan dinas terkait, kepala sekolah/madrasah, kader keamanan pangan, sampai pihak sekolah/madrasah melakukan evaluasi mandiri (Self Assessment). Petugas BBPOM di Bandar Lampung melakukan verifikasi hasil self asesment yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah, pelaksanaan pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan di kab. Lampung Barat dilaksanakan

secara bersamaan dengan kegiatan desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas, komunikasi secara intensif dan berkesinambungan kepada pihak Kader dan Tim Kader dari Desa untuk memastikan semua Kader yang sudah dilatih melakukan Sosialisasi kepada komunitas.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sebesar 16.999.638 dari pagu anggaran 17.000.000 atau 100 % dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Efisiensi anggaran ini didukung oleh Sinergi Program Magang SAPA KAMPUS dengan skema MBKM Mandiri, pelaksanaan kegiatan secara kombinasi luring dan daring, prioritas pendampingan berbasis tingkat kesiapan UMK, dan pemanfaatan materi dan template digital standar.

5. Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar 297.544.762 dari pagu anggaran 334.197.000 atau 89,03% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Efisiensi anggaran ini didukung oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran perjadi; tidak digunakannya anggaran sewa kendaraan pada saat tahap 2 (penyerahan Tersangka dan Barang Bukti); anggaran penangkapan dan penahanan hanya digunakan 1 (satu) kali dari 3 (tiga) perkara yang ditangani Penyidik BBPOM di Bandar Lampung, dimana 2 (dua) perkara lainnya tersangka tidak dilakukan penahanan hanya wajib lapor selama proses penyidikan. Selain itu hasil efisiensi anggaran digunakan untuk peningkatan kompetensi petugas karena anggaran peningkatan kompetensi petugas pada komponen anggaran laporan analisis kejahatan obat dan makanan tidak tersedia.

6. Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 Sasaran Kegiatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar 9.794.000 dari pagu anggaran 9.795.000 atau 99,99% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 108,89%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Anggaran pada Sasaran Kegiatan ini digunakan untuk kegiatan Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan; Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan dan Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan.

Efisiensi anggaran ini didukung oleh efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan untuk peningkatan kompetensi petugas dilakukan secara daring dan peningkatan kompetensi petugas yang dilakukan secara luring menggunakan anggaran hasil efisiensi pada komponen

anggaran perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan. Pelaksanaan kegiatan secara daring tersebut berkontribusi terhadap optimalisasi serapan anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun capaian kinerja yang ditetapkan.

7. Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik UPT yang prima

Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 Sasaran Kegiatan : Layanan Publik UPT yang prima sebesar 74.138.657 dari pagu anggaran 74.140.000 atau 100% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 103,19%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Efisiensi anggaran ini didukung oleh perencanaan kegiatan berbasis prioritas dan risiko, pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mandiri dan efisien, optimalisasi media informasi dan digitalisasi layanan, pengelolaan konsultasi dan pengaduan secara sistematis, evaluasi kinerja melalui sistem nasional (evortala.pom.go.id), revisi dan optimalisasi anggaran secara adaptif, pemeliharaan sarana dan prasarana secara preventif, transparansi dan sosialisasi standar pelayanan.

8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal sebesar 10.048.202.999 dari pagu anggaran 10.066.247.000 atau 99,82% dengan capaian Sasaran Kegiatan sebesar 99,49%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini tidak efisien karena output/kinerja yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Inefisiensi anggaran ini disebabkan oleh 2 indikator dalam Sasaran Kegiatan ini yang tidak mencapai target yaitu Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar

Lampung dan Indeks Manajemen Risiko namun telah merealisasikan anggaran secara optimal sehingga saat capaian anggaran dan capaian kinerja diperbandingkan hasilnya menjadi tidak efisien. Ketidaktercapaian 2 indikator ini disebabkan karena:

1. Terkait Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung

a) Nilai Capaian Kinerja Lebih Baik < 3,75

- Kriteria Kinerja Output pada Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan nilai 2,76 % (Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 26,32%)
- Kriteria Kinerja Outcome pada Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan nilai 3,66% (Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 41,38%)

b) Nilai total LKE < 90

- Nilai seluruh komponen pengungkit (Manajemen Perubahan, penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

Memenuhi Syarat

- Nilai Komponen Hasil Birokrasi Bersih dan Akuntabel pada Capaian Kinerja lebih baik adalah **Tidak Memenuhi Syarat**, sedangkan pada Komponen yang lain **Memenuhi Syarat**

2. Terkait Indeks Manajemen Risiko

- a. Nilai Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 2,84 sehingga target tahun 2025 yaitu sebesar 2,9 tidak tercapai.
- b. Pada tahun 2025 sudah dilakukan upaya perbaikan terhadap kelemahan di tahun 2024 akan tetapi masih ditemukan kelemahan lain di tahun 2025.

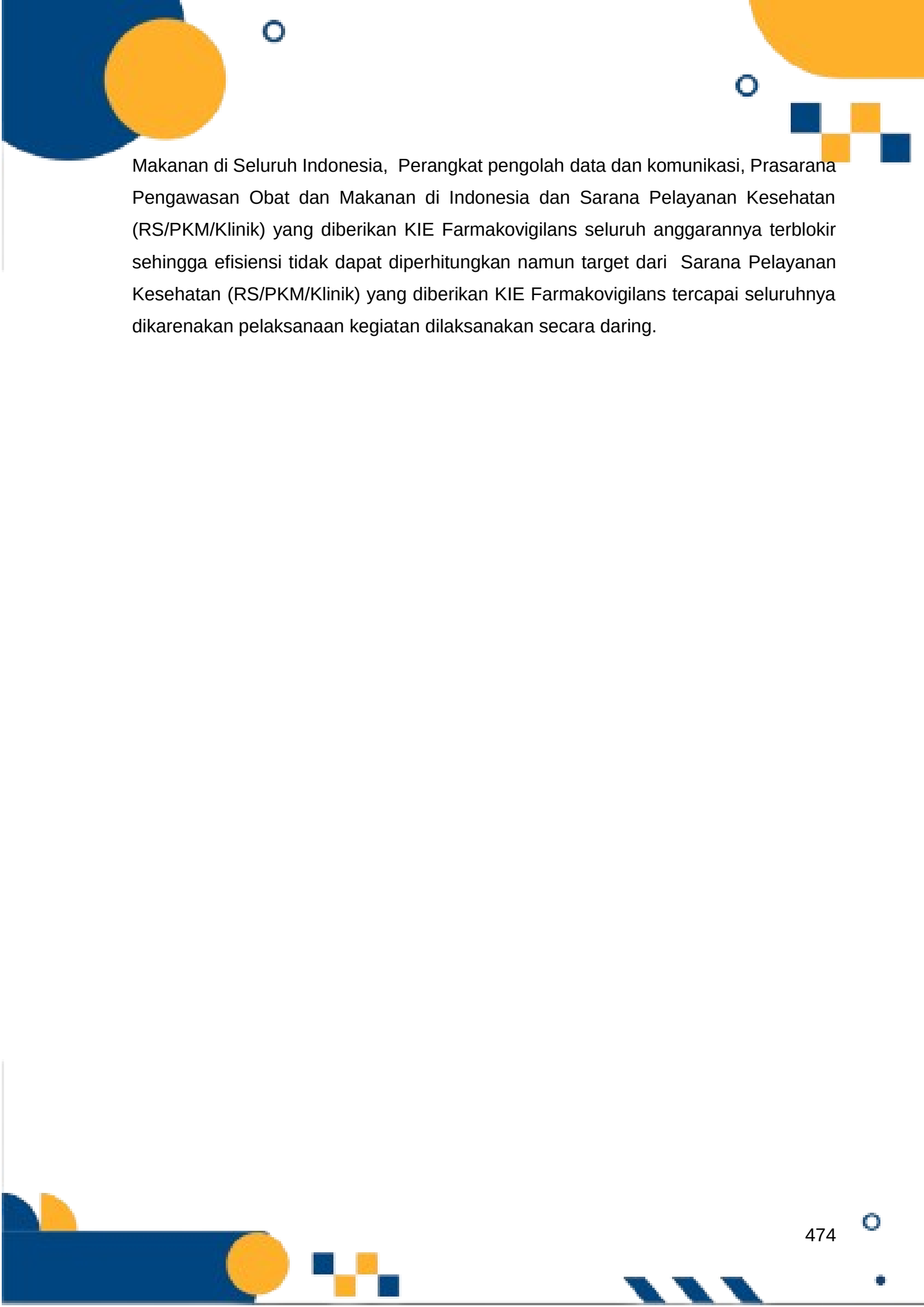
Meskipun pada akhirnya perhitungan menunjukkan hasil tidak efisien, namun telah ada upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam mengoptimalkan efisiensi anggaran yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat pada seluruh parameter penilaian IKPA terutama untuk parameter RPD yaitu setiap minggu keempat dilakukan evaluasi atas capaian RPD masing-masing substansi, melakukan koordinasi dengan seluruh substansi/bidang atas capaian realisasi dan pemenuhan ketercapaian RPD serta percepatan pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan dilaksanakan, melakukan pengawalan pada parameter penilaian Nilai Kinerja Perencanaan (EKA) yang meliputi Efektifitas (Capaian RO) dan Efisiensi (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), dan melakukan koordinasi dengan substansi yang menggunakan SBK supaya penggunaan dan efisiensi SBK terpenuhi.

Tabel 159. Capaian Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	9.795.000	9.794.000	99,99	1,00	0,00	100 % (Efisien)
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1.200	1.369	114,08	74.140.000	74.138.657	100,00	1,14	0,14	100 % (Efisien)
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.283	3.495	37,65	685.055.000	685.040.166	100,00	0,38	-0,62	75 % (Tidak Efisien)
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	96.841.000	96.660.738	99,81	1,00	0,00	100 % (Efisien)
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	35	112,90	56.907.000	56.898.287	99,98	1,13	0,13	100 % (Efisien)
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	-	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	-	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	-	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100,00	2.187.493.000	2.187.477.024	100,00	1,00	0,00	100 % (Efisien)
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	3	3	100,00	334.197.000	297.544.762	89,03	1,12	0,12	100 % (Efisien)
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12	12	100,00	46.809.000	46.672.900	99,71	1,00	0,00	100 % (Efisien)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
12	Desa Pangan Aman	5	5	100,00	67.385.000	67.084.140	99,55	1,00	0,00	100 % (Efisien)
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00	16.370.000	16.370.000	100,00	1,00	0,00	100 % (Efisien)
14	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	21	100,00	17.000.000	16.999.638	100,00	1,00	0,00	100 % (Efisien)
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	439	439	100,00	392.584.000	392.530.071	99,99	1,00	0,00	100 % (Efisien)
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.085	1.086	100,09	585.971.000	585.317.985	99,89	1,00	0,00	100 % (Efisien)
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	124	127	102,42	93.452.000	93.335.274	99,88	1,03	0,03	100 % (Efisien)
19	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	24	26	108,33	27.051.000	27.049.300	99,99	1,08	0,08	100 % (Efisien)
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	642	662	103,12	525.673.000	525.643.167	99,99	1,03	0,03	100 % (Efisien)
21	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100,00	6.411.434.000	6.409.879.080	99,98	1,00	0,00	100 % (Efisien)
22	Layanan BMN	1	1	100,00	170.000	170.000	100,00	1,00	0,00	100 % (Efisien)
23	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	9.969.236.000	9.946.396.491	99,77	1,00	0,00	100 % (Efisien)

Untuk mendukung capaian 8 Sasaran Kegiatan, Balai Besar POM melaksanakan 23 kegiatan berdasarkan DIPA TA 2025. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 18 kegiatan efisien, 1 kegiatan tidak efisien dan 4 kegiatan tidak dapat didefinisikan. Rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara -0,62 – 0,14. Kegiatan yang tidak efisiensi yaitu Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025 sehingga anggaran nonblokir yang tersisa pada kegiatan ini tidak mampu mencukupi kegiatan KIE utamanya bersama Tokoh Masyarakat sehingga target tahunan tidak tercapai. Kemudian pada rincian output Sarana Pengawasan Obat dan



Makanan di Seluruh Indonesia, Perangkat pengolah data dan komunikasi, Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia dan Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans seluruh anggarannya terblokir sehingga efisiensi tidak dapat diperhitungkan namun target dari Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans tercapai seluruhnya dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah bentuk pertanggung jawaban sebagai perwujudan visi dan misi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025– 2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode rencana strategis tahun 2025-2029, terdapat 8 Sasaran Kegiatan dengan 28 indikator kinerja yang menjadi target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM pada Bulan Agustus Tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **104,03%** dengan kriteria “**ISTIMEWA**” dengan rincian 3 indikator tercapai dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, 15 indikator tercapai dengan kategori **Sangat Baik**, 8 indikator tercapai dengan kategori **Baik**, 2 indikator tidak tercapai dengan kategori **Baik**.

Pencapaian Nilai Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Sasaran Kegiatan 1 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 106,08% dengan kriteria capaian “**Sangat Baik**” menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Tahun 2025.

- b. Capaian Sasaran Kegiatan 2 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 108,11% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi pada Tahun 2025.
- c. Capaian Sasaran Kegiatan 3 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100,87% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja UPT pada Tahun 2025.
- d. Capaian Sasaran Kegiatan 4 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100% dengan kriteria capaian **“Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada Tahun 2025.
- e. Capaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100% dengan kriteria capaian **“Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT pada Tahun 2025.
- f. Capaian Sasaran Kegiatan 6 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 108,89% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT pada Tahun 2025.
- g. Capaian Sasaran Kegiatan 7 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 103,19% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan Layanan Publik UPT yang prima pada Tahun 2025.
- h. Capaian Sasaran Kegiatan 8 memperoleh nilai Sasaran Kegiatan sebesar 99,49% dengan kriteria capaian **“Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

Pada tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung memiliki pagu anggaran sebesar Rp31.915.508.000,00 dengan pagu efektif setelah automatic adjustment sebesar 21.597.563.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.534.812.503,00 (67,47% terhadap pagu penuh atau 99,7095% terhadap pagu efektif).

Untuk mendukung capaian 8 Sasaran Kegiatan, Balai Besar POM melaksanakan 23 kegiatan berdasarkan DIPA TA 2025. Berdasarkan perhitungan sebanyak 18 kegiatan efisien, 1 kegiatan tidak efisien dan 4 kegiatan tidak dapat didefinisikan. Rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara -0,62 – 0,14. Kegiatan yang tidak efisiensi yaitu Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025 sehingga anggaran nonblokir yang tersisa pada kegiatan ini tidak mampu mencukupi kegiatan KIE utamanya bersama Tokoh Masyarakat sehingga target tahunan tidak tercapai. Kemudian pada rincian output Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia, Perangkat pengolah data dan komunikasi, Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia dan Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans seluruh anggarannya terblokir sehingga efisiensi tidak dapat diperhitungkan namun target dari Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans tercapai seluruhnya dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring.

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja, rentang tingkat efisiensi yaitu antara -0,02 – 0,16. Dari 28 indikator utama didapatkan sebanyak 26 indikator efisien dan 2 indikator tidak efisien. Inefisiensi pemanfaatan anggaran pada 2 indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung dan Indeks Manajemen Risiko disebabkan karena target kinerja tahun 2025 tidak tercapai namun anggaran telah dimanfaatkan secara optimal.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 28 indikator pada tahun 2025, dapat disimpulkan 26 indikator telah mencapai target dan 2 indikator tidak mencapai target yaitu Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM. BBPOM di Bandar Lampung perlu untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian anggaran dan kinerja untuk dapat mengoptimalkan efisiensi terkait pemanfaatan anggaran serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator dan output agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2026 utamanya pada indikator yang belum tercapai adalah sebagai berikut utamanya pada indikator yang belum tercapai:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Upaya peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

- a. Memastikan bahwa penentuan anggota tim sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan lengkap meliputi perbandingan antara rencana dan realisasi program pembangunan ZI, kendala, dan tindak lanjut apabila terdapat rencana kerja yang tidak terealisasi
- c. Meningkatkan upaya internalisasi nilai BerAKHLAK kepada seluruh pegawai.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital secara berkala terhadap seluruh teknologi informasi yang digunakan sehingga dapat diketahui dampak transformasi digital tersebut.

- e. Memastikan bahwa pelaksanaan mutasi pegawai antar jabatan seluruhnya telah memperhatikan kompetensi jabatan (termasuk pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai).
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi agar dikaitkan dengan perbaikan kinerja belum dilakukan.
- g. Menetapkan pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu belum ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja.
- h. Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai unsur dalam pemberian reward and punishment.
- i. Melengkapi laporan implementasi inovasi terkait area perubahan penguatan pengawasan
- j. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala disertai dengan kendala yang dihadapi dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk analisis jika hasil monitoring pengaduan nihil.
- k. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi laporan SKM sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut.
- l. Melengkapi laporan inovasi pelayanan publik yang memuat latar belakang, dampak, monitoring dan evaluasi implementasi secara lengkap.
- m. Melakukan penguatan tata kelola kinerja, perbaikan layanan dan mendorong inovasi sehingga capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

2. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Upaya peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:

- a. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/sertifikasi/refreshment/workshop/awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko;
- b. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko

LAMPIRAN DOKUMEN PERENCANAAN

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahun 2025



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 103-105 Pahoman - Bandar Lampung, 35213
Telp. 0721- 3738056, 0721- 3738066, Call Me Back (0821-8080-6008)
Email : bpom_lampung@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG

NOMOR HK.02.02.6A.09.24.222 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR
LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Bandar Lampung pada Tahun 2025, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Bandar Lampung tentang Rencana Kinerja Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun
2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 September 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANITA TIJAH ISFARJANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.09.24.222 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	94
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	97,29
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Bandar Lampung	14
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	90,50
		Nilai AKIP	81,49
		Nilai Kinerja Anggaran	89,10
		Indeks Manajemen Risiko	3,40

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANILATIMAH ISFARJANTI

Lampiran 2. SK IKU TAHUN 2025



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 103-105 Pahoman - Bandar Lampung, 35213
Telp. 0721- 3738056, 0721- 3738066, Call Me Back (0821-8080-6008)
Email : bpom_lampung@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR
LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana

-3-

Ketiga : kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung
9.2	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung
9.3	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung
9.4	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Lampiran 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI FATIMAH ISFARJANTI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung


ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.2 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.6 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT	90 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	BPOM	
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.9 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 32,829,487,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,121,903,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,707,584,000

Bandar Lampung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran 4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (REVISI)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI FATIMAH ISFARJANTI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.5 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas	94.5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.73 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.2 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.6 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.94 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.9 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 31.859.496.000 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	20.321.903.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11.537.593.000

Bandar Lampung, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 5. RAPK AWAL BBPOM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	585,971,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38,700,000
		03 - Persentase sampel Pangan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219,847,040

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82,442,640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90,294,320
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59,998,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		stakeholder													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3,738,080
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80,368,720
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364,703,760

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91,175,940
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	19,140,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.38	24.38	48.75	51.46	51.46	51.46	51.46	65	65	65	65	65	27,051,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76.2	76.2	76.2	76.7	76.7	76.7	77.2	12,432,443,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	2,824,155,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	40	60	70	80	90	100	100	100	12	469,164,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	40	50	70	80	90	100	100	100	5	782,221,000
		04 - Jumlah pasar pangan	20	25	25	50	60	70	80	90	100	100	100	1	126,919,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		aman berbasis komunitas													
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3.33	13.33	22.5	36.67	45	58.33	61.67	66.67	83.5	85.33	90	91	187,396,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				10	21	33	45	54	59	67	75	85	334,197,000
7.	07 - Terlaksananya	01 - Persentase	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122,664,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar													
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	206,651,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	3,420,061,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.9	3,420,061,500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,420,061,500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	3,420,061,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Total														32,829,487,000	

BANDAR LAMPUNG, 12 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG


ANI FATIMAH ISFARJANTI

Lampiran 6. RAPK BBPOM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 REVISI KE-1



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	585.971.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219.847.040
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90.294.320
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59.998.500
		07 - Persentase sarana produksi	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3.738.080

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.368.720
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364.703.760
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91.175.940
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	19.140.000
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.38	24.38	48.75	51.46	51.46	51.46	51.46	65	65	65	65	65	27.051.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76.2	76.2	76.2	76.7	76.7	76.7	77.2	12.432.443.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	2.824.155.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3.33	13.33	22.5	50	65	71.67	76.67	81.67	88.33	93.33	96.67	91	187.396.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					10	21	34	45	55	65	75	85	334.197.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	206.651.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	3.420.061.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.9	3.420.061.500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.420.061.500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	3.420.061.500
Total														32.829.487.000	

Bandar Lampung, 20 May 2025

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung



Ani Fatmahanikah, S.Si., Apt., M.H.

Lampiran 7. RAPK BBPOM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 REVISI KE-2



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	585.971.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	109.923.520
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	45.147.160
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	64.369.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	4.709.981
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	79.396.819
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	351.007.960
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	93.215.740
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	13.398.000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	5.742.000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	7.285.000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan			75	75	75	76.2	76.2	76.2	76.7	76.7	76.7	77.2	12.951.105.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman												20	155.070.680
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.38	24.38	48.75	51.46	51.46	51.46	51.46	54.05	65	65	65	65	27.051.000
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	2.956.666.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPPOB pangan olahan	3.33	13.33	22.5	50	65	71.67	76.67	81.67	88.33	93.33	96.67	16.94	187.396.000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan					10	21	34	38	51	61	71	85	334.197.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT	Olahan di UPT													
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 – Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	74.140.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	3.047.898.250
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.9	3.047.898.250
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.047.898.250
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	3.047.898.250
Total														31.859.496.000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Bandar Lampung, 29 August 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung


ANI FATIMAH ISFARJANTI

Lampiran 8. RAPK BBPOM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 REVISI KE-3



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	585.971.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	109.923.520
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	45.147.160
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	64.369.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	4.709.981
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	79.396.819
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	351.007.960
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	93.215.740
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.13	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	13.398.000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	5.742.000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	7.285.000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT			75	75	75	76.2	76.2	76.2	76.7	76.7	76.7	77.2	12.951.105.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman												20	155.070.680
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.38	24.38	48.75	51.46	51.46	51.46	51.46	54.05	65	65	65	65	27.051.000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	2.956.666.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	25	70	95	100	100	100	100	100	12	469.164.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	20	25	25	35	60	70	85	90	95	100	100	5	782.221.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	126.919.000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3.33	13.33	22.5	50	65	71.67	76.67	81.67	88.33	93.33	96.67	16.94	187.396.000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					10	21	34	38	51	61	71	85	334.197.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	74.140.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	3.047.898.250
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80,9	3.047.898.250
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3.047.898.250
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,9	3.047.898.250
Total														31.859.496.000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Bandar Lampung, 01 October 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung


BAGUS HERI PURNOMO

Lampiran 9. KERTAS KERJA TAHUN 2025

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Des	1085.00	88.75	99.57	92.69	98.66	99.88	97.70

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Des	26.00	12.00	45.00	26.67

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Des	379.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100%))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
Des	Susu kedelai	13	13	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	100%	35%	100%
	Susu kedelai sisa konsumsi warna pink	11	11	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	100%	35%	100%
	Susu kedelai sisa	11	11	100%	30%	bukan sampel	bukan sampel	100%	35%	1 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	1 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
	konsumsi warna putih					pangan terkemas	pangan terkemas				<i>occus aureus</i>)			
	Es teh	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (ALT)	1 (ALT)	100%	35%	100%
	Nasi goreng topping ayam dan sayuran	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	100%	35%	100%
	Nasi putih	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Fuyunghai	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	1 (<i>Bacillus cereus</i>)	100%	35%	100%
	Tahu	14	14	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	sayur sawi + wortel	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
	saus tahu + saus asam manis	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	susu UHT rasa coklat	5	5	100%	30%	4	4	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	susu UHT fullcream	5	5	100%	30%	4	4	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Mie kuning	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Staphylococcus aureus, Escherichia coli)	2 (Staphylococcus aureus, Escherichia coli)	100%	35%	100%
	Bakwan jagung	14	14	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Ayam	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Escherichia coli)	1 (Escherichia coli)	100%	35%	100%
	Sayur sawi	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)		100%	35%	100%
	Pisang + semangka	7	7	100%	30%	bukan sampel	bukan sampel	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
						pangan terkemas	pangan terkemas							
	Sisa konsumsi	12	12	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Staphylococcus aureus, Escherichia coli)		100%	35%	100%
	Nasi goreng dan ayam sisa konsumsi	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)	100%	35%	100%
	Nasi goreng (SPPG)	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)	2 (Bacillus cereus, Escherichia coli)	100%	35%	100%
	Ayam goreng (retain SPPG)	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%
	Timun + kelengkeng	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	susu UHT	8	8	100%	30%	4	4	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Nasi putih	7	7	100%	30%	bukan sampel	bukan sampel	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
						pangan terkemas	pangan terkemas							
	Rendang daging sapi	9	9	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Tahu goreng	5	5	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (E.coli)	1 (E.coli)	100%	35%	100%
	Timun-semangka	4	4	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Nasi putih	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Ayam bumbu kuning	8	8	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Sayur tumis kacang panjang wortel	8	8	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%
	Tahu goreng	5	5	100%	30%	bukan sampel	bukan sampel	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
						pangan terkemas	pangan terkemas							
	Susu UHT	4	4	100%	30%	4	4	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Roti manis	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (ALT)	1 (ALT)	100%	35%	100%
	Nasi putih	5	5	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%
	Rendang daging sapi	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Tahu goreng	5	5	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Sayur tumis toge wortel	6	6	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Komposit sisa konsumsi	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
	Nasi putih	5	5	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Semur daging	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Cah buncis wortel	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%
	Tempe goreng	6	6	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Semangka	4	4	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Nasi putih	5	5	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Telur ceplok	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
	Tahu goreng	6	6	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Cah kembang kol wortel	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (E.coli)	1 (E.coli)	100%	35%	100%
	Kelengkeng	3	3	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Jajanan long stik Feilala	13	13	100%	30%	13	13	100%	35%	1 (boraks)	1 (boraks)	100%	35%	100%
	Nasi putih	5	5	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%
	Tahu goreng	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%
	Ayam krispi	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0'	0'	100%	35%	100%
	Tumis buncis	7	7	100%	30%	bukan sampel	bukan sampel	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
						pangan terkemas	pangan terkemas							
	Nasi putih	5	5	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (Bacillus cereus)	1 (Bacillus cereus)	100%	35%	100%
	Telur santan	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Bacillus cereus, E.coli)	2 (Bacillus cereus, E.coli)	100%	35%	100%
	Tahu goreng	8	8	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	2 (Bacillus cereus, E.coli)	2 (Bacillus cereus, E.coli)	100%	35%	100%
	Timun - Jeruk	4	4	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Susu UHT	5	5	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	0	0	100%	35%	100%
	Roti sosis	10	10	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas	bukan sampel pangan terkemas	100%	35%	1 (B.cereus)	1 (B.cereus)	100%	35%	100%
	Tahu Goreng	11	11	100%	30%	bukan sampel	bukan sampel	100%	35%	0	0	100%	35%	100%

Periode	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	Realisasi Nilai Akhir (M=D+H +l)
						pangan terkemas	pangan terkemas							

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Des	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.86	100.00	98.29

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	79.00	74.15	100.00	87.07

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Des	90.50	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	93.75	96.88

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Desember	91.00	119.00	120.00	99.17	120.00	120.00	100.00	120.00	120.00	100.00	99.72	120.00	99.72

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	94.50	99.50	99.12	100.00	99.27	99.30

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Des	92	133	133	20.00	132	133	69.47	131	133	9.85	99.32

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	93.73	100.00	100.00	100.00	100.00	99.93	99.99

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Bulan pengawasan	Target waktu pelaporan	Realisasi waktu pelaporan	Target		A. Aspek pemenuhan jumlah			B. Aspek ketepatan waktu			Capaian realisasi: ((g/e)+(j/e))/2
			Target per bulan	Target kumulatif	Realisasi Jmlh per bulan	Akumulasi Realisasi Jumlah	Persen Jumlah	Realisasi tepat waktu per bulan	Akumulasi Laporan tepat waktu	Persen Tepat Waktu	
Desember	5 Januari 2026	10 Desember 2025	17	204	6	204	100,0%	6	172	84,3%	92,2%

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

KOMPONEN TOOLS PENGAWASAN AMR (A)			KOMPONEN BIMTEK (B)			KOMPONEN ADVOKASI (C)			KOMPONEN PUBLIKASI (D)			CAPAIAN IKU AMR UPT
<i>Diisi pada kolom "Jumlah penggunaan tools antibiotik"</i>	<i>Diisi pada kolom "Jumlah target apotek dan ketepatan ..."</i>	<i>% Penggunaan Tools Pengawasan AMR</i>	<i>Diisi pada kolom "Jumlah kegiatan bimbingan teknis ..."</i>	<i>Diisi pada kolom "Target bimtek dalam satu tahun"</i>	<i>% Pelaksanaan Bimtek</i>	<i>Diisi pada kolom "Jumlah kegiatan advokasi"</i>	<i>Diisi pada kolom "Target advokasi dalam satu tahun"</i>	<i>% Pelaksanaan Advokasi</i>	<i>Diisi pada kolom "Jumlah publikasi ..."</i>	<i>Diisi pada kolom "Target publikasi ..."</i>	<i>% Pelaksanaan Publikasi</i>	<i>% Realisasi</i>
99.65%	80.00%	124.57%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	106.14%

Lampiran Surat Dinas Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Nomor : T-PW.01.08.34.01.26.19 Tanggal : 9 Januari 2026 HASIL MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN IKU AMR LEVEL UPT TAHUN 2025 <table> <tr> <th>No.</th><th>Unit Pelaksana Teknis</th><th>Target</th><th>Capaian</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Balai Besar POM di Banda Aceh</td><td>100%</td><td>105.69%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Balai Besar POM di Bandar Lampung</td><td>100%</td><td>106.14%</td></tr> </table>				No.	Unit Pelaksana Teknis	Target	Capaian	1	Balai Besar POM di Banda Aceh	100%	105.69%	2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	100%	106.14%
No.	Unit Pelaksana Teknis	Target	Capaian												
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	100%	105.69%												
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	100%	106.14%												

14. Nilai Pemenuhan Lab Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar POM di Bandar Lampung
Triwulan/Tahun : 3/2025
Tanggal Penilaian : 23 September 2025
Nama Tim Penilai : 1. Diah Lestari, S.Si., M.Si.
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	81.2	77.7	76.7	101.3
2.	Standar Peralatan	81.1			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	80.0			
4.	Standar Metode Terverifikasi	48.4			

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar POM di Bandar Lampung
Triwulan/Tahun : 4/2025
Tanggal Penilaian : 23 Desember 2025
Nama Tim Penilai : 1. Diah Lestari, S.Si., M.Si.
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	83.2	81.0	77.2	104.9
2.	Standar Peralatan	81.1			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	90.0			
4.	Standar Metode Terverifikasi	51.9			

15. Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Desember	20.00	2.00	10.00	20.00

16. Persentase Cakupan Sarana Produksi Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	65	26	37	70.27

17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Periode Data

01 Jan 2025 - 31 Dec 2025

Tipe Survei

Semua Data

Background Color

Light

Tampilkan Dashboard

Total Responden : 655

Indeks Rata-Rata/Final : 92.71

** EFEKTIF **

?

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 490)

Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.77	94.29
Konten/Informasi	3.77	94.2
Pemahaman Audiens	3.53	88.29
Manfaat	3.6	89.97
Indeks Tatap Muka	91.69	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 165)

Average Values of	Skala 4	Skala 100
Sumber Informasi	3.81	95.3
Konten/Informasi	3.82	95.4
Pemahaman Audiens	3.67	91.67
Manfaat	3.7	92.58
Indeks Media	93.74	



18. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	12	25.00	20.00	25.00	25.00	5	12.00

19. Jumlah Desa Pangan Aman

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	5	25	25	20,00	20,00	10	5

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	1.00

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik, dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Desember	16.94	19.00	1.00	1.00	16.94

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Desember	3	0	0	0	0	1	0	0.55	0	0	0	2	0	2	85.00

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)	Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)	Realisasi (%)
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Des	90.0	50.0	23	25	98.0

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	
					Bobot 50%	Bobot 25%	Bobot 25%	
1	BBPOM Banda Aceh	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
2	BBPOM Bandar Lampung	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
3	BBPOM Bandung	100	96	66,67	50,00	24,00	16,67	90,67
4	BBPOM Banjarbaru	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	93,84
5	BBPOM Denpasar	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
6	BBPOM Gorontalo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
7	BBPOM Jakarta	91,67	100	91,67	45,84	25,00	22,92	93,75
8	BBPOM Jayapura	95,83	100	44,44	47,92	25,00	11,11	84,03
9	BBPOM Kupang	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
10	BBPOM Makassar	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
11	BBPOM Manado	95,83	100	88,89	47,92	25,00	22,22	95,14
12	BBPOM Mataram	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
13	BBPOM Medan	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
14	BBPOM Padang	100	80	100,00	50,00	20,00	25,00	95,00
15	BBPOM Palangka Raya	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
16	BBPOM Palembang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	94,00
17	BBPOM Pekanbaru	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
18	BBPOM Pontianak	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
19	BBPOM Samarinda	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24. Indeks Pelayanan Publik

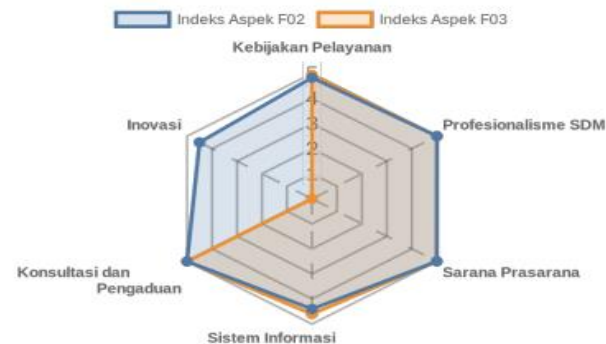
**BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025**

Pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.85/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	6.a.B	Hasil SKM agar dipublikasikan dalam berbagai media, termasuk media non elektronik
2	Profesionalisme SDM	Semua Indikator Telah Terpenuhi	
3	Sarana Prasarana	Semua Indikator Telah Terpenuhi	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	24.d.T	Agar pemutakhiran dapat dilakukan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik setiap hari pada kanal digital (subsite)
5	Konsultasi dan Pengaduan	Semua Indikator Telah Terpenuhi	
6	Inovasi	29.f.B	Inovasi agar terus dikembangkan dan diimplementasikan serta diikutsertakan dalam kompetisi

BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG



* : Aspek Inovasi pada Formulir F03 tidak dinilai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 17 September 2025

Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar
Lampung



Ani Fatimah Isfarjanti,
S.Si, Apt, MH

Ketua Tim Penilai



Arlinda Wibiayu, S.Si,
Apt., M.A.B

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax: 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.06.06.7.05.25.185 Jakarta, 28 Mei 2025
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2025

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 2. Kepala Balai Besar/Balai POM (terlampir)
- di Tempat

Inspektorat Utama telah melaksanakan desk evaluasi dan panel penilaian atas pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terhadap 34 (tiga puluh empat) unit kerja yang memenuhi persyaratan pra evaluasi. Dalam pelaksanaan desk evaluasi dan penentuan unit kerja yang akan diajukan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama mengacu pada Keputusan Kepala BPOM nomor 289 tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM. Adapun persyaratan untuk dapat diajukan memperoleh predikat WBK/WBBM adalah sebagai berikut:

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	85*)	90*) Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	Min 18,25	Min 19,50
•Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	Min 15,75 (indeks 3,60)	Min 15,75 (indeks 3,60)
•Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	Min 2,50 (nilai C)	Min 3,75 (nilai B)
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	Min 14,00 (indeks 3,20)	Min 15,75 (indeks 3,60)

b) Unit Kerja menuju WBBM

No	Unit Kerja	Nilai Panel	Keterangan
1	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	91,66	Tidak Memenuhi Syarat karena nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (C)
2	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	90,30	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai area penataan sistem manajemen SDM aparatur <75%*) b. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (C)
3	Direktorat Registrasi Obat	88,07	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik < 3.75 (C) b. nilai total LKE <90
4	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	92,34	Tidak Memenuhi Syarat karena nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (C)
5	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90,09	Tidak Memenuhi Syarat karena nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (C)
6	Direktorat Pengawasan Kosmetik	92,49	Memenuhi Syarat untuk diajukan WBBM
7	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	91,59	Tidak Memenuhi Syarat karena nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (C)
8	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	88,90	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik < 3.75 (C) b. nilai total LKE <90
9	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91,29	Tidak Memenuhi Syarat karena nilai Capaian Kinerja Lebih Baik <3.75 (C)
10	Balai Besar POM di Banda Aceh	90,24	Memenuhi Syarat untuk diajukan WBBM
11	Balai Besar POM di Pekanbaru	88,50	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai area penataan tatalaksana <75%*) b. nilai total LKE < 90
12	Balai Besar POM di Bandar Lampung	89,35	Tidak Memenuhi Syarat karena: a. nilai Capaian Kinerja Lebih Baik < 3.75 (C) b. nilai total LKE <90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

26. Nilai AKIP UPT BPOM

Lampiran-2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	19,68	+1,20
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	10,08	+0,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	16,80	+1,00
5.	Capaian Kinerja	20	16,66	14,77	-1,89
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,58	81,49	+0,91
Predikat			A	A	Tetap

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan segera disampaikan dan rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.


Yan Setiadi

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	063.01.432859	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	94,16	96,79	95,48

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Lampiran 2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	45,50	45,50	0,00
Nilai Maturitas	2,844	2,844	0,000
Tingkat Maturitas	Risk Aware	Risk Aware	

Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikannya akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.



Yan Setiadi

Lampiran 10. Daftar Risiko Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)				
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key				
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu					
1	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	S-01	1	Strategis	Banyaknya hasil uji sampel sediaan farmasi, pangan olahan dan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat mutu dan keamanan	Ketidapatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi dan distribusi yang baik	2	Eksternal	- Produk sediaan farmasi, pangan olahan dan PIRT yang beredar di pasaran menyebabkan risiko terhadap kesehatan masyarakat	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kelompok Substansi Pengujian, Pemeriksaan, Infokom, Penindakan	3	3	14	Melakukan tindak lanjut terhadap hasil TMS Memberikan pembinaan terhadap sarana produksi untuk produk TMS jika sarana berada dalam cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung	Surat Tindak Lanjut Pembinaan oleh tim inspeksi	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	3	11	104894
2	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di	SDM-23	4	Sumber Daya Manusia	Tidak terpenuhinya Pengujian Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai Pedoman Sampling pada sampel Sediaan Farmasi, Pangan Olahan dan PIRT	Kesalahan dalam menentukan kategori sampel	1	Internal	Tidak tercapainya IKU terkait pengujian sesuai pedoman	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kelompok Substansi Pengujian, Pemeriksaan	2	4	13	1. Selalu melihat Pedoman sampling dalam melakukan sampling 2. Meng-update pembagian kelas terapi sesuai PS terbaru 3. Melakukan refreshment dengan membaca Perka tentang kategori pangan terbaru	Laporan movev pengujian Dokumen PS terbaru Dokumen Perka Kategori Pangan Dokumen Peta Kemampuan Uji Link e-reg	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	104895

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu	
	Bandar Lampung													4. Selalu meng- update informasi terkait peta kemampuan uji khususnya sampel obat yang ada di regional pekanbaru 5. Melakukan monev sampling obat 6. Penentuan kategori sampel mengacu pada kategori sampel pada saat registrasi							
3	1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di	Kompetensi personel penguji	S-03	1. Strategi	Penyelesaian pengujian melewati time line yang telah ditetapkan pada sampel sediaan farmasi, pangan olahan, PIRT dan KLB	Beban kerja personel pengujian terlalu tinggi	1. Internal	Tidak tercapainya IKU terkait pengujian sesuai pedoman	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kelompok Substansi Pengujian, Pemeriksaan	2	4	13	Evaluasi berkala penyelesaian pengujian sampel Regionalisasi (meliputi pengujian dasar dan spesifik) yang memenuhi/tidak memenuhi timeline Pengaturan jadwal sampling	Laporan monev regional Surat Perintah Uji (SPU)	1. Kelemahan Tidak Signifikan	1. Efektif	1	4	8	104896

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)	
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du		
	Bandar Lampung																					
4	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kompetensi personel penguji	S-04	1	Strategis	Kompetensi personel penguji yang masih belum terpenuhi sesuai standar ; Dengan adanya regionalisasi beberapa kompetensi tidak terpelihara	Pelatihan dan pemenuhan pengujian yang masih kurang untuk beberapa judul sesuai SKL karena adanya regionalisasi laboratorium (sampel diuji di balai regional)	1 Internal	Tidak tercapainya IKU Nilai pemenuhan lab sesuai SKL (Kompetensi)	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Pengujian	2	4	13	Assesment Standar kompetensi SKL dan pemetaan uji kompetensi	Standar kompetensi personel, GAP kompetensi	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104897
5	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di	Pemenuhan standar peralatan laboratorium	A-05	1	Aset	Peralatan yang dimiliki belum memenuhi target standar peralatan dalam SKL	Alat yang dimiliki mengalami kerusakan	1 Internal	Tidak tercapainya IKU Nilai pemenuhan lab sesuai SKL (Peralatan)	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Pengujian	2	4	13	Assesment Standar Peralatan SKL, Evaluasi Pemeliharaan dan Permintaan Perbaikan	1. Form Permintaan Perbaikan 2. Program pemeliharaan alat dan perkiraan anggaran	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104898

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015 Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
											Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du	
	Bandar Lampung																				
6	1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pemenuhan standar ruang lingkup	S-06	1. Strategi	Ruang Lingkup Pengujian belum memenuhi SRL dalam SKL	Sampel ruang lingkup tidak tersedia di area pengawasan UPT	1. Internal	Tidak tercapainya IKU Nilai pemenuhan lab sesuai SKL	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Pengujian	2	4	13	Evaluasi SRL secara berkala (per TW) Berkoordinasi dengan anggota region Pekanbaru terkait pengadaan sampel pemenuhan RL	Form monitoring dan evaluasi SRL Bukti koordinasi	1. Kelemahan Tidak Signifikan	1. Efektif	1	4	8	104 899
7	1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di	Pengelolaan pengujian sampel KLB	S-07	1. Strategi	Adanya sampel KLB yang diuji tidak sesuai pedoman	kesalahan penentuan parameter uji	2. Eksternal	Hasil uji tidak valid, tindak lanjut tidak tepat sasaran	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kedeputan III, substansi pengujian, pemeriksaan, infokom dan lintas sektor terkait.	2	3	11	pelatihan personel terkait pengujian sampel KLB dan pemilihan parameter uji nya	bukti pelatihan	1. Kelemahan Tidak Signifikan	1. Efektif	1	3	5	104 900

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du		
	Bandar Lampung																					
8	1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian Sampel sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	SDM -24	4 Sumber Daya Manusia	Manipulasi data hasil uji	Petugas kurang berintegritas	1 Internal	- Hasil uji yang dilaporkan tidak sesuai sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Ditwas kedeputian I, II dan III	2	4	13	Memastikan prosedur, pengawasan, reward &punishment agar tidak terjadi manipulasi data hasil uji	Pakta Integritas, Surat Pernyataan Personel. Sistem pengawasan bertingkat	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104 901	
9	1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di	Pengujian Sampel sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	SDM -01	4 Sumber Daya Manusia	Kesalahan dalam interpretasi hasil pengujian	kompetensi personil kurang memadai	1 Internal	Hasil uji tidak valid, tindak lanjut tidak tepat sasaran	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Ditwas kedeputian I, II dan III	2	4	13	peningkatan kompetensi melalui pelatihan	rencana pelatihan sertifikat hasil pelatihan laporan hasil pelatihan evaluasi pelatihan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104 902	

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)	
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu		
	Bandar Lampung																					
10	1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian Sampel sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	SDM-11	4	Sumber Daya Manusia	Kesalahan input data sampel secara manual maupun SIPT	Petugas kurang teliti dalam memindahkan data atau verifikasi data	1 Internal	- Salah dalam menyimpulkan hasil uji - Tindak lanjut pelaporan sampel tidak sesuai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kedeputian I,II,III	2	4	13	Mengaktifkan fungsi kepenyeliaan secara bertingkat; merunut hasil input data dengan merujuk pada data primer	CP LCP yang ditandatangani penyalia	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104903
11	7 Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Pengujian pihak ke-3 dan Pengujian Sampel Rutin	F-01	8	Fraud	Adanya upaya pemberian suap oleh pihak ke-3 diharapkan hasil pengujian sesuai keinginan	Integritas pemberi suap masih rendah dan berharap keuntungan dari hasil uji tsb	2 Eksternal	Reputasi BBPOM di Bandar Lampung menjadi buruk dan potensi pelanggaran hukum	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pelanggan pihak ketiga	2	4	13	- Pelanggan tidak berinteraksi secara langsung dengan pengujian - Sosialisasi tarif layanan pengujian - Pembayaran uji sampel melalui billing/transfer ke rekening resmi (non cash) - Sosialisasi &am	- bukti Sosialisasi/Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai, - dokumen Pakta Integritas, - rekaman uji kelayakan personil, - Rekaman Sosialisasi &am	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104904

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3.- Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)				
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key				
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu					
														Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai, - Penandatanganan Pakta Integritas, - Pelaksanaan uji kelayakan personil, - Sosialisasi Gratifikasi - Pernyataan benturan kepentingan	- Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan kode etik dan disiplin - Laporan pengendalian gratifikasi - Laporan Pengendalian benturan kepentingan										
12	7	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Pengujian pihak ke-3 dan Pengujian Sampel Rutin	F-02	8	Fraud	Adanya pemberian gratifikasi karena telah mendapatkan hasil serta layanan pengujian yang baik dan tepat waktu	Budaya gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih yang masih tinggi di masyarakat	2	Eksternal	Integritas Pegawai turun	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pelanggan pihak ketiga	3	3	14	- bukti Sosialisasi/Pe mbuatan Tim Kode Etik Pegawai, - dokumen Pakta Integritas, - rekaman uji kelayakan personil, - Rekaman Sosialisasi Gratifikasi, - Laporan Monitoring	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104 905

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)			
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key			
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu				
														- Sosialisasi Gratifikasi- Pernyataan benturan kepentingan	dan Evaluasi penerapan kode etik dan disiplin - Laporan pengendalian gratifikasi&#0 39; - Laporan Pengendalian benturan kepentingan									
13	7	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	SDM -25	4	Sumber Daya Manusi a	Adanya kebocoran data/informasi terkait pengujian	- Pegawai belum mengetahui pengaturan kerahasiaan informasi	2	Ekste rnal	Potensi pelanggaran aturan kerahasiaan informasi dan Bocornya data ke pada pihak yang tidak berkepentinga n	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	3	3	14	- Sosialisasi terkait aturan kerahasiaan informasi dan data	bukti sosialisasi	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	1	104 906		
14	1	Meningk atnya efektivitas Pengawa san Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	O-02	5	Operasi onal	Pengiriman sampel dalam rangka pelaksanaan laboratorium tidak sesuai jadwal/perenc anaan	- komunikasi antar petugas di anggota region tidak lancar	2	Ekste rnal	Target dan Program nasional BPOM dan BBPOM di Bandar Lampung sebagai pelaksana tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	3	3	14	Komunikasi dan diskusi intensif baik melalui luring maupun daring	Korespondensi melalui SRIKANDI, WA grup regionalisasi, Rapat Monitoring dan Evaluasi Regional	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	2	3	11	104 907

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du	
	Balai Besar POM di Bandar Lampung																				
15	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian Sampel sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	O-03	5 Operasional	Peralatan laboratorium tidak berfungsi dengan baik, tidak stabil dan rentan mengalami kerusakan	- Pemakaian peralatan over load	1 Internal	Pengujian terkendala sehingga menghambat pencapaian pengujian PUK dan timeline pengujian	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Pengujian	3	3	14	mengurangi beban pemakaian alat dengan penggunaan alat alternatif	log book peralatan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104908
16	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	Kompetensi laboratorium	S-08	1 Strategis	Kompetensi laboratorium turun atau tidak tercapai	- keterbatasan jumlah personel yang mampu menguji parameter tertentu	1 Internal	Tidak tercapainya IKU Nilai pemenuhan lab sesuai SKL (Kompetensi)	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Pengujian	2	4	13	Assesment Standar kompetensi SKL dan pengembangan kompetensi	Standar kompetensi personel, GAP kompetensi Sertifikat pelatihan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104909

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du	
	Balai Besar POM di Bandar Lampung																				
17	1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	K3-01	7 Keselamatan Kerja	Terjadinya kebakaran di laboratorium	- konsleting listrik	1 Intern al	kerusakan aset dan cedera pada personel	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Pengujian	2	4	13	Pemeliharaan jaringan listrik Pengecekan APAR dan shower, pembentukan Tim K3, monitoring dan evaluasi secara berkala	Kelengkapan K3/APD, tersedianya SOP terkait K3, Monitoring alat K3, Form monitoring dan evaluasi termasuk di dalamnya pengecekan APAR dan shower, SK Tim K3	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104910
18	1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	K3-02	7 Keselamatan Kerja	Terpapar zat atau bahan kimia/ mikroba patogen /bising/debu	APD belum memadai	1 Intern al	Mengalami gangguan kesehatan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Pengujian	2	4	13	Melengkapi ketersediaan APD, Medical check- up secara rutin tiap tahun	Kelengkapan K3/APD, tersedianya SOP, Medical Check Up, Monitoring alat K3 agar selalu berfungsi dengan baik	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104911

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset		Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu		
	Balai Besar POM di Bandar Lampung																					
19	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Validasi / Verifikasi Metode Analisis	S-09	1	Strategis	Belum semua metode uji yang tercantum dalam Standar Ruang Lingkup telah diverifikasi	Keterbatasan sumber daya	1 Internal	Tidak tercapainya IKU Nilai pemenuhan lab sesuai SKL (Verifikasi Metode)	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Pengujian	2	4	13	Menyusun daftar prioritas metode analisis yang akan diverifikasi sesuai PS, dan merencanakan program verifikasi MA tersebut sesuai dengan kapasitas pengujian	Daftar Ruang Lingkup, Rencana verifikasi, monitoring pelaksanaan per triwulan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104912
20	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	Audit Internal/Eksternal	SDM -04	4	Sumber Daya Manusia	Tindak lanjut hasil audit tidak diselesaikan sesuai dengan time line yang telah disepakati dan tidak lengkap	Komitmen SDM	1 Internal	Implementasi sistem mutu kurang baik dan dapat terjadi kesalahan berulang sebelum tindak lanjut temuan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	KAN-BSN, lembaga audit lainnya	2	4	13	Membuat target penyelesaian tindak lanjut audit, penunjukan PIC	Monitoring pengisian Form CAPA	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104913

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	Balai Besar POM di Bandar Lampung																				
21	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian Makanan Bergizi Gratis	O-05	5 Operasional	Tidak semua sampel MBG yang sudah direncanakan untuk di sampling dapat diuji	1. Keterbatasan Sumber Daya (Reagen / Test Kit)	1 Internal	Keamanan Makanan Bergizi Gratis tidak seluruhnya terjamin aman	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	BGN, SPPG	3	3	14	1. melakukan perencanaan pembelian test kit kimia dan mikro dengan memperhitungkan jumlah sampel MBG	- dokumen perencanaan pembelian test kit	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104914
22	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	Pengujian Makanan Bergizi Gratis	S-41	1 Strategis	Terjadinya KLB dengan sumber dari Makanan Bergizi Gratis	- Proses Penyajian makanan tidak sesuai dengan pedoman keamanan pangan	2 Eksternal	- gangguan kesehatan terhadap penerima manfaat MBG	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	BGN, peserta didik dan non peserta didik penerima manfaat MBG, SPPG	2	4	13	- melakukan sampling dan pengujian sampel MBG - melakukan kitchen inspection ke SPPG - melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada	- hasil uji sampel MBG - hasil kitchen inspectin - bukti sosialisasi dan edukasi	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104915

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu	
	Balai Besar POM di Bandar Lampung													penjajah makanan bergizi gratis -memberikan edukasi ke penerima manfaat MBG							
23	7 Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Permohonan Uji Sampel Pihak ketiga	S-10	1 Strategi s	Terjadinya penurunan jumlah sampel pihak ketiga yang masuk ke BBPOM Bandar Lampung	- Kenaikan harga pengujian sampel dengan adanya perubahan tarif atas PNBPN sesuai dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2 Ekst ernal	Target PNBPN tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Stakeholder	2	4	13	- sosialisasi kepada stake holder atas PMK yang baru melalui FKP, medsos, - memberi pemahaman dasar perhitungan tarif yang baru	-bukti sosialisasi	1 Kelem ahan Tidak Signifika n	1 Efektif	1	4	8	104 916

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemungkinan Residu	Dampak Residu	Level Risiko Residu	
24	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian Sampel sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	O-24	5 Operasional	Penggunaan reagen dan media tidak efektif dan efisien	Pengujian sampel yang berulang karena kesalahan penentuan kategori sampel	1 Internal	Anggaran yang dialokasikan untuk pembelian reagen dan media tidak mencukupi	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian dan Pemeriksaan	2	3	11	Melakukan verifikasi terhadap kategori sampel sebelum sampel dikirim ke laboratorium	Bukti verifikasi pada data contoh	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	104917
25	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian sampel sediaan farmasi	S-42	1 Strategis	Sampel sediaan farmasi yang diterima oleh laboratorium tidak cukup untuk melakukan pengujian (sampel kurang)	Belum ditetapkan jumlah sampel minimal untuk keperluan uji sesuai PUK terutama untuk sampel dengan riwayat TMS	1 Internal	Timeline pengujian dan/atau PUK tidak terpenuhi (Target IKU tidak tercapai)	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian dan Pemeriksaan	2	4	13	Melakukan koordinasi dengan tim inspeksi untuk menetapkan jumlah sampel minimal untuk keperluan uji	Notulensi rapat	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104918

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)				
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key				
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du					
26	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	O-25	5	Operasional	Sampel uji untuk KLB tidak representatif untuk uji	Proses penanganan sampel dan komunikasi dengan dinas terkait kurang cepat dan tepat	2	Eksternal	Kesimpulan Investigasi penyebab kejadian KLB tidak dapat ditentukan secara laboratorium hanya disesuaikan dengan data dukung lain misal gejala keracunan, waktu inkubasi dan lainnya	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Dinas kesehatan terkait	2	4	13	Koordinasi dengan pihak terkait (vokal point) di lokasi kejadian agar lebih cepat dalam melakukan investigasi kejadian KLB dan pelaporan	SK Tim Gerak Cepat Dokumentasi koordinasi	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	104919
27	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	O-26	5	Operasional	Pengujian sampel tidak selesai sesuai target waktu yang ditetapkan.	Volume sampel tinggi,	1	Internal	Tertundanya tindak lanjut pengawasan,Keluhan dari stakeholder/pelaku usaha, Penurunan kinerja unit kerja	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian dan Pemeriksaan	2	3	11	Penjadwalan pengujian, Prioritas pengujian berbasis risiko, Koordinasi antar laboratorium, Monitoring target waktu pengujian	Waktu pengujian lebih terkendali dan Beban kerja lebih terdistribusi	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104920

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du		
28	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian Sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	O-27	5 Operasional	Kesalahan hasil pengukuran instrumen	Belum semua alat dikalibrasi	1 Internal	Hasil pengujian tidak valid	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian		1	3	5	Penjadwalan kalibrasi secara berkala, perawatan peralatan	Program kalibrasi, Penunjukan penanggung jawab alat	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	104921
29	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Fasilitas Sarana dan Prasarana	O-28	5 Operasional	Pegawai yang akan mobilitas antar gedung beresiko basah, terpeleset, dan jatuh yang menyebabkan cedera atau kondisi kesehatan lainnya ketika hujan turun. Hal ini sangat beresiko bagi kelompok rentan.	Belum adanya sarana dan prasarana seperti jalur aman bagi pegawai yang akan mobilitas antar gedung terutama saat hujan turun	1 Internal	Sakit, cedera, atau kondisi kesehatan lainnya yang berdampak pada produktifitas kinerja pegawai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tata usaha		2	2	7	Menyiapkan beberapa payung di setiap titik strategis mengusulkan pemeliharaan lantai yang lebih sesuai dan pemasangan kanopi	payung form usulan ke Tata Usaha	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	2	3	104922
30	8 Terwujudnya	Pengelolaan BMN Alat Gelas	A-06	10 Aset	Perbedaan antara jumlah	Kurang tertibnya	1 Internal	Data laporan inventaris	Kepala Balai	Pengujian, tata usaha		2	3	11	- Pencatatan alat gelas	- Buku catatan alat gelas	1 Kelemahan	1 Efektif	1	3	5	104923

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal				stok persediaan (alat gelas, baku pambanding) di rekapan data dengan lapangan	pencatatan administrasi barang persediaan		tahunan menjadi tidak akurat (misleading), mempersulit perencanaan pengadaan tahun depan. Menurunkan nilai Akuntabilitas dari Balai.	Besar POM di Bandar Lampung					rusak/pecah. - Melakukan stock opname dan audit secara berkala.	rusak - Data stock opname	Tidak Signifikan					
31	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan Baku Pambanding di Laboratorium	A-07	10 Aset	Pengambilan Baku pambanding oleh penguji	Pemutakhiran kartu stok baku pambanding tidak konsisten	1 Internal	Akuntabilitas balai menurun karena perbedaan data stok di aplikasi dengan data stok sebenarnya	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian	2	3	11	Petugas penanggung jawab baku pambanding segera melakukan update kartu stok	Stok Opname per semester	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	104924
32	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di	Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	K3-03	7 Keselamatan Kerja	Merokok di dalam lingkungan kantor	Kurangnya kepedulian personel terhadap K3	1 Internal	Terjadi kebakaran dan bahaya ledakan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tata usaha	2	4	13	1. Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait dengan bahaya dan pengendalian K3 secara umum 2. Membuat batasan terhadap orang asing/yang bukan Tim Limbah maupun K3 untuk tidak mendekati area penampungan limbah	Bukti sosialisasi K3, SOP K3, Papan/sticker peringatan di area penampungan limbah.	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104925

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	Bandar Lampung													3. Memberikan peringatan keseluruh pegawai untuk tidak merokok dilingkungan kerja apalagi digudang TPS/Penampung an Limbah							
33	8 Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Penerapan sistem keamanan kantor	F-23	8 Fraud	Pencurian BMN, sampel di dalam gudang penyimpanan sampel, dan barang pribadi karyawan	Integritas pegawai belum memadai	1 Intern al	Kehilangan BMN, sampel uji, dan barang pribadi karyawan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tata usaha	2	2	7	- Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai - Penempatan kamera CCTV di beberapa titik pantau - sampel uji disimpan di dalam gudang penyimpanan sampel - pendataan BMN secara berkala	Pakta integritas, laporan monitoring CCTV oleh Satpam, data inventaris barang dan ruangan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	2	3	104926
34	7 Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Sampel pihak ketiga	O-29	5 Operasi onal	Kesalahan pengambilan kesimpulan hasil uji sampel pihak ke-3 kepolisian	Pengujian terburu-buru karena permintaan percepatan pengujian pro- justicia	2 Ekstern al	- Kesalahan tindak lanjut proses pro- justicia oleh pihak kepolisian - Turunnya reputasi BBPOM Bandar Lampung	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengujian	2	4	13	1.Tetap melaksanakan pengujian sesuai prosedur 2. Menyampaikan kepada stakeholder risiko keterburu- buruan agar ekspektasi	SOP/standar layanan pengujian sampel pihak ke-3	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104927

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)			
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key			
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu				
								sebagai laboratorium penguji sampel pihak ke-3						penyelesaian hasil uji lebih realistis.										
35	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	K3-04	7	Keselamatan Kerja	Penanganan Limbah Pengujian Mikotoksin (misal: aflatoksin, DON) belum sesuai ketentuan	Belum semua penguji dan outsourcing mengetahui penangan limbah dari pengujian mikotoksin pangan seperti misalnya aflatoksin, okratoksin dan DON dimana limbah yang dihasilkan berupa limbah cair seperti pelarut organik, ekstrak dan sisa uji ataupun limbah padat seperti sampel sisa, kolom IAC, filter dan tissue	1	Internal	Paparan toksin kepada penguji dan outsourcing kontaminasi lingkungan dan tumpahan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	2	3	11	- melakukan sosialisasi pentingnya penanganan limbah mikotoksin dengan benar kepada penguji dan petugas - pengendalian dengan bayclin selama 12 jam harus di perelas - menyediakan 1 tempat khusus limbah B3 mikotoksin dan tidak dibuang ke sampah umum - melabeli limbah dengan benar agar dapat tertangani di tps tanpa membahayakan pihak tps - menetapkan SOP tumpahan reagen dan spill kit tumpahan reagen	- kit tumpahan reagen - APD Lengkap - Wadah Limbah khusus B3	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104928
36	1	Meningkatnya efektivitas	Pengujian sampel kasus KLB	O-30	5	Operasional	sampel kasus diserahkan ke laboratorium	sampel harus segera diuji	1	Internal	penomoran oleh penguji berbeda	2	2	7	penyampling segera melakukan	Dokumen data sampel	1	Kelemahan Tidak	1	Efektif	1	2	3	104929

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	s Pengawa san Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung				sebelum diberi kode/ penomoran, tidak dilengkapi data sampel			dengan data sampel yang dibuat susulan oleh penyampling, sehingga diperlukan revisi identitas sampel pada laporan hasil uji	POM di Bandar Lampun g				14	kodifikasi sebelum sampel diserahkan ke laboratorium		Signifik an					
37	8 Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Penyimpanan dokumen mutu	O-31	5 Operasi onal	Dokumen mutu yang tersimpan di aplikasi Saldomu belum dikurasi sesuai status dokumen terbaru. Masih ditemukan dokumen lama yang sudah tidak berlaku masih tersimpan di Saldomu.	Belum ada revidi dan kurasi menyeluruh atas dokumen yang disimpan di saldomu	1 Intern al	Terjadi kesalahan bisnis proses karena petugas menggunakan dokumen lama yang belum ditarik dan masih berada di Saldomu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional, sedangkan dokumen tersebut sudah tidak berlaku.	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Pengujian, Pemeriksaan, Infokom, Penindakan, tata usaha	3	3	14	Melakukan penataan kembali susunan dokumen dan melakukan revidi terhadap dokumen yang ada di Saldomu secara berkala.	SK kurator dokumen Saldomu, laporan revidi dokumen	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	2	3	11	104 930
38	5 Terlaksana nya Penjindak	Keberhasilan penyidikan kejahatan	O-23	5 Operasi onal	Tersangka melarikan diri	Tersangka tidak ditahan	1 Intern al	Target kinerja tidak tercapai	Kepala BBPOM di	Fungsi Penindakan di	2	4	13	Dilakukan penahanan	Aministrasi Penangkapan	1 Kelem ahan Tidak	1 Efektif	1	4	8	104 931

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)	
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu		
	an Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan							Bandar Lampung, Penyidik					terhadap Tersangka	dan Penahanan	Signifikan						
39	5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	H-02	3	Hukum	Adanya Pra peradilan oleh pihak tersangka atau lainnya	Tidak terpenuhinya persyaratan formil sesuai KUHP dalam proses penyidikan	1 Intern al	Target kinerja tidak tercapai	Kepala BBPOM di Bandar Lampung, Penyidik	Fungsi Penindakan	2	4	13	Supervisi oleh Ketua Tim/ monev pemenuhan persyaratan formil penyidikan	Form ceklist persyaratan formil penyidikan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104 932

Num ber	Number(col um kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)				
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key				
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du					
40	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	F-03	8	Fraud	Adanya penerimaan Gratifikasi oleh petugas	Adanya upaya pelaku usaha dalam memberi gratifikasi kepada petugas	2	Eksternal	Penilaian terkait kasus yang ditangani menjadi tidak obyektif	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung		2	4	13	Menandatangani Pakta Integritas, Melaporkan penerimaan/ penolakan Gratifikasi sesuai ketentuan, Sosialisasi tentang Gratifikasi dan SMAP	Monitoring Gratifikasi tiap bulan	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	104933
41	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di	S-11	1	Strategis	Adanya intervensi pihak lain yang mempengaruhi proses penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Adanya kepentingan pihak tertentu terhadap perkara yang ditangani Penyidik	2	Eksternal	Target kinerja tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung		2	4	13	Melakukan gelar perkara	Hasil kesimpulan gelar perkara	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	104934

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)			
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du						
	Bandar Lampung																									
42	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	O-06	5	Operasi onal	Target sasaran tidak sesuai ekspektasi pada waktu operasi penindakan di lapangan	Adanya kebocoran informasi atas pelaksanaan operasi penindakan dan pendalaman informasi masih kurang tajam	1	Intern al	Gagalnya kegiatan operasi penindakan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Penindakan	2	3	11	Menjaga dan membatasi informasi penindakan dan melakukan sharing knowledge secara rutin	Monev hasil kegiatan penindakan secara rutin	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104 935
43	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai	Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	O-07	1	Strategi s	Berkurangnya anggaran perjalanan dinas pada kegiatan intelijen dan penyidikan	Kebijakan Pemerintah untuk memblokir perjalanan dinas sebanyak 50%	1	Intern al	Target Kinerja tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Penindakan	2	4	13	Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sesuai prioritas	Renlak	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	104 936

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	Besar POM di Bandar Lampung																				
44	5 Terlaks nanya Penindak an Kejahata n Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	O-08	4 Sumber Daya Manusi a	Kerusakan atau kehilangan barang bukti	Kelalaian petugas dalam menjaga barang bukti	1 Intern al	Proses Penyidikan menjadi terhambat	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Fungsi Penindakan	2	3	11	Ruang penyimpanan barang bukti terkunci, control CCTV, akses terbatas	Hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses/m engelola BB. Lakukan prosedur pencatatan dan dokumentasi BB secara lengkap	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	3	5	104 937
45	6 Terlaks nanya kegiatan deteksi kejahata n di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	O-32	5 Operasi onal	Berkas perkara tidak dapat dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa karena kendala dalam pemenuhan P- 19	Adanya perbedaan persepsi antara Jaksa dengan penyidik	2 Ekste rnal	Target kinerja tidak sesuai timeline	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Fungsi Penindakan	2	3	11	Koordinasi dengan Jaksa	Terbit P-21	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	3	5	104 938

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)			
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key				
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko o Resi du					
	wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung																								
46	6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	SDM-33	4	Sumber Daya Manusia	Jumlah dan Jenis Barang Bukti Hasil Sitaan tidak sesuai dengan Berita Acara Penyitaan	Kurang cermat dalam pendataan barang bukti	1	Internal	Terkendala dalam proses Tahap-II (penyerahan tersangka dan barang bukti)	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Penindakan	2	3	11	Verifikasi barang bukti oleh Ketua Tim	Ceklis Ketua Tim pada Berita Acara Penyerahan Barang Bukti	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104939
47	6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	SDM-34	4	Sumber Daya Manusia	Hak tersangka tidak dipenuhi sesuai ketentuan KUHAP dalam proses pemeriksaan	Penyidik hanya fokus pada unsur materiil dalam proses pemeriksaan	1	Internal	Kelengkapan formulir tidak terpenuhi dalam proses pemberkasan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Penindakan	2	3	11	Melaksanakan administrasi penyidikan sesuai Perkap Polri No 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan	Draft Pertanyaan Standar Formulir Pemeriksaan terhadap Tersangka	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104940

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)			
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key			
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du				
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung																							
48	6	Terlaksana nanya kegiatan deteksi kejahata n di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	SDM -02	4	Sumber Daya Manusi a	Petugas tidak cermat dalam memverifikasi akun produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar yang tidak memenuhi standar	Kurangnya pengetahuan petugas terkait regulasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang memenuhi standar	1	Intern al	Proses rekomendasi takedown terhadap akun yang diusulkan tidak 100 %	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	2	2	7	Sharing Knowledge antar petugas	Monev hasil patroli siber	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	1	2	3	104 941
49	6	Terlaksa nanya kegiatan deteksi kejahata n di	O-09	5	Operasi onal	Adanya kendala pengungkapan peredaran sediaan farmasi dan	Belum ada peralatan pengolahan data dengan kemampuan tingoi	1	Intern al	Tidak dapat mengungkap pelaku pejahatan atau jaringannya	Kepala Balai Besar POM di Bandar	3	3	14	Berkoordinasi dengan tim siber Badan POM	Hasil Koordinasi berupa laporan Profiling Siber	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	2	3	11	104 942

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)					
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du						
	bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Bandar Lampung			pangan olahan secara daring				Lampun g																	
50	6	Terlaksana nya kegiatan deteksi kejahata n di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Laporan analisis sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Bandar Lampung	SDM -35	4	Sumber Daya Manusi a	Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak sesuai standar	Keterbatasan kapasitas dan kompetensi petugas analisis	1	Intern al	Nilai Laporan analisis tidak mencapai target	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Fungsi Penindakan	2	3	11	Kepala BBPOM melakukan review Laporan Analisis	Hasil review laporan analisis	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	1	3	5	104 943

Num ber	Number (col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)					
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du						
51	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Reformasi Birokrasi menuju WBBM	F-24	8	Fraud	Persyaratan WBBM belum terpenuhi	Adanya pengaduan terkait pengadaan	1	Intern al	Menghambat terwujudnya WBBM	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	BBPOM di Bandar Lampung	2	4	13	Penandatanganan Pakta Integritas, sanksi disiplin	Pakta Integritas, SK Hukdis	2	Kelemahan Signifikan	2	Tidak Efektif	1	4	8	104 944
52	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai RB	S-13	1	Strategis	Nilai LKE < 90	kelengkapan dokumen tidak terpenuhi	1	Intern al	Target RB tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	BBPOM di Bandar Lampung	3	4	17	Kelengkapan dokumen tiap Pokja	Monitoring dan evaluasi	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	4	13	104 945
53	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan kearsipan	SDM -13	4	Sumber Daya Manusia	Arsip rahasia terakses oleh pihak yang tidak berwenang	Kurangnya awareness pengelola arsip terhadap penanganan arsip rahasia	1	Intern al	Kerugian serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, dan hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Tata Usaha	3	3	14	Klasifikasi keamanan akses Naskah Dinas Peningkatan Awernes bagi Tim Pengelola Arsip dan Petugas PPID	Naskah dinas rahasia sudah diberi kode R, T, dan SR. Dokumen sosialisasi awareness	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104 946
54	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan kearsipan	SDM -36	4	Sumber Daya Manusia	Penciptaan Naskah Dinas tidak sesuai dengan pedoman Tata Naskah Dinas yang Berlaku	Pegawai tidak mematuhi ketentuan Tata Naskah Dinas BPOM yang berlaku dalam pembuatan naskah dinas	1	Intern al	Melemahnya kekuatan hukum naskah dinas yang tercipta dan tingkat keaslian naskah dinas	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	seluruh substansi	2	3	11	Menempatkan arsiparis sebagai verifikator tata naskah dinas	posisi arsiparis sebagai verifikator dalam penciptaan tata naskah dinas	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104 947

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)	
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu		
								dapat diragukan														
55	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	O-12	5	Operasi onal	Tempat Penyimpanan Arsip terkena wabah rayap	Kondisi ruangan yang lembab, tempat penyimpanan arsip tidak sesuai persyaratan (berbahan kayu)	1	Intern al	Dapat Merusak Fisik Arsip sehingga membuat informasi di dalamnya menjadi tidak utuh maupun tidak terbaca	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	3	3	14	Mengusulkan pengadaan tempat menyimpanan arsip yang sesuai standar Menjaga kondisi dan akomodasi lingkungan sehingga meminimalisir kerusakan lemari kayu oleh rayap	Bukti usulan Foto ruangan dilengkapi AC	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	1	104 948
56	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	TI-01	6	IT	Kehilangan Data/Informasi penting	- Kerusakan infrastruktur IT	1	Intern al	Terhambatnya proses bisnis, Kerugian energi, waktu, biaya untuk recovery data	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	3	3	14	Meningkatkan monitoring terhadap perangkat server aplikasi dan server data Melakukan perbaikan dan upgrade infrastruktur	Dokumen hasil monev	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	2	104 949
57	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	TI-02	6	IT	Serangan Siber	online hacking	2	Ekstern al	Terhambatnya proses bisnis, Kehilangan data, Kerugian energi, waktu, biaya untuk recovery data	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	3	3	14	Melakukan update sistem operasi yang digunakan Update antivirus, firewall, penggantian password berkala	dokumen rencana kerja dan monev nya	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	2	104 950

Num ber	Number(colou m kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu		
58	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	TI-03	6 IT	Kegagalan Sistem	- Kerusakan perangkat keras, - Kegagalan perangkat lunak software, - Pemadaman listrik	1 Intern al	Berkurangnya produktivitas Hilangnya sumberdaya penting Meningkatnya kesalahan manusia dengan sistem manual	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tata Usaha	3	3	14	- Proaktif dalam pemeliharaan, dengan rutin memeriksa kerentanan perangkat keras dan perangkat lunak - Melakukan backup data untuk proses recovery - Perbaikan dan atau penggantian perangkat keras dan perangkat lunak	dokumen rencana kerja dan monev nya	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104 951	
59	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	TI-04	6 IT	Teknologi Usang	- Perangkat keras yang sudah discontinue, - Perangkat lunak yang sudah tidak ada layanan dukungan	1 Intern al	Kinerja menjadi lebih lambat	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tata Usaha	2	3	11	Peremajaan perangkat keras, Update perangkat lunak	Dokumen pemeliharaan APD	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	104 952	
60	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi	TI-05	6 IT	Insider Threats (Ancaman dari dalam organisasi baik disengaja atau tidak oleh karyawan/pegawai)	Sistem Keamanan yang belum memadai	1 Intern al	Kebocoran data penting, Hilangnya data, Kerusakan sistem	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tata Usaha	2	3	11	Memberikan pemahaman kepada pegawai terkait security awareness	Bukti Sosialisasi Kemanan Sistem Data dan Informasi	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	104 953	

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	si yang optimal																				
61	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan keuangan	SDM-14	4 Sumber Daya Manusi a	Keterlambatan pendaftaran kontrak 50 juta rupiah pada Aplikasi SAKTI	Kurangnya koordinasi dalam penyampaian data kontrak	1 Intern al	Nilai IKPA berkurang	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tata Usaha	2	3	11	- Meningkatkan Koordinasi antara PPK dan operator SAKTI - Membuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak	Dokumen Monitoring Omspan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	104954
62	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan keuangan	S-16	1 Strategi s	Penilaian TUP pada komponen IKPA terjadi penurunan	Perencanaan kegiatan yang tidak pasti karena berkaitan dengan eksternal terutama pada kegiatan dengan pagu besar seperti KIE Tomas	1 Intern al	Penurunan nilai IKPA	Pengelola keuangan	Semua bidang	3	3	14	Melakukan monitoring pertanggung jawaban secara ketat Membuat SOP Mikro Keuangan	SOP Mikro Keuangan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104955
63	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan keuangan	O-13	5 Operasional	Keterlambatan proses pencairan keuangan	Pergantian petugas/operator SAKTI	1 Intern al	Mengganggu proses kegiatan karena ketersediaan/pencairan anggaran terhambat	Bendahara, KPA, PPK dan PPSPM	Fungsi Tata Usaha	3	3	14	Mentoring petugas/operator baru dan pelatihan pada seluruh pengelola keuangan SOP Mikro keuangan	Laporan hasil mentoring / pelatihan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104956
64	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah	Pengelolaan keuangan	O-14	5 Operasional	Penggunaan KKP rendah	Hanya sedikit belanja memakai KKP	1 Intern al	Mengganggu ketersediaan UP karena proses	Kepala Balai Besar POM di Bandar	BBPOM di Bandar Lampung	3	3	14	Penggunaan KKP untuk pembelian tiket, hotel, pembayaran	Hasil Monitoring KKP	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104957

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu	
	ah Unit Organisa si yang optimal							revolving yang lama	Lampun g					belanja barang dan jasa							
65	8 Terwujud nya tatakelo l pemerintah Unit Organisa si yang optimal	Pengelolaan keuangan	O-33	5 Operasi onal	Keterlambatan pertanggungja waban TUP	Kurangnya koordinasi bendahara dengan substansi	1 Intern al	Nilai IKPA menurun	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Bendahara Subtansi	2	4	13	- Koordinasi antar substansi, - Menetapkan mekanisme pertanggungjaw aban keuangan	Nota dinas mekanisme pertanggungja waban, sosialisasi mekanisme PJ	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	104 958
66	8 Terwujud nya tatakelo l pemerintah Unit Organisa si yang optimal	Pengelolaan keuangan	SDM -16	4 Sumber Daya Manusi a	Rencana Penarikan Anggaran (RPD) melebihi deviasi yang telah ditetapkan	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan/pel aksanaan RPD	1 Intern al	Nilai komponen RPD pada IKPA rendah	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Semua Substansi	4	4	19	Koordinasi dalam penyusunan/pela ksanaan RPD	Monitoring halaman III DIPA dan Omspan	2 Kelem ahan Signifik an	2 Tidak Efektif	4	4	19	104 959
67	8 Terwujud nya tatakelo l pemerintah Unit Organisa si yang optimal	Pengelolaan keuangan	SDM -17	4 Sumber Daya Manusi a	Revisi DIPA tidak sesuai dengan ketentuan	Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan revisi	1 Intern al	Nilai komponen Revisi pada IKPA revisi rendah	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Bagian Tata Usaha	2	4	13	Monev revisi DIPA setiap TW	Hasil Monitoring Omspan	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	104 960
68	8 Terwujud nya tatakelo l pemerintah Unit Oranisa	Pengelolaan keuangan	SDM -18	4 Sumber Daya Manusi a	Dispensasi SPM	Adanya kesalahan pembuatan SPM oleh operator	1 Intern al	Nilai IKPA berkurang	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Bagian Tata Usaha	2	4	13	Koordinasi Tim pengelola Keuangan	Monitoring Sakti	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	104 961

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemungkinan Residu	Dampak Residu	Level Risiko Residu	
	si yang optimal																				
69	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan keuangan	SDM-37	4 Sumber Daya Manusia	Penyetoran Pajak tidak tertib	Kelalaian petugas	1 Internal	Temuan audit	Bendahara pengeluaran	Bagian Tata Usaha	3	3	14	Monitoring kepatuhan pembayaran pajak	Hasil Monitoring	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104962
70	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan keuangan	SDM-38	4 Sumber Daya Manusia	Uang Persediaan di Brankas lebih dari 50 juta	Kelalaian Bendahara Pengeluaran	1 Internal	Kegiatan di substansi terhambat	Bendahara pengeluaran	Bagian Tata Usaha	3	3	14	Pemeriksaan kas Intern oleh PPK setiap bulan	Berita acara pemeriksaan Kas Intern	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104963
71	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan keuangan	SDM-21	4 Sumber Daya Manusia	Ketidakteraturan pembuatan pembelian AKUN belanja barang	Tidak dilakukan revaluasi ulang pada saat RKA-K/L oleh operator	1 Internal	Selisih pencatatan persediaan di gudang	petugas BMN	Bagian Tata Usaha	3	3	14	Koreksi Akun dengan revisi anggaran	Dokumen revisi anggaran	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104964
72	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan keuangan	SDM-22	4 Sumber Daya Manusia	Kesalahan perhitungan pembayaran uang makan dan Tukin	- Kesalahan pengisian exception pada saat verifikasi e-presensi	1 Internal	pengembalian uang makan dan tukin hasil audit inspektorat	PPAPB	Bagian Tata Usaha	4	2	12	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang pengisian e-presensi	Rekap e-presensi yang valid	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	2	7	104965

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)					
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu						
73	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan keuangan	K-04	9	Keuangan	Kesalahan pembayaran honor pejabat	Tidak mengikuti ketentuan peraturan keuangan terupdate	1	Internal	Potensi temuan audit, sehingga mengembalikan ke negara	Pejabat yang bersangkutan	Bagian Tata Usaha	2	2	7	Pembuatan SK mengacu peraturan terupdate	SK Pejabat	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	2	3	104 966
74	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja	SDM -19	4	Sumber Daya Manusia	Kesalahan perhitungan data realisasi kinerja	Kesalahan petugas dalam menghitung data	1	Internal	Data tidak akuntabel	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Semua Kelompok Substansi	2	3	11	Koordinasi antara petugas dengan katim/tim monev	Google sheet/sistem internal	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104 967
75	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal	SDM -20	4	Sumber Daya Manusia	Kepatuhan Pelaporan kinerja belum optimal	Penyusunan Analisis pada Laporan Interim oleh ketua tim tidak tepat waktu	1	Internal	Nilai AKIP menurun	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Semua Kelompok Substansi	2	3	11	- Pendataan/ceklist yang telah membuat pelaporan - Koordinasi dengan substansi	Google sheet/sistem internal perhitungan data monev	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104 968
76	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan BMN	A-01	1	Aset	Database Barang Milik Negara belum mutakhir	Barang Milik Negara belum semua diberi kodefikasi	1	Internal	Barang negara tidak terdata berpotensi barang hilang	Kuasa pengguna Barang	Bagian Tata Usaha	3	3	14	- Inventarisasi Barang Milik Negara	Barcode barang di BMN	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	3	11	104 969

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)					
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu						
77	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan BMN	A-02	10	Aset	Pengelolaan DBR belum update	pencatatan DBR belum tertib	1	Intern al	Barang Milik Negara di ruangan tidak terdata dan berpotensi hilang	Kuasa pengguna Barang	Bagian Tata Usaha	3	3	14	- Inventarisasi Barang diruangan	Barcode barang di ruangan	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	3	11	104 970
78	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan BMN	A-03	10	Aset	Pengelolaan Barang milik negara yang rusak belum update	Pencatatan barang rusak tidak tertib	1	Intern al	Keterlambatan pemusnahan/ elang	Kuasa pengguna Barang	Bagian Tata Usaha	3	3	14	Koordinasi dengan substansi agar menyerahkan barang rusak	BA penyerahan	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104 971
79	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan BMN	A-04	10	Aset	Pendisitribusia n Barang milik Negara belum sesuai ketentuan	Belum ada mekanisme pendistribusian BMN	1	Intern al	Pencatatan tidak tertib dan sulit tertelusur	Kuasa pengguna Barang	Bagian Tata Usaha	3	3	14	Di buat mekanisme pendistribusian barang	Dokumen berupa nota dinas/SOP	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104 972
80	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Penerimaan Sampel Pihak ketiga	R-05	2	Reputasi	Penerimaan sampel pihak ketiga tidak sesuai SOP	Pemahaman petugas layanan belum sama	1	Intern al	Pelayanan sampel pihak ketiga menjadi tidak konsisten dan ketidakpuasan pelanggan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Infokom, Tata Usaha dan Pengujian	3	3	14	Sosialisasi SOP mikro	Bukti Sosialisasi	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	3	11	104 973

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)					
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu						
81	8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengelolaan kearsipan	O-34	5	Operasional	Arsip sulit tertelusur	Arsip yang tercipta pada masing-masing substansi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak disusutkan sesuai dengan jadwal retensi yang ada	1	Internal	Hilangnya data histori/arsip	Kepala BBPOM di Bandar Lampung	bagian tata Usaha	2	4	13	Membuat daftar arsip sesuai pedoman	Daftar arsip	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	104974
82	8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Penatausahaan BMN	K3-05	7	Keselamatan Kerja	Terjadi kecelakaan kerja di gudang penyimpanan reagen	Rak terlalu tinggi menyebabkan kesulitan untuk menjangkau atau mengambil barang	1	Internal	Resiko material atas barang yang rusak dan risiko keselamatan	tata usaha	bagian tata Usaha	2	3	11	Menyesuaikan bentuk dan tinggi rak agar lebih mudah mengambil barang (bagian paling atas tidak digunakan untuk penyimpanan bahan yang ber bahaya)	Foto penyimpanan barang di Rak	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104975
83	8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja BBPOM di Bandar Lampung	S-43	1	Strategis	Nilai perencanaan anggaran (EKA) kurang dari 100	adanya blockir anggaran	2	Eksternal	Nilai kinerja anggaran menurun	Kepala BBPOM di Bandar Lampung	bagian tata Usaha	3	3	14	Pemantauan penggunaan MAK SBK (BMN dan Penindakan) dan monitoring capaian output	Laporan monev setiap bulan	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	104976
84	8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	S-44	1	Strategis	Terjadi penurunan nilai komponen capaian	Capaian kinerja tahun n-1 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya	1	Internal	Menurunnya nilai evaluasi AKIP	Kepala BBPOM di Bandar Lampung	BBPOM di Bandar Lampung	3	3	14	Dibuat reminder dan target minimal capaian kinerja pada aplikasi SIPADUPINTER	Tampilan reminder pada dashboard aplikasi SIPADUPINTER	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	3	11	104977

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)				
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key				
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du					
	Organisa si yang optimal					kinerja pada evaluasi AKIP																			
85	8	Terwujud nya tatakelol a pemerint ah Unit Organisa si yang optimal	SDM -39	4	Sumber Daya Manusi a	Terjadinya keterlambatan kehadiran pegawai pada jam kerja yang telah ditetapkan.	Keterlambatan pegawai disebabkan oleh rendahnya kesadaran disiplin	1	Intern al	Keterlambatan pegawai dapat menurunkan nilai SKP kepegawaian serta berdampak pada pencapaian kinerja individu dan organisasi.	Kepala BBPOM di Bandar Lampun g	Tata Usaha	3	3	14	Pengendalian dilakukan dengan memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan	Surat Panggilan Untuk dilakukan pembinaan kedisiplinan, BAP dan SK Penjatuhan disiplin	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	2	3	11	104 978
86	7	Layanan Publik Balai Besars POM di Bandar Lampung yang prima	S-45	1	Strategi s	Penurunan IPP BBPOM di Bandar Lampung	Adanya perubahan pada tools Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pelayanan Publik BPOM tahun 2026	2	Ekster nal	IPP BBPOM di Bandar Lampung tidak mencapai target	Kepala BBPOM di Bandar Lampun g	Infokom dan Tata Usaha	2	3	11	Melakukan koordinasi internal terkait hal-hal yang menjadi komponen penilaian PEKPPP, mengikuti perkembangan dan mengikuti sosialisasi pra penilaian PEKPPP	PerBPOM 28 Tahun 2022, Standar Pelayanan BBPOM di Bandar Lampung	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	1	3	5	104 979
87	1	Meningk atnya efektivita s Pengawa san Sediaan Farmasi dan Pangan	SDM -04	4	Sumber Daya Manusi a	Adanya perbedaan kesimpulan hasil penandaan sampel antara pusat dengan UPT	belum seragamnya kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi penandaan label sediaan farmasi dan pangan olahan	1	Intern al	Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil rendah sehingga berpotensi tidak tercapainya IKU	Kepala Balai Besars POM di Bandar Lampun g	Inspeksi	3	3	14	- Pelatihan personel untuk meningkatkan kompetensi petugas terkait evaluasi penandaan	- Sertifikat hasil pelatihan	1	Kelem ahan Tidak Signifik an	1	Efektif	2	3	11	104 980

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. ... Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung																				
88	1 Meningk atnya efektivitas Pengawa san Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Sampling sediaan farmasi dan pangan olahan	SDM -27	4 Sumber Daya Manusi a	Kesalahan parameter pengujian pangan karena kategori sampel tidak sesuai	Petugas sampling kurang teliti membaca kategori sampel saat sampling produk	1 Intern al	Tidak tercapainya IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi dan pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Substansi Pemeriksaan, Pengujian	2	3	11	Koordinasi dan komunikasi dengan laboratorium secara berkala Membaca kategori sampling dan melakukan pengecekan ke daftar registrasi untuk produk yang meragukan kategori pangannya melakukan cek/verifikasi terhadap data sampling dan SIPT	Laporan hasil koordinasi Pedoman sampling dan e-reg Bukti verifikasi pada data contoh	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	3	5	104 981
89	1 Meningk atnya efektivitas Pengawa san Sediaan	Sampling sediaan farmasi dan pangan olahan	F-05	8 Fraud	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharapkan produk yang disampling	Integritas pemberi suap masih rendah dan kemungkinan ada produk	2 Ekste rnal	Reputasi BBPOM di Bandar Lampung menjadi buruk dan potensi menurunnya	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun a	Inspeksi	2	4	13	- Adanya himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak memberikan aratifikasi pada	- rekaman himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak memberikan aratifikasi	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	104. 982

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemungkinan Residu	Dampak Residu	Level Risiko Residu	
	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung				sesuai keinginan	yang disembunyikan		mutu keamanan obat makanan						momen tertentu- Memastikan setiap petugas pemeriksa untuk menggunakan name take dan mempunyai surat tugas yang ada pernyataan himbauan anti gratifikasi.- Sosialisasi && Sosialisasi Tim Kode Etik Pegawai, - Penandatanganan Pakta Integritas, - Pelaksanaan uji kelayakan personil, - Sosialisasi Gratifikasi- Pernyataan benturan kepentingan- Sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial	pada momen tertentu- name take dan surat tugas yang ada pernyataan himbauan anti gratifikasi.- bukti Sosialisasi && Sosialisasi Tim Kode Etik Pegawai, - Rekaman Pakta Integritas, - Rekaman uji kelayakan personil, - Rekaman Sosialisasi Gratifikasi- Rekaman Pernyataan benturan kepentingan- Sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial						
90	1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	SDM-28	4. Sumber Daya Manusia	Pembuatan surat tindak lanjut melebihi batas waktu yang	Kurangnya Kepatuhan petugas dalam membuat surat tindak lanjut	1. Internal	Tidak tercapainya target IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil	Kepala Balai Besar POM di Bandar	Fungsi Inspeksi	3	3	14	Pemantauan surat tindak lanjut melalui bit.ly yang diisi oleh petugas	bit.ly surat tindak lanjut	1. Kelemahan Tidak Signifikan	1. Efektif	1	3	5	104983

Num ber	Number(col um kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)	
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu		
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	yang dilaksanakan oleh UPT				ditetapkan di SOP			pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Lampung												
91	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	SDM-29	4	Sumber Daya Manusia	Pelaku usaha tidak mengirimkan CAPA	Petugas tidak melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha yang tidak mengirimkan CAPA	1 Internal	Tidak tercapainya target IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Subtansi Pemeriksaan	3	3	14	Pemantaun CAPA melalui email dan link IKU Inspeksi	Hasil monev pemantauan CAPA	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104984
92	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	S-46	1	Strategis	Rekomendasi tindaklanjut pemeriksaan sarana produksi PIRT dan sarana	Kurangnya kepedulian Lintas sektor untuk melakukan tindak lanjuit	2 Eksternal	Capaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	Kepala Balai Besar POM di Bandar	Lintas Sektor	3	2	10	Pemantauan surat tindak lanjut dari lintas sektor Pengawasan	mengkonfirmasi kepada PIC lintas sektor BAP Wasber	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	2	3	104985

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			pelayanan farmasi tidak direspon oleh Pemerintah Daerah			oleh pemangku kepentingan tidak tercapai (IKU tidak tercapai)	Lampung					bersama sarana produksi PIRT dengan lintas sektor							
93	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pemeriksaan/pengawasan terhadap sarana produksi, sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan	S-28	1 Strategi	Target pemeriksaan sarana dalam 1 hari melebihi kapasitas petugas	Kebijakan efisiensi anggaran	1 Internal	Hasil pemeriksaan sarana tidak mencerminkan kondisi nyata dari sarana yang diperiksa	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Inspeksi	3	3	14	Efisiensi penggunaan anggaran dengan penggabungan 2 tim dalam 1 perjalanan dinas Membuat Perencanaan Berbasis resiko	Monitoring penggunaan anggaran Melakukan movev per triwulan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104 986
94	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan	Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan	SDM-05	4 Sumber Daya Manusia	Perbedaan hasil pengisian cek list pemeriksaan oleh petugas	Perbedaan persepsi dalam pengambilan keputusan terhadap tindak	1 Internal	Ketidakpercayaan pelaku usaha atas kualitas pemeriksaan	Kepala Balai Besar POM di Bandar	Stakeholder	2	3	11	Melakukan peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi terhadap	Laporan hasil pelatihan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	104 987

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung					lanjut hasil pengawasan			Lampung					pengawasan sarana produksi dengan melakukan desiminasi dan berbagi pengalaman terkait pengawasan sarana produksi							
95	1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan	F-06	8. Fraud	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharapakan hasil pemeriksaan sesuai keinginan	Budaya gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih yang masih melekat di masyarakat	2. Eksternal	Reputasi BBPOM di Bandar Lampung menjadi buruk dan potensi pelanggaran hukum	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Sarana produksi	3	3	14	- Adanya himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak memberikan gratifikasi pada momen tertentu- Memastikan setiap petugas pemeriksa untuk menggunakan name take dan mempunyai surat tugas yang ada pernyataan himbauan anti gratifikasi.- Adanya penetapan tarif layanan yang jelas- Pembayaran tarif layanan sertifikasi melalui	- rekaman himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak memberikan gratifikasi pada momen tertentu- name take dan surat tugas yang ada pernyataan himbauan anti gratifikasi.- tarif layanan - sarana pembayaran layanan sertifikasi secara non cash- bukti Sosialisasi &am	1. Kelemahan Tidak Signifikan	1. Efektif	1	3	5	104988

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)					
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du						
														billing/transfer ke rekening resmi (non cash)- Sosialisasi && Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai, - Rekaman Pakta Integritas, - Rekaman uji kelayakan personil, - Penandatanganan Pakta Integritas, - Pelaksanaan uji kelayakan personil, - Sosialisasi Gratifikasi- Pernyataan benturan kepentingan- Sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial	Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai, - Rekaman Pakta Integritas, - Rekaman uji kelayakan personil, - Rekaman Sosialisasi Gratifikasi- Rekaman Pernyataan benturan kepentingan- Sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial											
96	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar	Pemeriksaan sarana produksidan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan	F-07	8	Fraud	Pemberian gratifikasi selama proses pemeriksaan sarana	Budaya gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih yang masih melekat di masyarakat	2	Eksternal	Integritas Pegawai turun	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Sarana Produksi dan distribusi	3	3	14	- Adanya himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak memberikan gratifikasi pada momen tertentu - Memastikan setiap petugas pemeriksa untuk menggunakan name take dan mempunyai surat tugas yang ada pernyataan	- rekaman himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak memberikan gratifikasi pada momen tertentu- name take dan surat tugas yang ada pernyataan himbauan anti gratifikasi -	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	3	11	104989

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)		
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key		
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu			
	POM di Bandar Lampung													himbauan anti gratifikasi. - Adanya penetapan tarif layanan yang jelas- Pembayaran tarif layanan sertifikasi melalui billing/transfer ke rekening resmi (non cash) - Sosialisasi &Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai, - Penandatanganan Pakta Integritas, - Pelaksanaan uji kelayakan personil, - Sosialisasi Gratifikasi - Pernyataan benturan kepentingan - Sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial - Penggunaan Alat komunikasi (Hand Phone) secara official	tarif layanan - sarana pembayaran layanan sertifikasi secara non cash- bukti Sosialisasi &Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai, - Rekaman Pakta Integritas, - Rekaman uji kelayakan personil, - Rekaman Sosialisasi Gratifikasi- Rekaman Pernyataan benturan kepentingan- Sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial Hand Phone operasional pemeriksaan								

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)	
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du		
97	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	SDM-31	4	Sumber Daya Manusia	Perbedaan kesimpulan akhir hasil pengawasan iklan antara pusat dengan UPT	Perbedaan persepsi dalam melakukan penilaian iklan antara pusat dengan UPT	1 Internal	IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Inspeksi	3	3	14	Monev perbedaan hasil evaluasi pusat terhadap pengawasan iklan untuk meminimalkan kejadian berulang	Hasil Evaluasi pusat terhadap pengawasan iklan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	104990
98	2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	O-17	5	Operasional	Rencana inspeksi Tidak sinkron dengan rencana pengujian sampel fortifikasi	Kurang koordinasi antara tim inspeksi, tim sampling dengan tim pengujian	1 Internal	Pengujian sampel di laboratorium tidak sesuai dengan perencanaan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Inspeksi	2	3	11	Rapat perencanaan bersama antara tim inspeksi, tim sampling dan tim pengujian	Notulensi rapat perencanaan sampling pangan perencanaan inspeksi	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	104991
99	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi	F-08	8	Fraud	Adanya tawaran gratifikasi dari sarana yang diperiksa	Sarana ingin diberi keringanan terhadap temuan ketidaksesuaian saat pemeriksaan	2 Eksternal	Petugas menerima gratifikasi sehingga mutu pemeriksaan menurun	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Inspeksi	2	4	13	Penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi anti gratifikasi	Pencantuman tidak menerima gratifikasi di surat tugas	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104992

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset		Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du		
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung																					
100	1 Meningk atnya efektivita s Pengawa san Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengelolaan sampling sediaan farmasi dan pangan olahan	F-09	8	Fraud	Diskon tidak dimasukkan dalam pertanggungja waban keuangan	Petugas mengaharapkan keuntungan dari adanya diskon	1 Intern al	Kerugian keuangan negara	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Fungsi Inspeksi	3	3	14	Sosialisasi Fraud	Pakta Integritas; nota asli yg ditulis oleh sarana	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	2	3	11	104 993
101	1 Meningk atnya efektivita s Pengawa san Sediaan Farmasi	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan	F-10	8	Fraud	Adanya benturan kepentingan antara petugas dengan sarana yang diperiksa	Adanya afiliasi keluarga antara petugas dengan personil di sarana yang diperiksa	1 Intern al	Hasil pengawasan tidak independen	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Substansi Inpeksi	2	4	13	Penandatangana n pakta integritas, identifikasi benturan kepentingan	Laporan pengendalian benturan kepentingan	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	104 994

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset		Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)	
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key		
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu			
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung																						
102	1 Meningk atnya efektivitas Pengawa san Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan	F-11	8	Fraud	Adanya benturan kepentingan dalam penyewaan/tra nsport kendaraan	Penggunaan kendaraan pribadi untuk disewa pada perjalanan dinas	1 Intern al		Keuangan menjadi kurang akuntabel	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Substansi Inpeksi	3	3	14	Penandatangan n pakta integritas, penyewaan kendaraan pihak ke-3, penggunaan kendaraan dinas	Laporan pengendalian benturan kepentingan, rekaman penyewaan kendaraan pihak ketiga, Penggunaan kendaraan dinas	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	2	3	11	104 995
103	1 Meningk atnya efektivitas Pengawa san Sediaan Farmasi	Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan	O-18	5	Operasi onal	Data pengawasan terkait surat tindak lanjut dan CAPA tidak tersedia real time	Monev surat tindak lanjut CAPA dan status pemeriksaan sarana kurang optimal karena	1 Intern al		IKU pengawasan sarana berpotensi tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Substansi Inpeksi	3	3	14	Melakukan pemantauan surat tindak lanjut, CAPA dan IKU secara realtime melalui link IKU inspeksi	Aplikasi/ link IKU inspeksi	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	2	3	11	104 996

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)	
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du		
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung					data tersebar di petugas																
104	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	SDM-06	4	Sumber Daya Manusia	Kompetensi pegawai hasil rotasi belum memenuhi persyaratan	Belum ada pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan sarana	1 Internal	Hasil pengawasan tidak sesuai ketentuan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Substansi Inpeksi	3	3	14	Melakukan peningkatan kompetensi pengawasan sarana secara e-learning dan pelatihan internal Dilibatkan sebagai observer pada saat melakukan pemeriksaan sarana	Laporan pelatihan internal dan sertifikat pelatihan surat tugas sebagai observer	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104 997
105	7	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung	F-12	8	Fraud	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharuskan Penerbitan Surat Keterangan	Integritas pemberi suap masih rendah dan berharap ada keuntungan dari SK tanpa prosedur tsb.	2 Eksternal	Reputasi BBPOM di Bandar Lampung menjadi buruk dan potensi pelanggaran hukum	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Petugas Sertifikasi, Ketua Tim, Kepala Balai	2	4	13	- Pelanggan tidak berinteraksi dengan petugas (Layanan dilakukan menggunakan aplikasi online) - Pembayaran,	- Bukti Sosialisasi/Pe mbuatan Tim Kode Etik Pegawai - Dokumen Pakta Integritas	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	104 998

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	yang prima					Import/Eksport tanpa prosedur yang sesuai								melalui billing/transfer ke rekening resmi (non cash) - Sosialisasi & Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai - Penandatangan Pakta Integritas - Sosialisasi Gratifikasi - Pernyataan benturan kepentingan - Bukti sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial	- Rekaman Sosialisasi Gratifikasi - Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan kode etik dan disiplin - Laporan pengendalian gratifikasi - Laporan Pengendalian benturan kepentingan - Bukti sosialisasi kebijakan SMAP						
106	7 Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Penerbitan Surat Keterangan Import/Eksport	F-13	8 Fraud	Adanya pemberian gratifikasi karena telah mendapatkan hasil Surat Keterangan Import/Eksport serta layanan yang baik dan tepat waktu	Budaya gratifikasi atau pemberian tanda terimakasih yang masih tinggi di masyarakat	2 Ekst ernal	Integritas Pegawai turun	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Sertifikasi, Pelaku Usaha	3	3	14	- Pelanggan tidak berinteraksi dengan petugas (Layanan dilakukan menggunakan aplikasi online) - Pembayaran melalui billing/transfer ke rekening resmi (non cash) - Sosialisasi & Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai	- Bukti Sosialisasi/Pe mbuatan Tim Kode Etik Pegawai - Dokumen Pakta Integritas - Rekaman Sosialisasi Gratifikasi - Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan kode etik dan disiplin	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	2	3	11	104 999

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)			
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key			
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du				
														- Penandatanganan Pakta Integritas - Sosialisasi Gratifikasi - Pernyataan benturan kepentingan - Bukti sosialisasi kebijakan SMAP melalui media sosial	- Laporan pengendalian gratifikasi - Laporan Pengendalian benturan kepentingan - Bukti sosialisasi kebijakan SMAP									
107	7	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	F-14	8	Fraud	Adanya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dalam proses penerbitan Surat Keterangan Import/Eksport	Adanya benturan kepentingan (misal hubungan afiliasi) dengan pelaku usaha	2	Eksternal	Proses penerbitan SK lebih cepat dan instan karena diprioritaskan dibanding yang lain	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	2	4	13	- Pelanggan tidak berinteraksi dengan petugas (Layanan dilakukan menggunakan aplikasi online) - Pembayaran melalui billing/transfer ke rekening resmi (non cash) - Sosialisasi & Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai - Penandatanganan Pakta Integritas - Sosialisasi Gratifikasi - Pernyataan benturan kepentingan - Sosialisasi	- Bukti Sosialisasi/Pembuatan Tim Kode Etik Pegawai - Dokumen Pakta Integritas - Rekaman Sosialisasi Gratifikasi - Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan kode etik dan disiplin - Laporan pengendalian gratifikasi - Laporan Pengendalian benturan kepentingan - Bukti sosialisasi	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	105000

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)			
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key			
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu				
															Kebijakan SMAP melalui media sosial	kebijakan SMAP								
108	4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	S-29	1	Strategis	Pelaku usaha mundur di tengah jalannya proses pendampingan	Kurangnya komitmen pelaku usaha	2	Eksternal	IKU terkait Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	2	4	13	- Penjelasan secara detail saat proses seleksi/grading mengenai komitmen yang perlu dilaksanakan oleh pelaku usaha mulai dari mengikuti seluruh rangkaian proses pendampingan, perbaikan sarana, dan pembiayaan secara mandiri untuk pendaftaran produk - Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh UMKM yang didampingi	- Catatan hasil seleksi/grading UMKM Pendampingan - Surat Pernyataan Komitmen UMKM Pendampingan	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	105001
109	4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam	S-30	1	Strategis	Tidak ada UMKM Obat Bahan Alam (OBA) untuk didampingi	Tidak ada UMKM OBA yang mendaftarkan diri untuk program	2	Eksternal	IKU terkait Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Kepala Balai Besar POM di Bandar	2	4	13	- Koordinasi dengan stakeholder dan Pemerintah Daerah untuk meniarng usulan	- Surat Permohonan Usulan UMKM Calon Pendampingan	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	105002

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
	pemenuh an standar keamana n dan mutu					pendampingan OBA		sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tidak tercapai	Lampun g					UMKM OBA calon pendampingan - Penyebaran Informasi Pendampingan UMKM OBA melalui media sosial BBPOM di Bandar Lampung	- Konten Penyebaran Informasi Pendampingan UMKM OBA						
110	4 Meningk atnya pendamp ingan UMKM dalam pemenuh an standar keamana n dan mutu	Pendampingan UMKM	F-15	8 Fraud	Adanya gratifikasi oleh calon peserta pendampingan UMKM agar dipilih sebagai peserta	Persaingan tidak sehat antar peserta untuk penetapan sebagai peserta pendampingan	2 Ekste rnal	Reputasi BBPOM di Bandar Lampung menjadi buruk dan potensi pelanggaran hukum	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Fungsi Sertifikasi, Pelaku Usaha	2	4	13	- Seleksi calon peserta pendampingan secara fair sesuai Juknis Pendampingan UMKM - Penandatanganan Pakta Integritas - Sosialisasi Gratifikasi - Sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial	- Data hasil seleksi calon peserta pendampingan secara fair sesuai juknis Pendampingan UMKM - Rekaman Pakta Integritas - Sosialisasi Pelaku usaha - Sosialisasi Gratifikasi - Sosialisasi Kebijakan SMAP melalui media sosial	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	105 003
111	4 Meningk atnya pendamp ingan UMKM dalam pemenuh an standar	Pendampingan UMKM	F-16	8 Fraud	Penyalahguna an wewenang fasilitator eksternal pendamping UMKM baik terhadap UMKM yang difasilitasi	Integritas fasilitator masih rendah	2 Ekste rnal	Reputasi BBPOM di Bandar Lampung menjadi buruk dan potensi pelanggaran hukum	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Fungsi Sertifikasi, Fasilitator External, Pelaku Usaha	3	3	14	- Penandatanganan Pakta Integritas - Sosialisasi Gratifikasi - Pernyataan benturan kepentingan - Sosialisasi	- Dokumen Pakta Integritas - Rekaman Sosialisasi Gratifikasi - Laporan pengendalian gratifikasi	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	3	5	105 004

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemungkinan Residu	Dampak Residu	Level Risiko Residu	
	keamanan dan mutu					maupun terhadap usaha mandiri di luar program pendampingan								Kebijakan SMAP melalui media sosial	- Laporan Pengendalian benturan kepentingan - Bukti sosialisasi kebijakan SMAP						
112	4 Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Sertifikasi Layanan Publik	SDM-07	4 Sumber Daya Manusia	Penerbitan surat rekomendasi / sertifikat layanan sertifikasi melampaui SLA	Petugas baru dan belum kompeten	1 Internal	Indeks Pelayanan Publik turun	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Sertifikasi, Pelaku Usaha	3	3	14	Pemberian pelatihan/bimtek/mentoring kepada petugas	Bukti pelaksanaan pelatihan/bimtek, sertifikat pelatihan/bimtek, evaluasi hasil pelatihan/bimtek	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	105005
113	4 Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Audit sarana dalam rangka sertifikasi, dan program pendampingan BBPOM B.Lampung	F-17	8 Fraud	Pelaku usaha memberikan bingkisan/uang/ diskon/ sejenisnya kepada petugas	Sebagai ungkapan terima kasih dan atau permohonan diberi keringanan terhadap temuan di sarana	2 Eksternal	Kualitas hasil audit berkurang dan reputasi petugas kurang baik	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Fungsi Sertifikasi, Pelaku Usaha	2	4	13	Penandatanganan pakta integritas, sosialisasi anti gratifikasi saat pembukaan/penutupan audit, serta adanya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Pencantuman tidak menerima gratifikasi di surat tugas	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	105006
114	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan	Sampling sediaan farmasi dan pangan olahan	S-47	1 Strategi	Jumlah sampel pangan meningkat diluar sampel rutin	Jumlah sampel KLB MBG bertambah karena meningkatnya kasus KLB	1 Internal	- Jumlah sampel pangan tidak sesuai renlak awal tahun - Jumlah	Kepala Balai Besar POM di Bandar	Pemeriksaan, Infokom, Pengujian	2	4	13	Pengajuan revisi kategori sampel pangan olahan	Surat revisi kategori sampel pangan olahan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	105007

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung					MBG di Propinsi Lampung		sampel kasus melebihi target sehingga mengurangi jumlah kategori pangan yang lain	Lampung												
115	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Sampling penandaan produk tembakau	S-36	1 Strategis	Terjadi pengulangan merek produk tembakau/rokok elektronik pada tahun yang sama saat sampling penandaan produk tembakau/rokok elektrik	Tidak ada data base pengawasan produk tembakau/rokok elektronik	1 Internal	Risiko kerugian keuangan akibat pembelian barang tidak sesuai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Inspeksi	3	3	14	Membuat data base pengawasan rokok yang menjadi acuan petugas	data base yang bisa diakses	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	105008
116	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan	Keterlambatan pelaporan DAK POM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima DAK	O-22	5 Operasional	Realisasi DAK riil dan fisik berbeda	Kurangnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK	1 Internal	Realisasi capaian DAK rendah	Kepala Balai Besar POM di Bandar	inspeksi	3	3	14	- meningkatkan koordinasi - Melakukan monitoring secara berkala dengan	Jumlah koordinasi dengan Dinkes Kab/Kota	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	105009

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung								Lampung					pemakaian google form							
117	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan apotek	SDM-32	4 Sumber Daya Manusia	Penginputan tools AMR tidak lengkap	Petugas inspeksi belum memahami pengisian seluruh pertanyaan tool AMR	1 Internal	Realisasi jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools AMR antibiotik pada pemeriksaan apotek tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	inspeksi	2	3	11	Sosialisasi pengisian tool AMR pada saat rapat monev inspeksi	Laporan Hasil Sosialisasi	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	105010
118	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan	Pengujian Sampel sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	S-48	1 Strategi	Tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi, sampel	Hasil pengujian sampel tidak diperoleh tepat waktu	1 Internal	IKU Sedian farmasi, pangan olahan dan PIRT tidak memenuhi target	Kepala Balai Besar POM di Bandar	Kelompok Substansi Pengujian, Pemeriksaan,	2	4	13	Monitoring dan evaluasi pemeriksaan dan pengujian Koordinasi	Form monev pemeriksaan dan pengujian bukti koordinasi	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	105011

Num ber	Number(col um kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset		Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du		
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung					pangan olahan, sampel KLB keracunan, sampel PIRT beresiko yang Tidak Memenuhi Syarat melebihi SLA yang telah ditetapkan			Lampung						dengan balai regional untuk mempercepat pengujian dan pelaporan							
119	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pemeriksaan/pengawasan terhadap sarana produksi, sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan	O-35	5 Operasional	Akurasi antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak sesuai	Tidak ada data real time penggunaan anggaran sebagai dasar pengambilan keputusan	1 Internal	- Tidak terbayarnya biaya perjalanan dinas pengawasan - Deviasi RPD melebihi batas yang diperbolehkan - Pengambilan keputusan menjadi lambat terkait kesiapan anggaran menjadi lambat	Ketua Tim Pemeriksaan	Fungsi Inspeksi	3	3	14	Membuat pemantauan internal penggunaan anggaran perjadi secara real time	Data rekapan penggunaan anggaran perjadi pengawasan obat dan makanan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	105012	
120	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan	Pemeriksaan/pengawasan terhadap sarana produksi, sarana distribusi sediaan farmasi	TI-06	6 IT	Hilangnya rekaman hasil pengawasan dari penyimpanan digital	Data terdelete secara sengaja/tidak sengaja secara internal atau terekena hack	2 Eksternal	- data tidak tertelusur	Ketua Tim Pemeriksaan	Fungsi Inspeksi	2	3	11	Melakukan backup data pemeriksaan secara periodik	Bukti backup data (back up di data center)	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	105013	

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	dan pangan olahan			(simpan.pom.go.id)	secara eksternal															
121	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pengawasan Cesium pada sarana produksi rempah	O-36	5 Operasional	Rekaman hasil pengawasan Cesium tidak terkendali	Tidak ada wadah yang disiapkan untuk pengendalian data pengawasan cesium	1 Internal	Tidak tersedianya data pengawasan cesium saat diperlukan	Ketua Tim Pemerik saan	Fungsi Inspeksi	2	3	11	Melakukan backup data pemeriksaan secara periodik	Bukti backup data	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	105014
122	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan	Pembersihan pasar dari produk obat dan makanan yang substandar	O-37	5 Operasional	Di sarana peredaran Masih ditemukan produk obat dan makanan	sarana yang dilakukan pembersihan produk obat dan makanan substandar	1 Internal	Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPOM menurun	Ka BBPOM	Fungsi Inspeksi	2	3	11	Melakukan analisis terhadap target sarana yang akan dilakukan	Hasil Analisis	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	105015

Num ber	Number(col om kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset		Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risik o	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key	
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risik o Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risik o Resi du		
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung					yang masuk dalam surat perintah pembersihan pasar	belum sepenuhnya mewakili populasi								pembersihan pasar							
123	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Investigasi Epidemiologi, Pengambilan Dan Pengujian Sampel Pangan Pada KLB Keracunan Pangan	O-38	5 Operasional	Informasi KLB terlambat diterima	Satgas KLB Kabupaten/Kota belum memahami tugas		2 Eksternal	sampel terduga KLB tidak diperoleh	Ka BBPOM	Fungsi Inspeksi	2	4	13	Koordinasi dengan Satgas KLB Kab/Kota	Laporan koordinasi KLB	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	105016
124	3 Meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja	KIE kepada masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	S-49	1 Strategis	Keterbatasan target komunitas penerima KIE	Anggaran KIE dipangkas,		1 Internal	Target nilai Indeks Efektivitas KIE tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar	Kelompok Substansi Pemeriksaan, Infokom	2	4	13	Mempromosikan program inovasi Galaksi lebih luas	Postingan publikasi program KIE di Galaksi melalui Media sosial dan	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	105017

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)			
No.	Sasaran	Kegiatan/Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key			
					Risk Event/Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemungkinan Residu	Dampak Residu	Level Risiko Residu				
	Balai Besar POM di Bandar Lampung	BBPOM di Bandar Lampung							Lampung						mensosialisasikan di wa grup komunitas. serta adanya laporan KIE Galaksi									
125	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	S-31	1	Strategis	Pihak sekolah/madrasah yang diintervensi tidak konsisten dalam melakukan implementasi program	Monev dokumen dan sampel jajanan anak sekolah hanya dilakukan 1 x dalam setahun	1	Internal	KIE tidak efektif	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	4	2	12	Melaksanakan koordinasi rutin melalui WA GRUP Sehingga pelaksanaannya tidak terbatas pada saat Petugas Balai melaksanakan Monev onsite, Memberikan reward kepada sekolah yang paling terbaik dalam implementasi program	Dokumentasi Wa Grup dan Pemberian reward terhadapHasil Monev Sekolah terbaik	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	2	7	105018
126	3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	S-32	1	Strategis	Aparat Desa dan kader keamanan pangan desa kurang berkomitmen dalam implementasi program Desa kepada masyarakat	Aparat desa kurang menyadari pentingnya implementasi dari program Desa Pangan Aman	2	Eksternal	KIE tidak efektif	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	4	2	12	Melaksanakan survey kepada desa yang menjadi lokus intervensi terlebih dahulu , dipilih kepada desa desa hasil rekomendasi yang dinilai komitmennya baik, sehingga program bisa berjalan dengan	Laporan Survey Pemilihan Desa yang akan diintervensi	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	2	7	105019

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)				
No.	Sasaran	Kegiatan/Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key				
					Risk Event/Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemungkinan Residu	Dampak Residu	Level Risiko Residu					
														lebih baik, serta meningkatkan koordinasi dengan Linsek setempat sehingga monitoring bisa berjalan dengan baik											
127	3	Meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	S-33	1	Strategis	Pedagang masih menjual bahan pangan mengandung bahan berbahaya	adanya permintaan konsumen	2	Eksternal	masih beredarnya produk pangan mengandung bahan berbahaya	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung		2	3	11	Mengikutsertakan OPD terkait dalam melakukan program dan pengawasan dan melakukan sosialisasi serta kampanye langsung kepada pedagang dan masyarakat, Membuat materi yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh Masyarakat	Laporan sosialisasi dan kampanye Pasar bersama OPD Terkait, Rancangan materi KIE yang mudah dipahami oleh masyarakat	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	105020
128	7	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	SDM-09	4	Sumber Daya Manusia	Kurangnya kompetensi petugas terkait penguasaan bahasa isyarat untuk layanan kelompok rentan	Belum ada pelatihan khusus terkait bahasa isyarat	1	Internal	Pelayanan Publik untuk kelompok rentan tidak berjalan dengan baik	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung		2	3	11	Rencana pelatihan	Laporan pelatihan	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	3	5	105021
129	7	Layanan Publik Balai	S-50	1	Strategis	Pengaduan masyarakat terkait obat	kurangnya pengetahuan dan media yang	2	Eksternal	Target nilai Indeks Pelayanan	Kepala Balai Besar	Kepala BBPOM	3	3	14	Menyediakan sarana pengaduan yang	dokumentasi media	1	Kelemahan Tidak	1	Efektif	2	3	11	105022

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemungkinan Residu	Dampak Residu	Level Risiko Residu	
	Besar POM di Bandar Lampung yang prima	pengaduan yang efektif				dan makanan tidak optimal	bisa digunakan masyarakat terhadap pengaduan obat dan makanan aman			Publik tidak tercapai	POM di Bandar Lampung	Bandar Lampung			mudah di akses di gerai gerai MPP	pengaduan di gerai MPP	Signifikan				
130	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan KIE dan Melaporkan KTD/ESO	S-34	1 Strategis	Tidak dapat melaporkan melalui subsite e-meso	Lupa password, gangguan jaringan, pergantian operator	2 Eksternal	Target pelaporan tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kelompok Substansi Pemeriksaan, Infokom	3	3	14	Back up laporan manual dengan form kuning, Komunikasi dengan PIC pusat terkait user name dan password pelapor	Form pelaporan eso, media komunikasi (WAG dengan Pusat)	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	2	3	11	105 023
131	1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota Pangan Aman	S-37	1 Strategis	Kabupaten/Kota tidak memahami tujuan program dan cara pengisian tools terkait Kab/Kota Pangan Aman yang melibatkan stakeholder lain terkait	- Waktu sosialisasi di pertengahan tahun, dengan target pengisian tools di akhir September sangat singkat untuk menjangkau koordinasi kepada Kabupaten Kota	2 Eksternal	- Target Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat sebagai Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak terpenuhi - Ada Kabupaten/Kota yang tidak	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Infokom	2	3	11			1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	3	5	105 024

Num ber	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu	
	kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung				penilaian produk PSAT, PSAH, PSAI dan lainnya	secara menyeluruh, baik kepada leading sector di daerah dan stakeholder lainnya. - Tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan IKU ini, yang mewajibkan terlaksananya tahapan Advokasi, Pemantauan, Pelaporan dan Pengawasan, bukan hanya kepada Kabupaten/Kota yang menjadi target, tapi kepada semua Kabupaten Kota di wilayah catchment area		bisa terjangkau koordinasi dan implementasi semua tahapan program													
132	7 Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Sistem Penunjukkan Langsung Dan Swakelola	F-18	8 Fraud	Adanya konflik kepentingan antara petugas pengadaan dan penyedia barang/jasa	Hubungan relasi atau persaudaraan antara penyedia dengan petugas pengadaan	1 Internal	1. Penyedia barang/jasa tidak pernah ganti 2. Evaluasi penawaran dan kualifikasi yang tidak sesuai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Semua Substansi	2	4	13	- Whistle Blowing System - Pakta Integritas - Audit secara berkala oleh Inspektorat	1. Laporan WBS per TW 2. Dokumen Pakta Integritas 3. Laporan hasil audit	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	105025

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)					
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du						
								3. Spesifikasi barang/jasa yang diadakan tidak sesuai kebutuhan																		
133	8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengadaan Barang Dan Jasa secara e-purchasing	O-20	5	Operasional	Pengadaan Reagen Kimia/Media Mikrobiologi import membutuhkan waktu yang lama	Pengadaan reagen dan media mikrobiologi import membutuhkan izin dari Sestama	2	Eksternal	Ketersediaan media mikrobiologi dan reagen kimia import tidak terpenuhi tepat waktu	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Sestama	2	4	13	Berkoordinasi dengan user (laboratorium) untuk pengajuan izin pembelian reagen dan media mikrobiologi import	Surat pengajuan izin pembelian reagen/media mikrobiologi import	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	105026
134	8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengadaan Barang/Jasa	F-19	8	Fraud	Pemilihan rekanan/penyedia tertentu dengan menerima imbalan/suap/gratifikasi	1. Adanya kesempatan terkait jabatan sebagai PPK atau Pejabat Pengadaan 2. Adanya tekanan ekonomi	1	Internal	1. Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi 2. Kerugian keuangan negara	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Semua Substansi	2	4	13	- Sosialisasi dan pembentukan Tim Kode Etik Pegawai - Prosedur pengadaan sesuai Peundang-undangan tentang pengadaan (prioritas menggunakan aplikasi SPSE sehingga tidak ada interaksi langsung antara tim pengadaan dengan rekan bisnis - Sistem pembayaran pengadaan/kontrak diutamakan	- Bukti Sosialisasi dan pembentukan Tim Kode Etik Pegawai - Bukti penggunaan SPSE - Bukti pembayaran cash less - Rekaman Pakta Integritas - Bukti Uji kelayakan bagi rekan bisnis - Laporan WBS per TW - Laporan hasil audit	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	4	8	105027

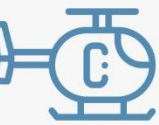
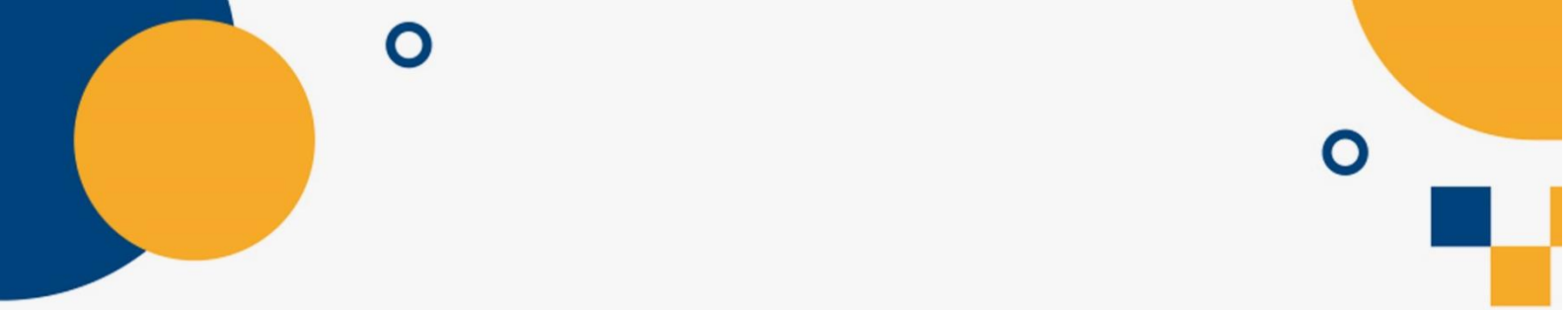
Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015 Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
											Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du	
														secara cash less - Penerapan Pakta Integritas - Uji kelayakan bagi rekanan							
135	8 Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengadaan Barang/Jasa	F-20	8 Fraud	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 agar ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan	Integritas pemberi suap masih rendah dan berharap keuntungan	2 Eksternal	Penyedia dipilih tidak berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan standar	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Semua Substansi, Pejabat pengadaan, PPK, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan	2	4	13	- Sosialisasi dan pembentukan Tim Kode Etik Pegawai, - Prosedur pengadaan sesuai Peundang- undangan tentang pengadaan (prioritas menggunakan aplikasi SPSE sehingga tidak ada interaksi langsung antara tim pengadaan dengan rekan bisnis - Sistem pembayaran pengadaan/kontr ak diutamakan secara cash less - penerapan Pakta Integritas - Uji kelayakan bagi rekan bisnis	- Bukti Sosialisasi dan pembentukan Tim Kode Etik Pegawai - Bukti penggunaan SPSE - bukti pembayaran cash less - Rekaman Pakta Integritas - Bukti Uji kelayakan bagi rekan bisnis	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	105 028
136	8 Terwujud nya tatakelola	Pengadaan Barang/Jasa	F-21	8 Fraud	Adanya pemberian gratifikasi oleh pihak ke-3	Budaya gratifikasi atau pemberian tanda	2 Eksternal	Integritas Pegawai turun	Kepala Balai Besar POM di	Semua Substansi, Pejabat pengadaan,	3	3	14	- Sosialisasi dan pembentukan Tim Kode Etik Pegawai	- Bukti Sosialisasi dan pembentukan Tim Kode Etik	1 Kelemahan Tidak	1 Efektif	1	3	5	105 029

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. ... Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Peng endalia n	Simpulan Efektifita s Peng endalia n	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu	
	pemerintah Unit Organisasi yang optimal				karena telah ditunjuk sebagai Penyedia	terimakasih yang masih tinggi di masyarakat			Bandar Lampung	PPK, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan				- Prosedur pengadaan sesuai Peundang-undangan tentang pengadaan (prioritas menggunakan aplikasi SPSE sehingga tidak ada interaksi langsung antara tim pengadaan dengan rekan bisnis - Sistem pembayaran pengadaan/kontrak diutamakan secara cash less - penerapan Pakta Integritas - Uji kelayakan bagi rekan bisnis	Pegawai - Bukti penggunaan SPSE - bukti pembayaran cash less - Rekaman Pakta Integritas - Bukti Uji kelayakan bagi rekan bisnis	Signifikan					
137	8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengadaan Barang/Jasa	F-22	8 Fraud	Mark up jumlah atau harga pengadaan barang/jasa	1. Adanya kesempatan sebagai petugas yang mengadakan barang/jasa 2. Kurangnya pengecekan oleh petugas penerima barang/jasa 3. Adanya	1 Internal	Kerugian keuangan negara	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Semua Substansi	2	4	13	1. Pakta Integritas 2. Whistle Blower System 3. Pengawasan secara berjenjang 4. Audit secara berkala oleh Inspektorat	1. Dokumen Pakta Integritas 2. Laporan WBS per TW 3. Laporan hasil audit	1 Kelemahan Tidak Signifikan	1 Efektif	1	4	8	105030

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Ekstern al	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)					
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key					
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemah an Pengend alian	Simpulan Efektifita s Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Resi du	Level Risiko Resi du						
						tekanan ekonomi																				
138	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengadaan Barang/Jasa	O-21	1	Strategis	Pengadaan barang/jasa dengan komponen PDN tidak mencapai 60% dari total pengadaan barang/jasa	1. Belum ada produk PDN dengan spesifikasi sesuai kebutuhan	1	Internal	Target pemenuhan persentase pengadaan barang/jasa PDN tidak tercapai	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Sestama	1	5	20	1. Aktif melakukan pengecekan produk PDN sesuai spesifikasi yang dibutuhkan di website Kemenperin 2. Selalu memilih barang/jasa dengan komponen PDN jika tersedia	Daftar kebutuhan barang/jasa dengan komponen PDN	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	1	5	20	105031
139	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengadaan Barang dan Jasa	SDM-40	4	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya personil yang memiliki sertifikasi/kom petensi untuk jabatan tertentu di Bagian Tata Usaha (misal: PPK, PPBJ, Bendahara)	Belum ada rencana/progra m pelatihan dan sertifikasi untuk jabatan tertentu di Bagian Tata Usaha	1	Internal	1. Beban kerja personel tertentu meningkat sehingga berisiko terhadap penurunan capaian kinerja organisasi 2. Multitasking personel sehingga kinerja kurang optimal karena tidak ada kaderisasi	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tata usaha	2	3	11	1. Melakukan pemetaan personil yang memiliki potensi untuk diajukan peningkatan kompetensi dan sertifikasinya 2. Memberi penugasan kepada personil yang tepat untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Program perencanaan pelatihan dan sertifikasi untuk jabatan tertentu	2	Kelemahan Signifikan	1	Efektif	1	3	5	105032
140	8	Terwujud nya tatakelola pemerintah	Penyelenggaraa n Manajemen Risiko di BBPOM Bandar Lampung	S-38	1	Strategis	Adanya perbedaan persepsi dalam penilaian risiko	Belum ditetapkan kriteria level kemungkinan dan dampak	1	Internal	Level risiko yang didapat tidak tepat dan kesalahan penentuan	Kepala Balai Besar POM di Bandar	Kelompok Substansi Pemeriksaan, Infokom, Pengujian,	3	3	14	menetapkan kriteria level kemungkinan dan dampak risiko yang	- Dokumen Kriteria Level Kemungkinan dan Dampak Risiko	1	Kelemahan Tidak Signifikan	1	Efektif	2	3	11	105033

Num ber	Number(col oum kode in Konteks)	Freetext	Freet ext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasiona l 6. IT 7. Keselamat an Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rum us)	Freetext	Freetext	1. Kelemah an Tidak Signifikan 2. Kelemah an Signifikan 3. Kelemah an Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rum us)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemung kinan Inheren	Dam pak Inher en	Level Risiko Inher en	Aktivitas Pengendalian	Atribute Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengend alian	Simpulan Efektifitas Pengend alian	Kemung kinan Residu	Dam pak Residu	Level Risiko Residu	
	ah Unit Organisa si yang optimal				baik dampak maupun level risiko	untuk masing- masing risiko		tindakan pengendalian	Lampun g	Penindakan dan Bagian Tata Usaha				dijadikan pedoman penentuan level risiko di BBPOM Bandar Lampung dan disosialisasikan kepada seluruh personel	BBPOM di Bandar Lampung - Nota Dinas - Data dukung sosialisasi						
141	8 Terwujud nya tatakelo la pemerint ah Unit Organisa si yang optimal	Penyelenggaraa n Manajemen Risiko di BBPOM Bandar Lampung	S-39	1 Strategi s	Daftar Risiko belum mencakup semua risiko yang ada di UPT	Ada penugasan / IKU / bisnis proses baru	1 Intern al	Risiko yang belum teridentifikasi dapat terjadi tanpa ada tindakan pengendalian yang dilakukan	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Kelompok Substansi Pemeriksaan, Infokom, Pengujian, Penindakan dan Bagian Tata Usaha	2	4	13	Melakukan rivi u risiko secara berkala dan selalu mengupdate isu internal eksternal dan peraturan- peraturan yang terbaru atau program- program baru	Daftar risiko, dokumen rivi u risiko	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	105 034
142	8 Terwujud nya tatakelo la pemerint ah Unit Organisa si yang optimal	Pengelolaan Manajemen Risiko	S-40	1 Strategi s	Pengujian aktivitas pengendalian tidak dilakukan pada level risiko inheren didas 16	Reviu oleh tim manajemen risiko maupun Auditor internal belum efektif	1 Intern al	- Belum dapat dievaluasi keefektifan aktivitas pengendalian - Dapat terjadi risiko berulang	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Tim Manrisk, tata usaha	2	4	13	Reviu berkala terhadap daftar risiko dan pengujian aktivitas pengendalian oleh tim manrisk dan auditor internal	Hasil reviu daftar risiko dan pengujian aktivitas pengendalian	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	105 035
143	8 Terwujud nya tatakelo la pemerint ah Unit Organisa si yang optimal	Pengelolaan Manajemen Risiko	S-51	1 Strategi s	Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko	Penyusunan dan pembahasan daftar risiko belum melibatkan seluruh pegawai,	1 Intern al	Belum semua pegawai merasa terkait dan bertanggungja wab dengan pengelolaan manajemen risiko di	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampun g	Tim Manrisk, tata usaha	4	4	19	Diterbitkan nota dinas dari Kepala BBPOM di Bandar Lampung agar setiap pegawai mengusulkan identifikasi risiko di bagian	- Nota Dinas - Bukti Sosialisasi (materi, daftar hadir, foto) - Hasil identifikasi risiko dari	1 Kelem ahan Tidak Signifik an	1 Efektif	1	4	8	105 036

Number	Number(column kode in Konteks)	Freetext	Freetext	1. Strategis 2. Reputasi 3. Hukum 4. Sumber Daya Manusia 5. Operasional 6. IT 7. Keselamatan Kerja 8. Fraud 9. Keuangan 10. Aset	Freetext	Freetext	1. Internal 2. Eksternal	Freetext	Freetext	Freetext	1-5	1-5	(Rumus)	Freetext	Freetext	1. Kelemahan Tidak Signifikan 2. Kelemahan Signifikan 3. Kelemahan Material	1. Efektif 2. Tidak Efektif	1-5	1-5	(Rumus)	(Key)
No.	Sasaran	Kegiatan/Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Issue ISO 9001:2015		Sumber Risiko	Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Pemilik Risiko	Nama Unit Kerja Terkait	Risiko Inheren			Aktivitas Pengendalian saat ini				Risiko Residual			Key
					Risk Event/Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko					Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	Kemungkinan Residu	Dampak Residu	Level Risiko Residu	
								BBPOM Bandar Lampung						pekerjaan mereka Sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui apel pagi	semua pegawai						



BADAN POM



lampung.pom.go.id

[@bpom.bandarlampung](#)

[@bpomlampung](#)

[BBPOM Lampung](#)

[0821-8080-6008](tel:0821-8080-6008)

